

Takashi Shiraishi

HANTU

# DIGOEL

POLITIK PENGAMANAN POLITIK  
ZAMAN KOLONIAL



LKiS

# **HANTU DIGOEL**

Takashi Shiraishi

HANTU  
**DIGOEL**

POLITIK PENGAMANAN POLITIK  
ZAMAN KOLONIAL

LKiS

**HANTU DIGOEL**  
**Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial**  
Takashi Shiraishi  
● Takashi Shiraishi 2001

Hak Terjemahan ada pada *LKiS*

X+208 halaman; 14,5X21 cm  
1. Sejarah Kolonial 2. Sejarah Pergerakan Nasional  
3. Kamp Tahanan Politik  
ISBN: 979-8966-78-3

Penerjemah: Endi Haryono, Nicolaus Loy, Nur Khoiron  
Editor: Nurul Huda S.A  
Rancang Sampul: Jaid al-Haitamy  
Gambar sampul diambil dari Majalah TEMPO, edisi khusus, Januari 2000  
Setting: Santo

Penerbit:  
*LKiS* Yogyakarta  
Jl. Parangtritis KM 4,2 Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul  
Yogyakarta 55187  
Telp. : (0274) 387194 Faks. : (0274) 417762  
e-mail: [marketinglkisgroup@gmail.com](mailto:marketinglkisgroup@gmail.com)

Bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI  
dan Ford Fondation

Cetakan I: Maret 2001

Percetakan:  
*LKiS* Printing Cemerlang  
Jl. Parangtritis KM 4,2 Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul  
Yogyakarta 55187  
Telp. : (0274) 387194 Faks. : (0274) 417762  
e-mail: [lkis.printing@yahoo.com](mailto:lkis.printing@yahoo.com)

## PENGANTAR REDAKSI

---

---

Jika ada suatu tempat yang telah di(tcr)lupakan dalam memori kolektif bangsa ini, dan kini perlu kita ingat-ingat lagi, mungkin Digoel adalah tempat itu. Digoel bertaut erat dengan sejarah pergerakan rakyat Indonesia, dengan putra-putra pertiwi, dengan mereka yang gagah berani mempertaruhkan jiwa dan raga.

Pada tahun 1926, pemerintah Belanda merealisasikan gagasan lama mereka tentang sebuah kamp tahanan politik buat mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) di wilayah Hindia Belanda. Terpilih Boven Digoel, sebuah kawasan rimba terpencil di Pulau Papua sekarang ini. Konon inilah kamp konsentrasi pertama yang lahir di dunia.

Berbeda dengan kamp tahanan terkenal seperti kamp tahanan milik tentara Nazi, di kamp ini tidak ada penyiksaan fisik. Tetapi keadaan Digoel yang 100% terisolasi, belantara rawa penuh nyamuk malaria, dan berada sekitar 450 km ke hulu sungai yang penuh buaya adalah siksaan tersendiri. Dengan daerah hunian yang tak layak huni ini, rasa sepi yang menekuk dan rindu kampung halaman yang kuat, maka ada di antara para tahanan ini yang kemudian menjadi gila, mati, mencoba melarikan diri namun kemudian lenyap tak tahu rimbanya, atau

## PENGANTAR REDAKSI

---

---

Jika ada suatu tempat yang telah di(tcr)lupakan dalam memori kolektif bangsa ini, dan kini perlu kita ingat-ingat lagi, mungkin Digoel adalah tempat itu. Digoel bertaut erat dengan sejarah pergerakan rakyat Indonesia, dengan putra-putra pertiwi, dengan mereka yang gagah berani mempertaruhkan jiwa dan raga.

Pada tahun 1926, pemerintah Belanda merealisasikan gagasan lama mereka tentang sebuah kamp tahanan politik buat mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) di wilayah Hindia Belanda. Terpilih Boven Digoel, sebuah kawasan rimba terpencil di Pulau Papua sekarang ini. Konon inilah kamp konsentrasi pertama yang lahir di dunia.

Berbeda dengan kamp tahanan terkenal seperti kamp tahanan milik tentara Nazi, di kamp ini tidak ada penyiksaan fisik. Tetapi keadaan Digoel yang 100% terisolasi, belantara rawa penuh nyamuk malaria, dan berada sekitar 450 km ke hulu sungai yang penuh buaya adalah siksaan tersendiri. Dengan daerah hunian yang tak layak huni ini, rasa sepi yang menekuk dan rindu kampung halaman yang kuat, maka ada di antara para tahanan ini yang kemudian menjadi gila, mati, mencoba melarikan diri namun kemudian lenyap tak tahu rimbanya, atau

tunduk dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kendati demikian, ada yang tetap teguh, terus mencoba menyusun perlawanan. Jika golongan yang pertama itu cukup di Tanah Merah, maka untuk mereka yang tetap "bengal" ini, pemerintah membuatkan kamp yang lebih ganas lagi di kawasan itu, Tanah Tinggi.

Sejak akhir tahun 1926, menyusul pemberontakan PKI di Banten dan tahun 1927 di Sumatra Barat, hingga awal 1940-an ketika kamp ini ditutup, ribuan aktivis pergerakan dikirim ke Digoel. Di antara mereka adalah para aktivis dan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Republik Indonesia (PARI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (PARTINDO), Perhimpunan Muslim Indonesia (PERMI), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), dan beberapa lainnya. Nama-nama terkenal yang pernah mendiami tempat ini adalah Chalid Salim, Najoan, Mas Marco Kartodikromo, Xarim MS, Djamaruddin Tamin, Aliarcham, Sardjono, Hatta, Sjahrir dan lain-lain.

Sebagai bagian dari pendidikan politik, atau katakanlah politik pengamanan politik, surat-surat para tahanan Digoel, berita-berita dan laporan-laporan tentang Digoel dengan sengaja disebar luaskan di kalangan masyarakat melalui media. Ikhwal Digoel yang disebarluaskan itu dimaksudkan untuk memberikan pe(la)ngajaran kepada kalangan bumiputra yang mencoba berpikir dan bernimpi tentang merdeka. Dengan infrastrukturnya—residen, intelejen, dan dewan rakyat—Digoel, dengan demikian menjadi sarana pengamanan politik yang efektif dalam rangka menjaga *rust en orde*. Ia menjadi "hantu" ganas, yang mengancam dan membayang-bayangi gerak aktivis pergerakan. Di Belanda sendiri, Digoel terkenal sebagai "kuburan".

Sebenarnya telah ada beberapa tulisan mengenai Digoel, baik dari pengamat/jurnalis, mantan digoelis, maupun para penghuni Digoel lainnya, seperti dokter atau tentara. Yang terkenal adalah memoar Chalid Salim, adik kandung H. Agus Salim, yang terbit dalam Bahasa Belanda, Inggris, dan Indonesia beberapa tahun silam.

Buku yang sekarang ada di tangan pembaca ini kurang lebih adalah suatu tatapan ulang terhadap kamp konsentrasi Digoel. Takashi memanfaatkan bahan arsif yang luas dan catatan-catatan mereka yang pernah “berkenalan” dengan Digoel. Tidak sekadar gambaran historis yang hendak diberikan, melalui Digoel ini juga diperiksa politik pengamanan politik yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan ini, kita mungkin bisa merenungkan akan kebutuhan memiliki orde dan menjaganya. Sering karena mementingkan orde kita lalu memikirkan ancaman. Orde selalu membutuhkan ancaman, dan ancaman dirasakan karena ada orde yang hendak dibangun dan dipertahankan. Di sisi lain, disoroti juga bagaimana keguncangan yang terjadi di dunia pergerakan, intrik, dan konflik ideologis akibat dari represi itu.

Prof. Dr. Takashi Shiraisi, sejarawan asal Jepang, terkenal dengan studinya mengenai zainan pergerakan. Buku *Zaman Bergerak* (1998), bisa disebut sebagai yang terbaik di topiknya. Dua bagian buku ini (bagian pertama dan ketiga) semula merupakan dua tulisan yang dimuat di jurnal *Indonesia*. Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta akhir 1998, kami meminta kesediaannya untuk diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. “Sensei” dengan senang hati menyambut tawaran kami tersebut, ia bahkan berjanji akan melengkapi dengan satu tulisan dengan topik yang sama. Tak lama kemudian satu tulisan, yang belum pernah dipublikasikan itu, ia kirimkan dan menjadi bagian kedua dari buku ini. Kami sangat berterima kasih dengan kemurahan hatinya. Ketika buku akan terbit kami meminta Sensei untuk menulis pengantar, namun karena kesibukannya yang padat keinginan itu tidak bisa beliau penuhi.

Untuk melengkapi buku ini, di bagian belakang kami sertakan wawancara dengan Prof. Dr. Takashi Shiraisi mengenai Digoel yang dimuat dalam buku *Mencari Demokrasi* (ISAI, 1999). Wawancara ini mungkin bisa berfungsi sebagai “pengantar” atau “penerang” hal-hal yang mungkin dianggap kurang jelas dalam buku ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman

ISAI yang memberikan izin naskah ini diterbitkan ulang. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Ford Foundation dan Yayasan Adikarya IKAPI atas dukungannya. Selamat membaca (hs).

# **DAFTAR ISI**

---

---

**PENGANTAR REDAKSI ◆ v**

**DAFTAR ISI ◆ ix**

**Bagian Pertama: DUNIA HANTU DIGOEL ◆ 1**

- Pendirian Kamp Digoel ◆ 3
- Sejarah Digoel ◆ 9
- Perjalanan ke Tanah Merah ◆ 17
- Dunia Hantu Digoel ◆ 29
- Tahun-tahun Penutupan ◆ 41

**Bagian Kedua: TATANAN REZIM BARU ◆ 45**

- Datangnya Kebijakan Modern ◆ 46
- Ahli Pengamanan Politik ◆ 60
- Tumbuh Bersama Partai Komunis Indonesia ◆ 69
- Tatanan Rezim Baru ◆ 77
- Politik Pengamanan Politik ◆ 84

**Bagian Ketiga: MENGAMANKAN HANTU  
GERAKAN BAWAH TANAH ◆ 93**

- Pelajaran dari Revolusi ◆ 96
- Skandal SKBI ◆ 107

Pembuangan Iwa Koesoema Soemantri ◆	121
Peran Moskow ◆	135
PARI Bawah Tanah: Menangani <i>Onverzoenlijken</i> ◆	142
Sejarah PARI ◆	142
Terciumnya Kegiatan PARI ◆	147
Jaringan PARI ◆	151
<b>Epilog: DIALOG BERSAMA TAKASHI SHIRAISHI ◆</b>	<b>171</b>
<i>Exorbitante Rechten</i> ◆	172
Residen dan Polisi Rahasia ◆	175
Mau atau Tidak Mau Bekerja ◆	176
Tanah Merah dan Tanah Tinggi ◆	178
Penelitian Hillen ◆	183
Korban Baru de Jonge ◆	185
Mencoba Lari ◆	188
Perubahan Politik Dunia ◆	191
Zaman Normal ◆	193
Pendidikan Politik Kolonial ◆	195
<b>SUMBER TULISAN ◆</b>	<b>199</b>
<b>INDEKS ◆</b>	<b>200</b>
<b>BIODATA PENULIS ◆</b>	<b>208</b>

## **Bagian Pertama**

# **DUNIA HANTU DIGOEL**

---

---

Tahun-tahun terakhir kekuasaan imperialis sesudah pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa tahun 1926, rezim kolonial Hindia Belanda membangun sebuah kamp pembuangan massal yang kurang mendapatkan perhatian, Boven Digoel, di pedalaman Papua yang penuh nyamuk malaria di pinggiran wilayah Hindia Belanda untuk memaksa para interniran hidup normal di bawah kondisi yang tidak normal.<sup>1</sup> Boven Digoel (Tanah Tinggi Digoel), disebut demikian karena terletak di dataran tinggi Sungai Digoel. Boven Digoel bukanlah sebuah koloni narapidana. Seperti dijelaskan oleh pemerintah Hindia Belanda, pembuangan bukanlah sanksi yang dijatuhkan melalui proses hukum (*penal sanction*) melainkan tindakan administratif, ditetapkan oleh kewenangan istimewa gubernur jenderal, *exorbitant rechten*, yang bisa menentukan para interni hidup di tempat tertentu.

Pengasingan (dalam hal ini pembuangan keluar), adalah sebuah praktik yang telah lama berlangsung di negara jajahan Hindia Belanda. Di abad dua puluh sendiri, Soerantiko Samin, orang Jawa Tengah dan pendiri agama Adam, dibuang ke

---

<sup>1</sup> Judul esai ini diambil dari Hannah Arendt's "The Phantom World of Dark Continent" dalam karya klasiknya *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harvest Book, edisi baru, 1955), hlm. 186.

Sumatra Barat tahun 1907. Tjipto Mangoenkocsomo, orang Jawa, tahun 1920 dikenai larangan menetap di wilayah penduduk berbahasa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan selanjutnya hidup di Banda Neira pada tahun 1927. Semaoen, Tan Malaka, Darsono, Hadji Misbach, Aliarcham, dan masih banyak lainnya, ditolak menetap di Hindia Belanda atau diwajibkan menetap di beberapa tempat berbeda di bagian timur kepulauan antara tahun 1919 hingga 1926. Baru pada tahun 1927 dan 1940 para interniran diasinkan di tempat yang sama.

Digoel juga bukan sebuah kamp konsentrasi, sebagaimana dikatakan sejarawan Belanda J.M. Pluvier, karena tempat ini berbeda dengan kamp konsentrasi Nazi dalam hal bagaimana para penghuninya diperlakukan: tak seorang pun di Digoel disiksa atau dibunuh seperti di kamp-kamp konsentrasi Jerman.<sup>2</sup> Pemerintah Hindia Belanda, hanya membiarkan para penghuni mati, menjadi gila, atau menjadi hancur.

Orang-orang Indonesia mengerti betul apa artinya diasinkan ke Digoel. Tak ada pembatasan informasi tentang Digoel, praktis setiap pengiriman interni baru ke Digoel dan setiap pembebasan baru dari tempat yang sama diberitakan di koran-koran Melayu, sering kali diikuti dengan penerbitan surat-surat interni dan wawancara yang bersangkutan kepada keluarga dan kawan-kawan mereka. Pemerintah sengaja membiarkan orang Indonesia tahu tentang Digoel, tak diragukan lagi, untuk membuat mereka jera. Soekarno dengan penuh imajinasi ketakutan oleh bayangan untuk dibuang ke Digoel, jauh dari ibunya dan barangkali harus hidup terpisah dari istri, sehingga ketika ditahan di sel penjara Sukamiskin tahun 1933 meminta pengampunan dari pemerintah dengan imbalan untuk menghentikan aktivitas politiknya dan bila perlu bekerja sama dengan pemerintah.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> J.M. Pluvier, *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942* ('s-Gravenhage: W. van Hoeve, 1953), blm. 42–43.

<sup>3</sup> Lihat surat-surat Soekarno kepada Jaksa R.J.M. Verheijen dalam R.C. Kwanten, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië: Aug. 1933-1942* (selanjutnya *De Ontwikkeling: Aug. 1933-1942*) Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982).

Bagaimanapun, Soebakatlah yang barangkali paling memahami makna politis Digoel. Soebakat, pendiri partai politik revolusioner bawah tanah PARI (Partai Republik Indonesia), menciptakan sebuah kode bagi komunikasi internal di mana "Rumah Sakit Umum" merujuk pada Digoel, sementara "rumah sakit" berarti penjara dan "Abu" berarti polisi.<sup>4</sup> Dalam jagad politik Hindia Belanda yang dibayangkannya yang diawasi "Abu" dan dipenuhi "rumah sakit", Digoel merupakan terminal tujuan bagi kaum revolusioner—dalam terminologi kolonial Belanda, dikenal dengan istilah *onverzoenlijken*, kepala batu, *incorig, die-hards*—menekan ketakutan yang membuat mereka menjadi revolusioner sejati. Soebakat bunuh diri sebelum dikirimkan ke Digoel sengaja tidak memberi kesempatan kepada polisi rahasia untuk mengorek keterangan penting darinya tentang PARI. Namun, scandainya ia tidak bunuh diri, ia bakal mendapati bahwa Digoel, yang dilengkapi tidak hanya dengan penjara, polisi, garnisun militer, kelompok pengintai, mata-mata, dan informal sendiri, tetapi juga memiliki kamp pengasingan tingkat dua di Tanah Tinggi bagi *onverzoenlijken*, merupakan sebuah metafor bagi Hindia Belanda, rezim kolonial yang dipoles Belanda pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya.

## Pendirian Kamp Digoel

Pendirian kamp pengasingan massal diputuskan pada sebuah pertemuan luar biasa dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlandsch-Indie*) yang diadakan 18 November 1926, kurang dari seminggu sejak pemberontakan komunis yang berawal di Jawa Barat malam tanggal 12 November.<sup>5</sup> Pertanyaan yang

<sup>4</sup> hlm. 37–43; John Ingleson, *Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement, 1927–1934* (Singapore: Heinemann Educational Books, Asian Studies Association of Australia, Southeast Asia Publication Series, No. 1), hlm. 218–221.

<sup>5</sup> Asisten Komisioner Polisi (Marinus Visbeen), *Process Verbaal* (Soebakat), Vb. 6-8-30 B-18.

<sup>6</sup> Pertemuan ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff dan dihadiri oleh K.F. Cretzberg, wakil ketua dewan; J.W. van der Marel, PW. Filet, Ch. J.L.M. Welter, dan A.M. Hens, anggota dewan; Sekretaris Jenderal (algemeene secretaris) G.R. Erdbrink; Gubernur Jawa Barat W.P. Hillen, Direktur Kehakiman D. Rutgers;

diajukan oleh Gubernur Jenderal de Graeff pada pertemuan ini adalah: Bilakah sejumlah tindakan harus diambil untuk memerangi meningkatnya gerakan komunis yang berlangsung seminggu terakhir dan untuk mencegah (pengulangan mereka) di masa datang sebisa mungkin. Jika ya, tindakan-tindakan seperti apa?

Ia mengatakan telah memutuskan sebelum mengundang pertemuan itu bahwa tak bisa ditawarkan lagi untuk menempatkan para pemimpin komunis yang berbahaya di tahanan secepat mungkin demi keamanan publik, dan telah menginstruksikan jaksa umum pada 17 November untuk memerintahkan para kepala administrasi wilayah di Jawa dan Sumatra untuk melaksanakan keputusan itu. Dalam pandangannya, bagaimanapun penahanan hanya memberikan tindakan sementara, karena setelah usai penyelidikan, sebagian besar dari mereka yang ditahan harus dibebaskan karena tiadanya bukti legal untuk mendukung pengenaan hukuman, dan selanjutnya mereka bakal memperbarui aktivitasnya lagi. "Tetapi tampaknya ada sebuah cara untuk mencegah hal ini terjadi," lanjutnya, "misalnya dengan mengasingkan para pemimpin utama komunis dalam jumlah besar." De Graeff yakin bahwa tindakan semacam itu harus dikenakan hanya pada para pemimpin utama dan berjanji semua inti bakal dibawa ke tempat yang sama sejauh mungkin.<sup>6</sup>

Dewan mendukung usulan de Graeff dan memutuskan bahwa pengasingan harus dimulai pada mereka yang ditangkap di Jawa Barat dan pengasingan bagi mereka yang ditahan di berbagai tempat bakal mengikuti secepatnya setelah kantor jaksa umum, *hoofd parket*, menerima informasi yang diperlukan bagi

---

Direktur Administrasi Internal (binnenlandsch bestuur) A.H. Maas Geesteranus; Jaksa Umum (procureur generaal) H.G.P. Duyfjes; wakil pemerintah untuk urusan umum di Volksraad J.J. Schrieke; dan deputi penasihat urusan penduduk asli E. Gobée. Lihat R.C. Kwanten, ed., *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië: tweede stuk medio 1923–1928* (selanjutnya *De Ontwikkeling: medio 1923–1928*) (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978), hlm. 475–480.

<sup>6</sup> "Verslag bg. vergadering van de raad van Nederlandsch-Indië, 18 Nov. 1926," dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: Medio 1923–1928*, hlm. 476–477.

tindakan tersebut. Diputuskan pula bahwa prosedur dan formalitas yang harus dipenuhi bagi pengasingan direvisi dan disederhanakan untuk pemberlakuan. Alasan-alasan yang diberikan dalam rancangan keputusan pengasingan harus jelas dan dibatasi pada delapan poin, intinya bahwa orang yang bakal diasingkan adalah anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), partai yang mengikuti Internasional Ketiga (*Third International*), dan bermaksud menggulingkan dan membentuk pemerintahan baru; bahwa PKI membentuk organisasi-organisasi ilegal; bertujuan merekrut elemen-elemen buruk (*slechte elementen*) melakukan tindakan kriminal melawan milik dan kehidupan para pejabat dan melawan keselamatan masyarakat.

Hari berikutnya, 19 November, Jaksa Umum Duyfjes mengirimkan telegram kepada kepala administrasi regional dan menginformasikan bahwa berkaitan dengan kerusuhan di berbagai wilayah dan kekacauan di Jawa Barat, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan pengasingan dalam skala besar terhadap para pemimpin komunis di seluruh Hindia Belanda, yang tindakannya memberikan ancaman serius terhadap ketenangan publik dan tatanan (*rust en order*). Sebuah perubahan kecil tetapi penting terjadi hari itu pada kategori orang yang bisa diasingkan: tidak lagi para pemimpin utama komunis sebagaimana dikemukakan dalam usulan de Graeff, tetapi para pemimpin komunis yang tindakannya bisa memberikan ancaman serius terhadap ketenangan publik dan tatanan.”<sup>7</sup>

Tanggal 24 November, daftar pertanyaan yang diajukan dalam interogasi terhadap mereka yang akan diasingkan dikirimkan kepada para kepala pemerintah regional. Di seluruh Hindia Belanda, semua orang yang bakal diasingkan diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan sama; nama, umur, tempat lahir, tempat tinggal, pendidikan, posisi karir; apakah mereka mengetahui bahwa tujuan utama PKI adalah menumbangkan pemerintah; bahwa PKI membentuk organisasi-organisasi ilegal;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 478.

dan bahwa tujuan dari organisasi-organisasi ilegal ini adalah merekrut unsur kriminal untuk mengerjakan tindak kriminal; apakah mereka anggota PKI dan/atau salah satu organisasi ilegal di bawahnya; dan apakah mereka turut serta dalam tindakan yang mengancam ketenangan dan tatanan.<sup>8</sup>

Pertanyaan-pertanyaan ini disusun berdasarkan teori yang diajukan kepala polisi rahasia A.E. van der Lely tentang pemberontakan-pemberontakan komunis. Dalam laporan pendahuluan yang diajukan pada jaksa agung ia berargumentasi bahwa di balik apa yang tampaknya sebagai usaha perlawanan yang tak terorganisir dan sporadis terhadap rezim yang ada terdapat sebuah gagasan dasar, seperti diformulasikan dalam karya Tan Malaka; *Naar de Republieke Indonesia* (Menuju Republik Indonesia), bahwa membimbing para pemimpin komunis dan memberikan aspirasi bagi tindakan-tindakan mereka. Jaksa agung, berdasarkan teori ini, incanyaampaikan argumentasi lewat surat kepada gubernur jenderal bertanggal 22 November yang menganjurkan pencarian kekuasaan luar biasa yang besar-besaran terhadap para pengikut, inti, dan pemimpin utama (*hoofdleiders*) yang bekerja di belakang layar, untuk mencegah terulangnya pemberontakan yang baru saja terjadi.<sup>9</sup> Dalam edaran yang dikirimkan kepada para kepala pemerintah regional tertanggal 13 Desember, ia menulis bahwa pengasingan berskala besar ini bakal kehilangan efektivitas, jika kelompok pemimpin baru bisa tampil ke muka tanpa dihalangi. Menjadi tugas pemerintah dan polisi untuk jangka waktu tertentu mengaburkan arti dan pengaruh yang mengancam dari kaiun propaganda baru dan memilih saat yang tepat untuk menetralisir mereka dengan cara yang sama seperti para pendahulunya.<sup>10</sup> Tergantung pada interpretasi para pemimpin lokal, seseorang yang diidentifikasi

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 480.

<sup>9</sup> Penuntut Umum (Duyfjes) kepada Gubernur Jenderal (de Graeff), Weltevreden, 27 November 1926, Mr. 1174x/26.

<sup>10</sup> "Procureur Generaal (H.G.P. Duyfjes) aan hoofden van gewestelijk bestuur," dalam Kwantess, *De Ontwikkeling: medio 1923–1928*, hlm. 520–521.

sebagai pemimpin komunis atau propagandis yang bisa diasingkan sekarang.

Sementara itu, Digoel, yang oleh Wakil Gubernur Maluku J. Roest dilukiskan sebagai lingkungan gersang tak berpenghuni yang bahaya, terisolasi, berpenduduk sangat jarang, dengan rute masuk terbatas, diidentifikasi sebagai suatu tempat yang ideal bagi kamp pengasingan massal terisolasi sepenuhnya dari masyarakat, memutuskan sebesar mungkin kontak dengannya dan selalu terpisah untuk selamanya.<sup>11</sup> Tanggal 10 Desember 1926, wilayah Sungai Digoel dipisahkan dari subdivisi (*onderafdeeling*) dari Papua Nugini bagian selatan melalui dekrit pemerintah dan dijadikan sebuah pemerintah subdivisi Boven Digoel dengan Tanah Merah sebagai pusat pemerintahannya.<sup>12</sup> Tak lama setelah itu, Kapten L. Th. Becking, pimpinan kesatuan yang menghancurkan pemberontakan November di Banten, dikirimkan ke Digoel dengan pasukannya yang kebanyakan berasal dari Ambon dan tawanan pekerja (*convict worker*) untuk membangun kamp tepat pada waktunya bagi kedatangan rombongan pertama para interni yang dijadwalkan tiba 27 Maret.

Sementara, Kapten Becking dalam perjalanan ke Digoel, sekretaris pertama pemerintah mengirim surat kepada Wakil Gubernur Maluku yang menjelaskan tentang rezim Digoel:

...Maksud tindakan khusus ini tercapai dengan kedatangan para interni di tempat yang dirancang sebagai tempat menetap mereka dan karenanya paksaan terhadap pribadi mereka yang tak bisa dihindarkan dalam penerapan tindakan administratif ini harus dihentikan kecuali terdapat keadaan khusus yang memaksa. Di tempat tinggal yang baru orang-orang ini menikmati hak-hak yang sama dan subjek dari kewajiban-kewajiban yang sama yang dijamin oleh hukum atau diterapkan pada semua penduduk bebas

<sup>11</sup> Kutipan diambil dari surat Deputi Gubernur Maluku J. Roest kepada gubernur jenderal bertanggal 18 Desember 1929, dikutip dalam Kwantes, *De Ontwikkeling: medio 1923-1928*, hlm. 521.

<sup>12</sup> "Overzicht van de Inwendigen Politieken Toestand (1924-15 April 1928)," dalam *Mededeelingen der Regeering omtrent Enkele Onderwerpen van Algemeen Belang* (Mei 1928) (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928), hlm. 9-10.

dan dalam kasus normal pemerintah dan organ-organnya harus menahan diri (dari tindakan berlebihan terhadap para interni) melampaui tindakan melakukan pengawasan...

(Di pihak lain) menurut pendapat gubernur jenderal bahwa kondisi abnormallah yang mengakibatkan sedemikian banyak orang harus ditempatkan bersama di sebuah tempat yang belum layak huni atas perintah pemerintah dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hidup dan kesejahteraan orang-orang ini sebagai dasar legit.masi bagi tindakan-tindakan khusus terhadap mereka dengan memberikan kewenangan lebih dari sekadar polisi biasa terhadap penguasa di sana. Aturan-aturan rezim ini tidak hanya berlaku untuk para interni tetapi juga keluarga mereka...

Dalam hubungan ini pandangan Yang Mulia (gubernur jenderal) harus diperhatikan bahwa para keluarga interni akan menyusul secepat mungkin seandainya mereka tidak bisa pergi bersama karena harus lebih dulu membereskan urusan keluarga. Kehadiran anggota keluarga ini dimaksudkan untuk mendorong dibangunnya kehidupan keluarga baku yang normal dan mungkin secara bertahap menggantikan ambisi politik mereka dengan disibukkan urusan-urusan yang lebih pada keluarga dan sosial.<sup>13</sup>

Dalam surat ini, pandangan Gubernur Jenderal de Graeff diungkapkan dalam bahasa birokratik yang hati-hati oleh sekretaris pemerintah. Dengan mengganti kata ganti orang-pertama dengan "pemerintah", "Gubernur Jenderal", dan "Yang Mulia", maka kita bisa mendengar suaranya yang lebih jelas. De Graeff mengatakan bahwa tujuannya telah tercapai dengan diasingkannya para interni komunis ini dan karenanya para interni harus dibiarkan hidup secara normal di Digoel sebagaimana di tempat lainnya di Hindia Belanda. Tak ada alasan bersikap sinis terhadap perhatian-perhatian yang ditunjukannya bagi kehidupan dan kesejahteraan para interni. Sesungguhnya, keputusan dialah untuk mengasingkan mereka, dan ia sadar bahwa keputusan itu bakal memaksakan banyak penderitaan

---

<sup>13</sup> Sekretaris Pertama Pemerintah kepada Deputi Gubernur Maluku, 5 Januari 1927, dalam Kwantes, *De Ontwikkeling: media 1923-1928*, hlm. 521-523.

bagi mereka. Karenanya, ia sepakat dengan Wakil Gubernur Maluku tentang perlunya membangun sebuah tatanan rezim yang khusus di Digoel, tetapi menegaskan bahwa aturan-aturan harus dibuat sesedikit mungkin. Ia ingin melihat para interni dan keluarga mereka mendapat sebuah koloni bersama dengan pemerintah—ia berbicara tentang kolonialisasi di Digoel dalam bagian lain suratnya—dan memulai sebuah kehidupan sosial dan keluarga yang normal dan teratur. Ia melihat Digoel, sebagaimana J.J. Schrieke, wakil pemerintah urusan umum di Volksraad, pernah menulis di awal 1925, sebagai sebuah proyek “manusiawi” untuk memberikan jalan bagi para pimpinan komunis dan propagandis, yang praktis bagi mereka tak ada pilihan kecuali antara propaganda dan penjara, untuk menciptakan kedamaian di Hindia Belanda, sebuah lingkungan (*outpost*) peradaban di pulau yang gelap, terisolasi dari dunia luar, secara politis tak terganggu, dan terus diawasi negara, di mana para interni bisa melakukan hal-hal yang berguna dan tidak menyia-nyiakan hidup mereka bagi impian-impian politik yang tidak bisa diwujudkan.<sup>14</sup>

## Sejarah Digoel

Kapten Becking dengan orang-orangnya dan tawanan pekerja tiba di Tanah Merah pada bulan Januari 1927 dan selama dua bulan membangun barak, gudang, rumah sakit, stasiun radio, kantor pos, dan tempat mandi besar (*badvlot*) di aliran sungai bagi tentara dan tawanan. Rombongan pertama interni dan keluarganya tiba bulan Maret; ada 50 interni, termasuk seorang Cina, dan tiga puluh keluarga, semuanya berpakaian rapi, dengan kostum tropis berwarna-warni, bersepatu dan kaos kaki bersih, topi, koper, dan sebuah payung yang dikempit di bawah lengan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Tentang usulan Schrieke, lihat tulisan saya *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 311.

<sup>15</sup> I.E.M. Salim, *Vijftien jaar Soer-Diguel: Concentratiekamp in Nieuw-Guinea, Bakermat van de Indonesische Onafhankelijkheid* (Amsterdam: Contact, 1973), hlm. 78–84;

Penduduk Digoel terus bertambah stabil mulai saat itu. Ketika pengawas M.A. Monsjou tiba, bersama dengan rombongan ketujuh interni, di Tanah Merah pada 30 Oktober 1927 untuk menggantikan Kapten Becking sebagai penguasa Digoel, pihak pemergang wewenang atau administratur, penduduk kamp tercatat 930 terdiri 538 interni dan 382 anggota keluarga. Pada Februari 1928, angka ini mencapai 1.139, terdiri 666 interni dan 473 anggota keluarga. Ketika W.P. Hillen, anggota dewan Hindia Belanda, mengunjungi Digoel pada bulan April 1930, penghuni kamp berada pada titik puncak, dengan 2.000 orang, termasuk 1.308 interni.<sup>16</sup>

Kunjungan Hillen merupakan kulminasi rangkaian investigasi pemerintah terhadap kondisi Digoel. Investigasi ini dipicu oleh artikel dari M. van Blankenstein yang dipublikasikan di *De Nieuwe Rotterdamsche Courant* bulan September dan November 1928, di mana ia berargumentasi bahwa terdapat korban-korban tak berdosa diasingkan di Digoel karena kesalahan.<sup>17</sup> Sebagai jawaban dari tuduhan ini, pemerintah mengumumkan di *Volksraad* pada bulan November 1928 bahwa para interni dikategorikan ke dalam tiga kelompok, aktivis partai (*de onverzoenlijken*), simpatisan (*de halfslachtingen*), dan penurut (*de welwillenden*), dan pemerintah telah mempersiapkan pembebasan mereka yang masuk kategori ketiga ini jika pengasingan mereka tidak didasarkan pada alasan memadai dan mereka berlaku baik di Tanah Merah.<sup>18</sup> Gubernur Jenderal juga menginstruksikan Gubernur Maluku pada bulan Desember 1928 untuk melaporkan

<sup>16</sup> Verslaggever Boven Digoel (Mas Marco Kartodikromo), "Riwayat Boven Digoel (IV)," dalam *Persatuan Indonesia*, No. 36, 1 Januari 1930.

<sup>17</sup> "Overzicht van de Inwendigen Politieken Toestand (1924–15 April 1928)," dalam *Mededeelingen der Regeering* (Mei 1928), hlm. 12, dan "Rapport van het lid van de raad van Nederlandsch-Indië, W.P. Hillen, over de interneringskampen aan de Boven-Digoel, 22 Juli 1930 (setelah Rapport Hillen)," dalam R.C. Kwantes, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandse-Indië: derde stuk 1928–Aug. 1933 (setelah De Ontwikkeling: 1928–Aug. 1933)* (Groningen: Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1981), hlm. 463.

<sup>18</sup> Kwantes, *De Ontwikkeling: 1928–Aug. 1933*, hlm. 165–166.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 338, aslinya dari *Handelingen Volksraad*, 8 November 1928, hlm. 1649.

tentang tingkah laku, sikap, dan mentalitas mereka. Pendeknya, semua yang bisa memberikan kesan untuk menentukan bila mereka bisa tetap dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan dan tatanan publik kalau dikembalikan ke tempat aslinya.<sup>19</sup>

Tugas Hillen adalah mengawasi kondisi umum di Digoel, mewawancarai interni dari kategori ketiga, dan mengidentifikasi mereka yang bisa dibebaskan. Ia tinggal di Tanah Merah selama 48 hari, mengunjungi Tanah Tinggi, dan mewawancarai antara 20 hingga 25 interni setiap harinya, hingga mencapai 610 orang. Ia menulis dalam laporannya bahwa sekilas Tanah Merah tampak makmur, rumah-rumahnya terawat, semuanya tertutup seng, kebun yang terurus, jalan-jalan yang tertata, penerangan listrik di sepanjang jalan utama, dua sekolah, sebuah rumah sakit, sambungan telepon, dan sebuah gedung bioskop sederhana. Penduduk asli yang dijumpainya bersikap baik, tenang, dan sopan, walaupun ia keindian memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang menurutnya mengabaikan dirinya dan tak ingin berurusan dengannya.

Namun situasinya tidaklah seideal seperti yang terlihat, tulisnya, karena terdapat banyak orang yang dari segi prinsip menentang pemerintah, juga tidak bersedia bekerja bagi pemerintah, bahkan mereka bisa meningkatkan kondisi material dengan bersikap demikian. Penduduk kamp pengasingan terbagi ke dalam beragam dan berubah-ubah jalur pemisahan menurut kelompok, klik, dan partai, dan terbagi antara mereka yang menolak bekerja, mereka yang setengah hati, dan mereka yang mau bekerja. Laporan-laporan tentang Digoel yang dikirimkan oleh pejabat-pejabat lokal kepada pusat terlalu optimistik, tulis Hillen mengingatkan pembacanya. Tak berapa lama setelah Residen Amboina mengunjungi Digoel dan menyerahkan sebuah laporan bernada optimis tentang mentalitas para interni, ia menangkan, beberapa interni dihukum karena menolak menjalankan kewajiban kerja paksa dan sebagai balas

---

<sup>19</sup> "Le Gouvernements-secretaris aan de gouverneur der Molukken (J. Tideman), 27 ded. 1928," dalam Kwantes De Ontwikkeling: 1928–Aug. 1933, hlm. 167.

dendam atas hukuman itu semua jembatan di kamp dihancurkan. Gubernur Maluku Tideman melaporkan pada bulan Maret 1929 bahwa sebuah semangat yang bagus menonjol di kamp, tetapi di bulan berikutnya, sebanyak 69 interni dikirim ke Tanah Tinggi, dan dalam laporan berikutnya Agustus 1929 Tideman sendiri mengakui bahwa hampir separo interni masih bersikap bermusuhan kepada pemerintah dan bahwa ia tidak yakin apakah pembalikan sikap mereka benar-benar jujur.<sup>20</sup>

Hillen berargumentasi bahwa tak ditemui sedikitpun bekas petani dan pedagang kecil di Digoel yang mengetahui tentang komunisme, PKI, dan SR (Sarekat Rakyat). Ia merekomendasikan bahwa 412 dari 610 interni yang diwawancarainya harus dibebaskan, namun menyarankan tetap dipertahankannya Tanah Tinggi sebagai kamp interniran kedua bagi radikal. Ia juga sangat meragukan tentang masa depan kamp intemiran Tanah Merah. Ia berargumentasi bahwa "kelelahan mendasar" kamp ini seperti tanahnya yang tandus dan malaria harus lebih diperhatikan dibandingkan lokasinya yang terisolasi ketika memutuskan masa depan Digoel dan bahwa "penarikan yang terencana bagi saya secara politis masuk akal."

Setelah para interni yang berlaku baik dipulangkan, pemukiman di Tanah Tinggi bisa dihapuskan dan penduduknya digabungkan dengan mereka yang bermukim di Tanah Merah. Di tempat pembuangan yang baru proses seleksi harus terus dilanjutkan terhadap mereka yang secara mental berubah menjadi baik, sehingga akhirnya jumlah mereka yang tetap dibiarkan dalam pengasingan bisa dihitung dalam angka puluhan dan tidak dalam jumlah ratusan seperti sekarang. Selanjutnya, barangkali tempat pembuangan yang baru ini bisa dihapuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dan interni sisanya bisa diasingkan dalam kelompok-kelompok kecil di berbagai tempat di kepulauan, di mana mereka bisa tinggal di tengah masyarakat yang apatis terhadap politik.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> "Rapport Hillen" dalam Kwantes, *De Ontwikkeling: medio 1928–Aug. 1933*, hlm. 460–463.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 464, 469–470.

De Graeff secara sadar menyaksikan proyek kemanusiaannya gagal. Ia segera melaksanakan rekomendasi Hillen. Kamp di Tanah Tinggi dijadikan kamp penampungan resmi bagi para pemuka. Ia sepakat dengan Hillen mengenai keinginan untuk memindahkan kamp interniran ke tempat lain di wilayah pemerintah Maluku dan menginstruksikan direktur administrasi internal untuk membentuk komisi yang akan mempelajari masalah ini. Pada bulan Desember 1930 ia juga memutuskan membebaskan 2.199 interni dari Digoel.<sup>22</sup> Namun waktu yang tersisa terlalu pendek bagi de Graeff untuk membangun sebuah rezim interniran yang baru. Pada bulan Mei 1931, Bonifacius Cornelis de Jonge ditunjuk sebagai Gubernur Hindia Belanda menggantikan de Graeff dan mulai bekerja sejak September 1931. Pada bulan Januari 1931 de Jonge memutuskan untuk mempertahankan Digoel sebagai kamp pengasingan.<sup>23</sup>

Namun sebuah preseden birokratis terbentuk dengan keputusan de Graeff untuk membebaskan para interni. Tak terpengaruh oleh perubahan kekuasaan di Buitenzorg dari de Graeff yang liberal ke de Jonge yang lebih otoriter, interni secara teratur dibebaskan setelah pembebasan pertama itu dan jumlah populasi interni memperlihatkan penurunan tajam dari tahun 1930 hingga 1936. J. Th. Petrus Blumberger, kepala kabinet urusan koloni di Den Haag dan orang paling ahli tentang gerakan penduduk asli di Hindia Belanda pada masanya, memberikan statistik dalam catatan yang dikirimkannya kepada menteri urusan koloni bulan Oktober 1937.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Kwantes, *De Ontwikkeling: 1928–Aug. 1933*, hlm. 470.

<sup>23</sup> Kwantes, *De Ontwikkeling: Aug. 1933–1942*, hlm. 319. Ini harangkali satu dari beberapa keputusan tidak penting yang dibuat oleh de Jonge sebagai gubernur jenderal, karena dalam memoimya, *Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn ambtenschap* (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968), ia tidak menyebutkan tentang keputusan ini bahkan sambil lalu pun tidak.

<sup>24</sup> Jumlah yang dicatat pada bulan Mei 1930 adalah berdasarkan “Rapport Hillen” dalam Kwantes, *De Ontwikkeling 1928–Aug. 1933*, hlm. 463; lainnya diambil dari “Nota van de afdeling Kabinet van het departement van kolonien, 15 Okt. 1937,” dalam Kwantes, *De Ontwikkeling Aug. 1933–1942*, hlm. 468–469.

## Populasi Interni di Digoel

Catatan bulan	Total	di Tanah Tinggi
Mei 1930	1.308	70
Jan. 1931	1.178	82
Jan. 1932	793	69
Jan. 1933	553	66
Jan. 1934	440	60
Jan. 1935	416	60
Jan. 1936	419	71
Jan. 1937	446	64

Petrus Blumberger melaporkan bahwa sekitar tiga perempat interni pada waktu Hillen menyusun laporannya telah dibebaskan sebelum Januari 1937, sementara sekitar seratus interni baru tiba di Digoel pada tahun-tahun yang sama. Dari para interni yang baru tiba ini kita bisa mengetahui siapa yang oleh pemerintah Hindia Belanda dikategorikan sebagai musuh negara paling berbahaya waktu itu. Di tahun-tahun antara 1930 hingga 1934 pemerintah masih memasukkan para pemimpin, propagandis PKI, dan SR dalam rombongan yang harus diasingkan meskipun mereka telah usai menjalani hukuman penjara karena keterlibatan mereka dalam pemberontakan tahun 1926 dan 1927. Namun mereka semakin kurang dianggap penting. Yang lebih dianggap penting adalah para pemimpin dari serikat buruh "merah" pusat, Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI), dibuang tahun 1930, dan di atas semuanya "pemimpin dan agen" PARI seperti Soenarjo, Mardjono, Sarosan, Djamaloedin Tamin, Daja bin Joesoef, Kandor, dan banyak lagi lainnya, dibuang dari tahun 1931–1934. Memang, setelah pemerintah berhasil menyingkap kegiatan bawah tanah PARI, keanggotaan dalam partai ini pada tahun 1930-an bisa dipastikan berarti sebuah tiket sekali jalan ke Digoel. Lalu, menjelang operasi

yang dilancarkan pencintah bagi penghancuran nasionalis "non-kooperasionis" pada tahun 1933–1934, para pemimpin organisasi nonkomunis seperti PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia) dan PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang berasal dari Sumatra Barat (Mocchtar Loetfi, Ilyas Jacob, Jalaloedin Thaib, dan beberapa lainnya), Hatta, Sjahrir, dan lima tokoh lain dari Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), pemimpin PARTINDO (Partai Indonesia) dari Sumatra Utara (Moehidin Nasoetion, Abdul Hamid Loebis, dan beberapa lainnya) dibuang ke Digoel. Dan akhirnya generasi baru tokoh-tokoh dari PARI, PNI-Baru, dan PKI-Muda di bawah Moesso (di antaranya, Jahja Nasoetion dan Dawud dari PARI, Amir Hamzah Siregar, Ahmad Soemadi dan Djoko Soedjono dari PKI-Muda "agen Moskow", Moerad dan Bermawi Latif dari PNI-Baru) kembali menambah jumlah penghuni Digoel pada tahun 1936.

Antara tahun 1936–1937 pemerintah Hindia Belanda juga membuat dua keputusan penting untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pembuangan. Pertama, dalam memutuskan untuk memindahkan Hatta dan Sjahrir dari Digoel ke Banda Neira di awal 1936, pemerintah membuat kesimpulan bahwa Digoel tidak cocok untuk intelektual berpendidikan universitas. Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Koesoema Soemantri dibuang ke Banda Neira dan Soekarno ke Ende, dan ini merupakan praktik pembuangan gaya kebijakan lama seperti halnya Digoel, tetapi dengan pemindahan Hatta dan Sjahrir ke Banda, pemisahan interni intelektual dari Digoel menjadi sebuah kebijakan baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Residen Maluku pada bulan April 1936, bagi mereka yang tak cocok berada di bawah rezim Digoel "karena pendidikan, kemurnian, atau kelahiran mereka" maka harus dibuang ke tempat lainnya.<sup>25</sup>

Kedua, tak lama setelah A.W. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menggantikan de Jonge sebagai gubernur jenderal, kantor penuntut umum pada bulan Agustus 1936 melakukan

<sup>25</sup> "Resident der Molukken (B.J. Haga) aan gouverneur-generaal (de Jonge), 15 April 1936," dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: Aug. 1933–1942*, hlm. 337.

penyelidikan atas situasi 800 eks-Digoel dan 2.500 eks-komunis yang baru bebas dari penjara. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa 45 eks-Digoel dan 180 eks-napi PKI masih di bawah pengawasan ketat polisi karena ancaman potensial dari mereka terhadap tatanan publik, namun hanya sebagian kecil saja dari mereka yang benar-benar memberikan ancaman serius untuk mendapatkan pembuangan kembali.<sup>26</sup> Penuntut umum menyimpulkan bahwa saatnya untuk melakukan pemulangan secara bertahap para interni, namun pada saat bersamaan menegaskan bahwa mereka yang berusaha mengembangkan gerakan revolusioner bawah tanah—seperti memimpin PARI dan propagandis dan agen *Comintern* didikti di Moskow—juga para tokoh garis keras yang dibuang di Tanah Tinggi tidak akan dibebaskan dari Digoel sama sekali.

Sebelum Petrus Blumberger menyerahkan nota tersebut kepada menteri urusan koloni Weltevreden agar dibuat peninjauan kebijakan, Digoel telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari rezim pengawasan politik Hindia Belanda, sebuah kamp pembuangan yang tidak cocok bagi intelektual didikan universitas, sebuah kamp pendidikan kembali semua kaum radikal, yang bisa berharap mendapatkan pembebasan, jika dalam penilaian pemerintah, mereka berlaku baik dan memperlihatkan kemauan untuk selalu bekerja sama. Hingga masa itu para

<sup>26</sup> Namun hal ini tidak berarti bahwa tidak ada eks-Digoelis yang dibuang kembali. "Propagandis dan kader" dari apa yang oleh Penuntut Umum Marcella disebut sebuah organisasi kriminal komunis di Kediri dan Madiun dibuang kembali pada tahun 1935. Firdaus Haroen Rasjid, bekas anak didik Hadji Misbach dan kepala editor jurnal Muhammadiyah, Adil, di Solo, setelah mendapatkan kebebasan, ditangkap dan dikembalikan ke Digoel tahun 1935 karena menyerang pemerintah melalui publikasi. Di antara eks-Digoel yang terus mendapatkan pengawasan ketat polisi adalah Moefandi alias Boediardjo yang tinggal di Solo karena kontaknya dengan Amir Hamzah Siregar, "seorang agen Comintern" yang dikirim ke Jawa oleh Liga Anti-Imperialis yang berbasis di Malaya; Oesman gelar Sultan Keadilan yang dipenjara selama tiga tahun di Sumatra Barat karena penyerangan melalui pers; seorang eks-napi yang dicurigai memiliki kontak dengan PARI; sekitar 20 eks-Digoelis dan 60 eks-napi yang bergabung dengan PARTINDO dan PNI-Baru; dan 45 eks-napi di Sumatra Barat yang bergabung dengan PSII, PERMI, HPII, dan Muhammadiyah. Penuntut Umum (H. Marcella) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda Starkenborgh-Stachouwer), 4 September 1936, Mr. 262x/37.

pejabat Belanda telah berhenti membicarakan tentang Digoel sebagai sebuah proyek untuk menciptakan sebuah koloni normal di wilayah pinggiran jauh dari kerajaan. Barangkali tak banyak yang mempedulikannya. Tempat itu telah ada demikian saja untuk membuang mereka yang dianggap membuat masalah dan, yang sama pentingnya, untuk menakut-nakuti mereka yang potensial menjadi perusuh benar-benar menjadi semakin menyulitkan. Seperti itulah kehidupan di Digoel, normal di permukaan, tetapi sesungguhnya sangat ganjil, makna satunya dari kehidupan ini terjadi dengan pembebasan pada suatu hari nanti.

## Perjalanan ke Tanah Merah

Digoei sungguh berada dalam isolasi yang sempurna dari titik pengawasan Hindia Belanda. Tanah Merah, pusat pemerintahan dan kawasan kamp penampungan utama, berlokasi 455 kilometer ke arah hulu Sungai Digoel—jarak dari mulut sungai ke Tanah Merah sama dengan jarak dari Batavia ke Semarang atau dari Amsterdam ke Paris—di tengah hutan belantara yang tak bersahabat, dan tepat berada di tengah Papua, dekat perbatasan Papua Nugini-Australia. Tanah Tinggi, kamp penampungan kedua, terpisah lebih jauh lagi dari Tanah Merah, berlokasi 55 kilometer ke arah hulu sungai dari Tanah Merah. Dibutuhkan waktu tiga setengah hari untuk mencapai Tanah Merah dari mulut sungai menggunakan perahu polisi, Albatros, dan lima jam lagi dari Tanah Merah ke Tanah Tinggi dengan perahu motor.

Wilayah ini penuh nyamuk malaria, panas, lembab, gersang, dan sangat jarang penduduknya—para tetangga interni adalah “pemburu kepala” serta “kanibal” di hutan dan buaya di sungai.<sup>27</sup> Tahun pertama, dua orang dimangsa buaya ketika sedang mandi, satu di antaranya interni “No. 528” Mangoen-atmodjo, mantan guru Islam Abangan, yang muncul di pusat

---

<sup>27</sup> Salim, *Vijfien Jaar Boven-Digoel*, lilm. 68, 81, 125; Verslaggever Boven Digoel (Marco), “Riwayat Boven Digoel(1),” dalam *Persatuan Indonesia*, No. 33, 15 November 1929.

panggung pergerakan bersama Haji Misbach dan Tjipto Mangunkusumo di pedalaman Surakarta tahun 1919 dan 1920.<sup>28</sup>

Tak terdapat kawat berdiri di sekeliling kamp penampungan, juga tidak ada menara pengawas. Sebaliknya, para tentara dan keluarga mereka yang tinggal di balik kawat berduri. Para interni dibebaskan untuk berkeliaran dan menetap di kawasan radius 25 kilometer dari kamp. Tetapi tak seorang pun bisa bepergian ke arah utara, barat, dan selatan, karena siapapun yang mencoba untuk kabur telah belajar dari “garis batas kematian”. Seandainya ada kesempatan kecil untuk meloloskan diri, satu-satunya rute yang mungkin adalah ke arah timur—melintasi hutan lebat, menghindari penduduk Papua, menyeberangi tiga sungai yang dihuni buaya Mandobo, Kaoh, dan Muyu, dan menuju Fly River di wilayah Australia. Ada 16 kali percobaan meloloskan diri antara tahun 1929 hingga 1943, kata Salim, melibatkan 50 interni, sekitar 40 dari Tanah Tinggi dan sisanya dari Tanah Merah.<sup>29</sup>

Najoan, yang oleh Salim disebut “Jungle Pimpernel” empat kali mencoba meloloskan diri. Percobaan yang terakhir tahun 1942, kurang dari setahun sebelum kamp ditutup, dan ia hilang di hutan. Dahlan dan Sukrawinata, keduanya bekas pemimpin komite revolusioner Batavia, tewas dibunuh Mappi-Papua di tengah hutan. Hanya sepertiga dari percobaan meloloskan diri melalui Fly River berhasil, dan sebagian besar mereka yang berhasil akhirnya tertangkap oleh polisi Australia, dikirim ke Thursday Island, diserahkan kembali kepada polisi Belanda di sana, dan dikirimkan kembali ke Digoel dengan kapal polisi. Percobaan paling berhasil dilakukan kelompok yang dipimpin oleh Sandjojo, yang menyeberangi Selat Torres dengan kapal dan

<sup>28</sup> Mangoenatmodjo hilang dari kamp pada 1 November 1928. Lihat Mr. 1140/1928. Untuk mengetahui deskripsi karirnya sebagai pemimpin pergerakan, lihat tulisan saya *An Age in Motion*, hlm. 197–203.

<sup>29</sup> Mrazek menulis bahwa terdapat dua puluh kali percobaan meloloskan diri antara tahun 1927 dan 1935. Rudolf Mrazek, *Sjajirir: Politics and Exile in Indonesia* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1994), hlm. 130. Bagian mengenai Digoel dalam buku ini (hlm. 128–153) adalah deskripsi terbaik tentang Digoel yang tersedia dalam bahasa Inggris.

mencapai Thursday Island tanpa bantuan polisi Australia. Mereka menetap di sana untuk beberapa lama dan bahkan membuka sebuah rumah potong rambut. Namun suatu hari seorang di antara mereka mengirimkan surat kepada keluarganya di Jawa meminta uang. Akibat dari ini, bukan uang yang datang tetapi seorang agen polisi rahasia yang dikirim dari Jawa. Mereka semua ditangkap oleh polisi Australia dengan bantuan agen polisi rahasia itu, diserahkan kembali kepada polisi Hindia Belanda, dan dikirimkan kembali ke Digoel.<sup>30</sup> Dengan demikian, tak seorang pun berhasil meloloskan diri dari Digoel dalam sejarah keberadaan kamp pembuangan ini. Kebebasan bergerak dan menetap di Digoel adalah palsu. Hal ini berarti bebas untuk hilang ditelan alam, di tengah hutan yang dihuni binatang-binatang pemangsa dan orang Papua yang tak bersahabat dengan mereka.<sup>31</sup>

Tanah Merah terdiri tiga wilayah berbeda yang dipisahkan oleh sungai-sungai kecil: wilayah administratif (*bestuursterrein*) di mana para pejabat sipil tinggal, wilayah militer, dan kamp pembuangan. Untuk melakukan perjalanan ke Tanah Merah, kami ditemani Chalid Salim sebagai pemandu handal. Ia menjadi saksi mata hampir seluruh sejarah Tanah Merah dari bulan Juli 1927 hingga penutupannya tahun 1943 dan mengetahui setiap sudut tempat itu karena berkeliling di sana setiap hari, mencari tempat pembiakan nyamuk anopheles. Dalam memoarnya ia memulai perjalanan ke Tanah Merah dari dermaga di Sungai Digoel.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Salim, *Vijftien Jaar Boven-Digoel*, hlm. 293–304.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 144–145; Tim Penyusun Buku Sejarah Perintis Kemerdekaan Departemen Sosial RI Tahun 1976/1977, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Eks Digoel* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial, 1977), hlm. 75.

<sup>32</sup> Chalid Salim, lahir tahun 1902 di Sumatra Barat dan saudara laki-lakiketua CSI-PSI anti-komunis Hadji Agus Salim, ditangkap di Medan pada bulan Oktober 1927 ketika ia bekerja sebagai editor *Pewarta Deli* dan dibuang ke Digoel bulan Juli 1928. Setelah ditangkap dan dibuang, ia akif di PKI dan SR, sebagai editor organ PKI di Sumatra Barat, *Halilintar Hindia*, dan kemudian pada harian PKI di Surabaya *Proletar* (dibawah pimpinan redaksi Moesso). Salim, *Vijftien Jaar Boven Digoel*, hlm. 27–28.

Dari dermaga terhampar sebuah jalan berkerikil besar, menuju ke bukit. Di sepanjang lintasan sungai, di sisi kanan, terdapat bangunan memanjang bagi "motoris", staf yang dipekerjakan untuk merawat perahu-perahu motor, dan beberapa rumah batu bagi para pegawai sipil rendahan dan staf polisi, semuanya dikelilingi taman-taman berukuran kecil yang terawat rapi di sisi kiri. Lalu, sebuah rumah penginapan baru, pasanggrahan bagi para pelaut, bangunan yang pernah digunakan sebagai rumah klub sipil, *burgersociteit*, tempat pemutaran film-film bisu seperti Tarzan, Tom Mix, dan Douglas Fairbank dalam proyektor sederhana.<sup>33</sup>

Di sebelah kiri rumah penginapan terdapat lapangan tenis bagi sipil dan tentara, lalu "Oranje Park" yang terawat memanjang di sisi lintasan sungai, di taman ini berdiri pula rumah tinggal yang besar dan megah, hampir seperti sebuah istana kecil, tempat tinggal kepala pemerintahan asisten residen tahun 1930-an, dan di sebelahnya ada rumah yang lebih sederhana yang dihuni komandan militer garnisun, seorang tentara berpangkat kapten.

Di sebelah kanan rumah penginapan terdapat sebuah jalan lebar berbatu, dan di sepanjang jalan itu ada stasiun pembangkit listrik, kantor pos, penjara sipil, dan gereja Katholik dengan pusat misinya. Jauh di ujung jalan berbatu itu terdapat lapangan tembak di sisi kanan jalan, dan tanah lapang yang menjadi batas utara kamp pembuangan, tempat di mana sebuah lapangan udara dibangun pada akhir 1930-an.<sup>34</sup>

Di pusat stasiun pembangkit listrik kecil dan kantor telepon dipekerjakan interni, pekerjaan mereka tak terpisahkan dari beroperasinya kantor-kantor itu. Menurut Salim, disiplin di penjara sipil longgar dan santai. Akhir tahun 1930-an ketika ia sedang mengerjakan tugas keliling seperti biasa sebagai pekerja dinas pengendalian malaria, Salim menyaksikan satu atau dua orang agen polisi yang sedang bertugas menjaga penjara duduk

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 123.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 124.

di tikar dan bermain kartu "tjeki" dengan para napi, sementara semua pintu sel penjara terbuka lebar dan seorang polisi lainnya tidur dengan nyenyak. Tak beberapa lama, penjaga memperingatkan semua orang bahwa seorang perwira datang untuk memeriksa. Dalam sekejab tikar digulung dan disingkirkan, para napi kembali ke sel masing-masing, dan ketika perwira tiba dan berjalan sepanjang sel, ia disapa oleh penjaga yang melaporkan dalam suara rutin: "Tak ada hal khusus yang dilaporkan, Tuan."<sup>35</sup>

Jika kita berjalan di atas jalan lebar berbatu yang asli ke arah utara dari persimpangan yang ada rumah penginapan dan stasiun tenaga listrik, kita akan sampai pada sebuah toko kelontong Cina yang lengkap. Pemilik pertamanya, Tan Toey, seorang penjaga toko di Ambon, mendapatkan izin dari pemerintah untuk membuka dua buah toko, satu di wilayah administratif dan satu di kamp pembuangan. Ia mendapatkan keuntungan dari monopoli perdagangan di Digoel dan keindian kembali ke Ambon. Setelah kepulangannya, pemerintah mengundang dua pedagang Cina untuk membuka toko di sana; dengan harapan bahwa kompetisi antara kedua pedagang itu akan menghilangkan monopoli. Satu di antara keduanya, Tan Tjo, yang mewarisi toko-toko Tan Toey, akhirnya membuka sebuah restoran modern dengan sebuah meja bar dan menghidangkan bir dengan es batu.<sup>36</sup>

Di sebelah toko Tan Tjo berderet rumah-rumah kediaman bagi pejabat-pejabat urusan pribumi, dibangun pertama kali tahun 1927 untuk wedana (kepala distrik) dari Sunda, Suria Atmadja, dan asisten wedana dari Minangkabau, Bitek.<sup>37</sup> Lebih jauh lagi di sepanjang jalan berbatu itu terletak kantor administrasi, di mana beberapa interni bekerja bersama dengan kepala pemerintahan lokal, dua pejabat (*commiezen*), sejumlah kecil juru tulis Ambon, wedana, dan asisten wedana. Kasus-kasus

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 125–126.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>37</sup> Kombinasi etnis ini masuk akal bertolak dari fakta bahwa dua kelompok etnis besar dari para interni adalah Jawa Barat dan Sumatra Barat.

krimal disidangkan di bangunan ini juga dengan kepala administratif sebagai hakim; kasus-kasus yang ada kebanyakan tentang pelanggaran-pelanggaran ringan, termasuk urusan wanita, dan kadang-kadang tindak kekerasan. Di gedung ini terdapat sebuah ruangan khusus yang tertutup, Arsip Digoel, tempat catatan tentang para interni yang terus membengkak oleh informasi yang datang terus-menerus dari para mata-mata dan informan yang melaporkan tingkah laku interni, semuanya diklasifikasikan secara sistematis, rapi, dan tersimpan baik.<sup>38</sup>

Di sebelah utara gedung administrasi berdiri sebuah gereja Protestan di tengah padang rumput. Di depan gereja, tepat di mana jalan berbatu berbelok ke arah timur, terdapat rumah satu-satunya dokter di Digoel berdekatan dengan rumah-rumah pejabat sipil dan perwira polisi. Lebih jauh lagi ke arah pedalaman terhampar sebuah ladang rumput, sebelumnya ada ladang buatan dari penebangan hutan yang dimaksudkan untuk menanam padi atas perintah asisten wedana dalam rangka menjadikan Digoel "memenuhi kebutuhan sendiri". Proyek penanaman padi ini gagal. Sawah-sawah buatan dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, tetapi beberapa tahun terakhir para interni menanam sayur-sayuran dan tanaman lain di sana, yang menjadikan Digoel berswasembada sayuran.<sup>39</sup>

Jalan berbatu sclanjutnya menuju pada sebuah tanah lapang luas, mulanya dibuka bagi penerbangan udara tahun 1937. Pada tahun ini sebuah perusahaan tambang, *Nederlandsch Nieuw Guinea*, biasa disebut *Goldmine*, datang ke Digoel untuk menambang emas. Hal ini membawa perubahan pada Tanah Merah dengan memecah "ketenangan mati" yang menyelimuti kehidupan di Digoel selama sepuluh tahun berlalu dan melahirkan peradaban baru. Sebelum waktu ini, satu-satunya jalan bagi interni melihat dunia luar adalah kapal putih, kapal polisi, yang datang ke Tanah Merah sebulan sekali, di tahun 1933, sekali dalam enam pekan. Banyak kapal asing dengan "*Goldmine*". Material dengan jumlah

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 126–127.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 127–128.

yang sangat besar diturunkan di dermaga dan diangkut dengan lori ke tanah-tanah kosong. Sebuah bandara dibangun yang dilengkapi dengan hanggar dan perumahan bagi staf. Perusahaan "Goldmine" juga mendirikan sendiri kantor pos, stasiun radio, dan pemukiman, dihuni sekitar 230 orang, yang terdiri atas para perwira Belanda, pekerja Jawa, dan penduduk Dayak, dipimpin oleh Kapten Becking, penguasa militer pertama di Digoel.

Tetapi eksplorasi tidak berjalan baik. Tahun 1939, dalam jangka waktu kurang dari dua tahun sejak kedatangannya, perusahaan memutuskan untuk keluar. Sebagian besar bangunan dibongkar kembali dan materialnya dibawa pergi. Bandara kembali menjadi padang rumput kosong. Digoel kembali ke dalam kesepian, ketenangan yang mati, sebuah pembuangan di pinggiran kerajaan, di tengah hutan yang belum pernah dijamah. Jumlah penghuni di wilayah administratif kembali menjadi sekitar 120 orang, meskipun beberapa orang Papua secara teratur berada di sana, berkeliaran selama beberapa bulan sebelum kembali ke hutan.<sup>40</sup>

Jika kita mengikuti jalur batu ke arah utara berkebalikan dengan arah ke bandara, kita akan melewati sebuah jembatan kecil untuk mencapai wilayah militer, dan lebih jauh ke utara adalah kamp pembuangan. Kamp militer berada di lokasi strategis, di antara dua sungai kecil, satu sungai memisahkannya dari wilayah administratif dan satunya dari wilayah pembuangan. Seorang interni yang bepergian ke wilayah administratif harus menunjukkan surat izin kepada penjaga bersenjata di pintu masuk kamp militer. Seluruh kamp militer, disebut tangsi, dikelilingi kawat berduri dan dijaga dengan menara pengawas pada setiap sudutnya. Seperti dituliskan Salim, kamp militer, lebih dari kamp pembuangan, tampak seperti kamp konsentrasi.<sup>41</sup> Ungkapan ini benar untuk alasan yang berbeda. Seperti dinyatakan secara tegas dalam laporan pemerintah tahun 1928, wilayah militer dikelilingi kawat berduri untuk melindungi

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 129–131.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 132–133 dan 144.

tentara dan para napi pekerja dari propaganda interni "ekstremis" dan mencegah kontak yang tak diinginkan antara interni dan mereka yang tinggal di wilayah militer dan wilayah administratif.<sup>42</sup>

Di kamp militer terdapat barak-barak militer, kantor komandan garnisun, bangsal orang sakit, gudang amunisi, stasiun radio, kantin, penjara, dapur umum, asrama wanita, dan lapangan kecil untuk berolahraga. Fasilitas-fasilitas asli kamp ini dibangun secara tergesa-gesa tahun 1927, terdiri dari kayu dan alang-alang. Tahun 1934, Gubernur Jenderal de Jonge memutuskan untuk mengubah kamp menjadi semi-permanen, di luar fakta bahwa ia dengan panik menuntut anggaran belanja pemerintah di berbagai sektor dan tempat untuk menyesuaikan dengan krisis keuangan yang diakibatkan oleh Depresi Besar. Meskipun keputusannya mempertahankan Digoel tak diketahui para interni, mereka bisa merasakan dari renovasi kamp militer untuk bisa memahami bahwa kamp pembuangan telah dibuat menjadi semi-permanen oleh pemerintah.<sup>43</sup>

Garnisun militer mula-mula hanya terdiri dari lima rumah dan selanjutnya menjadi tujuh peleton infanteri, setiap peleton terdiri 16 hingga 20 personel di bawah komando seorang tentara Eropa atau pribumi berpangkat sersan. Misi mereka menjaga keamanan dan tatanan di Tanah Merah, melakukan tugas penjagaan secara periodik di Tanah Tinggi, dan melakukan patroli ke seluruh wilayah Digoel. Seperti di tempat lain di Hindia Belanda, keluarga para tentara juga tinggal di kamp, di barak-barak yang terpisah; sehingga pejabat non-komisi Eropa dan pribumi, tentara, istri dan anak mereka, dan napi pekerja membentuk sebuah dunia kecil mereka di dalam garnisun, terpisah dari seluruh kehidupan Digoel.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> "Overzicht van de Inwendigen Politieken Toestand (1924-15 April 1928)," dalam *Mededeelingen der Regeering* (Mei 1928), hlm. 13.

<sup>43</sup> Salim, *Vijftien Jaar Boven-Digoel*, hlm. 133-134.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

Melewati kamp militer dan menyeberangi sebuah jembatan di atas sungai kecil, jalan berbatu paling lebar menembus kamp pembuangan, membaginya menjadi dua bagian. Jika seseorang masuki kamp, gedung pertama di sisi kiri adalah klinik kecil bagi interni, Rumah Sakit Wilhelmina. Di sepanjang jalan utama itu terletak kampung A, B, dan berbatasan dengan hutandi utara, kampung C, terletak di sisi kiri jalan dan membekangi Sungai Digoel.

Di awal-awal para interni hidup terpisah, terkotak-kotak menurut etnis. Di ujung utara kamp, di tepi sungai, adalah kampung Ujung Sumatra, yang penghuninya mayoritas etnis Minangkabau. Etnis Aceh dan Lampung menetap terpisah. Orang-orang dari Jawa—etnis Madura, Jawa, dan Sunda—berkumpul di pemukiman sendiri. Orang Banten, sebagian besar mereka yang turut dalam pemberontakan tahun 1926 di Banten, membentuk sebuah kelompok terpisah. Konflik sering terjadi antara orang Jawa dan Sumatra. Orang Sumatra menganggap hal yang bodoh menyaksikan seorang pejabat interni Jawa ketika bepergian selalu diikuti seorang interni yang memayunginya. Mereka juga mengejek seni Jawa, tembang, tandak, wayang, dan ketoprak, sebagai seni feudal. Bagaimanapun, karena waktu dan semakin banyak interni generasi awal dipulangkan, perbedaan etnis menjadi kurang berperan dalam pola huni.<sup>45</sup>

Sebuah gedung kongres, congresgebouw, yang terletak di sisi kanan jalan utama, digunakan sebagai gedung teater untuk memutar film dan sebagai tempat berkumpul pada acara-acara festival. Pada tahun-tahun kemudian, ketika para interni menjadi apatis dan mengalami kemerosotan moral karena isolasi berkepanjangan, gedung ini tak difungsikan dan dibiarkan rusak.

Rumah-rumah di Digoel dibangun relatif bagus, dibuat dari kayu dan atap seng, sebagian berdinding dan lantai dari semen. Seorang interni dari Jepara bahkan mendekorasi rumahnya dengan kayu berukir yang bagus. Sekolah terletak di Kampung

<sup>45</sup> Salim, *Vijftien Jaar Boven-Digoel*, hlm. 225–226.

B, di mana para guru interni mengajar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Salim melukiskan mendengarkan siswa sekolah menyanyikan “*merry, balada tipikal Belanda*” sambil berdiri di muka kelas di hadapan para siswa.<sup>46</sup>

Kantor utama administrasi kampung berada di Kampung B. Pemerintahan kampung ini dipimpin oleh Gondojoewono, kemudian Boedisoetjito. Kampung ini memiliki satuan polisi sendiri, yang bernama ROB (*Rust en Orde Bewaarders*), yang berarti Penjaga Ketertiban dan Tatanan. ROB bekerja sama dengan pemerintah lokal dan satuan polisi pemerintah lokal. Tahun-tahun pertama satuan polisi ini dipimpin oleh Soeprapto dari Salatiga.<sup>47</sup>

Sebuah masjid kecil dibangun tahun 1928, berada di Kampung C. Tak berapa lama setelah kehadirannya, Haroenrasjid dan Ahmad Dasoeiki, keduanya murid Haji Misbach dan bekas ketua Gerakan Komunis Islam Mu'alimin di Solo, mendirikan Komite Masjid (*Comite Masigit*), dengan maksud membuka sebuah seksi di dekat hutan dan mendirikan sebuah masjid. Natar Zainoedin, Haji Datoek Batoeah, Haji Ahmad Hatib, dan pemimpin lain dari Sumatra Barat dan Banten mendirikan asosiasi lain, Asosiasi Al Islam dan mendukung komite masjid. Dalam tulisan Marco, “AIV (Al Islamvereeniging) adalah asosiasi untuk mempersatukan Muslim dan CM (Comite Masigit) menjadi komite eksekutifnya”. Pemerintah lokal selanjutnya bermaksud mendanai sebagian proyek, menciptakan isu yang menyebar di kalangan Muslim. Asosiasi Islam terpecah dan selanjutnya dibubarkan. Tetapi minoritas terus beroperasi, menerima subsidi pemerintah, dan membangun sebuah masjid. Pemimpinnya selanjutnya ditunjuk sebagai pejabat pemerintah, tulis Marco dengan nada menghina. Haroenrasjid menjadi penghulu masjid. Haji Emed menjadi tukang, yang bertugas

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 137–139.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 139; Verslaggever Boven Digoel (Marco), “Riwayat Boven Digoel (I),” *Persatuan Indonesia*, 15 November 1929, No. 33; Tim Penyusun Pembuatan Buku Sejarah Kemerdekaan, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digit*, hlm. 75.

menyumpah interni yang bekerja sebagai pejahan pemerintah, dan Ahmad Dasoeki menjadi anggota ROB.<sup>48</sup>

Tak jauh dari masjid terdapat sebuah lapangan tenis yang dibangun oleh Boedisoetjitro untuk dipamerkan pada pejabat Belanda yang datang berkunjung, tetapi tidak pernah digunakan. Di sepanjang jalan utama terdapat sejumlah toko yang dikelola Cina. Toko terbesar di kampung dikelola oleh Tan Toey dan kemudian Tan Tjo, tetapi ada pula toko-toko yang lebih kecil, warung, dan studio photo yang dimiliki interni. Kata-kata dalam bahasa Inggris sering kali digunakan untuk papan nama seperti *English Teacher, Barbershop, Hairdresser, dan Laundress.*<sup>49</sup>

Di waktu malam orang-orang berkumpul di depan rumah-rumah mereka, menikmati udara malam yang dingin dan merokok klobot. Suara gitar, mandolin, dan kadang-kadang biola terdengar. Rumah Salim berada di Kampung B. Rumah ini terdiri sebuah teras depan yang kecil dan sebuah kamar tamu dan kamar tidur berukuran kecil di dalamnya. Di teras terdapat sebuah kursi rotan, sebuah meja kecil dengan dua tempat duduk di ruang yang sama, dan sebuah dipan tidur tertutup kelambu warna merah-putih-biru, kelambu penjaga nyamuk dengan warna Belanda. Air minum didapat dari sumur dekat rumah, tetapi di musim kemarau seseorang harus pergi ke sungai untuk mandi. Di malam hari, kenang Salim, ia membaca buku di bawah penerangan lampu minyak. Ia membeli buku-buku dari lelang berkala milik pejabat sipil dan militer yang habis masa dirias. Ia juga mendapatkan keuntungan dari kehadiran Hatta, karena Hatta ke Tanah Merah membawa serta bersamanya lima belas peti berisi buku-buku.<sup>50</sup>

Lelang merupakan sebuah peristiwa besar bagi para interni di Tanah Merah, seperti di tempat lain di Hindia Belanda. Lelang selalu diselenggarakan di malam hari. Setelah sehari kerja, para

<sup>48</sup> Verslagger Boven-Digoel ((Marco), "Riwayat Boven Digoel (iv)," *Persatoean Indonesia*, No. 36, 1 Januari 19930.

<sup>49</sup> Salim, *Vijftien Jaar Boven-Digoel*, hlm. 140.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

interni, berpakaian sebagus mungkin, pergi ke kawasan administratif dan militer secara bergerombol. Pada kesempatan seperti ini mereka tidak harus menunjukkan kartu pas pada tentara yang menjaga pintu masuk. Minuman dihidangkan. Cerutu dan rokok dibagikan. Gramaphon dimainkan. Dan para tamu selalu tampil riang dan bersahabat.<sup>51</sup>

Acara lain yang besar bagi interni adalah ulang tahun Ratu Wilhelmina. "Oranje House" merupakan simbol kerajaan, dan pada hari-hari itu foto-foto ratu digantungkan di seluruh Hindia Belanda, di gedung-gedung pemerintahan dan bisnis, di rumah-rumah semua orang Eropa, Cina, dan pribumi, dan di banyak pendopo rumah-rumah kepala desa di pedesaan. Demikian juga dengan fotonya di Digoel. Pada hari ulang tahun ratu sebuah delegasi berkunjung ke rumah asisten residen di pagi hari untuk menyampaikan selamat atas nama seluruh interni. Sebuah pertandingan sepakbola diselenggarakan di sorg harinya, dan di malam hari orang-orang berpakaian oranje mengorganisir sebuah prosesi obor dan pergi ke klub-klub sipil (*burgersocieteit*), untuk menyaksikan pertunjukan. Dalam festival-festival Oranje di Tanah Merah tidak sedikit kaum naturalis yang menolak bekerja sama dengan pemerintah, juga turut berpartisipasi bersama dengan mereka yang mau bekerja dengan pemerintah.<sup>52</sup>

Para interni membuat banyak asosiasi: klub opera "Orient", grup musik dan opera "Liberty", teater Sunda Kebinangkitan Pasoendan, grup ketoprak dan wayang orang Jawa, Langen Oedo Matojo, dipimpin seorang interni asal Solo, dan grup kerconcong dipimpin oleh Samsoedin Katjamata dan Mohammad Jasin asal Medan. Klub paling penting, yang bertahan hidup hingga hari terakhir Digoel, adalah Asosiasi Seni dan Olahraga Digoel (*Kunst en Sportvereeniging Digoel*). Asosiasi ini didirikan tahun 1928 di bawah kepemimpinan Winanta. Masuk dalam asosiasi ini adalah grup jazz Abdul Xarim dan Konser Digoel.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 141–142.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 231–233.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 237–238; *Ver slaggever Boven-Digoel* (Marco), "Riwajat Boven Digoel (IV)," *Persatuan Indonesia*, no. 36, 1 Januari 1930; Tim Penyusun Pembuatan Buku

Di ujung utara jalan utama, berbatasan dengan hutan, terdapat sisa-sisa Kampung Ujung Sumatra yang lama terbengkelai tepat di tepi sungai, dan disebelahnya, tanah makam yang terawat baik hingga hari penutupan kamp. Mereka yang meninggal di Tanah Tinggi, termasuk Marco dan Aliarcham, juga dimakamkan di sini. Sebagian besar dari mereka meninggal karena malaria.<sup>54</sup>

Di dekat pemakaman ini jalan berbelok ke timur. Di sepanjang wilayah ini adalah sisa-sisa Kampung D, E, F, dan G, yang sebelum akhir 1930-an telah terkubur semak-semak dan kembali dikuasai alam. Pemukiman ini ditinggalkan penghuninya satu per satu sejak awal 1930-an ketika para intern mendapatkan pembebasan bertahap dan penduduk kamp pembuangan menyusut dari angka tertinggi 2.100 di tahun 1929 menjadi kurang dari 1.000 pada pertengahan tahun 1930-an. Penduduk kamp pembuangan di akhir 1939 seluruhnya adalah 580 orang, 355 pria, 66 wanita, dan 159 anak-anak.<sup>55</sup>

## Dunia Hantu Digoel

Demikianlah hidup di Digoel, tidak mudah, tetapi kehidupan seperti apa adanya, kehidupan sosial dan keluarga dengan kebahagiaan-kebahagiaan sederhana dan kekacauan-kekacauan kecil. Digoel, dengan istana kecil Oranje Park, garnisun militer, dan pemukiman penduduk asli, tampak seperti kota kecil lain di Hindia Belanda, bahkan seperti Buitenzorg kecil. Namun kehidupan di Digoel adalah kehidupan yang ganjil. Kehidupan yang "normalitas ganjil" inilah, meminjam ungkapan Rudolf Mrazek, yang bisa diidentifikasi sebagai ciri utama Digoel.<sup>56</sup>

*Sejarah Perintis Kemerdekaan, Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digoel*, hlm. 84.

<sup>54</sup> Salim, *Vijftien Jaar Boven-Digoel*, hlm. 142.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>56</sup> Lihat Mrazek, *Sjajirir*, hlm. 141.

Untuk memahami keganjilan kehidupan di Digoel kita cukup mengambil ilustrasi dari Chalid Salim, yang sekaligus menjadi perintah kita memahami Tanah Merah. Ilustrasi Salim telah meninggalkan gambaran kuat tentang keganjilan hidup di Digoel yang sekaligus mengingatkan kita pada karya Garcia Marques, *One Hundred Years of Solitude*. Salim adalah seorang pemuda terpelajar yang cerdas berusia pertengahan 20-an ketika dikirim ke Digoel tahun 1927. Ia bekerja pada dinas pengendalian malaria, mencari tempat-tempat pembiakan anopheles—nyamuk pembawa malaria—dengan jadwal kerja sehari masuk dan sehari libur, bergerak dari satu kubangan air ke kubangan air berikutnya, dari satu penampung air ke penampung air berikutnya, selama 15 tahun. Ini tentu saja bukan sesuatu yang ingin dilakukannya dalam hidupnya—ia barangkali ingin menjadi seorang jurnalis—tetapi ia bersedia melakukannya karena ini caranya menjaga kewarasan jiwanya selama hidup di Digoel dan mendisiplinkan diri sendiri baik fisik maupun mental. Ia sepenuhnya sadar bahwa kerja sama yang ditunjukannya barangkali memperbesar kesempatannya untuk dibebaskan dari Digoel, namun pada saat bersamaan, ia tak bisa menghibur diri dengan harapan pasti untuk dibebaskan karena hal itu justru membuat hidupnya di Digoel menjadi semakin tak tertanggungkan. Salim bukanlah satu-satunya interni yang mengalami nasib demikian. Para interni berada di Digoel dengan kehendak tidak berada di sana. Mereka ingin pulang pada suatu hari nanti. Selama berada di Digoel mereka menekan harapan-harapan mereka untuk tidak berada di sana sebagai isyarat bahwa mereka tidak menyerah dan untuk menunjukkan kepada mereka sendiri bahwa mereka tidak menyerah sesuatu yang membuat hidup mereka berharga.

Keganjilan ini tak hanya psikologis, tetapi sangat terlembaga. Salim berbicara tentang serangkaian kategori yang menentukan secara struktural kehidupan interni di Digoel. Kehidupan yang terstruktur ini di Tanah Merah terdiri empat kategori utama.

Yang pertama *de werkwilliger*, mereka yang mau bekerja. Para interni yang masuk dalam kategori ini bekerja pada beragam pekerjaan, sebagai kepala kampung dan juru tulis pada kantor pemerintah, perawat di rumah sakit, pekerja dinas pengendali malaria, juru tulis dan kuli di gudang pelabuhan, pekerja teknik di pusat tenaga listrik dan kantor telepon, dan pekerja kasar di sawah-sawah. Seluruh kategori pekerjaan ini digaji oleh pemerintah. Merckya yang mendapatkan gaji terendah adalah pekerja di sawah, gaji mereka 40 sen sehari, sekitar f10.50 sebulan, untuk pekerjaan yang dimulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 13.00 siang. Juru tulis dan pekerja teknik mendapatkan bayaran lebih baik, gaji bulanan berkisar f18.75 hingga f30, dan gaji tertinggi didapat juru tulis pada kantor pemerintah yang mendapatkan f90 sebulan. Mayoritas interni bersedia bekerja untuk pemerintah karena sejak awal merckya yakin—and keyakinan mereka ini makin kuat setelah kunjungan Hillen—bahwa dengan demikian akan meningkatkan kesempatan merckya untuk dibebaskan dari Digoel.<sup>57</sup>

Kategori kedua, interni yang memiliki kesempatan paling kecil untuk dibebaskan adalah *de eigenwerkzoekenden*, pekerja mandiri—terdiri nelayan, petani sayur-mayur, pemilik toko kelontong dan warung, tukang pangkas rambut, pembuat roti, tukang jahit, pembuat sepatu, fotografer, guru kursus swasta. Mereka menerima jatah makan, 18 kilogram beras per bulan, hingga mereka mampu menghidupi diri sendiri. Kategori ketiga adalah *de steuntrekkers*, pencrima bantuan atau mereka yang invalid, orang dengan penyakit kronis serius seperti malaria dan tuberkolosis, penderita gangguan kejiwaan atau mereka yang menjadi gila karena isolasi yang lama.

Kategori terakhir adalah *de naturalisten*, kaum naturalis, disebutkan demikian karena mereka menolak bekerja apa pun untuk pemerintah dan menerima jatah makanan gratis dalam bentuk barang (*in natura*) dari pemerintah. Karena penguasa lokal memandang mereka sebagai “ kaum ekstremis” yang tak

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 217–218.

# **Bagian Pertama**

## **DUNIA HANTU DIGOEL**

---

---

**T**ahun-tahun terakhir kekuasaan imperialis sesudah pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa tahun 1926, rezim kolonial Hindia Belanda menbangun sebuah kamp pembuangan massal yang kurang mendapatkan perhatian, Boven Digoel, di pedalaman Papua yang penuh nyamuk malaria di pinggiran wilayah Hindia Belanda untuk memaksa para interniran hidup normal di bawah kondisi yang tidak normal.<sup>1</sup> Boven Digoel (Tanah Tinggi Digoel), disebut demikian karena terletak di dataran tinggi Sungai Digoel. Boven Digoel bukanlah sebuah koloni narapidana. Seperti dijelaskan oleh pemerintah Hindia Belanda, pembuangan bukanlah sanksi yang dijatuhkan melalui proses hukum (*penal sanction*) melainkan tindakan administratif, ditetapkan oleh kewenangan istimewa gubernur jenderal, *exorbitant rechien*, yang bisa menentukan para interni hidup di tempat tertentu.

Pengasingan (dalam hal ini pembuangan keluar), adalah sebuah praktik yang telah lama berlangsung di negara jajahan Hindia Belanda. Di abad dua puluh sendiri, Soerantiko Samin, orang Jawa Tengah dan pendiri agama Adam, dibuang ke

---

<sup>1</sup> Judul esai ini diambil dari Hannah Arendt's "The Phantom World of Dark Continent" dalam karya klasiknya *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harvest Book, edisi baru, 1955), hlm. 186.

Klasifikasi ini, yang diakui baik oleh pemerintah maupun interni, telah ada sejak awal sejarah Digoel. Ketika kamp masih dalam tahap pembangunannya, orang pertama yang berkuasa, Kapten Administratur Becking, dibekali banyak kekuasaan yang mencakup, di antaranya, kewenangan memeriksa para interni, memerintahkan apel pagi, dan mengharuskan setiap interni melakukan kerja di bawah pengawasan setiap hari dengan bayaran f31.50 sebulan. Namun, menyusul kunjungan Gubernur Maluku bulan Juli 1927 ketentuan-ketentuan ini diubah, barangkali untuk menjaga "tindakan-tindakan khusus" hingga tingkat minimum, menurut instruksi de Graeff secara lebih ketat. Dalam aturan baru yang diberlakukan hingga kamp ditutup, para interni diperbolehkan memilih bekerja untuk pemerintah atau tidak; setiap interni diberi tunjangan f0,72 sehari dalam bentuk bahan pangan; dan hanya mereka yang bersedia bekerja untuk pemerintah mendapatkan bayaran tambahan f0,30 perhari dalam bentuk uang tunai.<sup>60</sup> Dua kategori, mereka yang mau bekerja dan mereka yang tidak mau bekerja, dan dua kategori tambahan, pekerja mandiri dan *invalid*, merupakan akibat langsung dari aturan tersebut.

Bagaimanapun, aturan baru ini ditentang oleh interni. Di bawah pimpinan beberapa bekas ketua PKI, sebuah dewan kampung (*kampung raad*) dibentuk di setiap kampung dan sebagai badan sentralnya, dibentuk CRD (*Central Raad Digoel*) atau Dewan Sentral Digoel, dibentuk oleh perwakilan dewan kampung. Sardjono, bekas ketua PKI, menjadi ketua dan Soemantri, bekas ketua PKI Semarang, sebagai kepala eksekutif. Marco menulis dalam laporannya, yang diselundupkan keluar tahun 1929 dan diterbitkan dalam organ PNI Persatoean Indonesia di akhir 1929 dan awal 1930, dengan kata-kata seperti ini:

---

Sjahrir, *Out of Exile*, terjemahan dengan pengantar dari Charles Wolf, Jr. (New York: The John Day Company, 1949), hlm. 53–54.

\* Verslagger Boven Digoel (Marco), "Riwayat Boven Digoel (IV)," *Persatoean Indonesia*, 1 Januari 1930; Salim, *Vijfien Jaar Boven Digoel*, hlm. 237.

Ketika Kontrolir Monsju menggantikan Kapten Becking sebagai *gezaghebber* (administrator) (November 1927), CRD dan Dewan Kampung menuntut: 1. Beri kami tunjangan yang mencukupi; 2. Beri kami alat-alat kerja yang memadai.

Itulah tuntutan rakyat. Mereka sendiri bisa mengelola Digoel. Satu-satunya tugas pemerintah adalah menyediakan anggarannya; dokter bertanggung jawab atas kesehatan. Untuk urusan domestik kami membentuk pejabat sendiri. Untuk sekolah-sekolah pemerintah cukup hanya menyediakan subsidi. Pada waktu itu rakyat mengerti dan tidak menginginkan tunjangan permanen, tetapi ingin hidup sebagai orang merdeka. Sikap mereka adalah tidak ingin menjadi kaum buruh apa saja

Maksud baik mereka selalu dihalangi dari dalam dan dari mana saja seperti dari Koperasi CD (Koperasi Digoel), Dinas Keamanan Swasta (*Particuliere Veiligheids Dienst/PVD*) dan sebagainya...<sup>61</sup>

Jika kita meminjam ungkapan Abdoel Xarim, CRD dan dewan-dewan kampung ingin menciptakan "Australia Baru - Amerika Baru", sebuah koloni orang merdeka, di Digoel.<sup>62</sup> Tetapi tidak semua interni mendukung CRD, sebagaimana dilaporkan oleh Marco. Banyak anggota *werkwillinger* merasa terancam karena berada di bawah tekanan untuk bergabung dengan CRD dan sebuah dewan kampung tetapi takut hal itu bisa merusak kesempatan mereka mendapatkan pembebasan. R.M. Gondojoewono, bekas anggota komite sentral PKI, selanjutnya membentuk kesatuan pengamanan, PVD, dan menyerukan kerja sama dengan pemerintah.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Verslagger Boven Digoel (Marco), "Riwayat Boven Digoel (III)," *Persatuan Indonesia*, 15 Desember 1929.

<sup>62</sup> Abdoel Xarim M.S., *Pandoe Anak Boeangan* (Medan: Uitgevers Genootschap "Aneka", 1333), hlm. 4.

<sup>63</sup> Gondojoewono, keturunan pangeran Jawa pemberontak dari abad dua puluh, Diponegoro, adalah anggota terkemuka PKI Ternate, Maluku, anggota komite sentral partai dari 1923 hingga 1926, dan ketua serikat pekerja pelabuhan tahun 1924. Menurut Djamarloedin Tamin, ia mengubah Mocoso dan Alimin pada komunisme di penjara Tjipinang tahun 1923. Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 155, 183, 424, 426, dan 461.

Tanggal 1 Mei 1928 Kontrolir Monsjou memutuskan untuk menghancurkan CRD dan dewan-dewan kampung. Marco kembali menulis:

Orang-orang yang bisa memajukan Digoel tanpa bergantung pada kekuasaan pemerintah ditangkap dan sekarang berada di pengasingan karena fitnahan... oleh orang-orang yang bersiap mengembangkan Digoel sementara bergantung pada kekuasaan pemerintah dan menjilat sehingga mereka segera kembali ke tempatnya yang lama dikembalikan oleh pemerintah.<sup>64</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Marco, para pemimpin CRD dan dewan kampung seperti Sardjono Soeinantri, Boedisoetjito, Aliarchain, Dahlan dan Marco sendiri, ditangkap dan dikirim ke kamp pengasingan sementara, Gudang Arang, di sebelah selatan Tanah Merah. Tempat ini juga masih menungkinkan bagi interni untuk menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah. Pada suatu hari di bulan Maret 1929, Gubernur Maluku, atasan Monsjou, mengadakan perjalanan inspeksi menuju Tanah Merah. Ketika kapal yang ditumpanginya mendekati Gudang Arang, para interni yang ada di sana berdiri berjejer di tepi sungai, dengan punggung menghadap sungai, celana sengaja diturunkan, dan memberi sambutan gubernur dengan pantat telanjang. Tindakan mereka ini dianggap telah keterlaluan. Tak lama sesudah insiden ini, para interni Gudang Arang dipindahkan ke Tanah Tinggi, 40 kilometer dari Tanah Merah ke arah hulu dan praktis tak terlihat.<sup>65</sup>

Dengan dihancurnya CRD, tulang punggung perlawanan interni hancur pula. "Sebuah pemerintahan kampung yang normal" segera dibentuk dan ketua-ketua kampung yang baru ditangkap oleh pemerintah dari kalangan kaum kooperasionis: Gondojoewono, Hamid Soetan, Soehirman, Daris, dan Soeprapto masing-masing sebagai ketua Kampung

<sup>64</sup> Verslaggever Boven Digoel (Marco), "Riwajat Boven Digoel IV," *Persatuan Indonesia*, 1 Januari 130.

<sup>65</sup> Salim, *Vijftien Jaar Boven Digoel*, hlm. 269–270.

A, B, C, D, dan E PVD, yang dibentuk Gondojoewono, diubah menjadi ROD, Penjaga Ketenangan dan Tatanan, dan di bawah komando kepala-kepala kampung. ROD menempatkan interni, terutama para naturalis, dalam pengawasan ketat dan memberikan informasi kepada pemerintah tentang para pembuat keonaran yang potensial, *onverzoenlijken*, agar mereka ditangkap dan dibuang kembali pada kamp pembuangan kedua di Tanah Tinggi.<sup>66</sup>

Dari perspektif pemerintah, yang terpenting dari keseluruhan hal ini adalah bagaimana mencrapkan regulasi baru dan mengenalkan “pemerintahan desa yang normal” di kamp penibuangan. Di mata pemerintah, mereka yang inenentang upaya-upaya pemerintah adalah *onverzoenlijken*. Dari perspektif Marco, persoalannya adalah bagaimana menciptakan ruang bagi hidup merdeka para interni di Digoel, dan musuh-musuh mereka terutama adalah mereka yang bekerja sama dengan pemerintah, penjilatpemerintah, dan pemfitnah mereka. Bagaimanapun, garis pemisah yang sama bisa ditarik di antara mereka yang *onverzoenlijken* (orang yang memegang prinsip) dan mereka yang *werkwillingers* (*penjilat*, *pemfitnah*). Kategori *onverzoenlijken*, mereka yang keras kepala—and kamp pembuangan kedua yang diperuntukkan bagi mereka interni Tanah Merah yang masuk dalam kategori ini—adalah hal-hal yang tak terpisahkan dalam mengenalkan “normalitas” di Tanah Merah. Sebagaimana Digocl dibentuk untuk mengamankan politik di Hindia Belanda dan membuat tatatan kolonial normal, demikian pula Tanah Tinggi dibutuhkan untuk mengamankan Tanah Merah dan membuat tatanan normal.

Karenanya, mentalitas yang sangat berbeda mendominasi kehidupan di kedua kamp pembuangan ini. Di Tanah Merah

<sup>66</sup> Ungkapan ini, pemerintahan kampung yang normal (een normal dorpsbestuur) adalah dari “Overzicht van de Inwendigen Politieken Toestand (1924–15 April 1928),” dalam *Mededeelingen der Regeering* (Mei 1928), hlm. 15. Lihat pula *Verslagger Boven Digoel* (Marco), “Riwayat Boven Digoel (IV), Persaldoen Indonesia, 1 Januari 1930. Pernyataan Ongko dan Nunut bisa didapatl dalam Sudyono, PKI-Sibar, hlm. 68–69, 92–93.

mereka yang mau bekerja merupakan bagian mayoritas. Mereka sangat berharap dibebaskan dari Digoel. Semakin baik mereka bertingkah laku dan semakin baik mereka bekerja sama dengan pemerintah, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk pulang. Harapan-harapan mereka ini bertemu dengan kemauan pemerintah. Setelah kunjungan Hillen, mereka yang berjasa menormalkan kehidupan di Tanah Merah, di antaranya Gondojoewono, Socprodjo, dan Soeprapto, dibebaskan di awal 1931. Boedisoetjito, yang memohon ampun kepada pemerintah ketika berada di Tanah Tinggi, dikembalikan ke Tanah Merah dan menggantikan Gondojoewono sebagai kepala kampung di tahun 1931. Dalam beberapa tahun kemudian ia juga dipulangkan.<sup>67</sup>

Kehidupan di Tanah Merah dari hari ke hari setelah kunjungan Hillen selanjutnya berpusat pada saat-saat tegang ketika nama-nama mereka yang dibebaskan dicantumkan di papan yang dipajang di depan kantor administrasi kampung. Ketika daftar ditempel, banyak interni berkumpul di sekeliling papan pengumuman untuk membacanya. Kadang-kadang suara teriakan kegirangan terdengar, tetapi banyak lagi yang pulang ke rumah dengan kecewa, merasa telah "dilupakan" dan menanti saat tegang berikutnya beberapa bulan lagi.<sup>68</sup>

Mentalitas interni di Tanah Tinggi berbeda. Ini tempat bagi para *onverzoenlijken* atau seperti diungkapkan Salim secara lebih netral, mereka yang nekad, berkemauan baja, berprinsip, keras kepala, dan tak mau menyerah. Mereka menekan harapan untuk pulang dan bertahan dalam kehidupan yang buruk untuk tidak menyerah. Kecuali jatah makanan rutin yang disediakan pemerintah, mereka mengurus seluruh kebutuhannya sendiri. Pada tahun 1930 terdapat 115 penghuni di Tanah Tinggi, 70 interni dan 45 anggota keluarga. Rumah-rumah di Tanah Tinggi, seluruhnya 43 buah, dibangun "di tempat-tempat yang mereka pilih sendiri, terpisah satu sama lain, di hutan, dikelilingi oleh

<sup>67</sup> Pernyataan Wiro S. Wiardjo, bisa didapati dalam Sudyono, PKI-Siber, hlm. 73.

<sup>68</sup> Salim, Vijftien Jaar Boven-Digoel, hlm. 254.

taman-taman yang tak terawat". Satu-satunya jalan di sana adalah sebuah jalan yang dibangun oleh pemerintah, sebuah jalan masuk kecil menuju Tanah Tinggi, dan karena interni menolak membangun jalan sendiri, maka tak ada jalan setapak yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Seorang pejabat pemerintah yang dikirim dari Tanah Merah tinggal di sebuah rumah sederhana sekadar bisa melihat para interni, tetapi para interni sengaja menutup diri dari pejabat yang berkunjung kecuali saat menerima jatah makan dua kali seminggu.<sup>69</sup>

Ketika Hillen mengunjungi Tanah Tinggi, ia berkesempatan berdialog dengan Najoan, seorang bekas ketua Serikat Kereta Api, VSTP, dan anggota PKI sejak masa ISDV (*Indische Sociaal-Democratische Vereeniging*, Asosiasi Sosial-Demokrat Hindia Belanda). Hillen menulis:

Najoan yang terkenal jagoan berkata: "Kehidupan sangat sepi di sini (*Het is daar wel rustig wonen*)."<sup>70</sup> Orang ini pernah hidup di banyak tempat di kepulauan dalam berbagai pekerjaan dan juga telah mengunjungi Belanda. Kini ia mendapati kehidupan "sangat sepi" di Tanah Tinggi. Ini memperlihatkan kejiwaan yang abnormal, dan barangkali terdapat beragam tingkat gangguan kejiwaan di antara para *onverzoenlijken*.... Apa pun yang menimpa mereka, para penghuni di Tanah Tinggi sama sekali tidak memikirkan saat untuk pulang kembali ke masyarakat bebas.<sup>71</sup>

Tak bisa dihindarkan, Hillen menduga bahwa Najoan, yang akhirnya hilang di hutan lebat tahun 1942 dalam percobaan kecimpung terakhir untuk melarikan diri, telah gila. Barangkali ia menduga bahwa Najoan dan kawan-kawannya sesama terhukum telah dikuasai oleh alam dan telah menjadi sekadar bagian alam. Tak dapat dibantah bahwa alam merupakan penguasa yang terutama di Tanah Tinggi. Hillen pasti telah merasa bahwa para intemi tak mungkin bisa menciptakan sebuah dunia manusia, sebuah realitas manusia, di sana sehingga alam

<sup>69</sup> "Rapport Hillen" dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: 1928–Agustus 1930*, hlm. 467–468.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 470.

tetap menjadi satu-satunya realitas paling menentukan. Mereka yang dibuang di Tanah Tinggi, dalam pandangan Hillen, telah merosot menjadi makhluk alam yang tak lagi memiliki karakter manusia yang khas, tidak terlalu berbeda dengan tetangganya orang Papua, meskipun tanpa kebebasan dan tak berdosa. Mereka mempertahankan realitas kemanusiaan seperti hantu di dunia hantu Digoel.<sup>71</sup>

Para interni di Tanah Tinggi terbagi ke dalam tiga "klik" pada pertengahan 1930-an. Terdapat orang-orang yang terus melihat Aliarcham sebagai pemimpin mereka, sebuah teladan yang harus diikuti tentang seorang komunis yang seharusnya, jauh setelah kematiannya tahun 1931. Kelompok lain dipimpin oleh Sardjono, Ngadiman, dan Wmanta, yang membangun kader komunis mereka sendiri di dunia hantu ini. Kelompok ketiga dipimpin oleh tiga kader PKI yang kembali dari Moskow, "Hadji Moskow", Waworoentoe, Daniel Karnoe dan Clementi Wentoeck, yang sangat bangga dengan pelatihan yang didapatnya di Moskow dan bersikeras bahwa semua buku tentang komunis, selain yang diterbitkan di Rusia adalah palsu. Tahun 1935 tiga kelompok ini bertemu, dan setelah diskusi yang panjang, mereka menyepakati "konvensi anti pen-Digoel-an", yang intinya bersepakat untuk tidak menyerah. Namun Sardjono mengakhiri sikap kerasnya tahun 1937, dan berargumentasi bahwa "tujuan membekalkan cara" sehingga ia dan kelompoknya meminta dipindahkan ke Tanah Merah. Kelompok "Hadji Moskow" mengikuti langkah ini tak lama kemudian. Tinggalah di Tanah Tinggi hanya mereka "pengikut sejati Aliarcham", jumlah seluruhnya 25 orang yang berhasil bertahan hingga penutupan kamp tahun 1943, pada waktu itu mereka dievakuasi ke Australia.<sup>72</sup>

Dengan demikian seharusnya jelas bahwa Digoel dengan normalitas ganjilnya merupakan metafor bagi Hindia Belanda.

<sup>71</sup> Lihat dalam hubungan ini Arend, *The Origins of Totalitarianism*, hlm. 192.

<sup>72</sup> Pernyataan Wiro S. Miardja dan Nurut, dalam Sudyono, *PKI-Siber*, hlm. 74–76, 996–998. Wiro S. Miardja dan Nurut, juga Ongko D., yang pernyataannya pernyataannya terdapat dalam buku Sudyono, bertahan hidup di Tanah Tinggi hingga hari penutupan kamp.

Seperti telah kita ketahui, Tanah Tinggi diperlukan untuk menciptakan normalitas di Tanah Merah sebagaimana Digoel dibutuhkan untuk menjaga normalitas di Hindia Belanda. Normalitas berhasil didapatkan di Hindia Belanda dan Digoel melalui struktur yang *isomorfis* ini, yakni Digoel dimunculkan di Hindia Belanda dan Tanah Tinggi dimunculkan di Digoel. Seseorang lantas akan bertanya-tanya bagaimana bentuk normalitas Hindia Belanda jika normalitas yang diciptakan di Digoel secara fundamental ganjil, karena jika seseorang bisa mengatakan bahwa Tanah Merah normal sementara Tanah Tinggi abnormal, orang juga bisa mengatakan bahwa Hindia Belanda normal dan Digoel abnormal. Sebaliknya, normalitas tampaknya dalam relativitas: Hindia Belanda tampak normal dibandingkan Digoel, sebagaimana Tanah Merah tampaknya normal dibandingkan Tanah Tinggi. Bukan hanya masalah isolasi, tetapi isolasi di tengah-tengah alam yang bermusuhan, sangat besar yang mengancam untuk mereduksi siapapun menjadi bagian dari alam, makhluk manusia yang tak memiliki karakter khusus manusia, di Tanah Tinggi, yang oleh Hillen dianggap psikopat adalah satu-satunya bentuk "manusia" yang ada. Dibandingkan dengan Tanah Tinggi, Tanah Merah lebih manusiawi, lebih beradab, dan lebih normal, dan demikian pula Hindia Belanda dibandingkan Digoel. Tatapan kolonial Hindia Belanda bertumpu, dalam konteks ini, di atas dunia hantu Digoel, dan inilah makna paling penting dari Digoel.

Karenanya tidaklah mengejutkan bahwa *isomorfisme* Hindia Belanda/Digoel dan Digoel/Tanah Tinggi diikuti dengan pemetaan sosial yang *isomorfis* lainnya. Kita telah melihat bahwa para interni diklasifikasikan ke dalam tiga kategori *werkwillingen*, *naturalisten*, dan *onverzoenlijken*. Dan bahwa penciptaan Tanah Tinggi di Digoel dan penciptaan normalitas di Tanah Merah dibandingkan dunia hantu Tanah Tinggi bisa berlangsung di atas basis klasifikasi ini. Kita juga telah mengetahui bahwa serangkaian kategori ini muncul di Digoel dari proses negosiasi antara negara dan interni. Di Hindia Belanda di luar Digoel, serangkaian kategori yang lain—*kooperasionis*, *non-kooperasionis*,

*dan revolusionis/ekstremis*— terbentuk di tahun-tahun yang sama, sekali lagi akibat negosiasi antara pengamanan rezim politik Hindia Belanda dan orang Indonesia. Ini berarti bahwa kita bisa memahami politik nasionalis Indonesia di atas permukaan, baik kooperasionis dan non-kooperasionis, di Hindia Belanda jika kita juga memahami politik revolusioner bawah tanah. Juga, kita bisa memahami Tanah Merah dengan para *werkwillingen* dan *naturalisten* hanya jika kita juga melihat pada Tanah Tinggi dan kaum *onverzoenlijken* yang menyerupai hantu. Kehidupan di Digoel ganjil dalam bentuknya yang sangat terpolitisasi, dan dalam cermin keganjilan inilah kita menyaksikan tatanan normal yang ganjil di Hindia Belanda tercermin.

## Tahun-tahun Penutupan

Ketika Tjarda van Starkenborgh Statchouwer mengantikan De Jonge sebagai gubernur jenderal tahun 1936, dan khususnya sejak Welter menjadi menteri urusan koloni tahun 1937, Digoel yang untuk beberapa tahun terlupakan kembali menjadi isu besar di Den Haag dan Buitenzorg. Hal ini (sebagian) karena Digoel adalah bagian dari masa lalu Welter, di mana ia turut serta dalam pengambilan keputusan untuk mendirikan sebuah kamp pembuangan massal di akhir 1926 ketika menjadi anggota Dewan Hindia Belanda. Dan ia menjabat Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda ketika mendiskusikan laporan Hillen tahun 1930. Tetapi yang lebih penting lagi karena situasi internasional berubah dengan cepat, dengan Nazi berkuasa di Jerman dan invasi militer Jepang ke Cina telah dimulai. Catatan tentang Digoel yang diserahkan oleh Petrus Blumberger kepada Welter adalah isyarat awal dari tumbuhnya kembali perhatian aktif terhadap isu ini.

Bulan Desember 1938, Welter mengirim nota kepada Petrus Blumberger untuk merancang surat kepada gubernur jenderal, untuk mendukung keputusannya membebaskan 20 interni dari Digoel sebagai langkah lebih lanjut menuju penutupan kamp pembuangan ini kecuali bagi para *onverzoenlijken*. Ia selanjutnya menulis:

Menurut pendapat saya sebuah tindakan harus diambil untuk menutup tempat pembuangan ini secepat mungkin.

Saya berpendapat bahwa pembentukan sebuah kamp pembuangan yang berbeda harus dimungkinkan hanya sebagai sebuah tindakan perkecualian....

Menurut pendapat saya penguasa Belanda di Hindia Belanda mendapatkan penghargaan moral yang tinggi di dunia dari metode pemerintahannya yang efektif dan manusiawi. Karenanya saya percaya bahwa dalam waktu dekat tak bisa lagi tanpa cara yang luar biasa tentang sebuah tempat khusus pembuangan, yang lebih baik.

Welter selanjutnya mengusulkan agar Digoel diganti dengan metode pembuangan yang lebih tradisional dalam waktu dekat, yakni dengan para interni dibuang secara terpisah di banyak tempat sehingga mereka tidak lagi berharap bisa membangun pengaruh politik karena perbedaan bahasa dengan penduduk asli dan bahwa kamp pembuangan di Digoel harus dihapuskan "dengan perkecualian bagi mereka yang *onverzoenlijken*."<sup>73</sup>

Bagaimanapun, pemerintah Hindia Belanda menerima usulannya tanpa antusiasme. Penuntut umum, misalnya, berargumentasi bahwa cara tradisional tidak bakal bekerja efektif seperti selama ini karena telah menyebarnya bahasa Melayu di Hindia Belanda dan meningkatnya kemungkinan kontak dengan dunia luar sekali para interni ditempatkan di luar kamp.<sup>74</sup> Keputusan untuk mempertahankan Digoel diambil pada pertemuan Dewan Hindia Belanda bulan Desember 1938, dan semester pertama tahun 1938, 118 orang interni dibebaskan, sehingga mengurangi populasi interni di Digoel menjadi 345 sebelum Juli 1938, termasuk 42 interni di Tanah Tinggi.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> "Notitie van deministervan kolonien (Welter), 23 Desember 1937," dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: Agustus, 1933-1942*, hlm. 474-485. Berdasarkan nota ini, sebuah surat dikirimkan kepada gubernur jenderal, bertanggal 29 Desember 1937.

<sup>74</sup> "Procureur-Generaal (H. Marcella) aan Gouverneur-Generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), 9 November 1938," dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: Agustus, 1933-1942*, hlm. 552-554.

<sup>75</sup> Kwanten, *De Ontwikkeling: Aug. 1933-1942*, hlm. 552 dan 556.

Bulan Mei 1940 Welter kembali menulis nota, mengungkapkan kekecewaannya pada lambatnya proses penutupan Digocl.

Sebuah terobosan dibuat pada tahun 1927, dari praktik pembuangan yang telah lama diberlakukan, karena ratusan orang harus dibuang secara bersama-sama pada waktuitu. Maka lahirlah, dengan kekerasan, kamp pembuangan di Papua. Namun pembentukan kamp pembuangan ini bertentangan dengan sebuah tradisi lama dan dengan pengalaman yang didapatkan darinya, untuk menggunakan Boven Digoel sebagai kamp konsentrasi bagi pembuangan "normal", normal dalam artian bahwa hal itu selalu terjadi dan akan berlangsung hingga sekarang atau mungkin permanen. Dalam pandangan saya tradisi lama harus diikuti dengan pembuangan semacam itu.<sup>76</sup>

Empat belas tahun setelah pendiriannya, salah seorang pendirinya mengakui bahwa Digocl adalah sebuah kamp konsentrasi, bukan hanya kamp pembuangan "normal", apalagi sebuah kehidupan normal. Kendati demikian, Digoel bertahan untuk waktu tiga tahun lagi, hingga 1943, dua tahun setelah sebagian besar wilayah Hindia Belanda diduduki Jepang. Pada tahun itu pemerintah Hindia Belanda di pengasingan di Melbourne menjadi sangat ketakutan tentang kemungkinan para interni dibebaskan oleh Jepang, sehingga pemerintah Belanda di pengasingan memutuskan untuk menghapuskannya sama sekali dan mengungsikan semua interni ke Australia. Evakuasi dilakukan oleh Ch. O. van der Plas dan kanip ditutup tahun 1943.

Demikianlah sejarah kamp konsentrasi Digocl berakhir dan dengan ini pula berakhir sisa-sisa terakhir pengamanan politik rezim Belanda yang mewarnai tahun-tahun terakhir kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Tahun-tahun pascarevolusi 1927 hingga 1942 bisa dipahami dalam konteks keberadaan Digocl. Untuk menormalkan kehidupan di Hindia Belanda pada tahun-tahun ini pemerintah membutuhkan dunia hantu Digocl. Digoel

<sup>76</sup> "Notitie van de minister van kolonien (Welter), 6 Mei 1940, dalam Kwantes, *De Ontwikkeling: Aug. 1933-1942*, hlm. 744-745.

dan kamp pembuangan berfungsi untuk menjaga dan merefleksikan kondisi normal, bahwa Digoel secara definitif menjadi pemisah garis batas antara normal dan abnormal, kooperasi dan garis keras, karcnanya memisahkan tatanan kolonial yang rasional dan penduduk yang berada di ambang kegilaan, dan keseluruhan ini mencerminkan rezim yang melembagakan dan meminggirkan Digoel. Normalitas menjadi tergantung pada sebuah aparatus pengamanan yang kompleks yang menandai dan memecah kawasan, subjek, dan tanda-tanda kolonial.

## **Bagian Kedua**

# **TATANAN REZIM BARU**

---

---

**M**enciptakan tatanan rezim di Digoci sangatlah mudah, dengan cara diisolasi, dan tidak perlu ada catatan sejarah. Sejumlah kecil tawanananya masing-masing diidentifikasi secara lengkap, nama dan nama samarannya, nomor pengenal, tempat dan tanggal kelahiran, status pernikahan, pendidikan, latar belakang pekerjaan, karir politik, tanda tangan, fotografi, dan informasi lain yang berada dalam satu berkas. Semua berkas berada dalam satu ruangan. Sebaliknya, menciptakan tatanan rezim baru di Hindia jauh lebih rumit. Karena rezim ini berada dalam kerajaan kepulauan yang luas, mempunyai jutaan penduduk (pada tahun 1930), dengan sejarah, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Perangkat kenegaraannya berkembang membentang di berbagai daerah selama berabad-abad. Namun demikian, suatu tatanan rezim baru, yang benar-benar seragam dibentuk pada tahun 1930-an dengan penjara dan kamp-kamp tawan, kekuatan polisi modern yang relatif lebih kecil (34.000 kekuatan, tahun 1930) dan sejumlah kecil angkatan bersenjata kolonial (37.000 kekuatan, tahun 1930).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Indisch Verslag 1931: II. Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over het jaar 1930* (Batavia: Landsdrukkerij, 1931), hlm. 14, 405–406.

Perkembangan penting di era ini ialah dibentuknya aparat kebijakan politik modern, yang dibentuk melalui kepolisian. Lembaga ini dikendalikan oleh karir profesional Belanda dan pegawai polisi pribumi, serta otonomi departemen administrasi dalam negeri. Kehadiran aparatnya ditandai dengan ditetapkannya, *Algemeene Recherche Dienst* (ARD), Dinas Penyelidikan Umum, di kantor jaksa agung (*hoofdparke*) tahun 1919. Dengan adanya aparat penyelidik daerah di masing-masing karesidenan, ia menjangkau ke hampir seluruh wilayah kerajaan dan merambah ke pelosok kehidupan pribumi pada tahun 1920-an. Orang-orang Indonesia menyebut intelijen politik ini sebagai, PID (Politieke Inlichtingendienst), Dinas Intelijen Politik, meskipun tidak dikenal secara resmi. Karena kedudukan dan wujud lokalnya, kota, regional, dan satuan penyelidik setempat, sering disebut sebagai intelijen politik atau investigasi politik (*politieke inlichtingen, politieke recherche*).

PID adalah “mesin” yang mempunyai sejarah tersendiri. Ia tumbuh bersamaan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai musuhnya. Tradisi, mentalitas, pemikiran, dan caranya melihat orang pribumi, serta modus operasinya dibentuk melalui sejarah seperti ini. Tradisi ini dibawa untuk menormalkan situasi setelah PID menghancurkan komunis. Inilah sebagian jawaban dari negara Hindia Belanda atas kebangkitan politik populer Indonesia modern di Hindia. Kenyataan ini menandai datangnya abad politik di lingkungan modern Hindia, yang hingga akhir abad kedua puluh, bekas-bekasnya masih dapat kita rasakan. Lalu, bagaimanakah “mesin” ini berkembang, apa mekanismenya, mentalitas dan pemikiran apa yang mengendalikan mesin tersebut, bagaimana ia bekerja, dan dengan dampak seperti apa?

## Datangnya Kebijakan Modern

Sejarah polisi Hindia, seumur dengan sejarah kolonialisme Belanda itu sendiri. Seperti yang dapat kita jumpai dalam tulisan mengenai sejarah polisi Indonesia/Hindia Belanda, pegawai polisi pertama ialah Jan Steijns van Antwerpen. Jan Pieterszoon

Coen memilihnya sebagai *baljuw*, pegawai pengadilan dan kepala polisi, ketika ia menguasai Jakarta dari Raja Banten dan mendirikan Batavia pada tahun 1620.<sup>2</sup> Namun kita tidak perlu kembali ke prasejarah VOC negara Hindia untuk memahami polisi modern yang mewariskan keberadaannya di awal abad dua puluh. Fondasi masa depan polisi modern terletak di awal abad dua puluh, ketika *bankrupt* VOC dialihkan ke negara di bawah Gubernur Jenderal Jacobin yang dipilih Napoleon, Herman Willem Daendels (1808–1811), dan penggantinya, gubernur jenderal berwatak liberal, Thomas Stamford Raffles (1811–1816).

Daendels menghilangkan pemerintahan Pesisir Timur Laut dan membagi daerah tersebut ke dalam lima distrik. Dia membentuk koops Djajengsekar, pendekar pribumi di tiap-tiap distrik sebagai alat kekuasaan di wilayah masing-masing distrik. Selanjutnya, Djajengsekar dibentuk di Cirebon dan Banten, juga ketika Sultan Circbon dan Banten disederhanakan menjadi residen di bawah Raffles. Maka dimulailah tradisi polisi bersenjata paramiliter yang bertugas menjaga ketertiban di pedalaman Jawa.<sup>3</sup>

Sumbangan Raffles ternyata lebih besar. Dia menemukan, dalam bahasa *Muntinghe* disebut sebagai “institusi kuno administrasi desa yang hadir sebelum kedatangan orang-orang Islam yang menguasai seluruh pesisir Jawa”. Dalam peraturan

<sup>2</sup> Lihat, misalnya, A. Neijtzell de Wilde, “De Nederlandsch-Indische Politie,” dalam, *Kolonial Tijdschrift*, Vol.13, 1924, hlm. 115; Abdulkadir Widjojoatmodjo, *Riwiyat Kepolisian di Hindia Belanda dengan Ringkas: Lezing dengan Hadirat j.m. toen Resident Priyangan Tengah dalam Conggres Inlandsche Politie Bond ketiga di Bandung pada Bulan April 1927 tanggal 17* (Semarang: Typ Khouw Beng Wan, 1927), hlm. 5; “Uit de Voorgeschiedenis der Politie,” dalam, *Vereeniging van Hoogere Politie-Ambtenaren, 1916–1936: Jubileum-Nummer van de Nederlandsch-Indische Politiegids bij Gelegenheid van het 20 Jarig Bestaan van de Vereeniging* (Batavia: n.p., 1936) hlm. 17; P. Dekker, *De Politie in Nederlandsch-Indië: Hare Beknopte Geschiedenis, Haar Taak, Bevoedheid, Organisatie en Optreden* (Sukabumi: Drukkerij “Insulinde”, Tweede Druk, 1938) hlm. 3.

<sup>3</sup> Dekker, *De Politie*, hal 35; juga lihat Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite* (Singapore: Heinemann Educational Books, Asian Studies Association of Australia Southeast Asia Publications Series No. 2, 1979) hlm. 7-8.

yang dibuat tanggal 11 Februari 1814, Raffles menciptakan lembaga kepala desa yang bertanggung jawab atas kebijakan desanya. Ia diperlukan juga untuk mengatur ronda malam yang secara teratur untuk menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan menahan kriminal. Raffles juga membagi wilayah ke dalam residen-residen. Tiap-tiap residen dibagi menjadi distrik-distrik (kabupaten), dan tiap-tiap distrik dibagi menjadi divisi-divisi yang dikepalai oleh pegawai divisi. Setiap divisi dibuat peraturan; stasiun polisi ditetapkan dengan beberapa pegawai yang berada di bawahnya, sebagai mantri dan pegawai-pegawai polisi lainnya. Bersamaan dengan pengumuman mengenai peraturan yang dibuat pada bulan Februari 1814 itu, Raffles meletakkan dasar pembentukan dua lembaga kepolisian Hindia Belanda, polisi desa (*desapolitie*), dan polisi administratif (*bestuurpolitie*).<sup>4</sup>

Ketika Belanda kembali pada tahun 1818, lembaga kepolisian itu diwariskan ke pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1819, dengan demikian, Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Capellen membuat lembaga lain. Bersama dua peraturan mengenai pengadilan kriminal dan administrasi pengadilan polisi dan kriminal, dia membuat kepala pengadilan pusat jaksa agung, polisi, dan kepala polisi administrasi daerah residen. Namun residen tidak berada di bawah jaksa agung. Meskipun jaksa agung punya perwakilan di daerah dan pegawai-pegawai pengadilan, kekuasaan mereka lebih kecil dibandingkan residen. Maka di sini timbul dualisme. Dampaknya, jaksa agung dan pegawai pengadilan bertanggung jawab pada pengadilan Eropa, sementara residen bertanggungjawab pada pengadilan pribumi dan polisi. Dualisme ini bertahan sampai abad dua puluh.<sup>5</sup>

Dengan sedikit perubahan, kekuasaan rezim ini ternyata masih terasa di sepanjang abad sembilan belas. Djajengsekar pada tahun 1870-an sampai 1890-an, prajurit (tentara), dan kekuatan polisi bersenjata paramiliter, yang merupakan bagian

<sup>4</sup> Dekker, *op. cit.*, him. 37–38; Sutherland, *op. cit.*, him 8–9.

<sup>5</sup> Dekker, *op. cit.*, him. 39.

dari angkatan bersenjata kolonial dan yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak berasal dari komisaris tentara, secara bertahap diganti oleh satuan agen polisi. Diatur oleh kurir polisi dari polisi administratif, yang mempekerjakan pegawai administrasi pribumi, residen, asisten residen, *schouten* (sheriff, ketua polisi administrasi di pusat perkotaan), bupati, patih, wedana, dan asisten wedana. Di tiga sentral kota Jawa, Batavia, Semarang, Surabaya, organisasi polisi ini ditempatkan di bawah pembantu residen polisi, sementara di pusat kerajaan, agen-agen polisinya dipekerjakan. Misalnya, kurir polisi dipekerjakan ke pegawai administrasi. Kekuatan polisi ini dibentuk supaya bertanggung jawab kepada tawanan dan tugas menjaga keuangan, transportasi para tawanan dan keuangan pemerintahan, seperti halnya menjaga ketertiban dan melaksanakan tugas-tugas polisi seperti biasanya.<sup>6</sup>

Pembukaan korps agen polisi menandai munculnya polisi profesional (*berœpcelitie*) di Hindia Belanda. Bentuk polisi Hindia Belanda keempat, bersama-sama dengan polisi bersenjata, polisi desa, dan polisi administratif. Tetapi pada awal abad dua puluh, penguatan kekuatan administrasi gabungan dan polisi profesional agak kurang berhasil. Tahun 1907–1908, kurang lebih berkekuatan 9.500 orang, termasuk agen-agen polisi yang bertanggungjawab menjaga tawanan, transportasi para tawanan, kebijakan hutan, kebijakan monopoli opium dan garam, diatur sekitar 700 mantri polisi. Menurut perkiraan A. Neijzel de Wilde, yang bertindak sebagai anggota komisi kesejahteraan untuk kajian mengenai situasi polisi pada masa itu, sekurang-kurangnya, lebih dari 4.000 agen polisi dan kurir dibutuhkan untuk 25.000 desa di Jawa dan Madura.<sup>7</sup>

Pada masa itu, pemerintah merasa prihatin dengan munculnya korupsi di kepolisian yang dijadikan bahan

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 40–44.

<sup>7</sup> Neijzell de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie", hlm. 119–123. Menurut Neijzell de Wilde, di tiap residen dan kabupaten ditempatkan empat opaser pada tahun 1907–1908; tiga asisten residen; satu patih; empat wedana; dua asisten wedana; dan dua polisi mantri dan dua opaser polisi. *Ibid.*, hlm. 119.

pemikiran dalam berbagai kajian mengenai polisi. Di awal abad dua puluh, sebagaimana dalam masa sebelumnya, pegawai administratif residen dan kabupaten menurunkan mantri polisi dan kurir sebagai *antek* dan mata-mata, dengan bermacam-macam julukan seperti, palang, weri, jagabaya (polisi), dan jago. Jaringan kerja pegawai polisi dan pegawai administratif serta kaki tangan dan mata-mata mereka membentuk zone senjakala yang menghubungkan wilayah resmi negara dengan dunia desa Jawa. James Rush menggambarkan zone ini sebagai berikut;

Jagabaya membedakan dirinya dengan orang-orang desa setempat melalui pengalaman supra desa dan sikap menghasut. Tindakan, pencarian, serta tugas mereka dibayar. Jadi, mereka sering muncul bersama pegawai lokal seperti polisi desa (*kaptengen*). Ia dipilih oleh ketua untuk melindungi desa dari kejahatan, sebagai detektif (polisi rahasia) dalam dinas kepala kampung, pegawai priayi, dan administrator Belanda. Lingkungan sosial jagabaya lebih luas dibandingkan orang desa setempat, jagabaya terlibat dalam cандu, judi, dan berkerumun di antara kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat Jawa, wanita penari, prostitusi, pertunjukan rakyat keliling, pesulap, perampok, penipu, tukang tадah, dan pencuri. Keakrabannya dengan kelompok tersebut dan dengan dunia desa, mereka merupakan sumber informasi yang bernilai. Dengan demikian, jagabaya dalam tugasnya bukan hanya mendaftar kewenangan Belanda dan pribumi, melainkan juga berbagai individu dan kelompok lain yang kepentingannya masuk ke dalam wilayah desa<sup>4</sup>.

\* James R. Rush, "Social Control and Influence in Nineteenth Century Indonesia: Opium Farms and Chinese of Java", *Indonesia* (April 1983), 35, hal 59. Juga lihat karyanya, *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860–1910* (Ithaca: Cornell University Press, 1990); Ongbokham, "The Inscrutable and The Paranoid: An Investigation into The Sources of The Brioningrat Affair," dalam Ruth T. McVey (editor), *Southeast Asian Transitions: Approaches through Social History* (New Haven: Yale University Press, 1978); Neijtzell de Wilde, "De Nederlandsch-Indisch Politie," hlm. 122; "Nogmaals Politiespionnen", dalam *De Nederlandsch-Indische Politiegids*, Januari 1932, No 7, hlm. 51–53; "Uit de Desa II: Spion," di dalam *de Nederlandsch-Indische Politiegids*, Desember 1934, No 12, hlm. 283–293; *Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*; VIIIlb. *Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoeken naar 't Recht en de Politie en daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen, Deel II. Slotheschouwingen*. (Batavia: Ruygrok, 1912).

Pada abad sembilan belas, pegawai administratif Belanda menjadi bagian dari daerah tersebut dan pemerintah harus berada bersama-sama demi menjaga keteriban dan mendapatkan pendapatan. Akan tetapi, pada awal abad dua puluh, ketika kemajuan dan peningkatan kesadaran kaum pribumi menjadi kata kunci dalam era etika baru. Pada saat itu, pemerintah tidak lagi dapat mentolerir korupsi polisi, dan reformasi polisi menjadi isu politik umum. Pada tahun 1904, Pembantu Residen I.R. Priester ditugaskan oleh pemerintah untuk mempelajari reformasi polisi di tiga kota pusat utama Jawa, Batavia, Semarang, dan Surabaya, dan menguji reformasi ini di Semarang untuk menciptakan organisasi polisi yang dalam tugasnya sehari-hari dikendalikan oleh ketua polisi profesional, ketua komisaris polisi dan ketua pegawai administratif.

Dua tahun berikutnya, W. Bockhoudt ditugaskan untuk mempelajari reformasi polisi di Jawa dan Madura di luar tiga sentra kota-kota utama tersebut. Maka tidak mengherankan, perhatian utamanya adalah penetrasi jaringan bawah tanah, guru *weri* (guru mata-mata, ahli ilmu *kanuragan*) dan disiplin mereka di pegawai polisi dan pegawai administratif. Oleh karena itu, dia menyatakan pada tahun 1907 laporan mengenai sentralisasi, otonomi kelembagaan, dan kepemimpinan profesional polisi di bawah ketua komisaris polisi dan hak memiliki polisi administratif di bawah residen. Sementara, pada saat yang bersamaan menyuarakan pengawasan supra kampong pedesaan sosok dunia bawah dari guru *weri* (disebut juga sebagai *guru ngelmu* atau *guru kadigdaya*) dan pertapa (seperti, pendito, begawan, ajar) dengan menurunkan perhiasan emas dan perak, (kepala tandak), dan gerombong.<sup>9</sup>

Reorganisasi polisi utama pertama dikenalkan pada tahun 1911 berdasarkan kajian-kajian tersebut. Yang terpenting dalam

<sup>9</sup> W. Bockhoudt, *Rapport Reorganisatie van het Politiewezen op Java en Madoera (Uitgezonderd de Vostenlanden, de Particuliere Landerijen en de Hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soerabaja), 1906-1907* (Batavia: Landsdrukkerij, 1908), hlm. 6-9 dan hlm. 18-19. Untuk penjelasan ringkas dapat dilihat dalam studi Boekhoudt dan Priester. Lihat Dekker, *De Politie*, hlm. 47-54.

reformasi seperti ini adalah organisasi polisi kota, *stadspolitie*, di Batavia, Semarang, dan Surabaya, yang dikendalikan oleh pegawai polisi profesional (*vakman*). Polisi kota Batavia (termasuk *Meester Cornelis*) berkekuatan 600 orang, sementara gabungan polisi Semarang dan Surabaya berkekuatan 675 orang. Polisi kota diatur dalam beberapa kotapraja—Medan, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Makassar—pada tahun 1914.

Untuk memperkuat kepemimpinan polisi pusat, dalam rencana tahun 1910, pemerintah juga memutuskan memilih advokat umum kedua sebagai pemimpin polisi di bawah jaksa agung. Dan inspektur polisi untuk memimpin manajemen polisi di bawah direktur administrasi dalam negeri. Namun anggaran sebesar itu tidak disediakan oleh parlemen Belanda, yang membuat hal ini menjadi isu utama reformasi politik pada tahun 1910-an.<sup>10</sup>

Tahun berikutnya, 1912, polisi bersenjata, *gewapende politie*, dibentuk dari sisa prajurit dan unit polisi paramiliter lokal lainnya. Tiap satu divisi diberi satu daerah *region* (seperti residen) dan tiap detasemen ukuran peleton dipimpin oleh kapten pengganti dari angkatan bersenjata kolonial dan seluruh polisi bersenjata ditempatkan di bawah departemen administrasi dalam negeri. Pada awalnya berkekuatan 5.000, kemudian dalam beberapa tahun mencapai 10.000 orang.<sup>11</sup> Juga perlu disebutkan bahwa sekolah polisi dibuka tahun 1914 untuk pelatihan komisaris polisi dan inspektur yang menandai sempurnanya reformasi polisi yang telah direncanakan tahun 1910-an.<sup>12</sup>

Seiring dengan waktu, reorganisasi polisi diselesaikan tahun 1914. Namun demikian, kekurangannya segera dapat diketahui

<sup>10</sup> Dekker, *De Politie*, hlm. 55–60; Neijzell de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie," hlm. 124–125. Pada tahun 1911 kekuatan tersebut berjumlah seluruh polisi Jawa dan Madura (misalnya gabungan polisi kota, profesional, dan polisi administratif) kurang lebih 11.000 orang. Neijzell de Wilde, op. cit., hlm. 125.

<sup>11</sup> A. Hootweg, "Gewapende Politie", dalam, *Vereeniging van Hoogere Politie-Ambtenaren 1916–1936*, hlm. 41–44.

<sup>12</sup> "De Opleidingschool van het hogere onder politie," hlm. 49–50, op. cit., hlm. 49–50.

pemerintah di Buitenzorg dan kementerian kolonial di Dcн Haguc. Semua studi yang menjadi dasar reformasi dilakukan pada tahun 1900. Studi terakhir yang utama dilakukan Boekhoudt yang dirampungkan pada tahun 1907. Hal ini berarti bahwa reformasi tersebut telah mengantisipasi munculnya pergerakan, sebagaimana ditunjukkan pada awal tahun 1910-an oleh Sarekat Islam yang lahir di permulaan tahun 1912. Ekspansi besar-besaran pada tahun 1912–1914 terjadi di berbagai tempat melalui aksi jalanan, pengacauan, boikot, pemukulan, pembunuhan, perilaku-perilaku tidak senonoh terhadap pegawai, dan tindakan yang meruntuhkan otoritas negara.

Boekhoudt, menulis pada tahun 1907 bahwa perasaan nasional tampak tidak ada di kalangan orang-orang Jawa, setidaknya “tengah tidur”. Menurut pendangannya, kekacauan di antara orang-orang Jawa bersumber dari *Pan Islamisme*, dan atau fanatisme (*dweezelucht*) terhadap perbaikan Kerajaan Jawa. Namun tindakan mereka bersifat lokal dan tidak sampai mengancam negara. Gerakan Ratu Adil, yang dengan mudah dikaitkan dengan rapat-rapat bersama tanpa scizin pengadilan polisi, tidak punya kepentingan politik sama sekali. Dengan nada cemas dia menyatakan, adalah *Pan Islamisme*, khususnya jaringan tarekat internasional yang menyebar di Pulau Jawa, Singapura, dan Makah.<sup>13</sup>

(Namun) tidak berarti bahwa *Pan Islamisme* membuat saya cemas karena melawan otoritas negara yang dianggap sebagai musuh dari dalam. Tidak ada alasan mengenai hal itu. Namun, saya mencemaskan kehidupan pegawai dan warga negara tertentu yang memiliki berbagai perabot interior, yang (harus) mempercayakan harta milik mereka karena tiadanya perlindungan negara hingga munculnya kekuatan militer dari ibukota terdekat guna memadamkan revolusi.<sup>14</sup>

Boekhoudt juga menyatakan perlunya polisi bersenjata yang lebih baik dan polisi politik untuk menjaga pegawai administra-

<sup>13</sup> Boekhoudt, *Rapport Reorganisatie*, hlm. 3–5.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 5.

tif dari kesulitan-kesulitan yang dapat terjadi di daerah mereka.<sup>15</sup> Polisi yang sudah dikenal pada awal tahun 1910-an itu dapat mengatasi persoalan dengan baik.

Namun demikian, persoalan Sarekat Islam yang berada di tangan pemerintahan sangat berbeda. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh Gubernur Jenderal Idenburg. Pemerintah menganggapnya sebagai subversif, meskipun beberapa orang Belanda dan pegawai administratif pribumi yang menangani persoalan tersebut mempercayainya. Persoalan itu skalanya bersifat nasional bukan lokal. Tidak berasal dari *Pan Islamisme* atau *Ratu Adilisme*, namun dibentuk melalui koran berbahasa Melayu dan rapat umum (*vergadering*) dan dipimpin oleh pemimpin pergerakan yang berganti profesi menjadi wartawan. Bahkan Idenburg tidak ingin merusak SI. Dia memahaminya sebagai sinyal yang memperkuat keyakinannya akan adanya kebangkitan kaum pribumi, dan sebagai penasihat hubungan kaum pribumi dengan orang-orang Arab, Dr. D.A. Rinkes menyatakan bahwa Idenburg berniat mendampinginya menuju jalan yang kita harapkan atau setidaknya tidak sampai memberatkan otoritas kita.<sup>16</sup> Pemerintah harus berhubungan dengan SI dengan cara yang berbeda, melalui cara di mana hubungannya dengan kerusuhan-kerusuhan bumiputra bersumber dari *Pan Islamisme* dan fanatisme terhadap pembaruan kerajaan Jawa.

Dalam rangka meningkatkan pemikiran pegawai pemerintahan tingkat tinggi di Hindia dan Den Hague mengenai reformasi polisi di pertengahan tahun 1910-an, sangatlah perlu menguji apa yang dikatakan P.H. Fromberg Sr mengenai hal tersebut. Anggota Mahkamah Agung sebelumnya dan ahli gerakan populer Cina Modern di Hindia yang terkenal, Fromberg, diusulkan oleh menteri kolonial mengenai "Siapakah yang harus memimpin polisi Hindia?". Dia menunjuk pertanyaan

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>16</sup> Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 69. Mengenai kebijakan pemerintah terhadap SI di masa-masa awal, lihat hlm. 68-69.

tersebut berkaitan dengan kebangkitan politik populer modern di Hindia pada tahun 1915.

Menurut pandangannya, tidak ada pendapat mendua yang resmi mengenai kepemimpinan pusat jaksa agung tentang persoalan pengamanan. Persoalannya adalah bahwa dia tidak berada dalam posisi yang secara kelembagaan menggunakan kepemimpinannya. Penasihat hubungan kaum pribumi dengan orang-orang Arab, katanya, tengah mengambil peran penting dalam gerakan populer di Jawa. Penasihat memiliki pengetahuan penting mengenai kecenderungan beragama dan bahasa-bahasa kaum pribumi, mampu mempertahankan hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, menghadiri rapat umum dan konferensi SI, dan membaca koran-koran pribumi. Laporan ini tidak diragukan sangat bermakna bagi jaksa agung untuk menilai situasi di atas. Akan tetapi penasihat Fromberg mengingatkan kepada menteri, termasuk departemen agama dan pendidikan, laporannya tidak sampai ke tangan jaksa agung secara teratur. Ini juga termasuk kasus dengan penasihat hubungan Cina, katanya. Laporan ini seharusnya penting bagi jaksa agung dalam menilai situasi orang-orang Cina di Hindia pada masa kebangkitan Revolusi Cina 1911. Namun laporannya tidak sampai ke tangannya secara teratur karena kasus orang-orang Cina tersebut diserahkan kepada gubernur jenderal melalui direktur administrasi dalam negeri. Dan jaksa agung tidak termasuk dalam lingkaran birokrasi itu. Akibatnya Fromberg menyatakan bahwa jaksa agung telah ketinggalan informasi penting mengenai pribumi, Indo, orang-orang Islam yang anti-pemerintah, organisasi boikot, musuh kongsi orang-orang Cina (kelompok rahasia), musuh-musuh etnis, dan sedikit lebih tahu dari surat kabar berbahasa Belanda. Menurut pandangannya, inilah alasan mengapa jaksa agung tidak dapat mendorong kepemimpinan pusat, misalnya dalam menerapkan peraturan perkumpulan dan pertemuan-pertemuan di SL Pada awal kemunculan SI, masing-masing pemimpin lokal mengambil keputusannya sendiri tanpa berkonsultasi dahulu kepada jaksa agung dan hal ini menimbulkan kebingungan. Suatu residen

dilarang mengadakan rapat kecil SI, sementara di tempat lain membiarkan SI mengadakan rapat umum dan pertemuan-pertemuan dengan bebas. Jadi kebingungan pun melanda pemerintah dalam menangani "agitasi-agitasi" Cina saat kebangkitan revolusi. Residen Surabaya mengizinkan orang-orang Cina mengerek bendera nasional Cina setelah dia konsultasi dengan jaksa agung, sementara Residen Batavia justru melarangnya, setelah melakukan konsultasi dengan gubernur jenderal.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, Fromberg menyimpulkan bahwa "dalam praktiknya, sesungguhnya tidak perlu ada kepala polisi di Hindia Belanda." Namun harus ada kepemimpinan pusat yang mendorong terbentuknya pedoman dan instruksi jenderal dalam membuat pengamanan dan mempertahankan pengawasan terhadap semua polisi, sebab "gerakan pemberontakan, konflik rasial, dan organisasi boikot, biasanya tidak terbatas pada kotapraja, divisi-divisi maupun daerah. Argumen yang sama dapat dibuat, Fromberg menambahkan, demi pengamanan uang palsu, pembajakan, dan pembakaran lahan-lahan tebu. Pemerintah seharusnya tidak perlu bingung dalam mengatur asosiasi dan perkumpulan, demonstrasi, dan teater film.<sup>18</sup> Jadi kesimpulannya adalah;

Dia (jaksa agung) harus mengetahui laporan dari penasihat hubungan bumiputra, dari pegawai hubungan orang-orang Cina, dari inspektor monopoliganja (pemerintah) yang berkaitan dengan penyelundupan, laporan politik, dan komunikasi (*verslagen en mededeelingen*) residen sejauh mereka harus bekerja dengan polisi keamanan (*veiligheidspolitie*), statistik kejahatan sebagaimana diperlukan bagi pengawasan distrik dan pengamanan desa. Otoritas polisi sangat diperlukan untuk mengambil (peraturan yang mereka isukan) catatan dan mengirim (laporan tertulis mereka) kepada jaksa agung jika mereka mempengaruhi peraturan polisi jenderal. Misalnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mengurangi pencurian ternak, pembakaran lahan tebu<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> P.H. Fromberg Sr, "Nota Fromberg", dalam Dekker, *De Politie*, hlm. 62–64.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 75. Juga lihat Nijtzell de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie," hlm. 151.

Namun demikian, kejadian di atas tidak berlanjut sampai akhir tahun 1919, di mana Gubernur Jenderal van Limburg Stirum, karena kondisi darurat, memakai kantor jaksa agung dalam memfungsikan kepemimpinan polisi pusat. Alasannya sederhana. Van Limburg Stirum, mengingat perang besar di Eropa, ia menciptakan agen intelijen politik pusat (PID), pada bulan Mei 1916. Tugasnya adalah menempatkan orang asing dan sosialis di bawah pengawasan dan menyelidiki berbagai kecenderungan revolusioner di Hindia. Operasi kecil ini dikepalai oleh W. Muurling, kapten pegawai jenderal sebelumnya di angkatan bersenjata Hindia dengan satu staf yang masing-masing bermarkas di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Namun masing-masing staf itu melaporkan secara langsung kepada gubernur jenderal, dan punya akses teratur terhadap laporan-laporan dari penasihat hubungan bumiputra, penasihat hubungan dengan orang-orang Cina, residen, dan kepala polisi kota yang dikirim ke Buitenzorg. Van Limburg Stirum mengandalkan PID dalam mengendalikan polisi. Namun demikian, bersamaan dengan berakhirnya perang, tidak ada penilaian resmi mengenai tindak lanjutnya. Muurling merkomendasikan pembubaran lembaga tersebut pada bulan November 1918. Pada bulan April 1919, kantor jaksa agung tersebut secara resmi dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke intelijen militer.<sup>20</sup>

Namun dalam situasi keamanan dalam negeri, oleh pemerintah dinyatakan semakin memburuk, kerusuhan anti-Cina secara masif terjadi di akhir tahun 1918 di Kudus, pusat utama produksi rokok kretek di Jawa Tengah yang dikendalikan oleh produser dan pedagang Muslim. Gerakan itu juga tampak bertahan di akhir tahun 1918, untuk pertama kalinya semenjak kemunculan SI tahun 1912/1913.

---

<sup>20</sup> Mengenai PID, lihat, R.C. Kwantes, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië: Erste Stuk 1917–medio 1923* (Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1975) hlm. 134; Theodore Friend, *The Blue Eyed Enemy: Japan Against the West in Java and Luzon, 1942–1945* (Princeton: Princeton University Press, 1988) hlm. 35; Mr. 209x/1919, Vb. 10-7-19 No. 45.

Sayap radikalnya, yang diwakili oleh *Insulinde* dan SI Merah Semarang dipimpin oleh Semaoen meluaskan pengaruhnya. Pemogokan petani yang terus menerus terjadi di pedalaman Surakarta dipimpin oleh Haji Misbach dan aktivis *Insulinde* lokal. Tindakan pemogokan juga berpuncak di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya para buruh pabrik gula yang bergabung dengan serikat buruh pabrik, PFB (*Personeel Fabriek Bond*), dipimpin oleh CSI Yogyakarta, Soeryopranoto. Di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, seorang mandor Belanda terbunuh pada bulan Juni 1919 ketika dia mengunjungi area untuk melaksanakan tugas sebagai pesuruh militer (tobang), sctelah Abdoel Moeis, pemimpin CSI melakukan tour propaganda di sana dan tanpa sengaja mencetuskan kegairahan yang populer bagi gerakan.<sup>21</sup>

Namun yang paling penting adalah insiden yang terjadi di Jawa Barat pada bulan Juli 1919. Di Garut, Haji Hasan dan keluarganya yang melawan pengiriman beras ditembak oleh polisi bersenjata yang inenyamar sebagai asisten residen. Melacak penembakan tersebut, otoritas lokal tidak menyinggung keberadaan rahasia organisasi SI, SI seksi B (Branch), yang bertujuan melakukan tindakan subversif. Dengan cara yang tidak kelihatan, hubungan seksi B mengungkapkan adanya kontradiksi yang melekat dalam pemikiran etis. Ide dasarnya ialah bahwa orang-orang pribumi dapat didampingi menuju jalan kemajuan di bawah pengawasan Belanda. Inilah ide yang diatasnya telah dibangun kebijakan pemerintah terhadap gerakan sebagaimana ditunjukkan dalam kesadaran Gubernur Jenderal Idenburg mengenai status resmi SI pada tahun 1913. Namun hubungan seksi B tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Belanda merupakan fantasi kebebasan Belanda dan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam masyarakat pribumi menemukan salurannya agar bersungguh-sungguh dalam gerakan. Pemerintah sangat mencemaskan hal ini. Semua penduduk Jawa diinstruksikan untuk mencari SI seksi B di daerahnya masing-

---

<sup>21</sup> Mengenai pergerakan pada tahun 1919, lihat, Shiraishi, *An Age in Motion*, bab 3 dan 4.

masing. Berbagai surat kabar Belanda di Hindia memuat secara histeris persekongkolan orang-orang pribumi. Komunitas orang-orang Eropa berada dalam suasana panik.<sup>22</sup>

Scgera setelah hubungan Afdeeling B, Advokat General H.V. Monsanto memperingatkan gubernur jenderal akan adanya "pembusukan" gerakan, yang tumbuh menjadi liar (*verwilderung*), dan menyarankan bahwa Dinas Investigasi Pusat yang mempekerjakan kantor jaksa agung dan yang didukung oleh jaringan kerja intelijen daerah harus dibentuk untuk mengambil fungsi PID yang telah berprestasi di masa-masa perang. Beberapa bahan faktual disediakan, katanya, dengan menyebarkan dinas pemerintah daerah, dan kepala pegawai lokal. Meskipun begitu mereka perlu dibagi-bagi, bersama-sama, dipisah, dan diatur sesuai dengan kacamat pengamanan. Supaya dapat mengetahui secara lebih pasti dari yang (kita ketahui) sekarang maka bagaimana gerakan revolusioner yang luas mengendalikan berbagai macam perkumpulan telah terjadi, apa pengaruh (revolusioner) ini terhadap penduduk, bahaya apa yang bakal mengancam negara, rakyat, dan akhirnya otoritas.<sup>23</sup>

Gubernur jenderal mengumumkan dalam pembukaannya di *Volksraad* pada tanggal 1 September 1919, di mana gerakan yang melampaui batas akan ditindak tegas.<sup>24</sup> Pada bulan yang sama, gubernur jenderal memutuskan pengelolaan lahan polisi sebagai alat penindasan "akses ekses lokal", dan menciptakan Biro Penyelidikan Umum (*algemeene recherchedienst*) dengan memfungsikan jaksa agung. Sebagaimana diinformasikan S.J. Hirsch—ketua sindikat gula—tugas pertama Biro Penyelidikan Umum adalah melacak hubungan seksi B.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 113–114.

<sup>23</sup> "Advocaat-generaal (H.V. Monsanto) aan gouverneur-generaal (Van Limburg Stirum), 25 Juli 1919, Kwanten, *De Ontwikkeling: 1917–medio 1923*, hlm. 133.

<sup>24</sup> "Redevoering van zijne Excellentie den Gouverneur Generaal bij gelegenheid van het openbaar gehoor op 1 September 1919," *De Indische Gids* 41 (1919), hlm. 1438–1439.

<sup>25</sup> "1ste gouvernementssecretaris aan voorzitter van het algemeen syndicaat van suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië" (S.J. Hirsch) 5 maart 1920, in Kwanten, *De Ontwikkeling: 1917–medio 1923*, hlm. 214.

Bersamaan dengan keputusan ini, aparat pengamanan politik akhirnya berada pada posisi semula. Pusat jaksa agung mengarahkan dan mengawasi seluruh polisi, sementara direktur administrasi dalam negeri, yang dibantu oleh polisi umum (*algemeene politie*) dan polisi bersenjata (*gewapende politie*), harus bertanggungjawab terhadap manajemen polisi pusat. Di daerah-daerah, ketua polisi regional—ketua komisaris polisi di Batavia, Semarang, dan Surabaya, asisten komisaris polisi di Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta, serta komisaris polisi kelas pertama, di wilayah koloni—harus bertanggung jawab kepada kepemimpinan dan manajemen polisi umum, yang meliputi polisi kota (*stadspolitie*) dengan cabang penyelidikannya (*stadsrecherche*), polisi bidang (*veldpolitie*) dengan bakal Dinas Penyelidikan Regionalnya (*gewestelijke recherche*), polisi administratif, dengan Dinas Penyelidikan Lokal-nya, dan polisi desa.<sup>26</sup>

## Ahli Pengamanan Politik

Biro Penyelidikan Umum ditetapkan oleh dekret pemerintah tanggal 24 September 1919, dengan A.E van der Lely yang bertugas sebagai komisaris polisi kelas pertama di kota Batavia. Pada tahun 1915 sampai dengan 1919 ia berpindah ke kantor jaksa agung tepatnya pada akhir bulan November 1919, meski secara formal ia bertugas sebagai ketua Biro Penyelidikan Umum pada tanggal 27 Desember. Setiap hari tugasnya mengumpulkan, menyusun, memilah-milah, merangkai laporan-laporan resmi yang datang secara terus-menerus serta mencatatnya sebaik laporan berita harian dan memberikan instruksi dan menyusun penyelidikan dengan mengacu pada informasi itu.<sup>27</sup> Dalam membantu pekerjaannya, lebih dari dua orang dipilih pada bulan Juli 1920: Mohammad Jatim, sebelumnya ia adalah sekisi intelijen

<sup>26</sup> Lihat peta organisasional dalam Neijtzel de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie"; Dekker, *De Politie*, him. 179 dan 191.

<sup>27</sup> Jaksa Agung (G.W. Uhlenbeck) Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum), Maret 20, 1920, Mr. 520x /20.

politik, polisi kota di Batavia, sebagai pegawai ARD pribumi dengan pangkat *wedana* (pengangkatannya diumumkan pada tanggal 30 Juli 1920); dan B.R Vander Most, yang sebelumnya adalah polisi kota di Semarang, sebagai komisaris polisi kelas dua, ketua deputi, meski pemilihannya tidak diumumkan sampai bulan Februari 1925.<sup>28</sup>

Sejauh mengenai ARD, sebuah pos baru advokat umum polisi kedua dibuat bersama A. Neijzell de Wilde, orang yang sebelumnya kita kenal sebagai ahli terkemuka di bidang reorganisasi polisi, dan dibuat bersama kantor jaksa agung sejak bulan Juli 1916 sebagai jabatan pertamanya. Advokat umum polisi bertanggung jawab melakukan pengawasan harian ARD. Namun demikian, ketua ARD melaporkan secara langsung kepada jaksa agung.

Jaksa Agung G.W. Uhlenbeck memberitahukan kepada kepala administrasi daerah mengenai pembentukan ARD dan tugas-tugasnya dalam surat rahasianya tertanggal 16 April 1920, di mana dia menekankan pada residen bahwa pembentukan itu tidak berarti membuat lembaga kepemimpinan polisi daerah yang baru lagi atau mengubah kegiatan polisi sehari-hari. Dia melanjutkan:

Namun di sana perlu ada pusat yang menginformasikan kecenderungan dan gejala-gejala di masyarakat Hindia. Tugas pimpinan jenderal polisi harus menjadikan pemimpin polisi lokal mengikuti prinsip-prinsip pemerintah yang telah diketahui, menguji peraturan-peraturan yang diajukan atau diambil oleh otoritas polisi lokal bukan hanya dan secara khusus berada di luar pertimbangan, namun juga yang berkaitan dengan peraturan-peraturan legal, dan kemudian menjalankan kontrol terhadap pemimpin polisi lokal (untuk meyakinkan bahwa) polisi tidak menanggung sampai sejauh kertas kerja resmi. Tugas dari pemimpin pusat adalah mendukung arahan-arahan umum.

\* Uittreksel uit het register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië, Buitenzorg, 15 Mei 1920, No.2x, Mr. 520x/ 20. Mohammad Jatim kemudian dilantik menjadi patih pada bulan Agustus 1927. Van der Most yang paling mungkin mengetuai intelijen politik seksi polisi kota Semarang dari bulan Juli 1919 sampai bulan Juli 1920.

Kini kekuatan ini diberikan pada jaksa agung, katanya, pembela umum polisi dan ARD membantunya dalam menjalankan kepimpinan pusat di bidang pengamanan. Kemudian dia menggambarkan para ahlinya yang berwenang:

Di tiga pusat kota di Jawa (Batavia, Semarang, dan Surabaya) dan beberapa daerah lain kini berdiri suatu dinas penyelidikan kota dengan dasar yang lebih modern. Di lain tempat, personil penyelidik kini betul-betul diperkuat. Sekarang kita bermaksud—dimulai dari Jawa dan Madura—memfungsikan kepala administrasi regional yang masih bertanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari (kekuatan) polisi di bidang mereka, pemimpin teknis polisi (satu pemimpin untuk dua wilayah kabupaten/residen pada saat itu) dengan menduduki posisi sekurang-kurangnya komisaris polisi tingkat pertama, sebagai orang yang di samping peduli terhadap pelatihan personil polisi dan kerja sama yang baik di antara berbagai macam kesatuan polisi dalam bidang yang telah direncanakan, juga harus bertanggung jawab terhadap pembagian dan kerja yang efektif atas penyelidikan terhadap daerah-daerah yang dituju.

Akhirnya, pemimpin teknis polisi harus bertanggung jawab dengan memberikan dukungan yang lebih dalam penyelidikan mereka terhadap intelijen (kesatuan-kesatuan polisi administratif) yang mulai sekarang harus tetap berada di tangan administrasi pribumi dan orang-orang Eropa, di mana kebutuhan dan kemudahan pasti berada di gudang penyelidikan daerah (*gewestelijke recherchedepot*) yang mendorong bantuan di daerah-daerah di mana penyelidikan daerah tidak memadai dalam menangani kasus investigasi yang ada.

Dinas Penyelidikan Daerah harus melaporkan kepemimpinan polisi pusat (jaksa agung) informasi-informasi yang dia terima yang menurutnya mungkin menarik; dia (jaksa agung) mempunyai tugas khususnya dalam mengumpulkan, menata, dan memilah-milah apa saja yang ditemukan oleh Dinas Penyelidikan Lokal dan apa saja yang dilaporkan mengenainya oleh dinas lokal sebagai hal yang menarik bagi pimpinan jenderal dan selanjutnya menarik perhatian pimpinan jenderal polisi mengenai laporan-laporan yang sekiranya dapat berguna sebagai informasi bagi penyelidikan lokal. Oleh karena itu, ARD membentuk bagian yang integral dengan

pekerjaan polisi pusat karena tanpanya kepemimpinan jenderal yang baik tidak mungkin bisa berjalan.<sup>29</sup>

Dari surat ini maka menjadi jelas lembaga mana yang membentuk aparat pengamanan politik. Di pusat terdapat jaksa agung pemimpin polisi pusat, yang dibantu oleh pengacara umum untuk polisi dan ARD. Tugas ARD adalah mengumpulkan, memotong-motong, menata, memilah-milah informasi yang datang secara terus-menerus yang dikirim oleh Dinas Penyelidikan Daerah dan menyiagakan jaksa agung mengenai persoalan-persoalan yang harus dia periksa, arahkan, dan informasi-informasi yang harus dia berikan kepada Dinas Penyelidikan Daerah.

Di kota-kota besar, tidak hanya meliputi Batavia, Semarang dan Surabaya, tetapi juga Medan, Padang, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Makassar, dan kota-kota lain yang pada tahun 1920 terdapat polisi kota, yang dipimpin oleh ketua komisaris polisi, ajudan komisaris ketua, atau komisaris polisi tingkat pertama. Polisi kota biasanya terdiri dari empat cabang: sekretaris atau hubungan jenderal; penyelidikan (*recherche*), sebuah fotografi, studio daktiografi, dan perpustakaan polisi; kontrol umum yang meliputi patroli jalanan, senjata api, penyimpanan buku, keuangan; dan polisi lalu lintas. Masing-masing cabang diketuai oleh komisaris polisi tingkat pertama.<sup>30</sup>

Cabang penyelidikan (*afdeeling recherche*), juga disebut sebagai dinas penyelidikan kota (*stadsrecherche*, dibandingkan dengan dinas penyelidikan daerah) atau dinas penyelidikan pusat (*centrale recherche*), dibedakan dengan dinas penyelidikan umum, ARD), yang terdiri atas beberapa seksi, masing-masing seksi diketuai oleh komisaris polisi tingkat dua atau polisi wedana (pegawai polisi bumiputra yang berkedudukan wedana,

<sup>29</sup> Parket van den Procureur Generaal, "Rondschrifven aan de Hoofden van Gewestelijke Bestuur," *Wellevereden*, 16 April 1920, Mr. 503x/20.

<sup>30</sup> Dekker, *De Politie*, hlm. 197-199.

ketua distrik, yang merupakan polisi pribumi dengan posisi tertinggi): hubungan administratif tunum, bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan memproses data-data kriminal, menjaga buku daftar, dokumen-dokumen mengenai sesuatu, menyusun statistik, mengatur arsip-arsip intelijen khusus, dan mengumpulkan informasi-informasi mengenai orang-orang dan kasus-kasus yang tidak berada di penyelidikan; penyelidikan kriminal (*opsporingsdienst*) polisi moral (*zedenpolitie*) yang bertanggung jawab atas prostitusi, perdagangan wanita, rekrutmen kuli, perjudian, eksplorasi anak-anak dan perempuan, dan kontrol hotel; hubungan dengan orang-orang Cina; keadaan imigran dan orang-orang asing, polisi candu; potografik dan studio daktilografik; dan yang sangat penting adalah, penyelidikan polisi atau intelijen (*politieke recherche or politieke inlichtingen*). Biasanya seksi-seksi yang berada di bawahnya diketuai oleh polisi asisten wedana (pegawai polisi pribumi yang berkedudukan sebagai pembantu wedana) atau mantri polisi.<sup>31</sup>

Intelijen politik, yang dikenal secara resmi setelah tahun 1926, semula membentuk seksi di cabang penyelidikan. Akan tetapi, pada tahun 1926-1927, cabang itu sendiri sering digabungkan dengan berbagai pengamanan imigran dan orang-orang asing serta berkomunikasi dengan seksi hubungan orang-orang Cina. Tugasnya yang sangat luas dijabarkan dalam pengertian yang umum. Ia bertanggung jawab mengontrol pelaksanaan hak berkelompok dan perkumpulan; situasi rapat-rapat umum (*vergadering*); registrasi dan laporan-laporan mengenai pertemuan (*bijeenkomsten*); penanganan mengenai permintaan rapat-rapat di muka umum, melaporkan rapat-rapat umum dan perkumpulan-perkumpulan; mempersiapkan residen dan *hoofdparket* dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak sesuai dengan aturan umum; investigasi perkumpulan rahasia (yaitu perkumpulan tanpa status resmi penggabungan); investigasi dan rekomendasi pengasingan dan penawanhan; situasi pers, pengeluaran kartu

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 203-205 dan 211-212; Neijtzel de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie", hlm. 126.

wartawan; situasi mengenai masuknya bahaya berita-berita cetak dan tujuan propaganda lainnya; imigrasi dan emigrasi; situasi stasiun, hotel, pelabuhan dan tempat umum lainnya; kontrol terhadap perdagangan senjata. Tugas ini juga meliputi tanggung jawab terhadap penyelidikan atas perkumpulan yang menerapkan status penggabungan legal; permohonan naturalisasi dan status yang sama dengan orang-orang Eropa; kontrol terhadap perubahan nama dan sebagainya.<sup>32</sup>

Hubungan dinas penyelidikan kota dengan daerah dan dinas penyelidikan daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam suatu wilayah karesidenan, lembaga tersebut diketuai oleh ketuanya sendiri di bawah kepala polisi kota dan terpisah dari dinas penyelidikan daerah yang memfungsikan bidang polisi dan unit-unit penyelidikan lokal polisi administratif. Di karesidenan lainnya, dinas penyelidikan ini digabungkan dengan gudang penyelidikan daerah dan secara langsung dipimpin oleh kepala polisi kota yang juga bertindak sebagai pemimpin teknis polisi bidang.<sup>33</sup>

Organisasi dinas penyelidikan daerah (*gewestelijk*, karesidenan) kondisinya lebih rumit. Ia terdiri dari unit penyelidikan lokal (*plaatselijk*, seperti misalnya, kabupaten, distrik, dan subdistrik) yang dibebankan pada polisi administratif, unit-unit penyelidikan memfungsikan detasemen polisi bidang, dan gudang penyelidikan daerah yang langsung dipimpin oleh pemimpin teknis polisi bidang. Maka yang paling penting adalah gudang penyelidikan daerah, yang menurut Jenderal Advokat Umum Polisi Pertama, Neijtzell de Wilde, dibentuk sebagai tulang punggung pengamanan politik daerah dan ditujukan untuk membantu kerja polisi administratif dan polisi bidang.<sup>34</sup>

Polisi bidang mulai dikelola pada tahun 1919 dan diganti dengan polisi bersenjata pada tahun 1922–1923, kecuali di Malaka

<sup>32</sup> Mengenai semua daftar tugas bidang intelijen politik, lihat Dekker, *De Politie*, hlm. 205–206.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>34</sup> Neijtzell de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie," hlm. 129.

dan Manado. Pada tahun 1923 semula ia berkekuatan 3.000 agen polisi bidang, dengan 780 kuda, 2.500 sepeda, dan 420 sepeda motor. Namun kekuatannya dalam tenggang satu tahun merangkak menjadi kurang lebih 10.000 orang. Masing-masing unit disebut sebagai detasemen atau brigade, yang berkekuatan kira-kira 30 orang, diketuai oleh satu komando atau kepala kelompok, dan ditempatkan di 90 barak di seluruh Hindia.<sup>35</sup>

Agen polisi bidang direkrut dari luar daerah, akan tetapi dari daerah yang berbahasa sama. Dua ratus inspektur dan enam puluh kepala agen direkrut dari perwira letnan muda ke bawah dan tentara dari angkatan bersenjata kolonial Jerman sebelumnya di Kianchow. Sembilan staf angkatan bersenjata dipilih komisaris polisi tingkat pertama yang bertindak sebagai pemimpin daerah. Di Jawa, polisi bidang ditempatkan di bawah pemimpin teknis yang bertanggung jawab kepada dua karesidenan, dan di mana terdapat dua polisi kota, kedudukannya sebagai ketua merangkap sebagai pemimpin teknis.<sup>36</sup>

Suatu cabang intelijen kecil dipekerjakan ke tiap-tiap detasemen polisi bidang. Yang mengangkat satu atau dua mantri polisi dan beberapa agen, yang bekerja melakukan komunikasi dengan unit-unit penyelidikan lokal di bawah pegawai administratif pribumi dan orang-orang Eropa dan gudang penyelidikan daerah di bawah pemimpin teknis polisi bidang.<sup>37</sup>

Dinas penyelidikan daerah bertanggung jawab baik terhadap penyelidikan kriminal maupun di bidang pengamanan politik. Dengan demikian, setelah tahun 1922, ketika PKI muncul sebagai kekuatan yang memimpin dalam pergerakan, yang lebih

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 227. Hoorweg, "Gewapende Politie," hlm. 44–46. Neijzell de Wilde, "De Nederlandsch-Indische Politie," hlm. 133.

<sup>36</sup> "De Opleidingsschool, hlm. 51; "De Veldpolitie," hlm. 60. Ketua komisaris polisi di Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya bertindak sebagai pemimpin-pemimpin teknis unit polisi bidang di Batavia, Banten, Semarang, Surabaya dan Madura secara berturut-turut; asisten ketua komisaris polisi/komisaris polisi kelas pertama Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, dan Malang secara berturut-turut bertindak sebagai polisi bidang untuk Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, Pasuruan, dan Basuki.

<sup>37</sup> Neijzell de Wilde, De Nederlandsch-Indische Politie, hlm. 129.

ditekankan sesuai arahan jaksa agung adalah kerja-kerja pengamanan politik. Gudang penyelidikan daerah diperluas. Agen-agennya dikirim ke unit-unit penyelidikan lokal untuk memimpin kegiatan mereka.<sup>38</sup> Pergeseran ini sedemikian rumit. Kelak di masa depan, kepala polisi Batavia, P. Dekker, menulis dalam tinjauan ulang bahwa dinas penyelidikan daerah tidak dapat dibedakan dengan dinas intelejen politik pada pertengahan tahun 1920.<sup>39</sup>

Ekspansi polisi umum (kota, bidang dan gabungan polisi administratif, namun di luar polisi bersenjata dan polisi desa) tampak dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1:  
Polisi dalam Urutan Ranking**

	1921	1925	1928
Orang-orang Eropa	362	1.092	1.346
Komisaris	28	86	110
Inspektur	130	443	611
Kepala Agen	194	526	574
Kepala Detektif	10	37	51
Pribumi	18.341	25.704	31.644
Polisi Wedana	-	5	8
Polisi Asisten Wedana	2	29	54
Mantri Polisi	859	1.198	1.495
Komandan	72	524	1.353
Detektif	111	720	1.668
Agen polisi	17.657	23.223	27.018
Sopir	2	5	48
<b>Jumlah</b>	<b>37.768</b>	<b>53.595</b>	<b>65.980</b>

<sup>38</sup> Cornelis Gijsbert Eliza De Jong, *De Organisatie der Politie in Nederlandsch-Indië. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtsgereerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden* (Leiden: "Luctor et Emergo," (1933), hlm. 46.

<sup>39</sup> Dekker, *De Politie*, hlm. 230. Lihat juga Neijt en de Wilde, *De Nederlandsch-Indische Politie*, hlm. 134 dan 159; *De Veldpolitie*, hlm. 60.

**Tabel 2:**  
**Polisi Umum**  
**Berdasarkan Distribusi Regional**

	1921	1925	1928
Banten	408	585	-
Batavia**	1.438	3.079	5.960
Priangan	1.294	1.406	-
Cirebon	514	686	-
Pekalongan	1.052	1.284	1.349
Semarang	1.782	2.752	2.678
Jepara-Rembang	574	1.029	1.047
Kedu-Banyumas	1.005	955	1.004
Surabaya-Bojonegoro	1.334	2.475	2.657
Madiun	574	829	850
Kediri	999	1.480	1.575
Pasuruan (Malang)	1.333	1.588	1.838
Basuki	699	755	839
Madura	748	760	771
Yogyakarta*	208	533	788
Surakarta*	264	628	792
Total Jawa dan Madura	14.266	20.824	22.148
Pesisir Sumatra Barat	554	579	1.432
Pesisir Timur Sumatra	608	661	2.206
<b>Jumlah Total</b>	<b>29.654</b>	<b>42.883</b>	<b>47.934</b>

\* Kekuatan polisi Kesultanan, Pakualaman, Mangkunegaran, dan Kasunanan tidak termasuk dalam statistik tersebut.

\*\* Batavia dari tahun 1921 dan tahun 1925 termasuk Buitenzorg dan Krawang; Batavia untuk tahun 1928 berarti meliputi semua Jawa Barat.

*Sumber:* Handelingen VR, tahun 1920, Begrooting tahun 1921, Stuk O, Afdeeling IV, 5 hlm. 2-3; Handelingen VR, tahun 1924, Begrooting tahun 1925, Stuk O, Afd. IV, 6, hlm. 2-3, dan Afd. IV, 7 , hlm. 2-3; Handelingen VR, tahun 1927, Begrooting tahun 1928, Afdeeling IV, Stuk 13, hlm. 1-3.

Statistik polisi pemerintah tidak memberitahukan kepada kita mengenai bagaimana beberapa pegawai polisi bertanggung jawab atas pengamanan politik. Namun juga tidak salah menganggap bahwa mayoritas pegawai polisi pribumi yang berkedudukan sebagai wedana, asisten wedana, mantri polisi, dan detektif merupakan anggota penting agen polisi di bidang pengamanan polisi (dalam kasusnya Surakarta dan Yogyakarta, kekuatan polisi umum sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas hanya terdiri dari dinas penyelidikan kota, daerah, dan unit-unit polisi bidang, hampir separo dari agen polisi adalah dinas penyelidik). Lebih dari sepuluh kali lipat, perluasan detektif pribumi (*rechercheurs*) dari tahun 1921 sampai tahun 1925, menunjukkan, aparat pengamanan politik tidak diragukan bertambah secara signifikan pada tahun-tahun tersebut. Bahkan, jika kita mengambil polisi wedana, asisten wedana, mantri, dan detektif sebagai inti aparat pengamanan politik kekuatannya mencapai 1952 orang pada tahun 1925, yang pada intinya lebih besar dari inti anggota PKI. Jaksa agung mempertimbangkan perintah untuk menahan di Digoel pada tahun 1927.

Di sisi lain, distribusi daerah menunjukkan konsentrasi yang besar pada kekuatan polisi di Jawa, khususnya pusat kota Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, dan daerah-daerah gula Pekalongan, Kediri dan Pasuruan (Malang). (Kekuatan polisi di Surakarta dan Yogyakarta tidak diumumkan, sebab kekuatan polisi kasusnya tersebut tidak tercakup dalam statistik. Jika Yogyakarta dan Surakarta tercakup, kekuatannya pasti sama dengan Priangan-Bandung).

## Tumbuh Bersama Partai Komunis Indonesia

Setelah pembentukan aparat pengamanan politik di awal tahun 1920-an, kantor jaksa agung dengan ARD sebagai intinya, segera muncul sebagai pemain utama dalam politik birokratis terhadap kebijakan pribumi (yang terakhir tahun 1923), dan masih tetap bertahan sampai berakhirknya penjajahan Belanda tahun 1942. Salah satu pecundang utama dari perkembangan

baru ini adalah staf pada hubungan orang-orang Arab dan pribumi. Pada dua dekade pertama abad dua puluh, staf tersebut merupakan agen terpenting bagi kebijakan pribumi. Namun pada tahun 1920-an, staf tersebut disederhanakan sampai tidak memiliki pengaruh yang berarti, sehingga pertanyaan muncul di lingkaran pemerintahan tertinggi pada awal tahun 1930-an, apakah menggantinya dengan dua agen baru, biro hubungan politik di bawah direktur administrasi dalam negeri dan biro hubungan agama Islam di bawah direktur agama dan pendidikan. Sebagian alasan atas penggantian ini bersifat organisasional. Sementara kantor hubungan orang Arab dan orang-orang pribumi beroperasi dalam skala kecil, tanpa disertai berbagai perlengkapan daerah, jaksa agung didukung oleh laporan yang datang secara kontinyu dan catatan dari aparat pengamanan politik Hindia yang luas. Namun penggantian tersebut menunjukkan lebih dari sekadar cara pemerintah mengumpulkan intelijen dan pergerakan. Penggantian itu disertai perubahan penting dalam cara di mana perubahan itu menunjukkan politik populer pribumi yang bersifat modern. Dengan melihat pemikiran ini kita perlu menguji ARD, dibandingkan dengan kantor hubungan orang-orang pribumi, singkatnya mengenai perbedaan mereka atas modus operasi, keahlian, mentalitas, dan fantasi.

Kantor Hubungan Orang-Orang Arab dan Pribumi ditetapkan pada tahun 1899 dengan Islamolog legendaris Belanda, Dr. Snouck Hurgronje sebagai penasihat utamanya (1899–1906), dan kemudian diketuai oleh Dr. G.A.J. Hazeu (1907–1913, 1927–1920), Dr. D.A. Rinkes (1914–1916), E. Gobee (1927–1937), dan Dr. G.F. Pijper (1937–1942). Semuanya terlatih dalam Indologi dengan penguasaan bahasa Arab dan pribumi yang baik.<sup>40</sup> Pada tahun 1933, direktur pendidikan dan agama,

---

<sup>40</sup> Tidak ada penasihat yang dipilih dari tahun 1920 sampai 1926, ketika kantor dikelola oleh penasihat deputi, R.A. Kern (1921–1922, 1924–1926) dan E. Gobee (1923). G.A.J. Hazeu (1870) yang telah mendapat gelar doktor dari Universitas Leiden pada tahun 1897 adalah ahli di bidang bahasa dan kebudayaan Jawa. H. Aqib Suminto, *Politiek Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Batavia:

sejarawan terkemuka, B.J. O. Schrieke, yang bertindak sebagai wakil penasihat pada tahun 1917–1920 mencatat sejarahnya demikian:

Kantor ini, secara bertahap telah berkembang keluar dari biro penasihat hukum Islam, lalu bertindak menjadi penasihat pemerintah bagi hubungan orang Arab dan pribumi pada saat dunia orang-orang pribumi keadaannya masih tenang. Oleh karena itu, mengukur isu-isu masyarakat pribumi yang lebih dalam.

Situasi ini berangsur-angsur berubah. Pada permulaan abad dua puluh muncul pergerakan, yang pada umumnya disebut sebagai, “kebangkitan orang-orang Asia” yang mendobrak kesunyian dunia pribumi. Muncullah perkumpulan-perkumpulan politik pribumi, yang di dalamnya terdapat pers pribumi, yang memuat opini politik yang berkembang di lapisan dunia pribumi yang lebih tinggi—yang segera menemukan tempat aspirasi rakyat *Volksraad*—sebagai wadah yang dapat menerima aspirasi secara terbuka. Di samping itu, opini-opini tersebut sangat berbeda dengan opini-opini sebelumnya; bentuk opini yang lebih baik.

Di bawah kondisi yang berubah itu, selain kantor hubungan orang pribumi, organ-organ pemerintah yang lain harus memberikan perhatian atas berbagai kecenderungan spiritual (*geestesstroomingen*) yang berada di masyarakat pribumi. Selama perang dunia, dinas intelijen politik menerima keadaan yang kini dirasakan oleh *hoofdsparket*. Sementara itu pos pemerintahan yang mewakili hubungan-hubungan umum (pada *Volksraad*) dibentuk, yang secara resmi bersamaan dengan pemerintahan yang mewakili polisi. Ia dibentuk untuk menangani situasi politik umum di *Volksraad*. Juga kepala administrasi daerah, bertanggung jawab

---

LP3ES, 1985), hlm. 125; C.W.J. Driewes, “Balai Pustaka dan Pendahulunya,” dalam Nigel Phillips dan Khairil Anwar, *Papers on Indonesian Languages and Literature* (London: The Indonesian Etymological Project, 1981), hlm. 101. D.A. Rinkes (1878) mendapatkan gelar doktor di Leiden pada tahun 1906, dan bertindak sebagai deputi penasihat hubungan-hubungan pribumi dari tahun 1911–1913 dan sebagai kepala Balai Pustaka dari tahun 1917–1927. R.A. Kem (1875) belajar Indologi di Utrecht pada tahun 1893–1905, dan akhirnya menjadi dosen bahasa Sunda di Leiden pada tahun 1927–1942. E. Gobee (1881) belajar Indologi di Leiden pada tahun 1906–1908 dan bahasa Arab pada tahun 1915 dan menjadi konsul di Jeddah dari tahun 1917–1921. G. F. Pijper (1893) mendapatkan gelar doktor bahasa Arab dan Islamologi pada tahun 1924. Suminto, *Politik Islam*, hlm. 132, 128, 141, dan 147.

seperti mangamankan dan menata daerahnya sendiri, menjaga mereka sendiri dan pegawai-pegaui administratif yang berada di bawahnya, menginformasikan kehidupan yang diinginkan dalam dunia pribumi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah selain organ-organ yang disebutkan di mu<sup>ka</sup>—administrasi dalam negeri di satu sisi, dua pemerintahan yang mewakili yang lain, di samping dinas intelijen politik di bawah kepemimpinan jaksa agung—masih diperlukan organ-organ yang lain, dalam kasus ini adalah kantor hubungan pribumi.<sup>41</sup>

Sebagaimana Schrieke tunjukkan dengan tepat, kantor hubungan orang-orang Arab dan pribumi dibentuk sebelum munculnya pergerakan, ketika dunia pribumi masih dalam keadaan sepi, dan dalam kata-kata Boekhoudt, "perasaan nasional tampak tidak terdapat di kalangan orang-orang Jawa, setidaknya, perasaan ini sedang tidur nyenyak". Hal ini tidak berarti bahwa dunia pribumi dalam keadaan tenang dan tidak terdapat kerusakan, kerusuhan, revolusi, dan pemberontakan yang mengacaukan tatanan kolonial. Rupanya pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana orang-orang pribumi dapat dipahami melalui mentalitas, pemikiran, dan masyarakat mereka. Karena di sana terdapat misteri yang tidak dapat dipahami di antara orang-orang Belanda mengenai orang-orang pribumi, Cina, dan Arab di Hindia pada pergantian abad dua puluh.

Dengan demikian, di awal abad dua puluh, berbagai ancaman terhadap tatanan tampak kelihatan. Sebagaimana Boekhoudt katakan, dari "Pan Islamisme" dan "fanatisme atas pembaruan kerajaan Jawa". Ketakutan ini mengisyaratkan perlunya didirikan kantor hubungan orang-orang Arab dan pribumi. Pendirinya, Snouck Hurgronje, menyatakan bahwa, "sebagian besar Kiai, ulama, dan haji, adalah sosok dunia lain, sebagian besar mereka tidak pernah berharap kecuali beribadah kepada Allah dalam kedamaian. Namun ulama fanatik yang membaktikan gagasan-gagasan "Pan Islamisine" harus diawasi.

---

<sup>41</sup> "Directeur van onderwijs en eredienst (B. J. O. Schrieke) aan gouverneur-generaal (de Jonge), 28 Oktober 1933," in Kwantes, *De Ontwikkeling: Agustus 1933–1942*, lln. 95–96.

Musuh kita bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik, baik dalam bentuk agitasi melalui fanatik lokal, maupun dalam bentuk "Pan Islamisme", apakah dalam kenyataannya diinspirasikan oleh peraturan Islam yang bertindak keluar seperti khalifah atau tidak: Kantor tersebut harus bertanggung jawab terhadap pengukuran isu-isu mutakhir masyarakat pribumi yang lebih mendalam dan mengawasi jaringan kerja subversif muslim fanatik, baik lokal maupun internasional, madzhab dan guru agama (kiai dan ulama), sekolah agama, pemimpin tarekat, haji, orang-orang Arab Hindia, dan Kampung Jawi di Makah.<sup>42</sup> Target pengawasan kemudian didefinisikan. Adalah wajar bagi orang yang mengelola kantor sebagai penasihat dan wakil penasihat dilatih dalam Islamologi dan Indologi, mempunyai keahlian pengetahuan Islam dan Hindia, menguasai bahasa Arab dan pribumi dengan baik, dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan pemuka-pemuka pribumi dan komunitas Arab di Hindia.

Na mun demikian, pada akhirnya keahlian-keahlian tersebut menimbulkan keruntuhannya sendiri. Suatu kali muncul gerakan yang menimbulkan kegaduhan dan melawan agen-agen pemerintah, bukan kantor hubungan pribumi yang mulai mengawasi dunia orang-orang pribumi. Kejadian ini setelah jelas latar belakangnya, bahwa Islam ternyata bukanlah agama yang menakutkan. Bahwa yang disebut sebagai konspirasi Islam internasional hanya isapan jempol, dan terjadinya kerusakan, revolusi, dan pemberontakan-pemberontakan ternyata tidak berasal dari *Pan Islamisme*, namun berasal dari hal lain. Maka dalam pembelaannya terhadap kantor hubungan orang-orang pribumi, Schrieke tidak menekankan Islam melainkan sumbangan unik kantor tersebut karena telah membuat pemerintah:

Pegawai-pegawai administrasi dalam negeri hanya bisa berorientasi pada masalah lokal, sebab segala hal risiko mereka

---

<sup>42</sup> Harry J. Benda, *Crescent and The Raising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942–1945* (The Hague: W. van Hoeve, 1958) hlm. 23–24. Juga lihat Sumiyo, *Politik Islam*, hlm. 52–58, 64–70, 78–97, dan 99.

sendiri; mereka merindukan gambaran fenomena yang utuh, yang hasilnya dapat mereka percaya di daerah mereka sendiri. Terutama jaksa agung mengarahkan perhatiannya terhadap penggalian bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu melihat masyarakat pribumi dengan tujuan yang terbatas. Namun, fenomena tersebut juga dapat dicerna secara sosiologis dan akademis. Inilah tugas yang diberikan kepada kantor hubungan orang-orang pribumi. Tugas yang harus dikerjakan dengan sistem administrasi yang baik. Di samping ini, adalah tradisi yang dibentuk oleh Snouck Hurgronje sebagai penasihat Bahasa Timur dan Hukum Islam: bahwa kantor bukan hanya bersifat resmi melainkan juga harus melakukan hubungan yang lebih hangat di antara tokoh-tokoh masyarakat di bidang agama dan politik dalam masyarakat pribumi. Melalui informasi yang bernilai, harus dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan yang terjadi di masyarakat pribumi: yakni informasi yang berasal dari lingkaran tempat administrasi dalam negeri dan dinas intelijen mendapatkan aksesnya. Penasihat hubungan orang-orang pribumi adalah orang yang dipercaya (*vertrouwensman*) sejak awal, kepada siapa tokoh-tokoh masyarakat pribumi mengungkapkan perasaan dan pendapatnya (juga kritiknya terhadap kebijakan pemerintah), yang biasanya dirahasiakan dari pegawai lain.<sup>43</sup>

Maka dapatlah dipahami, bila Schricke tidak mengatakan bahwa penasihat hubungan orang-orang pribumi itu sebagai "orang yang dapat dipercaya" oleh masyarakat pribumi, yang jauh sebelumnya menaruh curiga karena radikalasi gerakan tersebut. Untuk melihat hal ini mengapa dapat terjadi, kita hanya perlu menyebutkan salah satu perkembangan utama dalam gerakan di awal tahun 1920-an, yang disebut Schrieke sebagai kebangkitan yang bersifat ekstremis seperti komunisme, ekstrem nasionalis, dan nonkooperatif.

Sebagaimana Pengacara Umum Monsanto menulis kepada gubernur jendral yang mengusulkan pembentukan ARD, gerakan-gerakan tersebut tengah menunjukkan tanda-tanda "pembusukan", "semakin liar" dalam radikalasinya, jika dilihat

<sup>43</sup> "Directeur van onderwijs en eredienst (B. J. O. Schricke) aan gouverneur-generaal (de Jonge), 28 Oktober 1933," in Kwantes, *De Ontwikkeling: Agustus 1933-1942*, hlm. 96-97.

dari kacauanata pemerintah. Dengan demikian, yang menarik, dia (barangkali) tidak dapat mentcorisasikan "pembusukan" ini, karena meskipun "hantu" Islam telah tiada, di tempat yang sama masih belum muncul suatu "hantu" komunis baru. Namun situasi segera berubah. Kurang dari setengah tahun setelah terbentuknya ARD, ISDV diubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), Liga Komunis di Hindia dengan Semaoen sebagai ketua umum pada bulan Mei 1920. Perpecahan SI, yang mulai menjalar dari kepemimpinan pusat sampai ke tingkat lokal di bulan Oktober 1920, menjadi jelas melalui Kongres CSI di Madiun bulan Februari 1923 dan Kongres PKI di Bandung dan Sukabumi pada awal Maret 1923. Pada awal tahun 1924, PKI dan SI Merah yang sebelumnya muncul sebagai pemenang dalam merebut hegemoni gerakan. Perkembangan ini membuat kantor hubungan orang-orang pribumi tidak relevan bagi kebijakan pemerintah untuk orang-orang pribumi, pegawai-pegawainya tidak memiliki akses terhadap PKI dan SI Merah.

Perluasan aparat penyelidikan daerah, dibentuk karena merespon perkembangan ini. Dengan demikian, yang lebih penting adalah fakta bahwa aparat pengamanan politik menemukan PKI dan SI Merah sebagai musuh utamanya. Pegawai polisi dari ARD sampai Unit Penyelidikan Daerah mengembangkan keahlian pengamanan politik dalam mengatur PKI dan SI Merah. Mereka tidak memerlukan lagi keahlian bidang Indologi, Islamologi, atau bahasa pribumi. Sebagian besar agen-agen polisi lokal merupakan orang-orang pribumi, yang biasanya beroperasi di daerah mereka sendiri. Mereka mengandalkan mata-mata dan pencari informasi yang dikumpulkan intelijen, pengetahuan yang terkumpul mengenai seluk-beluk partai dan organisasi lokal; identitas, personalitas pemimpin lokal dan aktivis, tempat tinggal, tempat persembunyian yang mungkin, nama samaran, teman dan sanak famili, tempat pertemuan, kurir, identitas serta simpatisan mereka.

Ribuan informasi diterima oleh *hoofdsparket* secara kontinyu. Untuk menutup, memilah, menata, menghubungkan, membuat

informasi yang kontradiktif dan terpisah-pisah dapat dipahami ARD di bawah van der Ley yang selalu membutuhkan "kertas kerja teoritis". Menyesalkan kemunculan PKI, yang ditemukan berada dalam konspirasi komunis internasional yang fantastik, ARD melihat tangan-tangan Moskow di mana pun terlibat di balik layar, yang memahami aksi-aksi yang kurang terkoordinasi dan kadang-kadang murni bersifat individual, tindakan teroris yang bersifat anarkis sebagai bagian dari rencana besar komunis yang dikendalikan *Comintern*. Kemudian ARD mengembangkan keahliannya dalam pengamanan dalam negeri dan jaringan kerja komunis internasional; identitas, nama-nama samaran tokoh-tokoh PKI, daerah dan luar negeri, komunikasinya dengan *Comintern*, rute-rute perjalanannya, tempat persembunyian, tempat pertemuan, tempat tinggalnya, dan beberapa tempat makannya di Singapura, Penang, dan Belanda. Kontak-kontaknya, sandi-sandi rahasianya, perintah rahasia komite pusat partai yang diisukan ke cabang-cabang, alamat surat-menurut rahasianya, identitas orang-orang menghubungkan antara partai pusat dan cabang, mata-mata dan pemberi informasi dengan akses ke pemimpin partai.<sup>44</sup>

Pendeknya, ARD membentuk topografi dan biografi sendiri, jika kita menggunakan istilah yang diciptakan tokoh pendiri polisi rahasia modern, Fouche.<sup>45</sup> Tidak ada yang menunjukkan akumulasi keahlian pengamanan politik yang bersifat lebih grafis dibandingkan naiknya jumlah selipan sidik jari tangan dan

<sup>44</sup> Lihat, misalnya, bagaimana agen dua polisi dikirim dari Semarang pada bulan Agustus 1926 untuk menelusuri ke jaringan ketiga PKI di Singapura. Mereka langsung menuju kedai di jalan Arab No. 131 di mana pelatihan komunis dari Sumatra Barat sedang singgah. Dengan memperkenalkan dirinya sebagai pelarian komunis dari Yogyakarta, mereka mudah diterima, dan dalam beberapa minggu salah seorang bertanggung jawab menerima dan mengirim wakil komunis dari Jawa ke tempat pertemuan di Batu Pahat, sementara yang lain, menjadi sekretaris dagang komunis Sumatra tanpa sepengertahan Tan Malaka dan didukung oleh Alimin dan Moesso. Mereka dapat beroperasi sebagai mata-mata sampai mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Soebakat, ia datang dari Semarang, oleh karena itu identitas mereka dapat diketahui. Lihat, laporan Geheim, Pinang, 9 September 1926; 13, 1926; dan 30 September, semuanya dalam, Mr. 971x/ 26.

<sup>45</sup> Eric A. Arnold, Jr., *Fouche, Napoleon and General Police* (Washington, DC: University Press of America, 1979), hlm. 154.

beberapa identifikasi (misalnya, fotografi) yang terkumpul di polisi umum. Jumlah selipan sidik jarinaik dari 19.077 pada tahun 1924 menjadi 24.605; pada tahun 1925 naik menjadi 29.467; pada tahun 1926 menjadi 36.862; pada tahun 1927 naik menjadi 36.862. Sementara itu, jumlah identifikasi (fotografi) tumbuh dari 1.469 pada tahun 1924 menjadi 2.402 pada tahun 1925, menjadi 3.030 pada tahun 1926, menjadi 3.710 pada tahun 1927.<sup>46</sup>

Sejarah ini membentuk tradisi pengamanan politik di Hindia—keahliannya, caranya melihat gerakan, apakah gerakan komunis, nasionalis ekstrem, gerakan non-kooperatif maupun kooperatif. Tokoh pendirinya adalah orang seperti van der Lely, yangmeyakini betapa pentingpekerjaannya dan kebanggaannya atas capaian-capaiannya ditulis saat setelah masa pensiunnya di Belanda.

Dengan berperan di belakang layar, saya biasanya tidak dapat mendapatkan secara detail selama berpengalaman sebagai ketua Dinas Penyelidikan Umum dan selama menetapkan sifat dan prioritas kerja detektif “yang lebih baik”. Oleh karena itu, peran tersebut terasa cukup menggarisbawahi, karena pengaruh luar negeri terhadap peristiwa mutakhir di Timur Jauh sangat berarti, meski di bawah tanah, pentingnya kerja detektif yang lebih baik itu seharusnya tidak dikesampingkan makna pentingnya. Polisi modern mengemban tugas ini berdasarkan kemampuannya.<sup>47</sup>

## Tatanan Rezim Baru

Aparat pengamanan politik banyak yang berada di tempat kejadian saat terjadi revolusi pada akhir tahun 1926 dan awal

<sup>46</sup> Tahun tersebut maksudnya adalah akhir tahun. Centraal Kantoor voor de Statistiek in Nederlandsch-Indie, *Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië: Jaargang 1925*. (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1926) hlm. 174; *Jaargang 1926* (1927) hlm. 174; *Jaargang 1927* (1928), hlm. 207.

<sup>47</sup> A.E. v.d. Lely, “Handhaving der openbare rust, orde en veiligheid,” dalam, *De Nederlandsch-Indische Politiegids*, Juni 1932, No. 1932, hlm. 191–193, aslinya dipublikasikan dalam *Rijsteenheid* pada bulan Januari 1932. Yang berhuriuf miring adalah naskah asli.

tahun 1927. Dalam perkembangannya revolusi tersebut tidak sempat meletus. Peristiwa ini berkembang sesuai rencana semula; kontrol dan kepemimpinan jaksa agung terhadap Dinas Penyelidikan Daerah yang lebih ketat; mempermudah hubungan komunikasi antara ARD dan Dinas Penyelidikan Daerah; Penertiban dan Ekspansi Dinas Penyelidikan Daerah; Kontrol dan Kepemimpinan Dinas Penyelidikan Daerah yang lebih ketat terhadap Unit-unit Penyelidikan Lokal; keterlibatan Unit-unit Penyelidikan Lokal yang semakin kuat terhadap kehidupan desa. Ada dua hal yang layak mendapat pertimbangan. Pertama, adalah pertimbangan organisasional, yang akan didiskusikan di bawah. Pertimbangan lain adalah, yang berkaitan dengan dampak politik. Yang akan diterangkan di bagian akhir bab ini.

Kita mulai dengan *hoofdparteket*. Apakah terjadi revolusi atau tidak, jaksa agung dan pengacara umum berubah secara bertahap. Pada tahun 1926 sampai tahun 1942, tujuh pegawai bertindak sebagai jaksa agung; D.G. Wolterbeek Muller (1922–1926); H.G.P Duijfjes (1926–1928); J.K. Onnen (1928–1929); R.J.M. Nerheijen (1929–1934); G. Vonk (1934–1938); H. Marcella (1938–1940); A.S. Block (1940–1942). Sebaliknya, ARD hanya memiliki dua ketua; deputi ketua dan ketua pegawai pribumi di sepanjang sejarahnya; A.E van der Lely (1991–1929) dan B.R. van der Most (1929–1942) sebagai ketua ARD; van der Most (1920–1929) dan H.J.A Vernijs (1929–1942) sebagai deputi; Mohammad Jatim (1920–1935) dan Raden Hermansaid (1935–1942) sebagai ketua pegawai pribumi.<sup>48</sup> ARD didirikan pascarevolusi oleh orang-orang yang masih mempunyai ingatan akan revolusi. Yang diliputi dengan mentalitas, “jangan sampai terjadi lagi”, dan kewaspadaannya terhadap politik orang-orang Indonesia yang

<sup>48</sup> Lihat, Regeeringsalmanak, 1919–1941. Di daerah-daerah tersebut kelancaran personil intelijen diumumkan. Cabang intelijen politik polisi kota di Batavia mempunyai empat ketua dari kalangan pribumi: Mohammad Jatim (1920–1922), Naipin (1923–1929), Mas Rangga Soetandoko (1929–1940) dan Mas Mohammad Jasri Partadiredja (1940–1942). Bandung dan Semarang masing-masing mempunyai tiga. Surabaya empat. Namun intelijen politik polisi Surakarta sepanjang sejarahnya hanya punya satu, R. Ramelan.

nasionalis selalu diliputi fantasi konspirasi komunis internasional.

Di berbagai propinsi, aparat penyelidikan daerah dan kota ditambah. Di daerah luar kota, inti penyelidikan (*recherche kernen*, juga disebut sebagai Dinas Penyelidikan Khusus, *speciale inlichtingen-dienst*), yang ditetapkan sebagai gudang penyelidikan daerah pada akhir tahun 1920-an, meluas hingga ke wilayah Jawa Barat, Pekalongan, Semarang, Kedu-Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Surabaya-Bojonegoro, Pasuruan-Malang, dan Sumatra Barat dan Timur Laut. Inti penyelidik yang lebih kecil ditetapkan di Kediri, Besuki, Tapanuli, Palembang, Jambi, Benkulen, Lampung, Bangka, Riau, Malaka, dan daerah di Kalimantan. Sekolah Polisi juga mulai membuka kursus baru pelatihan pegawai intelijen politik.<sup>49</sup> Kita dapat melihat dalam tabel 1 dan 2 kekuatan yang berkekuatan polisi umum menanjak dari 26.796 pada 1925 menjadi 32.990 pada tahun 1928. Sementara itu, jumlah detektif ditingkatkan dari 720 menjadi 1.668 pada periode yang sama.

Peningkatan aparat pengamanan politik terjadi pada tahun 1927. Gubernur jenderal diinstruksikan jaksa agung agar memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan politik pada tanggal 7 Desember 1926. Sebaliknya, jaksa agung mengirimkan edaran rahasia kepada administrasi daerah tanggal 7 Desember 1926 dengan instruksi untuk melaporkan struktur organisasi pengamanan politik di daerahnya masing-masing, sejumlah personel intelijen, tingkatan-tingkatannya, dan rencana reformasinya. Dalam edaran yang sama, Duyfjes juga mengatur para penduduk untuk menginstruksikan pegawai polisi dan pegawai administratif yang berada di bawahnya agar melaporkan secara langsung kepada jaksa agung, memperpendek hierarki administratif, apa pun yang tampak penting lebih

---

<sup>49</sup> Mededeelingen der Regeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang (Mei 1928), (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928) hlm. 2–3. Lihat juga Procureur Generaal (Duyfjes) aan Gouverneur Generaal (de Graeff) 10 Januari 1927, Mr. 66x/1927.

sekadar masalah lokal dapat melalui telegram, atau jika perlu melalui telepon.<sup>50</sup>

Perkembangan penting lainnya adalah logika kejelasan hubungan PKI internasional dan kehadiran pemimpin komunis serta buronan luar negeri, khususnya di Malaysia. Ini merupakan kerja sama polisi internasional pemerintah Hindia dan koran milik pemerintah Inggris. Kerja sama polisi informal dimulai pada bulan Juli 1926, ketika wewenang pemerintahan Inggris di Singapura setuju untuk mengizinkan dua agen polisi yang dikirim oleh ARD untuk memata-matai komunis Hindia di Malaysia yang masih dijajah Inggris. Dengan berpura-pura menjadi buronan komunis dari Yogyakarta, mereka berhasil menelusur ke dalam jaringan kerja lokal komunis dari Sumatra Barat, dan melaporkan kembali ke ARD sebelum identitasnya dibongkar oleh Soebakat pada bulan September, mengenai perpecahan yang berkembang di antara Tan Malaka, Soebakat, dan Djamaloedin Yamin, di satu sisi, dan Komite Sentral PKI yang dipimpin oleh Sardjono dan Boedisoetjiwo yang berkaitan dengan rencana revolusi dan kunjungan Alimin dan Moesso ke Moskow.<sup>51</sup> Keberadaan "pusat propaganda" komunis Hindia di Singapura menegaskan, jaksa agung menyarankan untuk mempertahankan unit intelijen untuk memantau aktivitasnya di Singapura.<sup>52</sup> Dengan demikian, negosiasi terjadi, dan hanya setelah revolusi di Jawa Barat. Kepala polisi memberikan laporan kepada deputi konsul jenderal Belanda secara meyakinkan dan kuat:

Kebijakan kita pada saat ini adalah mencegah komunis Jawa yang sudah dikenal mendarat di Malaysia. Sayangnya, kita hanya

<sup>50</sup> Iste Gouvernementssecretaris (H.A. Helb) aan Procureur Generaal (Duyfjes), 7 Desember, 1926, Mr. 1225x/1926; Procureur Generaal aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur, Rondschrijven-Spocd-Geheim, 29 Desember 1927 dan, Procureur Generaal aan Gouverneur Generaal (de Graeff), 10 Januari 1927, keduanya terdapat dalam Mr. 66x/1927.

<sup>51</sup> Lihat laporan Geheim, 13 September 1926, Mr. 971x/1926; Laporan Geheim, 30 September 1926, Mr. 1031x/1926.

<sup>52</sup> 1 stc Gouvernementssecretaris aan wd. Consul Generaal der Nederlanden te Singapore, 25 Oktober 1926, Mr. 1031x/1926.

mampu mengenali dua atau tiga pemimpin. Jadi jika blokade dibuat efektif, pemerintah Hindia Belanda Timur perlu mengirim setidaknya dua orang, satu di Singapura dan satunya lagi di Penang secara sembunyi-sembunyi, sebagai *board vessels* yang datang dari Jawa dan Sumatra, yang memperingatkan polisi atas munculnya pemimpin komunis terkenal atau yang ekstremis.<sup>53</sup>

M. Visbeen, asisten komisaris polisi pada polisi kota di Batavia dikirim ke Singapura dengan dua detektif pribumi pada awal bulan Desember. Dia mempertahankan kerja sama yang erat dengan Fairburn, Inspektur Jenderal Polisi *Straits Settlements*, dan Rene Oiract, ketuanya departemen penyelidikan kriminal (polisi khusus masa depan). Poin penting dan puncak kegagalan kerja penyelidikan Visbeen di Singapura adalah penahanan Alimin dan Moesso serta pembuangan mereka berikutnya dari Malaysia pada bulan Desember 1926. Visbeen kembali ke Batavia pada bulan Juli 1927, hubungan personal yang penting dilakukan, kemudian dia muncul sebagai ahli mengenai komunis Hindia secara luas.<sup>54</sup>

Pada tingkat yang lebih formal, pemerintahan Hindia, pertama mengenalkan perlunya kerja sama polisi internasional pada akhir tahun 1924 dan meminta pemerintahan Inggris di India, dan pemerintahan Prancis di Indo Cina pertukaran intelijen dalam "propaganda kolonial pemerintah Soviet" pada bulan Januari 1925. Pemerintahan Prancis tidak menanggapi, namun negosiasi antara pemerintahan Hindia dan pemerintahan India yang masih dijajah Inggris berhasil mengadakan kesepakatan pada bulan Februari 1927 dalam pertukaran intelijen langsung antara ketua ARD dengan Direktur Biro Intelijen British India.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Wd. Consul Generaal (Klcyn Molckamp aan Gouverneur Generaal (de Graeff, Singapore, 25 November, 1926, Mr. 12x/1927. Lihat juga wd. Consul Generaal aan Gouverneur Generaal, Singapore, 22 November 1926, Mr. 12x/1927.

<sup>54</sup> Mengenai kegiatan di Singapura, lihat, Mr. 881x./1927, 902x/1927, dan 1104x/1927.

<sup>55</sup> Lihat Procureur Generaal (Duyfjes) aan Gouverneur Generaal (de Graeff), 15 Juli 1926, Mr. 745x/1926; wd. Iste Gouvernementsssecretaris aan Procureur Generaal (Duyfjes, 3 Agustus 1926, Mr. 745x/1926; Viceroy dan Gubernur Jenderal India ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Simla, 26 September 1925, Mr. 70x/27; Viceroy dan Gubernur Jenderal India ke Gubernur Jenderal Hindia Timur Belanda,

Namun rencana ini hasilnya tidak menuaskan, sebab pertukaran intelijen tidak terjadi secara teratur.<sup>56</sup> Ketika Gubernur Wilayah Selat, Sir Cecil Clementi berkunjung ke Batavia pada bulan Agustus 1930, Gubernur Jenderal de Graeff memunculkan dan mendiskusikan lagi dengan Gubernur Inggris, "pertanyaan mengenai kerja sama yang lebih dekat, langsung, dan sistematis antara pemerintahan kita dengan tujuan pengontrolan dan pencegahan agitasi komunis". Mereka mencapai kesepakatan.<sup>57</sup> Jenderal pengacara polisi G. Vonk berkunjung ke Singapura bulan Oktober 1930, dan membuat rencana dengan polisi *Straits Settlements* untuk pertukaran sistematis atas:

- a. Fotografi dan gambaran agitator yang dicurigai; b. manifesto-manifesto komunis, poster-poster, selebaran-selebaran, jika perlu reproduksi fotografi; c. salinan laporan-laporan penting, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan agitasi komunis dan korespondensi komunis yang penting dalam reproduksi fotografi; d. informasi mengenai rencana tindakan para ekstremis dan wilayah bersama kita, yang terakhir ini harus diberikan dengan kemampuan maksimal yang dimiliki.<sup>58</sup>

Juga disetujui bahwa pertukaran ini terjadi secara langsung antara *hoofdparke*l dan inspektur jenderal polisi di Singapura yang berkaitan dengan aktivitas komunis dan antara penasihat Hindia dalam hubungan orang-orang Cina dan sekretaris *Straits Settlements* untuk hubungan orang-orang Cina yang berkaitan dengan persoalan yang bersinggungan dengan orang-orang Cina.

Delhi, 28 Desember 1926, Mr. 70x/ 27; Procureur Generaal (Duyfjes) aan Gouverneur Generaal, 24 Februari 1927, Mr. 380x/1927.

<sup>56</sup> Lihat Kwantes, *De Ontwikkeling: 1928 – Agustus. 1933*, hlm. 486.

<sup>57</sup> "Gouverneur-generaal (de Graeff) aan gouverneur van de Straits Settlements (sir Cecil Clementi), 16 September 1930, di Kwantes, *De Ontwikkeling: 1928 – Agustus. 1933*, hlm. 486.

<sup>58</sup> "Gouverneur-generaal (de Graeff) aan gouverneur van de Straits Settlements (sir Cecil Clementi), 16 September 1930, di Kwantes, *De Ontwikkeling: 1928 – Agustus. 1933*, hlm. 486-487. Lihat juga Uittreksel uit het register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië, 26 September 1930, Mr. 936x/1930; 1ste Gouvernementssecretaris aan Procureur Generaal, 23 Oktober 1930, Mr. 1035x/1930.

Vonk mengalami euporia ketika dia kembali ke Batavia. Dalam laporannya kepada gubernur jenderal, dia menulis: telah menerima tugas untuk pemerkasaan sejumlah besar bundelan (dokumen) dan laporan-laporan mengenai kecondongan pengamanan politik Semenanjung Malaya. Bersama PNI Soekarno yang sangat diingat, Vonk juga menemukan beberapa isu yang sangat berguna mengenai laporan yang sangat rahasia dari biro intelijen Inggris untuk memahami jenis persoalan pengamanan politik gerakan pemberontakan yang lebih besar yang dapat terjadi. Namun kepentingan utamanya terletak pada komunisme internasional, dalam berbagai aktivitas, Semaoen, Darsono, Alimin, Tan Malaka, dan Mocso, dia mengalami euporia karena Fairburn, ketua polisi berkebangsaan Singapura, menyuarakan positif atas tekanannya terhadap otoritas pemerintahan Inggris di Singapura dalam meminta organisasi polisi mereka untuk bekerja sama demi peningkatan kepentingan Hindia Belanda secara spesifik ini.<sup>54</sup>

Kita akan melihat dalam bab berikutnya, kenapa kemudian Vonk sedemikian tertarik dengan aktivitas komunis Hindia secara luas. Apa yang perlu dicatat pada saat itu adalah bahwa pemerintahan Inggris di Singapura mempunyai kebutuhannya sendiri dalam pertukaran intelijen. Di Malaysia, polisi bagian intelijen kriminal *Straits Settlement* (*Straits Settlement Police Criminal Intelligence Department-CID-SS*), yang mencantumkan kembali nama cabang khususnya pada tahun 1933, telah ditempatkan sejak tahun 1918 dalam berhubungan dengan masalah-masalah politik. Namun tidak sampai menunggu usainya pemberontakan komunis Cina di Singapura, pada bulan Maret 1927, pemerintah menjadi lebih serius dengan kegiatan komunis dan menambah jumlah organisasi polisi, seperti kata ketua CID, Onraet, tersedianya gaji, pembangunan, perlengkapan yang lebih baik, pelatihan peningkatan gudang yang berkekuatan lebih dari 4.000, uang

---

<sup>54</sup> Rapport advocaat-generaal (G. Vonk) over besprekingen met Engelse autoriteiten te Singapore van 10-17 Oktober 1930, 18 Oktober 1930, di Kwartes, De Oorlogsdienst, 1928 Agustus 1933, hlm. 487-488.

yang lebih dari cukup bagi polisi rahasia, perlusan departemen-departemen yang ada, dan otoritas polisi yang tidak dipisah-pisah dalam aktivitas orang-orang Cina yang sampai sekarang sebagian masih dikontrol oleh departemen pemerintahan.<sup>60</sup> Dengan demikian, di Malaysia, orang-orang komunis terutama berasal dari kalangan orang Cina, seperti pernah diramalkan oleh Tan Malaka secara tepat pada tahun 1925, Malaysia hanya terlibat secara marginal dalam gerakan-gerakan komunis.<sup>61</sup> Inilah alasan yang dikemukakan penasihat Hindia untuk hubungan orang-orang Cina dan sekretaris *Straits Settlements* untuk hubungan orang-orang Cina yang dibawa dalam pertukaran intelijen. Namun tidak terdapat pertanyaan jaksa agung yang banyak bermanfaat mengenai reorganisasi dan ekspansi aparat intelijen politik Malaysia seperti dapat kita lihat pada hancurnya PARI yang beranggotakan orang-orang Singapura pada tahun 1932.

## Politik Pengamanan Politik

Kini akhirnya kita sampai pada pembahasan untuk mempertimbangkan sifat umum pengamanan politik di Hindia, bentuk politik di mana pengamanan politik diambil pada masa-masa pascarevolusi. Dua hal yang penting didiskusikan. Pertama,

<sup>60</sup> Rene H. Onraet, *Singapore-A Police Background* (London: Dorothy Crisp, 1947), hlm. 96–97. Seperti AID merupakan puncak dari masa profesionalisasi dan modernisasi polisi, CID-SS dipimpin dari awal oleh pegawai polisi profesional. Pemimpin pertamanya, V.G. Savi, yang menguasai bahasa Melayu, Fukin, Hindustan, dan Punjabi, adalah “anak sekolah” pertama, lulusan dari dinas calon perwira polisi untuk Hongkong dan Melayu yang didirikan pada tahun 1903. Onraet juga anak sekolah yang mendapatkan pelatihan bahasa secara intensif di Amoy, adalah ketua CID-SS kedua dankerjanya dekat dengan Visbeen dalam mencari pelarian komunis Hindia di masa-masa awal kejayaan sama polisi formal dan informal Belanda-Inggris. Cabang mempunyai 25 pegawai pada tahun 1935 dan 43 orang pada tahun 1936, dan terdiri dari lima seksi yang bertanggung jawab atas orang-orang komunis, Jepang, keamanan, politik (misalnya, kegiatan politik nonkomunis) dan hubungan persekutuan. Mengenai sejarah polisi rahasia di Inggris-Melayu, lihat juga Alun Jones, “Internal Security in British Malaya, 1915–1935,” disertasi Ph.D., Yale University, 1970.

<sup>61</sup> Lihaq, Cheah Boon Kheng, *From PKI to Comintern, 1924–1941: The Apprenticeship of the Malayan Communist Party; Selected Documents and Discussion Compiled and Edited with Introductions* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1992), hlm. 50–51.

dampak politik yang menimpa masyarakat pribumi. Kedua, dampaknya terhadap pemerintah Hindia.

Sebagaimana Thamrin secara berapi-api menyatakan dalam pidato di *Volksraad* pada tahun 1930, intervensi polisi terhadap gerakan biasa terjadi dan rutin dilakukan pada masa-masa pascarevolusi.<sup>62</sup> Pegawai-pegawai PID campur tangan dalam pidato-pidato dan kadang-kadang mencurigai rapat-rapat umum bersama. Polisi juga melakukan penggeledahan rumah dan tahanan rumah, menahan, menginterogasi beberapa orang, melakukan sensor, melakukan penyitaan terhadap koran harian, mingguan dan bulanan, serta menyita buku-buku. Namun yang lebih penting adalah, fakta bahwa PID di mana pun mudah diketahui oleh orang-orang Indonesia. Meski kadang-kadang dijuluki sebagai polisi rahasia, namun tidak seluruhnya rahasia. Orang-orangnya selalu berada di tempat rapat-rapat umum terbuka, duduk di tempat-tempat tertentu yang mencolok. Mereka disebarluaskan ke partai-partai politik, persekutuan dagang dan para penjual koran, sekolah-sekolah yang dikelola partai dan perkumpulan-perkumpulan, dan tempat-tempat yang sering disinggahi para aktivis. Mereka berada di luar ruang tempat pertemuan-pertemuan tertutup dilakukan. Mereka juga mengandalkan mata-mata dan *telik sandi*. Polisi mempunyai dana yang sangat rahasia untuk mempertahankan kerja sistem intelijen dan *telik sandi* yang baik. Dana rahasia yang ada, misalnya, 750.000 gulden pada tahun 1932, dan rata-rata 522.000 gulden pada tahun 1936 ketika anggaran pemerintah dipotong secara drastis karena masalah depresi.<sup>63</sup> Mata-mata dan *telik sandi* tidak selamanya profesional. Tak dapat disangkal, tidak ada sikap profesional melainkan sering kali mereka adalah para aktivis yang kadang-kadang mencrima suap, kadang tidak, dan

<sup>62</sup> "De Interpellatie Thamrin in zake het verscherpte positioneel optreden in openbare vergadering, enz," dalam *De Nederlandsch-Indische Politiegids*, Juni 1933, No. 6 hlm. 176-189. De Politiegids published Thamrin's interpellation in the *Volksraad* in its entirety to show attorney general's rebuttal.

<sup>63</sup> "Over Geheim Politie-Fondsen," dalam *De Nederlandsch-Indische Politiegids*, September, 1936, No. 9 hlm. 168-170.

memberikan sepotong informasi kepada orang-orang PID. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa semua orang mengetahui bahwa terdapat mata-mata dan *telik sandi* di antara mereka.

Orang-orang Indonesia kemudian sadar, dan semakin dibuat sadar oleh kehadiran PID, bahwa mereka sedang diawasi, bahkan oleh sesama aktivis. Dan mereka menyadari risiko diawasi, risiko yang barangkali dapat mengantarkannya ke Digoel. Satu-satunya cara untuk menghindari risiko ini adalah menjaga jarak dengan politik dan supaya tidak dilihat oleh orang-orang PID. Suasana demikian berada di semua tempat di antara orang-orang Indonesia. Dengan baik hal ini terlukis dalam suatu pertanyaan Pramoedya Ananta Toer, yang dikutip dalam buku berjudul *Cerita dari Blora* ketika ibunya menceritakan padanya bahwa kakaknya, Hurip, telah bergabung dalam partai politik.

Bukan main kagetku mendengar dia campur tangan dalam politik itu. Menurut pengertianku politik adalah polisi, dan seisi rumah kami jijik pada apa saja yang berhubungan dengan polisi.

"Tidak marahkah bapak karena dia masuk polisi?" tanyaku. Ibu tersenyum manis mendengar pertanyaanku itu. Kemudian dengan kata-kata sederhana menjelaskan apa artinya politik dan bahwa: "Mereka yang masuk partai politik adalah musuh polisi." Dan aku mengerti sedikit.<sup>64</sup>

Dialog tersebut dibuat secara hati-hati, seperti selalu dinyatakan Pramoedya, untuk menceritakan sejarah mengenai bagaimana suatu gerakan dimulai di suatu kota kecil di awal tahun 1930-an. Dengan demikian, tujuan kita yang paling penting adalah meninjau anak-anak kecil yang cerdas dan polos, sebagai metafora dari kelompok yang tak berpendidikan, tidak tahu apa-apa, namun dialah rakyat yang pandai, yang barangkali menganggap bahwa politik adalah polisi. Inilah dampak di mana sebagian besar orang-orang Indonesia menjauhi politik = polisi, suatu kondisi yang penting bagi pembentukan Hindia di era Digoel.

<sup>64</sup> Pramoedya Ananta Toer, "Kemudian Lahirlah Dia," *Cerita Dari Blora* (Jakarta: Balai Pustaka, 1963) hlm. 96.

Namun pengamanan politik dengan cara mengawasi secara khusus penduduk juga telah membentuk cara pemerintah dalam melihat masyarakat pribumi pada uniwinnya. Untuk melihat hal ini, kita hanya perlu melihat beberapa paragraf yang diambil dari hasil survei kebijakan politik bulanan ARD yang dilakukan secara acak. ARD mulai mengumpulkan survei ini pada bulan Maret 1927, di saat meletusnya revolusi, sirkulasinya dilakukan dengan sangat terbatas. Survei ini dikirim ke gubernur jenderal, yang memilih ketua departemen, ketua administrasi regional, (berjumlah total 22), menteri kolonial, dan perwakilan diplomatik Belanda di Peking, Tokyo, Bangkok, Washington, Kairo, Singapura, Shanghai, Hongkong, Kalkuta, Manila, Sydney, Saigon, dan Jeddah.<sup>65</sup>

Survei tersebut terdiri dari lima bagian; gerakan ekstremis, gerakan Islam dan nasional, gerakan orang-orang Cina, gerakan perserikatan dagang, dan luar negeri. Mari kita melihat survei pada bulan Desember 1927. Paragraf delapan dan sembilan pada bagian pertama, "Gerakan Ektremis", menyatakan sebagai berikut:

Di Kisaran (Sumatra Timur Laut) muncul perkumpulan baru, Muhammadiyah, yang menyerupai komunisme, namun tidak sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi yang sama yang berada di Jawa. Dalam rapat umum yang dilakukan pada tanggal 17 November, yang pasti H. Saleh, melakukan kampanye pada tahun 1925 di Benkulen, menyatakan bagaimana rakyat ditindas oleh pemerintah. Maka diputuskan setelah pertemuan tersebut untuk mendirikan organisasi, laporan ini diperoleh dari inisial A.W. (yang sampai sejauh ini artinya masih belum diketahui), dengan tujuan merekrut secara rahasia orang-orang pemberani. Dikatakan dalam perkumpulan tersebut untuk membentuk substruktur (*onderbonen*) dengan nama, *Djanuтоerhamah*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Harry A. Poeze, "Voorwoord", dalam Poeze, ed., *Politiek-Politionele Overzichten van Nederlandsch-Indië: Deel I, 1927–1928* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982) hlm. vii–viii.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 188.

Di Desa Cipanokalan (Kabupaten Bandung), dilaporkan adanya cabang PKI di bawah kepemimpinan Iskak, yang memiliki hampir 50 anggota. Di perkebunan Tasikmadu (Surakarta) terdapat perkumpulan bernama Soerjo Moeljo yang dilaporkan telah membeli senjata api untuk mempertahankan diri dari otoritas dan untuk membunuh polisi. Pemimpinnya bernama Irosemito sedang ditahan.

Tidak ada analisis agak panjang yang diperlukan. Paragraf tersebut menceritakan sedikit kepada kita. Paragraf pertama menceritakan bahwa rapat umum dilakukan di Kisaran tanggal 17 November dan bahwa seseorang dengan nama Haji Saleh memberikan pidato. Paragraf kedua, menceritakan lebih sedikit. Barangkali kita hanya mempercayai adanya sebuah perkumpulan dengan nama Soerjo Moeljo di perkebunan Tasikmadu dan seseorang dengan nama Irosemito sedang ditahan. Namun laporan ini dipergunakan dalam laporan-laporan intelijen. Yang lebih penting adalah bahwa daerah tersebut sedang diawasi. Jelaslah dalam laporan tersebut hanya satu hal yang menjadi persoalan. Apakah kenyataannya benar atau tidak, tanipak bahwa di sana terdapat bahaya, di Kisaran, di desa dekat Bandung dan di perkebunan Tasikmadu, yang barangkali terdapat gerakan subversif. Irosemito sedang ditahan. H. Saleh dan Iskak tidak menutup kemungkinan juga segera diciduk. Jika tidak, data-data mengenai H. Saleh akan menjadi lebih tebal dan data-data baru untuk Iskak akan dibuat.

Apa yang luput dalam laporan tersebut adalah area kultural dan sosiologis tempat orang-orang tersebut bermukim. Dengan mencoba membayangkan Kisaran, suatu kota kecil di daerah Asahan (dari Medan dapat ditempuh selama empat jam), berada di tengah-tengah perkebunan karet dan hutan yang lebat, mengembalikan ingatan kita pada akhir tahun 1920-an. Dengan mencoba melukiskan seseorang dengan nama H. Saleh, yang mengarahkan pembaca pada pertemuan di suatu hari di bulan November. Kita tidak tahu di mana pertemuan tersebut terjadi, di masjid, di pondok, atau pusat kota? Apa yang dia katakan, siapa saja yang datang dalam pertemuan tersebut, kemudian

dengan sendirinya ini mengarahkan pada pertanyaan, siapa dia sebenarnya, apakah pekerjaannya sehari-hari, lembaga mana saja yang membesar kan dia, dan seterusnya. Namun, persoalananya bukan itu, sebab ARD mengawasi kegiatan-kegiatan subversif, yang sifatnya dapat mengancam negara, apa pun ajakan dan bentuknya. Ibarat membalikkan telapak tangan, seorang bernama Haji Salch dengan mudah ditempatkan sebagai seorang subversif.

Mari kita melihat beberapa paragraf dalam bagian mengenai, Gerakan Islam dan Nasional. Pada bulan November 1927, front persatuan nasional baru, PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) atau *Forum for Indonesian National Political Associations*, dalam proses pembentukannya banyak menarik perhatian ARD.

Dalam laporan bulan ini, federasi partai-partai politik nasional pribumi secara resmi didirikan, yayasan yang membawahinya berada di Kongres PSI (Partai Sarekat Islam)...

Menurut usulan Dr. Sukiman diputuskan untuk mempublikasikan surat kabar nasionalnya, dari koran ini suatu komite dibentuk—menurut Sin Po (surat kabar Melayu Cina dipublikasikan di Batavia)-- dengan Parada Harahap dan Mr. Sartono sebagai anggotanya. Adapun komite penasihatnya terdiri dari: Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sebagai ketua; Dr. Samsi Sastrowidagdo, sekretaris-bendahara; Dr. Soekiman dan Ir. Soekarno sebagai utusan.

Dengan dibentuknya federasi ini, pengaruh kelompok intelektual nasionalis ekstrem, yang menjadi pendorong gerakan ini (lihat survei bulan September), telah melangkah ke depan dan merencanakan untuk menerima blok (religius nasional) anti imperialis, yang didiskusikan dalam catatan politik rahasia bab IV mengenai PKI dan survei bulan Juli akan lebih jelas.<sup>67</sup>

Di sini barangkali kita secara faktual memiliki dasar yang lebih kuat. Tak ada alasan untuk meragukan data faktual yang dilaporkan dalam paragraf tersebut, bukan karena data tersebut

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 189–190.

dapat di-cross check dengan laporan surat kabar, namun juga karena kita telah mengetahui bahwa ARD sangat tertarik dengan PPPKI dan para intelektual muda, sebagaimana disebutkan dalam paragraf tersebut, serta ARD terobsesi oleh fakta-fakta yang mereka olah sendiri. Toh, semua yang dianggap serupa, semua orang dan tindakan-tindakan mereka itu dibaca berdasarkan perspektif pengamanan politik tertentu, di mana berbagai persoalan sedemikian rupa dijadikan pertanyaan-pertanyaan praktis. Apakah *hoofdpartijk* harus campur tangan dalam PPPKI, jika ya, bagaimana dan kapan waktunya. Apakah *hoofdpartijk* harus menahan orang-orang itu, jika ya, kapan dan untuk alasan apa. Apakah *hoofdpartijk* harus campur tangan dalam publikasi mengenai organ PPPKI, jika ya kapan dan apa alasannya.

ARD berhati-hati sekali dengan para subversif. Seolah-olah hanya subversif atau orang-orang yang berpotensi menjadi subversif yang mendiami daerah-daerah yang berada di bawah pengawasannya, bagi ARD mengawasi mereka adalah pekerjaan satu-satunya, tidak ada yang lain. ARD lalu membantu pemerintah dengan peta yang dapat mencirikan kepadanya di mana harus memukul dan siapa yang perlu dianggap sebagai ancaman, dan yang tak kalah pentingnya, pemerintah membentuk area yang diterangkan dalam peta yang dibuat ARD untuk tujuan pengamanan politik Hindia.

Jauh setelah kekuasaan Hindia Belanda berakhir, P.J.A. Idenburg, putra dari Gubernur Jenderal Etis, A.F.W. Idenburg, yang bertindak sebagai Sekretaris Dewan Hindia Belanda (1926-1934), menulis sebuah artikel, "Belanda Menjawab Nasionalisme Indonesia", yang menjadi inspirasi Harry J. Benda dalam tulisannya mengenai Negara Hindia sebagai *Beamtenstaat* dalam esainya berjudul, "Berbagai Pola Reformasi Administratif Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Belanda di Indonesia." <sup>68</sup> Setelah

<sup>68</sup> P.J.A. Idenburg, "Het Nederlandse Antwoord op het Indonesisch Nationalisme," dalam, H. Baudet dan I.J. Brugmans eds, *Balans van Beleid: Tcrugblík op de Laatste Halve Eeuw van Nederlandsch-Indië* (Assen: van Gorcum, 1961) hlm. 121-151. Harry

menjelaskan bagaimana seluruh intelijen PID bekerja, dan bagaimana laporan bulanan dan tiga bulanarnya disebarluaskan oleh *hoofdparket*, Idenburg menulis dalam artikel ini:

PID terlalu ditekan dalam menilai apa pengaruh laporan intelijen seperti itu, suaranya sendiri, harus berada di atas kebijakan regional dan pegawai administratif lokal (terhadap nasionalisme Indonesia). Di samping itu, tidak terdapat informasi politik (yang akan datang) yang bersifat teratur dari pemerintah, yang (dapat) bertindak sebagai petunjuk kebijakan politik bagi kepala-kepala administratif. Kepala administratif yang mengikuti laporan intelijen ini hanya boleh mendengarkan suara yang mendukungnya, di mana informasi dianalisa, dan informasi yang menyenangkan hati didukung. Tidak ada polisi yang tidak dapat keluar dari persembunyiannya; berbagai pertimbangan biasanya berasal dari dunia pemikiran tipikal polisi, bila kita membandingkan berbagai pemikiran dan laporan yang datang secara kontinyu dengan laporan perwakilan untuk hubungan umum pemerintah, yang menyatakan tentang kebijakan pemerintah di *Volksraad*, orang juga melihat dengan baik bahwa laporan intelijen polisi tidak dan juga tidak dapat membuat kebijakan riel gubernur jenderal yang memadai.<sup>69</sup>

Pengetahuan ini sangat penting, karena pemerintah—termasuk perwakilan hubungan umum pemerintah—seperti penduduk Hindia, adalah sandera dari pengamanan politiknya sendiri. Tanpa laporan intelijen, *hoofdparket* dengan laporan bulanan dan triwulannya membantu pemerintah hanya dengan peta yang dapat menuntun kebijakan mengenai dunia pribumi.

J. Benda, "The Pattern of Administrative Reform in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia," dalam karyanya, *Continuity and Change in Southeast Asia: Collected Journal Articles of Harry J. Benda* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, sci Monograph No. 18, 1972) hlm. 236–252. Diskusi terkenalnya mengenai Beamtenstaten, jadi halaman tersebut menyatakan bahwa kutipan itu aslinya dipublikasikan pada tahun 1966, yang secara luas diambil dari artikel, Idenburg (namun Idenburg tidak menggunakan kata, "beamtenstaten").

<sup>69</sup> Idenburg, "Het Nederlandse Antwoord," hlm. 149.



## **Bagian Ketiga**

# **MENGAMANKAN HANTU GERAKAN BAWAH TANAH**

---

---

Bawah tanah: Kata sifat yang memiliki arti: 1. berada, terjadi atau bekerja di bawah permukaan bumi; 2.a. tertutup atau tersebunyi; b. menunjuk pada organisasi yang terlibat dalam kegiatan rahasia atau ilegal; 3. mencakup gerakan *avant garde* (garda depan) dan film-filmnya, publikasi, dan seni. Sebuah organisasi klandestin yang merencanakan tindakan-tindakan perrusuhan untuk melawan atau menggulingkan sebuah pemerintahan. Di Inggris, kata ini berarti juga Kereta Bawah Tanah. Sebuah gerakan *avant-garde* atau publikasi.

*The American Heritage College Dictionary* (New York: Houghton Mifflin Company, Third Edition, 1993).

R eaksi pemerintah terhadap Revolusi Komunis tahun 1926 sangat keras. Tanggal 17 November, lima hari setelah revolusi mletus di Jawa Barat pada tanggal 12 November 1926, gubernur jenderal memutuskan untuk menempatkan para pemimpin komunis yang berbahaya dalam tahanan demi keamanan publik.<sup>1</sup> Hari berikutnya Dewan Hindia

<sup>1</sup> "Verlag bg. Vergadering van de raad van Nederlandsch-Indie, 18 Nov. 1926", dalam R.C. Kwanten, ed., *der Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië: Tweede stuk medio 1923-1928* (selanjutnya *De Ontwikkeling: medio 1923-1928*) (Groningen: Wolters-Noordhooff, Uitgaven van de Commissie voor Bronnen publicatie betreffende de Geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1900-1942 van het Nederlands Historisch Genootschap, 9, 1978), hlm. 476.

Belanda memutuskan untuk memenjarakan para pemimpin komunis terkemuka secara besar-besaran. Awal Desember, pemerintah memutuskan tidak akan mendesak Mahkamah Agung Hindia Belanda untuk mengumumkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) itu ilegal. Dilarang secara hukum atau tidak, partai memilih bergerak di bawah tanah, dan kegiatan-kegiatannya disamarkan dalam bentuk asosiasi-asosiasi kecil dengan tujuan-tujuan yang tampak luhur. Tindakan mengumumkan bahwa partai komunis itu ilegal, dalam pandangan dewan, sama sekali tidak ada manfaatnya.<sup>2</sup> Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1926, jaksa penuntut umum menginstruksikan kepada para jaksa daerah untuk mewaspadai bahaya dan ancaman para propagandis dan memilih saat yang tepat untuk meredam mereka, sama seperti yang dilakukan terhadap para pendahulunya. Ia menulis bahwa, jika hal ini tidak dilakukan maka kebijakan untuk melenyapkan inti gerakan yang berbahaya melalui penangkapan dan penahanan secara massal tidak akan efektif.<sup>3</sup>

Kebijakan yang diambil tahun 1926 untuk melawan kaum komunis merupakan salah satu kebijakan politik. Pemerintah membuat larangan-larangan administratif dan politis untuk menyapu dan mencegah kebangkitan kembali kader-kader komunis. Akibat revolusi, tiga belas ribu orang ditangkap. Beberapa ditembak karena terlibat dalam pembunuhan; 4.500 orang dikirim ke penjara setelah diadili; dan 1.308 orang dikirim ke Digoel.<sup>4</sup> Seperti apa yang ditulis jaksa penuntut umum untuk para kepala administrasi wilayah pada tanggal 30 Juli 1927.

Secara praktis dapat dikatakan PKI adalah organisasi terlarang: tidak ada lagi tindakan terang-terangan kaum komunis

<sup>2</sup> Untuk perdebatan internal mengenai masalah ini, lihat "Procureur-generaal (H.G.P. Duyfes) aan gouverneur-generaal (de Graeff), 2 dec. 1926; dan "Directeur van justitie (D. Rutgers) aan gouverneur-generaal (de Graeff) 10 Desember 1926" dalam Kwantes, *De Ontwikkeling: medio 1923–1928*, hlm. 494–508.

<sup>3</sup> "Procureur-generaal (H.G.P. Duyfes) aan hoofden van gewestelijk bestuur," dalam Kwantes, *De Ontwikkeling: medio 1923–1928*, hlm. 520–521.

<sup>4</sup> Ruth McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 353.

kaitannya dengan asosiasi bentukan mereka. Ada upaya untuk membangkitkan gerakan melalui propaganda di antara penduduk, dan penjualan kartu anggota. Usaha itu dapat dihentikan dengan menangkap dan membuang para penghasut, jika sebuah pengadilan kriminal tidak mungkin dilakukan.

Ini kebijakan kita dan jaksa umum memperingatkan para kepala wilayah, bahwa pendirian pemerintah harus ditanamkan dalam kesadaran seluruh penduduk.<sup>5</sup>

Pertanyaannya, apakah pendirian pemerintah itu ada dan bagaimana dapat ditanamkan ke dalam kesadaran masyarakat? Jaksa penuntut umum tidak mengatakan bagaimana melakukannya, namun hanya metodenya yang ditcakpan seperti penangkapan, penjara, dan pembuangan membuktikan sendiri makna ucapan ini. Jauh lebih problematis adalah pertanyaan tentang ‘apa’. Tak lama kemudian jawaban atas pertanyaan ini menjadi jelas. Pemerintah tidak mentoleransi PKI, organisasi-organisasi, dan serikat buruh afiliasinya seperti SR (Sarekat Rakyat) dan VSTP (Serikat Buruh Kereta Api). Tindakan pemerintah pada tahun 1927 dan 1928 memberikan kesan mengenai apa sikap pemerintah di dalam pikiran masyarakat umum. Sarekat Rakyat Sudiro, organisasi PKI di Pematang Siantar, Sumatra Timur dan *Trianoadimoro Centralisatie Indonesia* di Surabaya dihancurkan satu per satu pada tahun 1927. Sejumlah penangkapan dan penggeledahan rumah dilakukan pada tahun 1927 dan 1928 demi mencegah usaha-usaha yang dilakukan individu secara terpisah-pisah di beberapa daerah untuk membangkitkan kembali SR dan organisasi-organisasi komunis, religius-magis, teroris, dan kriminal lain seperti Djajar, Sarekat Item, dan Korban Diri.<sup>6</sup>

Dalam jangka panjang, apa yang disebut pendirian pemerintah ini tidak jelas, karena begitu PKI, organisasi afiliasi

<sup>5</sup> Procureur-generaal aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur, July 30, 1927, Geheim-Eigenhandig Rondschrijven, Mr. 945x/1927.

<sup>6</sup> Poeze “Inleiding” dalam Harry A. Poeze, ed., *Politiek-Politionele Overzichten van Nederlandsch-Indië: Deel 1 1827–1928* (Selanjutnya disebut PPO:1927–1928) (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), hlm. lxviii-lxix.

dan serikat buruhnya dihancurkan, bentuk organisasional PKI lenyap sama sekali. Akibatnya musuh berubah lebih menyebar, tersembunyi, dan semakin sulit diidentifikasi. Masalah menjadi lebih rumit akibat kebijakan konstruksi liberal Gubernur Jenderal de Graeff terhadap kaum nasionalis Indonesia yang diramu dengan aturan-aturan represif untuk melawan aksi destruktif bawah tanah. Mencermati sikap pemerintah ini, seseorang hanya perlu bertanya apa tanggapan pemerintah jika mantan-mantan aktivis PKI dan SR membentuk sebuah partai dan serikat buruh yang secara terbuka tidak menganut paham komunis atau nasionalis? Atau jika kaum nasionalis non komunis bekerja sama dengan organisasi internasional yang berada di bawah pengaruh komunis? Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap *pergerakan*? Bagaimana kebijakan itu bisa memperingatkan orang-orang Indonesia bahwa ada batas-batas yang tak boleh dilanggar agar tidak dibuang di Digoel? Bagaimana kebijakan politik ini membentuk kehidupan politik Indonesia masa itu?

## Pelajaran dari Revolusi

A.E. van der Lely, kepala ARD (*Algemeene Recherche Dienst*, Dinas Investigasi Umum) tampak dalam hari-hari sibuk pada akhir tahun 1926 dan awal 1927. Sambil memimpin seluruh aparat PID (*Politieke Inlichtingendienst*, Dinas Intelijen Politik) untuk menghancurkan PKI, ia juga harus membuat sebuah laporan rinci dan objektif (*zakelijk*) tentang organisasi PKI dan cabang-cabangnya untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang bahaya politik organisasi ini dan para pemimpinnya, sesuai instruksi gubernur jenderal pada tanggal 24 November 1926.<sup>7</sup> Kemudian ia menulis tiga versi laporan yang berbeda dalam bulan tersebut. Versi pertama berupa laporan kasar yang

<sup>7</sup> Kwanten, *De Ontwikkeling: Medio 1923–1928*, hlm. 525–526. Gubernur jenderal juga membentuk dua komite. Satu untuk mempelajari situasi di Banten pada bulan Januari 1926 dan yang lainnya meneliti situasi di Sumatra pada bulan Februari 1927. Namun laporan mereka yang lebih terfokus di daerah kurang penting bagi pembahasan kita.

dibuat secara tergesa-gesa diserahkan kepada de Graeff pada tanggal 27 November. Dalam dokumen ini, jaksa penuntut umum mendesak penggunaan kekuasaan secara luas dan luar biasa terhadap inti (dari partai), para pemimpin utama yang bekerja di belakang layar, untuk mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa saat ini.<sup>8</sup>

Versi kedua, laporannya lebih berasas, disusun lebih baik namun masih bertemu pada argumen dalam laporan pertama. Dikumpulkan pada awal Januari 1927 dan diserahkan pada gubernur jenderal pada tanggal 11 Januari. Laporan diberi judul panjang: "Catatan Politik mengenai Partai Komunis Indonesia (*Netherlands Indies Communist Party*), Seksji Ketiga Komunis Internasional, dari bulan Juli 1925 sampai Desember 1926". De Graeff menyukai laporan ini. Ia memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuat 150 kopian bagi keperluan internal. Ia memuji karya van der Lely yang memberikan "pemahaman yang jelas terhadap situasi umum dan menunjukkan bahwa keluhan-keluhan tentang tidak berfungsinya pusat intelijen politik selain hari-hari pemberontakan ternyata tidak terbukti."<sup>9</sup>

Versi terakhir laporan itu diberi judul seperti laporan kedua, namun lebih telak, memiliki beberapa bab yang diperluas dan ditambah empat bab baru, diserahkan kepada gubernur jenderal pada bulan April 1927. Laporan ini juga dicetak untuk keperluan internal, namun digunakan untuk sasaran politik yang berbeda. Karena krisis sudah berakhir, laporan van der Lely yang terakhir ini berisi pandangan tentang masa depan dan merekomendasikan sebuah strategi politik untuk melawan komunisme.<sup>10</sup>

Karena laporan kedua ini tersedia dalam bahasa Inggris atas usaha Harry J. Benda dan Ruth T. McVey, tesis Levy mengenai

<sup>8</sup> Procureur Generaal aan Gouverneur Generaal, 27 November 1927, Mr. 1174x/1926.

<sup>9</sup> Kwanten, *De Ontwikkeling: Medio 1923-1928*, hlm. 466-467.

<sup>10</sup> Geheim Rapport, "Waarin is Samengevat Wat Gebleken Is omtrent de Actie der Partij Kommunist Indonesia" (*Nederlandsch-Indische Kommunistische Partij*), Seksje de 3de International, Vanaf Juli 1925 tot en met December 1926, Mr. 497x/1927.

revolusi komunis cukup diuraikan secara singkat di sinil. Ia mengajukan tesis tentang adanya konspirasi komunis internasional. Ia mengawali laporan kedua dan ketiga dengan paragraf berikut:

Tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin komunis dalam periode Juli 1925 sampai akhir Desember 1926 mungkin erat berkaitan dengan resolusi-resolusi yang dihasilkan pada kongres kelima Komunisme Internasional di Moskow (pertengahan 1924) dan Konferensi kaum komunis di Yogyakarta (Desember 1924).<sup>11</sup>

Setelah menyatakan pendapatnya yang mendasar, ia membangun argumennya dalam beberapa tahap:

1. Comintern (Komunis Internasional) dalam kongres kelima membuat keputusan tentang reorganisasi partai-partai dengan menggunakan sistem sel pada serikat buruh, organisasi politik, pabrik, tempat kerja, desa, tempat yang dihuni penduduk asli (kampung), dan Bolsevisasi partai-partai.
- 2a. Sejalan dengan keputusan ini, dalam Konferensi Yogyakarta, PKI memutuskan dan menginstruksikan seksi-seksinya pada paro pertama tahun 1925, untuk mengorganisasikan para penjahat ke dalam kelompok-kelompok illegal dan menjalankan propaganda melalui sel-sel, pertemuan-pertemuan tertutup dan pelatihan kader-kader.
- b. Dalam paro kedua tahun 1925, propaganda terutama dilakukan dalam serikat buruh. Kegiatan ini merupakan yang pertama dan konsekuensi logis dari keputusan-keputusan yang dibuat pada Konferensi Buruh Pan Pasifik di Kanton, bulan Juni 1924. Sesudah mereka bertemu di Yogyakarta dan Surabaya pada bulan Desember 1924, para pemimpin PKI memutuskan untuk memperluas kegiatan-kegiatan serikat buruh, mengintensifkan propaganda dalam serikat buruh yang berada di bawah kontrol mereka, dan membentuk serikat

---

<sup>11</sup> Benda dan McVey, *The Communist Uprisings: Key Documents* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, Modern Indonesia Project Translation Series, 1960), him. 1; Geheim Rapport, Mr. 497x/1927.

buruh baru seperti serikat buruh pabrik gula, galangan kapal, pelaut dan serikat pekerja toko mesin. Surabaya dibuat sebagai pusat kegiatan serikat buruh komunis dengan membentuk Sekretariat Serikat Buruh Merah Indonesia (*Secretariaat Vakbonden Red Indonesia*) sebagai bagian dari Sekretariat Serikat Buruh Pan Pasifik di Kanton. Propaganda ini mendorong meletusnya serangkaian pemogokan pada tahun 1925.

- c. Dalam Kongres Yogyakarta, para pemimpin PKI juga memutuskan untuk membentuk sebuah pusat propaganda rahasia di Singapura, sekaligus lagi sejalan dengan keputusan Comintern untuk membentuk biro gabungan Comintern dan Serikat Buruh Merah Internasional (*Profintern*) di sana.
  - d. Pengorganisasian para penjahat ke dalam *Anti-Riboet Bonds* (Liga Anti-Pengacau) berproses dan mengarah pada kekacauan-kekacauan seperti pemogokan, kerusuhan, pembunuhan, dan aksi-aksi teroris lainnya. DO, Dobel atau Organisasi Diktatorial, juga dibentuk tanpa ragu dikaitkan dengan perintah yang dikeluarkan oleh para eksekutif PKI pada pertengahan tahun (1925).
- 3a. Pemimpin-pemimpin komunis di Hindia Belanda dan Selat-Selat (*Strails* = Singapura) memiliki andil dalam berbagai peristiwa yang mengarah pada revolusi. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pada pertemuan di Surakarta (Prambanan) pada bulan Desember 1925, mereka memutuskan dengan harapan adanya bantuan finansial dari Moskow untuk membiayai provokasi yang menimbulkan kekacauan (revolusi) yang dimulai di Padang dan meluas ke Jawa. Keputusan ini ditentang oleh para pemimpin komunis di luar, terutama Tan Malaka yang berpendapat bahwa revolusi tidak tergantung pada tambahan uang melainkan kekuatan masyarakat yang harus dibangun melalui aksi massa, serangkaian pemogokan tanpa henti, dan demonstrasi. Walaupun mereka berbeda pandangan mengenai saat yang tepat untuk melakukan revolusi, kedua kelompok pemimpin ini sepakat mengenai manfaat pemogokan, kerusuhan, dan revolusi.

- b. PKI umumnya berhasil dalam memperkuat inti organisasi yang penuh disiplin setelah konferensi Yogyakarta. Hal ini tercermin dalam fakta bahwa PKI berkembang dari tiga puluh enam seksi dengan total anggota sebesar 1.140 pada bulan Desember 1924 menjadi enam puluh lima seksi pada bulan Mei 1926.
- c. Di Timur, tidak seperti di Barat, sekelompok kecil kader komunis yang berdisiplin dan diorganisasikan dengan baik mampu membangkitkan ketidakpuasan untuk menimbulkan serangan spontan dan kekacauan massal. Sasarananya adalah menentang kemapanan dengan menyebarkan slogan-slogan yang menyesatkan dan janji-janji palsu, misalnya penduduk akan dibebaskan dari pajak dan kerja paksa serta memperoleh keuntungan dari redistribusi kekayaan. Ketidakpuasan ini mengarah ke revolusi dan demi tujuan tersebut cara-cara seperti ancaman dan penganiayaan digunakan untuk memaksa masyarakat bergabung ke dalam partai.
4. Kekacauan-kekacauan serius yang terjadi di Jawa Barat serta kekejaman di tempat lain harus dilihat sebagai konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh para eksekutif PKI dalam pertemuan Surakarta (Prambanan) untuk menciptakan kerusuhan-kerusuhan. Keputusan-keputusan itu secara langsung mengarah pada propaganda kekerasan yang membenarkan aksi-aksi teroris ilegal, yang dijalankan secara intensif di daerah-daerah di mana terjadi kerusuhan.<sup>12</sup>

Singkatnya, inilah tesis van der Lely yang ditulis dalam versi pertama laporannya, kemudian dikembangkan lebih luas pada versi kedua dan dipertahankan dalam versi ketiga. Tesis ini telah ditolak oleh Ruth T. McVey dalam karya klasiknya, *The Rise of Indonesian Communism*.<sup>13</sup> Demi maksud pembahasan kita, apa yang menjadi persoalan bukan kebenaran historiografis, tetapi

<sup>12</sup> Benda and McVey, *The Communist Uprisings: Key Documents*, hlm. 1–18.

<sup>13</sup> Lihat Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965) bab 9–12.

kenyataan bahwa tesis itu mempengaruhi strategi dan kebijakan politik Belanda yang baru, yang awalnya diarahkan untuk melawan gerakan komunis, tetapi kemudian digunakan untuk meredam gerakan revolusioner di Hindia Belanda.

Ada dua pelajaran penting yang diperoleh dari laporan itu. Pertama, sifat komunisme internasional. Laporan ini menandang gerakan komunis Hindia Belanda disebarluaskan dari luar, ditransfer dari Moskow kepada kepemimpinan PKI di pusat dan kemudian diteruskan ke penduduk asli. Laporan ini tidak melihat gerakan itu dalam wujud yang sebenarnya dengan mengambil berbagai bentuk yang berbeda, seperti pawai dan kursus-kursus pelatihan kader, surat kabar, teater, pendidikan di sekolah, serikat buruh dan pemogokan, aksi-aksi teroris, dan revolusi, seperti yang dihasilkan dari hubungan-hubungan kolonial, rasial, dan kelas di Hindia Belanda. Dalam pandangan pemerintah, gerakan itu adalah hantu agitasi dari luar (*the phantom of external agitation*) yang bersifat politis dan dapat menjadi ancaman.<sup>14</sup> Menjadi masuk akal bahwa strategi dasar yang direkomendasikan tesis ini adalah untuk melindungi Hindia Belanda dari konspirasi komunis internasional dan tidak pernah mengizinkan para kader komunis untuk mendirikan kembali partai komunis.

Hal ini menjadi jelas jika kita membandingkan versi kedua dan ketiga laporan van der Lely. Dalam laporan ketiga, dua bab diperluas: bab 3 berjudul "Kontak antara Duria Ketiga dan PKI melalui Bagian Timur, dengan Singapura sebagai Pusat Penghubung Utama", dan bab enam berjudul "Agama Mohammad dalam Pelaksanaan Propaganda Komunis". Empat bab baru ditambahkan. Bab 7 diberi judul "Bagaimana Eksekutif Partai di Negara Ini, atas Dorongan Comintern, Mencoba Menjangkau Tidak Hanya Petani dan Borjuasi Kecil Melalui SR, Namun Juga Berusaha Keras untuk Menarik Pemimpin-Pemimpin Intelektual di Kalangan Nasionalis Saat Ini untuk

---

<sup>14</sup> Penggalan "the phantom of external agitation" dikutip dari Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979* (New Haven: Yale University Press, 1985) hlm. 55 dan 79.

Mendukung Gerakan Revolusi". Bab ini menekankan pentingnya Perhimpunan Indonesia, kaum intelektual dan nasionalis sayap kiri sebagai partisipan aktif dalam strategi *Comintern* untuk membentuk "Blok Anti-Imperialis" dari gabungan kaum komunis dan nasionalis. Bab 8 membicarakan kegiatan propaganda komunis melalui sistem sel di kalangan tentara dan polisi. Bab 9 membahas pengaruh perkembangan di Cina terhadap gerakan komunis di Hindia Belanda, dengan memfokuskan pada hubungan antara PKI dan KMT (Kuo Min Tang), dan menganjurkan pemerintah Belanda mempertahankan pengawasan ketat untuk mencegah kerja sama antara propagandis Soviet-Cina dengan orang asli. Akhirnya, Bab 11 membahas tentang "kekacauan-kekacauan pada bulan November 1926, organisasi komunis dan kepemimpinan, tekanan pada disiplin partai, dan bagaimana kepemimpinan di Moskow mencoba mengipas api dalam tungku".

Seluruh bab dalam laporan van der Lely diperluas atau ditambah dalam versi ketiga. Bab tambahan itu membahas tentang jaringan internasional yang digunakan *Comintern* untuk masuk ke Hindia Belanda. Oleh karena itu, tidak mengejutkan bahwa strategi anti komunis yang dirancang van der Lely mengharuskan pemisahan secara total isolasi Hindia Belanda dari *Comintern* yang berpusat di Moskow. Isolasi ini dilakukan dengan menghancurkan pusat-pusat propaganda komunis di Singapura dan Makassar, berbagai usaha untuk mewaspada setiap sinyal yang menunjukkan kegiatan "Blok Anti-Imperialis" yang terdiri dari *Comintern* dan kaum nasionalis dan intelektual muda Indonesia, menguntit para pelarian komunis di luar, dan pengawasan terhadap para propagandis Soviet-Cina.

Pelajaran lain yang diberikan van der Lely adalah mengenai peran penting yang dimainkan Tan Malaka dalam gerakan komunis di Hindia Belanda. Dalam versi pertama laporannya, ia berargumen bahwa di balik upaya-upaya yang tidak konsisten untuk bertahan menghadapi rezim yang mapan, terdapat sebuah gagasan penting. Dua bagian yang dikutip ; "Taktik dan Strategi"

dan "Konsentrasi Kekuatan-kekuatan di Tempat dan Waktu yang Menguntungkan bagi Kita", berasal dari karya Tan Malaka *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia). Uraian tentang peran Tan Malaka incngisi enam setengah halaman dari lima belas halaman laporan pertamanya.<sup>15</sup> Dalam versi kedua dan ketiga, ia berargumen bahwa pemahaman akan bahaya kegiatan yang dilakukan para pemimpin komunis diperoleh dari karya tulis Tan Malaka. Van der Lely mempertahankan kutipan "konsentrasi kekuatan-kekuatan" dari *Naar der Republiek Indonesia*, serta menggantikan kutipan "taktik dan strategi" dengan sebuah bagian dari karya Tan Malaka yang lain, *Semangat Moeda*.

Untuk memahami apa "gagasan utama", "pengertian" yang ditemukan van der Lely dalam tulisan Tan Malaka, akan sangat bermanfaat untuk membahas apa yang dikatakan Tan Malaka dalam beberapa bagian tulisannya. Di bagian yang dikutip van der Lely dari *Naar der Republiek Indonesia*, Tan Malaka menulis tentang strategi revolusionernya:

Jika kita memilih Indonesia sebagai medan pertempuran, maka kita akan menemukan bahwa kekuatan penuh musuh (ekonomi, politik, dan militer) tidak dikumpulkan di satu tempat, tetapi menyebar.

Kekuatan militer terpusat di Priangan. Pusat politik sekarang berada di Batavia, yang mungkin dapat segera disatukan dengan kekuatan militer di Priangan. Seseorang dapat mengatakan bahwa kekuatan ekonomi terdapat di lembah Surakarta (Solo); yakni di karesidenan Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Rembang, Kediri dan Surabaya. Di daerah-daerah ini terdapat sejumlah besar pabrik gula, jalan kereta api, kapal-kapal, penyulingan minyak, toko mesin, dan faktor ekonomi lainnya.

Untuk melakukan serangan yang sukses terhadap kekuasaan imperialis Belanda, menurut Tan Malaka, kita harus membagi kekuatan-kekuatan revolusioner dan memilih tempat yang paling

<sup>15</sup> Bandingkan dengan Procureur Generaal aan Gouverneur Generaal, 27 November 1927, Mr. 1174/1926 dan Tan Malaka, *Menuju Republik Indonesia* (Jakarta: Jajasan "Massa", 1962) hlm. 42-46 dan 48-51.

penting demi kemenangan kita. Pertanyaannya adalah di mana tempat itu? Tan Malaka berpendapat bahwa lembah Solo adalah yang paling baik.

Di sana kita mungkin bisa berharap untuk menang dan tetap mempertahankan posisi kita dibandingkan dengan Batavia dan Priangan. Para pekerja industri terpusat di lembah Surakarta. Sumber-sumber ekonomi yang membuat kemenangan kita langgeng juga terdapat di sana. Kita mampu mengkonsolidasikan kemenangan politik jika kemenangan itu bergandengan dengan kemenangan ekonomi (mencakup pabrik-pabrik, pertanian, transportasi, dan lembaga perbankan).

Bila kita memilih Solo, itu tidak berarti bahwa daerah-daerah lain seperti Priangan, Pantai Timur Sumatra, Palembang, dan Aceh tidak begitu penting. Serangan sukses ke tempat-tempat ini sangat penting untuk mengelabui musuh. Pukulan strategis kemudian dapat dilakukan pada saat yang tepat di lembah Surakarta. Karena itu, dalam kaitan dengan strategi ini, partai harus menyatukan kekuatan, energi dan keyakinan untuk menempatkan pasukan kita dalam aksi di pabrik-pabrik, tempat kerja, pertambangan, dan perkebunan, sebagai sebuah latihan untuk pertempuran masa depan.

Semua prajurit yang berada di bawah komando PKI harus taat pada wewenang pusat ... adalah kemajuan jika pusat menganggap hal ini penting ... jika staf jenderal mengatakan pasukan harus mundur, maka mereka tidak boleh menolak untuk mundur.

Jika setelah pertempuran kecil dan besar, saat ini di Jawa, besok di Sumatra, saat ini dalam serikat buruh, besok dalam partai politik, kita bisa membuktikan bahwa kita memiliki pemahaman, kebulatan tekad, kemampuan dan semangat, maka pukulan terakhir akan dilakukan oleh kita, dengan kekuatan kita, pada tempat dan saat yang tepat. Akibatnya pemerintahan kolonial Belanda akan jatuh dan kejatuhannya akan terdengar di koloni-koloni lain di Timur.

Van der Lely lalu mengutip beberapa bagian dari *Semangat Moeda* untuk menunjukkan gambaran jelas mengenai metode propaganda untuk aksi-aksi teroris ilegal yang secara tak

langsung dianjurkan oleh Tan Malaka dan karakter meracuni yang dikandung oleh propagandanya:

Namun jika kita tidak mempunyai harapan untuk membebaskan Indonesia melalui anarkisme, anarkisme dapat muncul dari sikap masyarakat di Indonesia. Jika pemerintah menghalangi meletusnya gerakan, api revolusi akan berkobar di mana saja, misalnya, kebun tebu dan pabrik gula akan dibakar, jembatan-jembatan dihancurkan, kereta api akan tergelincir karena relnya dibongkar, dan orang-orang Eropa akan dibunuh. Bukan PKI yang menginginkan hal ini terjadi, tetapi benar-benar merupakan keinginan rakyat yang telah menjadi nekat dan dikobarkan amarahnya oleh organisasi kota.

Misalnya, ketika 55 juta rakyat yang kuat memilih mati daripada hidup sebagai budak dan tertawa ketika mereka menyaksikan polisi berkuda memegang tongkat; ketika penjara dijebol dan para pemimpin dibebaskan; ketika kaum buruh kereta api dan awak kapal menolak mengangkut para pemimpin mereka ke tempat pembuangan; ketika para prajurit menolak menindas gerakan ataupun menembak kerumunan massa yang tak berdosa, ketika orang-orang Eropa pergi tidur sambil menggenggam revolver di tangan dan tidak berani makan sebelum diperiksa oleh dokter. Semua ini membuktikan bahwa semangat revolusi telah kuat berakar, sedang menyebar ke mana-mana dan hanya bisa direndahkan dengan kebebasan.

Tan Malaka menulis *Naar de Republiek Indonesia* pada awal tahun 1925 dan diterbitkan di Kanton pada bulan April untuk mengkritik PKI yang mengabaikan Sarakat Rakyat setelah Konferensi Yogyakarta pada bulan Desember 1924. Karya ini juga mewakili pandangannya sendiri tentang program partai.<sup>16</sup> Bagian yang dikutip van der Lely bermakna karena berisi strategi revolusi Tan Malaka, berpusat pada serangan terhadap lembah Solo, menekankan pentingnya mempertahankan PKI sebagai partai kader dan SR sebagai basis massa, dan mendesak pelatihan tentara kita dalam aksi massa, bukan untuk membuat revolusi.

*Semangat Moeda* ditulis beberapa saat kemudian dalam tahun yang sama dan diterbitkan di Manila pada tahun 1926.

<sup>16</sup> McVey, *The Rise of Indonesia Communism*, hlm. 316.

McVey mengatakan bahwa Tan Malaka lebih berhati-hati dalam karya ini dibandingkan dengan *Naar de Republiek Indonesia*. Dalam karya ini, ia berargumen bahwa walaupun partai harus siap untuk revolusi, partai tidak boleh mulai bertindak sampai dipastikan bahwa seluruh rakyat berada di belakangnya. Setiap revolusi di Indonesia akan gagal jika rakyat tidak matang untuk revolusi. Kita tidak boleh mempercayai dan menentang semua bentuk *putsch*.<sup>17</sup> Bagian yang dikutip bermanfaat untuk menggambarkan situasi revolusioner yang mengarah kepada aksi massa, dan bukan dorongan untuk tindakan anarkis.

Meskipun demikian van der Lely tidak tertarik dengan konteks historis di mana Tan Malaka menulis bagian-bagian di atas. Ia tertarik untuk menemukan pengertian, gagasan sentral, yang mampu memahami usaha-usaha yang tampak tanggung dan tak saling berkaitan untuk melawan rezim yang mapan, dan yang bertentangan dengan tesisnya mengenai konspirasi komunis internasional. Bukan kebetulan bahwa van der Lely menemukan apa yang ia cari dalam tulisan-tulisan Tan Malaka. Penulis memiliki semua hal yang bisa dipercayai dan perlu dipertimbangkan van der Lely. Tan Malaka adalah tokoh yang mewakili komunis di Timur Jauh. Ia adalah pemimpin komunis yang paling berhasil dan berpengalaman. Ia menulis dalam bahasa Belanda. Dan ia menulis penggalan-penggalan yang jelas mencerminkan keadaan sebenarnya dan perlu dikutip, dengan halus menyusup dalam mimpi-mimpi buruk van der Lely. Dalam dunia yang diatur oleh politik di mana van der Lely hidup, Tan Malaka muncul sebagai seorang musuh berwajah ganda dan disegani yang memiliki fantasi-fantasi orang Belanda, mulia bagi seseorang dan menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Dari kalangan pelarian komunis Indonesia diluar, Tan Malaka adalah musuh nomor satu, dan penggalan-penggalan tulisan yang dikutip van der Lely menjadi yang paling penting dan didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memberikan bukti-bukti dan pemahaman kepada para

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 317. *Semangat Moeda* tidak ada lagi di pasaran ketika saya kutip.

pejabat pemerintahan Belanda mengenai strategi revolusioner dan visi kaum revolusioner Indonesia.

Laporan yang dibuat van der Lely membentuk garis dasar bagi tindakan pemerintah ketika harus menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar *pergerakan*. Sejauh PKI menjadi target, strategi pembendungan yang dianjurkan laporan ini tidak menimbulkan masalah. Tetapi isi laporan itu terus-menerus ditanamkan dan mempengaruhi pemerintah bahkan setelah PKI dihancurkan dan bentuk-bentuk organisasional yang menjadi target represi telah berubah dan menyebar. Bagaimana pemerintah menetapkan batas-batas bagi *pergerakan* dan bagaimana gerakan politik bawah tanah berkembang dalam menghadapi kebijakan baru pemerintah di bidang politik pada akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas tiga kasus kebijakan politik penting yang dijalankan melalui *hoofdpartek*: skandal SKBI (Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia), Pembuangan Iwa Koesoema Soemantri, dan PARI (Partai Republiek Indonesia) bawah tanah.

## Skandal SKBI

Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) secara resmi didirikan pada tanggal 8 Juli 1928, dalam pertemuan yang diadakan di Surabaya. Pertemuan ini dipimpin oleh Soenarjo, editor surat kabar berbahasa Melayu, *Indonesia Baroe*. Berdasarkan kesaksian kepala ARD van der Most yang menggantikan van der Lely pada bulan April 1929, Soenarjo mengatakan bahwa SKBI adalah kelanjutan dari Persarikatan Kaoem Boeroeh Komunis (PKB) yang sekarang berada di bawah kepemimpinan nasionalis. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik dan tidak menjalankan kegiatan politik apa pun.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Wd. Hoofd van den Dienst der Algemeene Recherche (van der Most), Rapport over de resultaten van het tegen de Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (S.K.B.I.) ingesteld onderzoek, ten vervolge op mijn voorloopig rapport van 30 Juli 1929, 17 Oktober 1929, Mr. 1017x/1929.

SKBI melakukan pawai pertamanya pada tanggal 5 Agustus 1928 di Surabaya, di mana Soedjiman diangkat sebagai ketua. Ia adalah bekas anggota PKI yang kemudian menjadi komisioner PNI (Partai Nasional Indonesia) cabang Surabaya. Beberapa pemimpin SKBI lain yang diidentifikasi oleh PID pada masa-masa awal ini adalah bendaharawan Sunaryo, mantan anggota SR dan mantan sekretaris Serikat Sopir di Surabaya dan Serikat Pekerja Pabrik Mesin (SBBE) di Malang, kemudian pada akhir tahun 1928 menjadi sekretaris Komite Administrasi "Bersatoe" *Commercial Papers Co.* dan editor *Sinar Indonesia* (sebelumnya *Indonesia Baru*) yang diterbitkan oleh "Bersatoe". Tokoh lain adalah Hadji Mohammad Abas, bekas anggota PKI dan Ketua Serikat Islam (SI) meraah di Banyuwangi; Goenardjo, anggota komite sentral dan direktur percetakan, mantan anggota PKI dan kemudian (akhir tahun 1928) menjadi anggota komite administratif "Bersatoe" *Commercial Papers Co.*, dan Askandar, pegawai Jawatan Kereta Api Negara di Surabaya.<sup>19</sup>

Pada bulan September 1928 Soedjiman dipecat sebagai ketua dan digantikan oleh Marsoedi, mantan anggota PKI dan sekretaris serikat pekerja pos. Seorang pendiri "Bersatoe" *Commercial Papers Co.* dan editor kepala surat kabar *Indonesia Bersatoe*. Ia dibebaskan pada bulan Agustus setelah delapan bulan dipenjara karena serangan-serangan melalui pers. Setelah Marsoedi mengambil alih kepemimpinan SKBI, komite sentral serikat ini diorganisasikan kembali, komite cabang yang terpisah dibentuk untuk menampung para pekerja rel kereta api, percetakan, pekerja galangan kapal, pegawai kereta api, dan sebagainya. Kursus-kursus pelatihan anggota dimulai. Statuta dan program kerja dicetak dan dipublikasikan dalam majalah bulanan serikat *Sinar Kaoem Boeroeh* yang baru terbit tahun 1928. Kursus pelatihan anggota dilakukan dengan pengawasan ketat dari para pemimpin SKBI. Anggota-anggota komite eksekutif membaca teks-teks seperti *Pedoman PKI*, *The Pan Pacific Worker*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, lihat juga Bijlage III (Staat van leiders en hun antecedenten) dalam Mr. 627x/1929.

dan tulisan Soemantri *Rasa Merdika*. Mereka mendiskusikan topik-topik seperti, imperialisme dan disiplin partai dalam kursus-kursus.<sup>20</sup> Teks-teks kemudian ditulis oleh sekretaris pertama dan kedua komite eksekutif, dan para pemimpin membaca teks-teks ini keras-keras dalam kursus-kursus. Cabang-cabang didirikan di Bangil dan Banyuwangi pada bulan Desember 1928.<sup>21</sup>

Jaksa penuntut umum menulis dalam suratnya kepada gubernur jenderal pada bulan Mei 1929 bahwa cabang-cabang SKBI ada di Surabaya, Banyuwangi, dan Bangil. Cabang-cabang baru didirikan di Medan oleh Mr. Iwa Koesoema Soemantri dan bahwa persiapan-persiapan dilakukan untuk mendirikan cabang-cabang serta kring di Magelang, Purworejo, Kutoarjo, Malang, Probolinggo, Kertosono, Mojokerto, dan Kotaraja. Jaksa penuntut juga melaporkan bahwa basis SKBI yang paling kuat ada di Surabaya dengan 450 anggota, 175 adalah anggota cabang serikat pekerja jalan kereta api, 81 berasal dari serikat buruh galangan kapal, dan 52 dari percetakan. Sebuah alat propaganda baru, *Sendjata Indonesia* (sebelumnya *Sinar Indonesia*) mulai diterbitkan pada bulan April 1929 dengan Marsoesi sebagai editor kepala.<sup>22</sup>

Sebagian besar pemimpin PKI adalah mantan PKI/SR (Sarikat Rakyat/aktivis serikat buruh). Mereka memimpin SKBI seperti PKI/SR/Aktivis Serikat Buruh memimpin serikat buruh dalam tahun 1924 dan 1925. Meskipun demikian ada dua perbedaan penting antara SKBI dan gerakan serikat buruh pada periode partai komunis. Pertama, orang-orang Indonesia tahu bahwa pemerintah tidak akan mencintai setiap usaha

<sup>20</sup> Untuk *Rasa Merdika*, lihat Takashi Shiraishi, ed., *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 246-248.

<sup>21</sup> Wd. Hoofd van den Dienst der Algemeene Recherche, Rapport, Mr. 1017x/1929.

<sup>22</sup> "Advocaat-generaal (RJMVerheijen) aan gouverneur-generaal (deGraeff), 15 Mei 1929," dalam R.C. Kwantes, ed., *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie: Derde stuk 1928-Aug 1933* (selanjutnya disebut *De Ontwikkeling: 1928-Aug 1933*) (Groningen: Wolters-Noordhoff, Uitgaven van de Commissie voor Bronnenpublicatie betreffende de Geschiedenis van Nederlandsch-Indie 1900-1942 van het Nederlandsch de Historisch Genootschap, 10, 1981), hlm. 212-221.

membangkitkan gerakan komunis dan segala sesuatu yang komunis (seperti, PKI, SR, VSTP dan Serikat Buruh Komunis lainnya) selalu diasosiasikan dengan pembuangan ke Digoel. Kedua, beberapa pemimpin itu telah ditandai sebagai "komunis" oleh PID bahkan sebelum mereka mendirikan SKBI. Karena organisasi ini dipimpin mereka yang diduga komunis, SKBI diawasi secara ketat oleh PID dan sejak awal telah disusupi mata-mata dan informan. Kasus Marsoedi, Direktur SKBI, mengungkapkan persoalan ini. Ia sudah berada di bawah pengawasan PID Surabaya sejak akhir tahun 1927. Dalam survei bulanan mengenai ketenangan politik tahun 1927, ia disebut tiga kali oleh van der Lely sebagai editor kepala *Sinar Indonesia*, sebagai pemimpin komite publikasi "komunis" yang besar (yang dimaksudkan van der Lely adalah "*Bersatoe Commercial Paper Co.*"), dan sebagai orang yang mencoba mendirikan partai politik baru, Partai Nasional Rakyat Indonesia. Ia juga seorang pengkhianat. Ketika ditangkap pada bulan November 1926, ia memberikan informasi penting kepada PID Surabaya yang menyebabkan terjadinya penangkapan beberapa pemimpin PKI yang sebelumnya mampu mengelabui polisi. Sebagai ganjarannya ia dibebaskan.<sup>23</sup> Ia ditangkap lagi tahun 1927 karena serangan-serangannya melalui publikasi pers, *Sinar Indonesia*, yang dideitnya. Ia dipenjara selama delapan bulan, namun kemudian diizinkan kembali ke tengah masyarakat. Mungkin orang tidak tahu bahwa ia telah menjual teman-temannya pada tahun 1926, namun mereka tentu heran mengapa orang komunis seperti ia tidak dikirim ke Digoel.

Gubernur jenderal telah diperingatkan mengenai bahaya SKBI oleh penasihatnya, van der Plas. Ia percaya akan karakter komunis yang dimiliki SKBI. Dalam laporan yang diserahkan untuk de Graeff pada bulan April 1929, ia menunjuk sebuah keputusan terbaru Kongres *Comintern* pada bulan Juli 1928 yang berisi rekomendasi untuk menghidupkan kembali gerakan

<sup>23</sup> Poec. PP● 1927–1928, bln. 21, 50, 118. Resident Soerabaja aan Gouverneur van Oost Java, 20 September 1929, Mr. 1191x/1929.

serikat buruh komunis di Hindia Belanda. Ia juga menyebutkan, berdasarkan survei bulanan ARD, bahwa sebuah cabang didirikan di Medan oleh Mr. Iwa Koesoema Soemantri, mantan direktur SPPL (Serikat Pekerja Pelayaran dan Perkapalan), Perhimpunan Indonesia dan mantan wakil Scmaoen di Belanda. Ia pernah tinggal di Moskow beberapa lama dan memiliki hubungan dengan PNI, dan bahwa SKBI memiliki hubungan dengan Sekretariat Serikat Buruh Pan-Pacific di Kanton.<sup>24</sup>

Van der Plas mengetahui bahwa SKBI tidak begitu berhasil sebagai sebuah gerakan. Van der Plas menulis kepada de Graeff bahwa sebagian besar serikat pekerja memisahkan diri dari SKBI; para pemimpin SKBI meminta kepada PNI untuk mengambil alih kepemimpinan, namun kaum nasionalis, Kelompok Studi Surabaya dan anggota PNI tidak percaya pada para penyeri usul dan pemimpin SKBI, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang meragukan.

Dulu mereka adalah komunis, kegiatan mereka pertama di *Sinar Indonesia*, kemudian dalam *Indonesia Bersatu*, lalu dalam SKBI. Jika mereka adalah orang-orang komunis bonafid, kata orang kepada saya, kita pasti sudah gila mengizinkan mereka memasukkan kita ke dalam tali gantungan dan sama sekali tidak masuk akal bahwa pemerintah yang telah mengirim ratusan orang komunis ke Digoel, tidak melakukan apa-apa pada mereka. Barangkali mereka adalah mata-mata—seperti yang kita yakini—tetapi kita tidak begitu peduli seperti apa yang mereka kira.

Para pemimpin SKBI dipandang kaum nasionalis sebagai agen provokasi atau paling tidak mata-mata, lanjut van der Plas. Namun, masih ada kemungkinan bagi PNI untuk mengambil alih kepemimpinan dan melenyapkan elemen-elemen yang tidak mereka percayai.<sup>25</sup> Laporannya tidak menyodorkan kesimpulan, ia tidak mengusulkan bentuk tindakan tertentu untuk melawan SKBI, namun menganjurkan gubernur jenderal memerintahkan

<sup>24</sup> "Nota van Ch.O. van der Plas (td.wd. Adviseur voor inlandse zaken) april 1929," hlm. 207–212.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 209–210.

*hoofdpartet* untuk memberikan laporan rinci mengenai SKBI dan para pemimpinnya dan menjelaskan bagaimana menangani organisasi ini.

Advokat umum mengirim surat kepada gubernur jenderal pada tanggal 15 Mei 1929.<sup>26</sup> Ia setuju dengan van der Plas bahwa SKBI dibangun menurut garis-garis kebijakan yang ditentukan dalam konferensi internasional ketiga dan tidak bisa dipastikan tindakan SKBI masih dalam batas-batas yang tidak mengganggu ketenangan dan tertib publik. Ia berargumen bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi ini didirikan atas dorongan Moskow dan memiliki hubungan dengan Liga Anti-Imperialis, Sekretariat Serikat Buruh Pasifik, atau organisasi asing lainnya. Selain itu, ia menunjukkan bahwa SKBI tidak melakukan propaganda anti pemerintah dan jarang berusaha menggerakkan pekerja untuk menentang para majikan. Karena itu tidak terbukti bahwa arah-arahan para pemimpin SKBI saat ini mengancam ketenangan dan tertib publik. Ia juga mengatakan bahwa tidak relevan van der Plas mengkhawatirkan pengambil-alihan kepemimpinan SKBI oleh PNI dan mengatakan bahwa PNI akan masuk ke dalam Serikat Buruh dan kehancuran SKBI mungkin memudahkan PNI menjalankan kegiatan-kegiatan serikat buruh. Pandangannya jelas, jangan lakukan intervensi saat ini, sudah cukup menempatkan SKBI dalam pengawasan polisi.<sup>27</sup>

Verheijen kemudian membicarakan panjang lebar tentang penegasan van der Plas bahwa seluruh kelompok Surabaya, termasuk anggota PNI, tidak mempercayai para promotor dan pemimpin SKBI dan mereka dilihat oleh sebagian nasionalis sebagai agen provokasi dan paling tidak mata-mata. Ia menunjukkan bahwa mayoritas tokoh yang memimpin SKBI adalah anggota, bahkan komisioner PNI cabang Surabaya dan saya tidak

<sup>26</sup> Karena alasan yang tidak diketahui, advokat umum RJM. Verheijen secara de facto bertindak sebagai jaksa penuntut umum dari bulan Mei sampai November 1929 ketika ia secara resmi diangkat sebagai jaksa penuntut umum.

<sup>27</sup> Advocaat generaal (RJM Verheijen) aan gouverneur-generaal (de Graeff), 15 Mei 1929, dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: Agustus 1928–1933*, hlm. 212–221.

paham mengapa orang-orang mencurigai pemerintah menggunakan para pemimpin SKBI sebagai agen provokasi atau mata-mata.<sup>28</sup>

Cukup aneh, advokat umum berpendapat bahwa para pemimpin SKBI bukan agen-agen provokator atau mata-mata melainkan aktivis murni. Lebih aneh lagi ia menyampaikan dua laporan PID Surabaya kepada gubernur jenderal tanggal 24 Mei 1929 untuk menunjukkan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat eksekutif SKBI untuk membersihkan mata-mata polisi. Juga tidak ada bukti yang membenarkan kecurigaan kaum nasionalis Surabaya, bahwa para pengajur dan pemimpin SKBI bertindak sebagai sekelompok mata-mata atau agen provokator pemerintah.<sup>29</sup> Laporan pertama yang ditulis mantri polisi Soesilo, bertanggal 15 Mei 1929 mengatakan bahwa menurut informasi yang ia peroleh dari "mata-mata S1 dan S2," sebuah pertemuan komite eksekutif diadakan 11 Mei yang dihadiri oleh anggota komite eksekutif dan beberapa anggota terpercaya SKBI. Pertemuan ini memutuskan untuk memecat Marsaid, ketua dewan eksekutif SKBI, karena ia terlalu erat bergaul dengan agen PID dan dicurigai sebagai mata-mata polisi. Laporan lain yang ditulis Mantri Polisi Oemar pada tanggal 16 Mei mengatakan menurut informasi yang disampaikan seorang informan, Marsaid dikeluarkan dari SKBI tanggal 12 Mei dalam rapat anggota yang dihadiri empat puluh orang.<sup>30</sup>

Laporan-laporan ini menunjukkan begitu dalamnya penyusupan mata-mata ke dalam SKBI. Orang mungkin heran mengapa Verheijen marah dengan dugaan van der Plas dan terus-menerus menyatakan bahwa SKBI adalah benar-benar organisasi aktivis murni, bukan sebuah kelompok provokator dan mata-mata. Penjelasan mungkin terletak pada perbedaan semantik.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.220–221.

<sup>29</sup> Laporan Advocate General kepada gubernur jenderal pada tanggal 24 Mei 1929, Mr.485x/1929.

<sup>30</sup> Mantri Politie afd. PID Soesilo, Geheim Rapport, 15 Mei 1929 dan Mantri Politie Oemar, Geheim Rapport, 16 Mei 1929, keduanya dalam Mr.485/1929.

Verheijen hanya berkata bahwa para pemimpin SKBI bukan sekelompok agen provokator, namun ia tidak pernah menolak bahwa mata-mata dan informan telah menyusup ke dalam SKBI. Meskipun seseorang mencurigai ada sesuatu yang lebih dari itu. Hoofdparket tahu bahwa para pemimpin SKBI seperti Marsoedi, Haji Mohammad Abas, dan Socnarjo adalah mantan anggota PKI. Begitu mudah untuk membuang mereka ke Digoel dengan alasan mereka adalah pemimpin dan propagandis PKI dan SR jika memang pemerintah menghendakinya. Namun terdapat paling kurang tiga faktor hoofdparket yang meniberatkan dalam memutuskan saat yang tepat untuk intervensi ke dalam SKBI.

Faktor pertama adalah ingatan masa lalu yang mempengaruhi penilaian pemerintah. Para pejabat mengingat militansi serikat buruh Indonesia di akhir tahun 1910-an dan 1920-an. Sebelum revolusi, VSTP, serikat buruh jalanan kreta api merupakan organisasi yang paling berpengaruh dan diorganisasikan dengan baik di bawah kepemimpinan komunis. Serikat buruh ini dihancurkan akibat pemogokan tahun 1923, namun bangkit kembali dua tahun kemudian, dengan 77 cabang dan 8.293 anggota menjelang November 1925, diketuai oleh pemimpin-pemimpin cabang yang masih muda, militan, dan terlibat dalam PKI dan SR serta serikat buruh lainnya. Akibatnya, tahun 1925 Surabaya muncul sebagai pusat kegiatan serikat buruh komunis terbesar, dengan anggota 900 orang dalam VSTP, 450 dalam serikat pekerja pos, 1.500 dalam serikat buruh galangan kapal dan pelaut, serta 2.000 anggota dalam serikat buruh pabrik mesin.<sup>31</sup> Bersamaan dengan kehancuran PKI, VSTP dan serikat buruh komunis lainnya juga ikut hancur. Sebagai gantinya, sebuah serikat buruh baru, PBST (Perhimpunan Beambte Spoor dan Tram) didirikan bulan Juli 1927. Serikat buruh ini tidak menyerupai VSTP. Saat kongres pertama yang diadakan bulan Januari 1928, sebuah usulan diajukan untuk mencantumkan kata

<sup>31</sup> John Ingleson, *In Search of Justic Workers and Unions in Colonial Java, 1908–1926* (Singapore: Oxford University Press, Asian Studies Association of Australia South-east Asia Publication Series, Nomor 12), Nmr. 269, 271 dan 296.

"Indonesia" pada nama serikat buruh ini. Usulan ini ditolak dan dianggap tidak resmi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa serikat buruh ini bisa dijinakkan dengan mudah. Seperti yang ditulis Petrus Blumberger pada tahun 1931, serikat buruh ini menjaga jarak secara politis dan tetap mempertahankan kegiatan sebagai serikat buruh murni.<sup>32</sup> Meskipun demikian, dengan catatan sejarah seperti itu, tak seorang pun dengan mudah meniadakan kemungkinan bangkitnya kembali serikat buruh rel ketera api yang militan, karena kurang dari satu tahun SKBI berhasil mengorganisasikan 150 buruh jalan kereta api di Surabaya, dan kegiatan propaganda dilakukan di kalangan buruh jalan kereta api di berbagai kota di Jawa.

Faktor kedua yang masih berkaitan dengan yang pertama adalah pertanyaan tentang serikat buruh sentral. Sejak kejatuhan Serikat Buruh Sentral Merah yang berpusat di Surabaya tahun 1926, tidak ada lagi badan pusat yang didirikan untuk mengkoordinasi gerakan buruh. Namun ada usaha-usaha untuk mendirikan sebuah pusat, yang dilakukan baik oleh PSI (Partai Sarakat Islam) dan nasionalis. Petrus Blumberger menulis bahwa SKBI menempatkan diri dengan cerdik di tengah persaingan diam-diam untuk merebut hegemoni atas gerakan serikat buruh antara anggota Sarakat Islam dan kaum nasionalis Indonesia.<sup>33</sup> Hoofdparkeet dengan cermat mengawasi sikap yang diambil serikat buruh lain terhadap SKBI, seperti yang tertera dalam laporan van der Most tertanggal 17 Oktober 1929. Di dalamnya, ia mengatakan bahwa PBST, Serikat Pekerja Pegadaian (yang diketuai oleh Soerjopranoto, pemimpin PSI), Serikat Pekerja Pos, dan Serikat Sopir tetap menjaga jarak dengan SKBI.<sup>34</sup>

Akhirnya, ada pertanyaan pada van der Most mengenai serikat buruh yang berada di bawah pengaruh PNI. Kongres PNI

<sup>32</sup> John Theodoor Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië* (Dordrecht: Foris Publications, 1987, aslinya diterbitkan tahun 1931), hlm. 362.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 33.

<sup>34</sup> Wd. Hoofd van den Dienst der Algemeene Recherche, Rapport, Mr. 1017x/1929.

yang diselenggarakan di Batavia bulan Mei 1929 menutuskan untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pembentukan serikat buruh dan organisasi petani. Keputusan ini menarik perhatian *hoofdparke*t karena cabang Surabaya yang dipimpin Anwari menangani serikat buruh lebih serius dibandingkan dengan kepemimpinan pusat di Bandung.<sup>35</sup> Tampaknya gerakan PNI ini mendorong van der Plas mengingatkan gubernur jenderal tentang keberadaan dan potensi SKBI. Verheijen mengabaikan pentingnya SKBI bagi PNI, namun hal ini tidak berarti bahwa ia menganggap serikat buruh pimpinan PNI tidak cukup penting. Ia menganggap serikat buruh PNI sebagai sebuah kekuatan serius, meskipun demikian ia percaya bahwa PNI akan masuk dalam serikat buruh, apa pun akibatnya terhadap hubungan partai ini dengan SKBI.

Seperti yang kita lihat, dalam suratnya kepada gubernur jenderal tanggal 15 Mei 1929, Verheijen mengatakan, "Saya berpandangan bahwa belum tiba saatnya, bahkan untuk saat ini, bagi pemerintah untuk membuat larangan-larangan yang menbatasi kegiatan-kegiatan SKBI, yakni membatasi kegiatan mereka secara keseluruhan." SKBI bukan agen provokator atau mata-mata, katanya. Namun ia tahu bahwa mata-mata polisi telah menyusup ke dalam SKBI, yang berarti *hoofdparke*t akan mempelajari apa saja keputusan-keputusan penting yang dibuat para pemimpin SKBI. Tidak ada alasan untuk menemaskan bahwa SKBI mungkin merencanakan sesuatu secara gelap. Rencana itu akan dihancurkan setiap saat yang dipilih *hoofdparke*t. Gubernur jenderal harus menilai saat yang tepat untuk menghancurnya dan menanamkan sikap pembenaran dalam ingatan publik. Di samping itu, organisasi dapat menjadi umpan yang baik. Biarkan dia sebentar. Jika buruh jalan kereta api, galangan kapal, percetakan dan buruh lain bergabung dengan SKBI, biarkan saja. Jika PBST, penjaga malam, dan serikat buruh

<sup>35</sup> John Ingleson, *Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement, 1927–1934* (Singapore: Heinemann Educational Books, 1979, Asian Studies Association of Australia Southeast Asia Publications Series, No. 1) hlm. 90–94.

non-komunis lain bergabung dengan SKBI, biarkan saja. Jika PNI setuju untuk mengambil alih kepemimpinan SKBI, biarkan saja. *Hoofdparket* akan melakukan intervensi pada saat yang tepat dan menghancurkan semua serikat buruh militer, setiap serikat buruh sentral yang aktif secara politik, dan PNI sekaligus. Tindakan yang ditolaknya saat itu adalah intervensi yang terlalu dini akibat instruksi gubernur jenderal yang mendapat dorongan van der Plas yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia tahu bahwa de Graeff tidak mau menghancurkan PNI, jika penghancuran itu dilakukan oleh provokator dan mata-mata.

Karena itu *hoofdparket* terus mengamati SKBI. Dalam sebuah laporan yang disampaikan pada gubernur jenderal pada tanggal 8 Juli 1929, Kepala ARL van der Most mencatat kemunduran kegiatan SKBI: tidak ada pawai umum dan kursus-kursus pelatihan anggota terakhir kali dilakukan bulan Juni. *Senjata Indonesia* telah berhenti terbit karena kesulitan keuangan dan para pekerja tampaknya tidak punya minat untuk bergabung dengan SKBI di bawah Marsocdi. Di Bangil, jumlah anggota cabang hanya sampai 40 orang. Sebuah kelompok pertemuan didirikan di Sidoarjo, yang didukung terutama oleh pekerja pabrik gula dan jalur kereta api. Cabang lain didirikan di Yogyakarta dengan anggotanya para penjahit, pengrajin batik tulis, dan pandai besi. Perserikatan Sopir Mataram juga bergabung dengan SKBI. Tokoh penting di Yogyakarta adalah Moeljono alias Tarmoeji, mantan pemimpin PKI dan SR dan pelaku propaganda di Kediri, yang tidak dibuang ke Digoel karena ia dipenjara bulan November 1926 dan dibebaskan bulan Agustus 1928. Ia ikut membentuk PSM dan menjadi wakil ketua, bergabung dengan SKBI dan diangkat menjadi komisioner SKBI Jawa Tengah. Di Surakarta, pemimpin SKBISurabaya telah melakukan kontak dengan aktivis komunis Siti Aminah, alias Woro Trisoelo, istri Trisoelo dari Surabaya, yang sedang dibuang ke Digoel. Siti Aminah kemudian memperkenalkan mereka kepada Sadiono Martopoespto dan Soemokasdiro, alias Rasimin, keduanya adalah calon anggota PNI. Mereka membentuk sebuah komite darurat di Solo. Di tempat-tempat lain seperti di Banyumas, Cepu, Kudus, Blora,

Semarang, dan Pekalongan SKBI mengalami banyak keberhasilan. Verheijen menasihati lagi gubernur jenderal bahwa tidak perlu membubarkan SKBI, cukup mengawasinya dengan ketat.<sup>36</sup>

Pada hari yang sama, tanggal 18 Juli 1929 Residen Surabaya mengirim kepada advokat umum sebuah laporan polisi rahasia PID Surabaya dari Asisten Wedana Soentoro, tertanggal 16 Juli. Dalam laporan ini, Soentoro menulis bahwa "mata-mata S3" menunjukkan kepada saya sebuah surat tertanggal 30 Mei 1929 yang dikirim oleh sekretariat Liga Anti-Imperialis dan dialamatkan kepada komite eksekutif sentral SKBI. Dalam surat ini, sekretariat Liga Anti-Imperialis menginformasikan kepada SKBI bahwa SKBI diterima sebagai anggota pertama dari Indonesia. Soentoro mengirim laporan ini bersama reproduksi fotografis amplop dan surat tersebut.<sup>37</sup>

Setelah menerima laporan ini, *hoofdpartijk* memutuskan untuk bertindak. Pada tanggal 24 Juli, advokat umum mengirim telegram kepada residen Surabaya dan kepala daerah lainnya di Jawa dan Madura serta gubernur di Pantai Timur Sumatra untuk memerintahkan polisi agar menggeledah kantor-kantor SKBI dan rumah para pemimpin dan propagandisnya pada tanggal 26 Juli dan melaporkan kepada *hoofdpartijk* melalui telegram mengenai setiap kontak SKBI dengan asosiasi lain dan siapa yang membangun hubungan dengan Liga dan SKBI di Belanda.<sup>38</sup> Dalam penyapuan oleh polisi, aktivis SKBI yang telah ditandai

<sup>36</sup> Laporan Deputi Kepala ARD (van der Most) kepada jaksa penuntut umum, 17 Juli 1929 dan jaksa penuntut umum kepada gubernur jenderal, 18 Juli 1929, keduanya dalam Mr. 695x/1929. Lihat juga laporan Deputi Kepala SRD (van der Most), *Voorloopig rapport over de tegen Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) getroffen maatregelen*, 30 Juli 1929, Mr. 713x/1929; jaksa penuntut kepada gubernur jenderal, 15 November 1929, Mr. 1192x/1929; keterangan kepala komisioner polisi Surakarta kepada Residen Surakarta, 10 Agustus 1929 dan laporan jaksa penuntut umum kepada gubernur jenderal, 15 November 1929 keduanya dalam Mr. 1193/1929.

<sup>37</sup> Asisten Wedana PID cabang Surabaya (Soentoro), *Geheim Rapport*, Surabaya, 16 Juli 1929, Mr. 713x/1929.

<sup>38</sup> *Hoofdpartijk* cepat belajar dari Dinas Rahasia Belanda yakni bahwa Rustam Effendi dan Ticoalu Pandean yang menjalankan bisnis pers untuk politik kolonial di Penerbit

olch polisi ditangkap di Batavia, Bandung, Padalarang, Semarang, Blora, Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Kediri, Blitar, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Jember, Surabaya, Bangil, Banyuwangi, dan Makassar, termasuk 25 di Surabaya, 20 di Surakarta dan 20 orang di Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka dibebaskan kembali tidak lama kemudian. Namun bulan Desember 1929 pemerintah memutuskan untuk membuang enam pemimpin dan propagandis SKBI ke Digoci: Marsoedi (Ketua); Goenardjo alias Hardjosoepetro (komisioner komite eksekutif dan ketua cabang serikat pekerja percetakan dan sopir); Ahija Soepardi alias Ahjadiredjo (bekas anggota VSTP dan ketua cabang serikat pekerja rel kereta api) di Surabaya, Sadino Martopoespito (ahli propaganda SKBI dan bekas pegawai stasiun kereta Solo Balapan) di Surakarta; dan Maeljono alias Tarmoedji di Yogyakarta. Menariknya, sekretaris SKBI, Askandar tidak ikut dibuang walaupun ia ikut bertanggungjawab atas korespondensi dengan Liga. Tak perlu diragukan lagi bahwa ia adalah "mata-mata S3" yang dibina oleh Asisten Wedana Soentoro.<sup>39</sup>

Tanggal 6 Agustus 1929, wakil pemerintah untuk urusan umum membuat pengumuman di *Volksraad* tentang Liga Anti-Imperialis. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi setiap kontak organisasional langsung antara asosiasi-asosiasi dan orang di Hindia Belanda dengan Liga atau organisasi mana pun yang sangat dipengaruhi oleh komunisme. Begitu ada bukti yang menunjukkan adanya kontak itu, pemerintah akan melakukan intervensi. Hal ini merupakan sikap

The Hague, membangun kontak antara SKBI dan Liga Anti-Imperialis. Procureur Generaal aan Gouverneur Generaal, 27 Agustus 1929. Mr. 812x/1929.

<sup>39</sup> Deputi Kepala ARD (van der Most), Voorloopig Rapport. 30 Juli 1929. Mr. 732x/1929; Deputi Kepala ARD (van der Most), Rapport over resultaten van het tegen de Sarekaat Kaem Boeroeh Indonesia (SKBI) ingesteld onderzoek, ten vervolge op mijn voorloopig rapport dari 30 Juli 1929, Oktober 1929, dalam Mr 1191x/1929; jaksa penuntut kepada gubernur jenderal, 21 Oktober 1929, keduanya dalam Mr. 1192x/1929; jaksa penuntut kepada gubernur jenderal, 15 November 1929 dan keterangan kepala komisioner polisi cabang Surakarta kepada Residen Surakarta, 10 Agustus 1929, keduanya di dalam Mr. 1193x/1929; Uitreksel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie, 5 April 1930, Mr. 393/1930.

resmi pemerintah yang akan tetap dipertahankan. Pada kesempatan yang sama, ia juga memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah menangani serikat buruh. Ia tidak mau menolak keinginan sebuah serikat buruh yang sehat, dan harus mestijelas bahwa semua dogma yang berasal dari Barat harus ditolak dan pemerintah tidak melihat artikel tentang pemogokan dalam hukum kriminal (artikel 161) dapat menghancurkan kegiatan serikat buruh yang jujur (*bonafide*), namun tidak ada dispensasi bagi serikat buruh yang tidak bisa dipercayai (*mala fide*). Peter Blumberger menafsirkan dengan tepat, pesannya jelas: Orang-orang Indonesia diharapkan menjauhkan diri dari partai politik, dogma-dogma sosialis dan nasionalis tentang kapitalisme, imperialismc, dan bekerja dengan pemerintah untuk mengejar kepentingan ekonomi para pekerja yang sesuai dengan kepentingan umum masyarakat dan tanah air.<sup>40</sup>

SKBI tidak bersifat ilegal atau pun klandestin. Karena organisasi ini dipimpin oleh mantan aktivis serikat buruh/PKI/SR dan telah disusupi mata-mata dan informan, kaum nasionalis telah melihat organisasi ini tidak bisa dipercaya sejak awal, dan ketidakpercayaan itu diperkuat oleh tindakan penangkapan pemerintah. Signifikansinya sebagai sebuah organisasi bukan dalam kegiatan atau konstitusi, tetapi dalam peluang yang memberikan kesempatan pemerintah untuk menegaskan sikapnya: pemerintah tidak akan mentoleransi setiap kontak organisasional dengan Liga Anti-Imperialisme dan organisasi komunis lainnya; tidak pernah ada izin untuk serikat buruh yang secara politik dogmatis, dan akhirnya sebaiknya PNI tetap menjaga kegiatan serikat buruhnya dalam batas-batas yang wajar. Peringatan yang terakhir ini jelas-jelas dikomunikasikan, walaupun hoofdpartij tidak menemukan kaitan langsung apa pun antara SKBI dan PNI dalam penggeledahan polisi bulan Juli.

---

<sup>40</sup> Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging*, hlm. 369 dan 374.

## Pembuangan Iwa Koesoema Soemantri

Mr. Iwa Koesoema Soemantri ditangkap tanggal 26 Juli 1929 dalam penyapuan oleh polisi terhadap para pemimpin SKBI, namun sejak awal, kasusnya diperlakukan secara berbeda walaupun pada mulanya *hoofd parket* melihat bahwa ia merupakan tokoh utama SKBI cabang Medan dalam bulan Desember 1929.<sup>41</sup>

Van der Plas menggambarkan Iwa sebagai mantan ketua Perhimpoenan Indonesia dan bekas wakil Semaoen di Belanda, beberapa lama tinggal di Moskow, sekarang agak dekat dengan PNI. Data tentang Iwa yang lengkap ini menunjukkan bahwa sudah lama ia diawasi, minimal sejak 1924, ketika ia menjadi sekretaris SPLI (Sarekat Pegawai Laoet Indonesia) yang baru didirikan di Amsterdam di bawah kepemimpinan Semaoen.<sup>42</sup> Saat Iwa kembali ke Hindia Belanda dengan gelar Sarjana Hukum dari Leiden (gelarnya *Meester in de Rechten, Mr.*) pada tanggal 11 November 1927, jaksa penuntut segera melaporkan kedatangannya pada hari yang sama kepada gubernur jenderal. Ia melaporkan bahwa Iwa telah pergi ke Ciamis, kota asalnya di Jawa Barat di mana kedua orang tuanya tinggal (ayahnya adalah pensiunan penilik sekolah). Ia juga menyampaikan bahwa Iwa adalah aktivis sayap kiri PI (Perhimpoenan Indonesia) di Belanda, tinggal sebentar di Moskow dan diangkat sebagai wakil PI dalam Comintern.<sup>43</sup> Sejak itu, nama Iwa sering masuk dalam laporan bulanan ARD. Laporan November 1927, misalnya, disebutkan bahwa Iwa berencana pindah ke Medan, dan sejak bulan Februari 1928 ia mengirim uang ke Soebardjo yang kemudian bekerja pada sekretariat Liga Anti-Imperialis di Berlin. Laporan bulan Maret 1928 mencatat khadirananya pada pertemuan tertutup PNI yang

<sup>41</sup> Advocate General (Verheijen) kepada gubernur jenderal (de Graeff), 21 Oktober 1929, Mr. 1017/1929.

<sup>42</sup> Van der Plas mengatakan Iwa adalah sekretaris SPPL, gabungan antara SPPL yang didirikan PKI di Jawa tahun 1925 dengan SPLI yang didirikan Semaoen di Amsterdam tahun 1924.

<sup>43</sup> Jaksa Umum (Duyfes) kepada gubernur jenderal (de Graeff) 11 November 1927, Mr. 134x/1929.

diadakan di Bandung di bawah kepemimpinan Soekarno.<sup>44</sup> Ketika ia pindah ke Medan tanggal 3 April 1928, kepala polisi Batavia mengirim berita ke sejawatnya di Medan melalui telegram.<sup>45</sup>

Iwa tampaknya pindah ke Medan bukan karena politik nasionalisnya, walaupun tidak perlu diragukan ia seorang nasionalis, sama seperti banyak temannya di Belanda. Ketika ia kembali ke Jawa, ia bekerja sebentar pada firma hukum Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo di Bandung dan kemudian pada Mr. Sartono di Batavia. Keduanya adalah teman Iwa sejak masih di Belanda dan keduanya aktif dalam PNI. Ia juga datang untuk bertemu Ir. Soekarno, Ketua PNI, pada akhir tahun 1927 ketika ia di Bandung. Namun ia kembali ke Medan, seperti yang dikatakanya dalam otobiografi yang tidak pernah ingin dipublikasikannya, karena pañannya Abdul Manap mengatakan bahwa tidak ada ahli hukum Indonesia di Medan dan mengundangnya untuk datang.<sup>46</sup> Dilihat dari perspektif *hoofdparket*, Iwa adalah salah satu dari sedikit kader intelektual, bahkan salah satu yang paling berbahaya karena pernah tinggal di Moskow, melalui dia Comintern mendorong kaum komunis Indonesia untuk membangun kerja sama atau membentuk "Blok Anti-Imperialis". *Hoofdparket* yakin bahwa ia datang ke Medan untuk alasan politik.

Sebagai kota perbatasan yang berkembang dan kantong perdagangan yang didominasi orang Eropa di akhir abad 19, Medan sejak menjelang akhir abad 20 menjadi "Paris" dari Hindia Belanda. Jumlah penduduknya 76.600 di tahun 1930 yang terdiri dari orang asli 41.300, Cina 27.300 dan orang Eropa sebanyak 4.300. Medan adalah ibukota Karesidenan Pantai Timur Sumatra, dan kota ini menjadi pusat perdagangan "Deli", dekat dengan daerah perkebunan yang berpusat di Deli, Serdang, dan Langkat.

<sup>44</sup> Poeze, PPO: 1927–1928, hlm. 169, 267–274.

<sup>45</sup> Rapport No. 2 dalam *Chef der Rechentele, Algemeene Politie Batavia (Maseland)*, Extra-Rapport, 10 September 1928, Mr. 315x/1930.

<sup>46</sup> Iwa Koesoema Soemantri, *Indonesia Minzoku Shugi no Genryū: Iwa Koesoema Soemantri Jiden* (Tokyo: Waseda University Press, 1975), hlm. 65–66. Edisi Indonesia tidak dipublikasikan.

Wilayah ini disebut Tan Malaka sebagai "tanah penuh emas, surga bagi kelas kapitalis, namun juga tanah penuh keringat, tangisan dan kematian, neraka bagi proletariat".<sup>47</sup> Jumlah penduduk Sumatra Timur tahun 1930 adalah 1,69 juta. Orang Jawa adalah mayoritas dengan jumlah 600.000 (35,0 persen). Klompok ras dan etnis lainnya, mencakup Melayu (335.000; 19,9 persen), Cina (193.000; 11,4 persen), Batak Karo (145.000; 8,6 persen), Batak Simalungun (95.000; 5,6 persen), Batak Toba (74.000; 4,4 persen), Batak Mandailing dan Angkola (60.000; 3,5 persen), Minangkabau (51.000; 3,0 persen), Sunda (44.000; 2,6 persen), Banjar (31.000; 1,9 persen), dan orang Eropa (11.000; 0,7 persen).<sup>48</sup>

Institusi terpenting di Sumatra Timur bukanlah negara, konglomerasi dari sebuah administrasi regional Hindia Belanda, sultan daerah, kerajaan, dan unit-unit otonom lainnya, melainkan perkebunan-perkebunan tembakau, karet, klapa sawit, dan perkebunan lain milik orang Barat (Eropa dan Amerika). Perkebunan itu dibangun sejak tahun 1870 di wilayah yang sangat jarang penduduknya tetapi sangat subur ini dengan menggunakan tanaman dan kuli-kuli Cina dan Jawa yang diimpor. Kemudian dibangun jaringan jalan, jalan kereta api yang menghubungkan Langkat, Deli dan Serdang, sebuah jaringan telegram, pelabuhan, irigasi, sarana air bersih, dan sekolah-sekolah. Sepintas keadaan di Deli mengatakan kepada kita banyak hal tentang kondisi daerah ini. Seperti yang dikatakan Rob Nieuwenhuys; Deli adalah sebuah pulau, di Deli segala sesuatu harus diimpor, karyawan maupun kuli. Staf didatangkan langsung dari Eropa, kuli dari Jawa. Deli merupakan konglomerasi peniukinan kulit putih yang dikelilingi koloni-koloni

<sup>47</sup> Tan Malaka, *From sail to sail*, volume satu, diterjemahkan dan diberi pengantar oleh Helen Jarvis (Athens: Ohio University Monographs dalam International Studies Southeast Asia Series, No. 83), hlm. 43.

<sup>48</sup> Michael van Langenberg, "National Revolution in North Sumatra, Sumatra Timur and Tapanuli, 1942–1950," Disertasi PhD, University of Sidney, 1976, hlm. 959–960; Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and The End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), hlm. 43 dan 58.

Cina dan Jawa. Namun mereka semua adalah orang asing, tidak ada yang berasal dari daerah itu.<sup>49</sup> Tan Malaka yang pernah tinggal di Deli tahun 1912–1921 hanya menambahkan bahwa:

Konflik antara kolonis kulit putih yang bodoh, arogan, dan kejam dengan bangsa berwana yang tertekan, ditipu, tertindas, dan budak-budak yang dieksplorasi. Memenuhi atmosfir Deli dan secara konstan meningkatkan serangan-serangan kaum kuli terhadap orang Belanda pemilik perkebunan. Sering kali satu penghinaan atau teguran cukup untuk menjadi alasan bagi para kuli mencabut golok dari sarungnya dan menyerang *Tuan Besar* (administrator perkebunan) dan *Tuan Kecil* (Asisten yang berkulit putih), karena hatinya dipenuhi dengan kemarahan terhadap semua hal.<sup>50</sup>

Demikian pula, protes kolektif kaum buruh dan serangan fisik dari pihak manajemen merupakan hal umum yang jumlahnya terus meningkat pada akhir tahun 1920-an, walaupun tanpa organisasi yang canggih, frekuensi tetap dan inspirasi politik seperti yang sering dikatakan para pemilik perkebunan. Dari tahun 1925 sampai tahun 1930, kata Stoler, dilaporkan serangan terhadap para perantau (kulit putih dan nonkulit putih) meningkat dari 31 menjadi 220, dan jumlah penyerangan terhadap orang Eropa yang menjadi staf perkebunan berlipat ganda dalam periode yang sama. Dalam tahun 1924 diperhitungkan bahwa rata-rata seorang asisten dalam 15 tahun berdinias memiliki peluang 33 persen dibunuh oleh pekerja dan paling kurang 50 persen peluang diserang secara fisik.<sup>51</sup>

Pemerintahan daerah dan industri perkebunan sangat peka terhadap setiap tanda pemogokan di perkebunan, dan mereka menyalahkan para agitator komunis, elemen-elemen ekstremis dan perusuh-perusuh nasionalis yang menyebabkan serangan fisik dan protes buruh. Asosiasi Perkebunan Deli (DVP, *Deli Plant-*

<sup>49</sup> R. Nieuwenhuys, *Oost-Indische Spiegel* (Amsterdam: Querido, 1978), dikutip dalam Stoler, *Capitalism and Confrontation*, hlm. 42, 53, dan 62.

<sup>50</sup> Tan Malaka, *From Jail to Jail*, Volume Satu, hlm. 47.

<sup>51</sup> Stoler, *Capitalism and Confrontation*, hlm. 42, 53, dan 62.

*ers Vereeniging) dan Asosiasi Umum Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatra (AVROS, *Algemeene Association van Robberplanters ter Oostkust van Sumatra*) bersama-sama mendirikan dinas intelijen swasta, DPV-AVROS intelijen, pada bulan Oktober 1927, yang berpusat di Medan dan dikepalai oleh bekas kepala PID Sumatra. Lembaga ini bekerja sama dengan dinas intelijen daerah untuk mengumpulkan informasi tentang "kecenderungan politik dan religius di kalangan pekerja perkebunan" dan mengejar kuli-kuli kontrak yang melarikan diri.<sup>52</sup>*

Hal ini tak berarti bahwa *pergerakan* kuat di Medan dan melakukan terobosan berarti berupa "politisasi" para pekerja perkebunan. Apakah dengan nama BO (Boedi Oetomo), SI, *Insulinde*, PKI atau Thawalib Sumatra, *pergerakan*, umuninya terbatas di Medan dan kota-kota kecil Sumatra lain dan umumnya menjalankan jurnalisme berbahasa daerah sehingga sulit menjangkau pekerja perkebunan. Anggotanya umumnya terbatas pada sekelompok kecil pegawai negeri setempat, buruh jalan kereta api dari jalur Deli Sumatra, reformis Islam Mandailing dan Minangkabau, profesional asli yang merupakan kelas menengah kota. Di samping itu, sayap radikalnya umumnya diwakili oleh aktivis-aktivis PKI Minangkabau dan Mandailing dan militan *kaum muda* dari Sumatra Thawalib. Ketika revolusi bangkit, semua mereka disingkirkan bersama dengan pembuangan 30 orang dari Sumatra Timur, termasuk Abdul Xarim M.S. (kemudian bersama di Digoel), Chalid Salim, dan Urbanus Pardede, pemimpin PKI cabang Pematang Siantar.<sup>53</sup>

Saat Iwa tiba di Medan bulan April 1928, *pergerakan* di Sumatra Timur tampaknya tidak terlalu hidup, dengan beberapa ratus orang aktif dalam organisasi-organisasi politik, religius, sosial, dan pemuda lainnya yang secara ketat diawasi oleh PID dan intelijen DPV-AVROS, dan dijepit juga oleh pemerintahan

<sup>52</sup> Onderzoek inzake het opvatten van gedroste contractanten door den te Medan gevestigden inlichtingsdienst der DPV en AVROS, Nr. 145x/1929.

<sup>53</sup> Van Langenber, "National Revolution," hlm. 120-131; Reid, *The Blood of the People*, hlm. 59-61.

daerah, industri perkebunan, penguasa dan pemimpin asli, dan pemimpin agama konservatif. Pada saat itu Iwa menemukan dirinya berada di tengah dunia *pergerakan* kecil tidak begitu lama setelah ia bermukim di sana. Dengan gelar sarjana hukum dari Leiden, masa lalunya sebagai ketua PI dan persahabatannya dengan para pemimpin PNI seperti Soekarno, Sartono, dan Iskaq Tjokrohadisocrjo, ia dilihat sebagai seorang pemimpin oleh aktivis *pergerakan* dan diidentifikasi oleh PID sebagai "Propagandis PNI" yang bekerja untuk menarik dukungan mayoritas penduduk bagi kepentingan politik untuk mencapai kebebasan dari Belanda dengan cara ilegal.<sup>54</sup>

Untuk mengukur tingkat keterlibatan Iwa dalam kegiatan asosiasi orang-orang Indonesia di Pantai Timur Sumatra, khususnya di Medan, dan sekertat apa ia diawasi oleh PID, kita hanya perlu melihat *hard facts* yang terkandung dalam ringkasan laporan intelijen PID cabang Sumatra Timur yang dikumpulkan setelah penangkapan Iwa.

#### Tahun 1928

3 April: Tiba dari Belawan (Belanda?) dengan kapal "Plancius" dari Batavia; tinggal dengan dokter hewan, Abdul Manap.

April: Mr. Iwa Koesoema Soemantri telah membuka sebuah firma hukum di Jalan Huttenbach 12, Medan. Ketua Jong Islamiten Bond, yang bernama Mohammad Dasoeki, seorang anggota keluarga Mr. Iwa Koesoema Soemantri bekerja di sana sebagai clerk.

19 Mei: Sebuah pertemuan anggota dilakukan BO di rumah klub mereka di Jalan Tjong Yong Hian, Medan, untuk memperingati ulang tahun ke-20 dihadiri oleh kira-kira 80 orang, termasuk wakil cabang Minangkabau Saijo (Asosiasi Sahabat Minangkabau) dan serikat jurnalis; Mr. Iwa Koesoema Soemantri, nasionalis terkenal dari Weltevreden, juga hadir dalam pertemuan itu."

20 Juli: Isu pertama dalam harian berbahasa Melayu *Matahari Indonesia* muncul dengan Iwa sebagai editor kepala.

---

<sup>54</sup> Laporan Kepala Intelijen Daerah, Medan, Pantai Timur Sumatra, kepada Gubernur Pantai Timur Sumatra, tanggal 22 Juli 1929, Nr. 315x/1930.

21 Oktober: BO mengadakan pertemuan di rumah klub untuk mendirikan sebuah cabang organisasi Pemoeda Indonesia; Iwa diangkat sebagai penasihat.

6 November: Harijo Soedjono, Direktur Bank Nasional yang didirikan Kelompok Studi Surabaya, tiba di Medan dan menginap di Grand Hotel; ia mengontak Iwa dan Abdul Manap.

### Tahun 1929

8 Januari: *Jong Islamiten Bond* cabang Medan mengadakan *slametan* di rumah perkumpulan dekat jalan Oranje Nassau; dihadiri 70 orang, termasuk Iwa dan Abdul Manap.

12 Januari: Sebuah pertemuan diadakan di rumah perkumpulan Minangkabau Saijo untuk mendirikan cabang organisasi Pemoeda Indonesia secara resmi; kira-kira 250 orang hadir dalam pertemuan ini, termasuk Iwa, Abdul Manap, Mangaradja Ihuetan (editor kepala *Pewarta Deli*), dan Muhammad Dasoeki.

31 Januari: *Malahari Indonesia* berhenti terbit.

3 Februari: Kaoetamaan Istri, organisasi wanita BO, menyelenggarakan ulang tahun yang pertama di rumah perkumpulan BO; dihadiri 200 orang, Iwa dan Abdul Manap, Ketua BO cabang Medan, keduanya berpidato.

24 Februari: Serikat Sopir Persatuan Motorist Indonesia (PMI) didirikan di rumah perkumpulan BO dan Iwa diangkat sebagai penasihat sementara.

16 dan 17 Maret: *The Opium Regie Bond Luar Djawa dan Madoera* (Serikat Pekerja Monopoli Opium oleh Pemerintah untuk Luar Djawa dan Madura) mengadakan kongres yang dihadiri oleh wakil dari 45 cabang. Iwa diangkat sebagai ketua.

24 Maret: Persatuan Motorist Indonesia mengadakan pertemuan anggota di rumah perkumpulan BO, Iwa menghadiri pertemuan dalam kapasitas sebagai penasihat. Pada saat yang sama, anggota eksekutif BO, Persatuan Motorist Indonesia, Pemoeda Indonesia dan Gerakan Nasional Pandu Indonesia bertemu di kantor Iwa untuk mendirikan sebuah rumah klub.

14 April: Tebing Tinggi Sepakat mengadakan pertemuan umum di Tebing Tinggi; Iwa memberikan pidato.

4 Mei: Pemuda Indonesia mengadakan pesta di rumah perkumpulan BO; Iwa memberikan pidato.

26 Mei: Dua cabang *Opium Regie Bond* mengadakan pertemuan bersama di rumah perkumpulan Taman Persatuan Indonesia. Pertemuan ini dipimpin Iwa.

1 Juni: Mr. Soenarjo, seorang pemimpin PNI yang terkenal tiba di Medan.

16 Juni: Sebuah pertemuan diadakan dan dipimpin oleh Mr. Iwa Koesoema Soemantri dan Mr. Soenarjo di rumah perkumpulan Taman Persatuan Indonesia untuk membicarakan pembentukan sebuah *Volksoniversiteit* di Medan.<sup>55</sup>

Harus diingat bahwa setiap informasi yang berasal dari mata-mata dan informan, apa yang dilaporkan mengenai Iwa, dan/atau setiap spekulasi yang dibuat pejabat PID tentang kegiatannya tidak dimasukkan ke dalam laporan di atas. Dengan kata lain, ringkasan di atas hanya mencakup peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi menurut akal sehat—yakni peristiwa-peristiwa yang langsung disaksikan oleh para petugas PID dan tidak ada alasan untuk menipu—and Iwa mengakui bahwa hal itu terjadi atau minimal ia tidak pernah menolak secara eksplisit dalam interrogasi dan/atau membantahnya dalam otobiografinya. Kita harus yakin pada kebenaran data-data seperti ini. Iwa aktif di BO dan kelompok diskusi Pemoeda Indonesia. Hal ini bukan hal yang aneh karena pendidikannya di Belanda, masa lalunya sebagai aktivis dengan menjadi anggota terkemuka Tri Koro Darma, (sebuah organisasi pemuda yang dekat dengan BO, kemudian menjadi Jong Java) dan PI, dan kenyataan bahwa secara pribadi ia sangat dekat dengan pamannya Abdul Manap yang menjadi Ketua BO cabang Medan. Ia bertemu dengan istrinya, Kuraisin, kemenakan perempuan Abdul Manap dan keponakan Iwa di rumah pamannya dan menikahinya di Medan atas dorongan pamannya.<sup>56</sup> Ia juga aktif di PMI dan *Opium Regie Bond*, dan sekali lagi, hal ini tidak mengejutkan karena Iwa sama seperti para pemimpin PNI lain, memandang serikat buruh sebagai sarana bagi PNI untuk menjangkau para petani dan pekerja. Akhirnya, ia juga aktif dalam jurnalistik, menerbitkan dan beberapa lama sebelum J. Mannopo bergabung, ia mengedit *Matahari Indonesia*. Ia juga akan aktif dalam mendirikan

<sup>55</sup> Kutipan ini didasarkan pada ringkasan laporan PID Sumatra Timur yang dikuumpulkan oleh pemimpin intelijen daerah dalam Mr. 315/1930.

<sup>56</sup> Iwa Koesoema Soemantri, *Indonesia Minzoku Shugi*, hlm. 72–73.

*Volksuniversiteit (Universitas Rakyat)*, dengan Soenarjo, jika ia tidak ditangkap bulan Juli 1929.

Seperti yang dicurigai Ketua PID Medan, Iwa mungkin menyiapkan dasar bagi pembentukan PNI cabang Medan dengan mendirikan jaringan di antara BO dan anggota-anggota Penioeda Indonesia, aktivis-aktivis serikat buruh, dan para jurnalis. Jika ini alasannya, ia sama sekali tidak berhasil. Pada tanggal 29 Desember 1929, Gubernur Pantai Timur Sumatra memerintahkan intelijen daerah untuk melakukan penggeledahan rumah besar-besaran sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap PNI di seluruh Hindia Belanda, "untuk mempelajari sejauh mana propaganda politik PNI yang dijalankan secara rahasia oleh agitator (Iwa) telah berakar di dalam jiwa asosiasi-asosiasi di atas (BO, Jong Islamiten Bond, dan seterusnya) dan di kalangan para pemimpinnya. Delapan puluh delapan tempat digeledah, termasuk rumah Mr. Soenarjo, Abdul Manap, Mohammad Dasoeki, Mohammad Samin (bekas ketua SI Medan), dan guru Taman Siswa. Tidak ada hasil positif yang diperoleh, namun para penggeledah rumah, seperti yang dilaporkan Gubernur Sandick kepada jaksa penuntut umum, berhasil dalam meningkatkan keyakinan para petugas pemerintah dan polisi sejauh diperlukan.<sup>57</sup>

Hal ini baru disadari oleh pemerintah ketika sudah ada gagasan untuk membuang Iwake Banda Neira. Ketika ia dibebaskan tahun 1928 dan 1929, baik *hoofdsparket* dan intelijen daerah mencurigai bahwa ia tidak hanya memimpin propaganda PNI tetapi lebih dari itu. Ia terlibat dalam *klandestin* dan kegiatan bawah tanah. Para mata-mata dan informan memberikan informasi yang cukup untuk mendukung kecurigaan mereka. Walaupun sebelumnya tidak banyak teman-teman Iwa yang bekerja bagi PID, kita tahu pasti bahwa salah satu dari mereka adalah mata-mata. Mohammad Jocnoes disebut dalam daftar

---

<sup>57</sup> Laporan Gubernur Pantai Timur Sumatra kepada Procureur Generaal, Medan, 7 Maret 1930 dan daftar orang yang rumahnya digeledah, keduaanya dalam Mr. 381x/1930.

orang-orang yang diinterogasi dan yang rumahnya digeledah dalam penyapuan polisi pada tanggal 29 Desember 1929, dengan catatan ini:

Melalui kontak yang ajeg (kontinyu) dengan semua pemimpin politik di Medan, Kolaborator Intelijen Regional (*medeweke*) mengarahkan penggeledahan rumah untuk menghindari kecurigaan. Editor *Benu Merdeka* (1920), ketua Serikat Sopir di Medan (1920), pemimpin dan agitator dalam pemogokan DSM (jalan kereta api Deli Sumatra), Editor *Benu Timor* (1925), Komisioner Serikat Jurnalis di Medan (1925), mantan editor *Matahari Indonesia*, dan editor *Bintang Sumatra* (1929).<sup>58</sup>

Dengan menjadi editor *Matahari Indonesia*, Mohainmad Joenoes menjadi orang dekat Iwa (*inner circle*), bersama dengan Mohammad Dasocki, Abdoel Hamid Loebis (editor *Matahari Indonesia*; Iwa bertindak sebagai pembelaanya ketika ia diadili karena serangan-serangannya dalam koran *Pertja Timoer* tahun 1928), dan Hasboellah Parindoeri (Matu Mona, koresponden *Matahari Indonesia*).<sup>59</sup> Tampaknya Joenoes yang melaporkan kepada PID tentang adanya pertemuan di kantor Iwa tanggal 20 Desember 1928 untuk mendirikan sebuah cabang SKBI. Menurut dugaan, pertemuan ini dihadiri oleh Mangaradja Ihoetan (editor kepala *Pewarta Deli*), Hasan Noel Arifin (editor *Pewarta Deli*), Tan Tek Bie (editor kepala *Tjin Po*), Mohammad Said (editor *Oetoesan Sumatra*), dan Muhammad Dasocki.<sup>60</sup> PID juga memperoleh informasi dari mata-mata dan informan yang diangkat Iwa pada akhir tahun 1928 sebagai *zaaktivaarnemiers*, pencari sumbangan di

<sup>58</sup> Lihat daftar ini dalam Mr. 31x/1930. Mohammad Said mengatakan bahwa Mohammad Joenoes mengawali karirnya sebagai wakil ketua SI Asahan di Tanjung Balai dan editor *Benu Merdeka* (koran SI medan di mana Mohammad Said menjadi editor kepala) tahun 1916. Mohammad Said, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pers di Sumatra Utara* (Medan: Waspada, 1976), hlm. 16.

<sup>59</sup> Mohammad Said, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pers*, hlm. 34; Iwa Koesoema Soemantri, *Indonesia Minzoku Shugi no Genryu*, hlm. 71.

<sup>60</sup> Lihat ringkasan laporan PID Sunatra Timur yang dikumpulkan oleh kepala intelijen regional dalam Mr. 315x/1930. Dari peserta yang hadir, pertemuan ini tampaknya merupakan sebuah pertemuan antara para jurnalis. Tan Tek Bie adalah ketuanya pada pertengahan tahun 1920-an. Lihat juga Mohammad Said, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pers*, hlm. 46.

Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Mereka melaporkan bahwa Iwa mencoba mendirikan sebuah serikat buruh sentral dengan bantuan ahli-ahli propaganda dari Jawa, Soetarmono dan Hardjosoeckarto, yang menyamar sebagai penjual tembakau bermerek "Indonesia" dan menjalankan kegiatan propaganda di kalangan kuli kontrak; dan Iwa mencoba membangun scl-scl di kalangan pekerja DSM.

Seperti yang dilaporkan gubernur kepada jaksa penuntut umum pada bulan Maret 1930, PID mempelajari bahwa tidak ada kegiatan bawah tanah yang dilakukan Iwa dan sebagian besar (jika bukan semua), potongan-potongan informasi yang diberi oleh mata-mata tidak berdasarkan atas fakta. Namun pada tahun 1928 dan 1929, PID percaya pada laporan mata-mata ini dan melihat ada bahaya, karena petugas-petugas PID percaya, seperti pejabat pemerintah dan pemilik perkebunan, bahwa protes kolektif kaum buruh dan serangan fisik di perkebunan-perkebunan secara politis didorong dari luar.

Juga terdapat bukti yang cukup untuk mengingatkan pemerintah tentang situasi di perkebunan-perkebunan. Surat kabar berbahasa Belanda, *Java Bode*, melaporkan pada tanggal 7 Mei 1929 bahwa 17 kuli kontrak ditangkap di perkebunan tembakau Kotari di Serdang karena mendirikan Perkumpulan Jawa Nasionalis, dan merencanakan pemberontakan pada tanggal 1 Mei 1930. Hari berikutnya, advokat umum mengirim telegram kepada Gubernur Sumatra Timur, untuk meneliti tentang laporan *Java Bode*. Gubernur membalas kembali telegram ke Verheijen tanggal 10 Mei, melaporkan penangkapan anggota eksekutif dan delapan propagandis, dan menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan ilegal di Kotari dan Iwa berada di balik aksi-aksi nasionalis rahasia. Hari berikutnya, Verheijen sekali lagi mengirim sebuah telegram ke van Sandick, menginstruksikan kepada van Sandick untuk berkonsultasi dengannya sebelum melakukan tindakan apa pun pada Iwa.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> PG (Jaksa Penuntut Umum) ke G Medan (Gubernur Sumatra Timur), 9 Mei 1929; G (Gubernur Sumatra Timur) kepada PG, 10 Mei 1929; PG ke G Medan, 11 Mei

Van der Plas, selalu siap membuktikan keyakinannya sebagai penasihat gubernur jenderal untuk masalah-masalah dalam negri. Ia selalu memperingatkan gubernur jenderal mengenai Iwa. Dalam suratnya tertanggal 12 Juni 1929, ia menyebutkan "kegiatan bawah tanah" di kalangan pekerja di Serdang dan tempat lain di Sumatra Timur dan memperkirakan bahwa mungkin Iwa berada di balik gerakan tersebut. Ia lalu menulis:

Di samping itu, jika kontak Mr. Iwa Koesoema Soemantri dengan kegiatan bawah tanah di Serdang dapat dibangun dan sifat hubungan ini semakin kuat, saya mengajurkan kepada Yang Mulia untuk membuang mantan ketua SPPL di Belanda, mantan wakil Semaoen, mantan penghuni Moskow ini ke Digoel. Bukan hanya karena Pantai Timur Sumatra merupakan titik yang sangat rentan, tetapi tindakan ini akan sejalan dengan kebijakan konstruksi liberal yang dianut pemerintah danaturan-aturan untuk menghadapi kegiatan bawah tanah yang destruktif. Penangkapan salah satu pemimpin intelektual, yang didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, akan memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap kegiatan politik di Jawa secara keseluruhan, PNI khususnya, dan dengan cara yang menyakinkan memberi peringatan mengenai batas-batas (*grenzen*) yang ingin ditetapkan pemerintah.<sup>62</sup>

Seperti pertanyaan mengenai SKBI yang kemudian diperdebatkan antara van der Plas dan advokat general, pertanyaan tentang penangkapan Iwa dan pembuangannya juga diajukan oleh van der Plas karena ia berpikir untuk menetapkan batas-batas bagi jenis-jenis kegiatan yang bisa ditoleransi pemerintah dan memberikan sinyal kepada PNI mengenai batas-batas itu. Namun Verheijen tidak memberikan tanggapan pada laporan van der Plas tentang Iwa. Ia tertarik untuk menetapkan bukan hanya batas-batas yang tak boleh dilanggar, tetapi juga saat yang tepat untuk bertindak.

<sup>62</sup> 1929, *Jaksa Penuntut Umum (Verheijen) kepada Gubernur Jenderal*, 13 Mei 1929, semua dalam Mr. 449x/1929.

<sup>62</sup> "Tjd. Wd. Adviser voor inlandse zaken (Ch. O. van der Plas) aan Gouverneur-generaal (de Graeff), 22 Juni 1929," dalam Kwanten, *De Ontwikkeling: 1928–Agustus 1933*, hlm. 239.

Saat itu mungkin datang lebih awal dari yang diharapkan. Pada awal bulan Juli 1929, istri asisten dibunuh oleh kuli kontrak di perkebunan Parnabola di Simaloengun, Sumatra Timur. Berita pembunuhan menyebar dengan cepat di seluruh Hindia Belanda dan langsung menjadi *cause célèbre* bagi orang-orang putih yang telah lama mengkritik pemerintah yang menurut anggapan mereka terlalu lunak pada penduduk asli. Pemakaman korban dihadiri banyak orang. Banyak telegram dikirim ke gubernur jenderal dan ratu. Koran-koran Belanda di Jawa memperkirakan adanya "Konksi Moskow-Deli". Tentara dikirim dari Jawa ke Deli untuk memulihkan ketertiban. Protes orang-orang Eropa mencapai klimaksnya dengan mengadakan pertemuan di Medan tanggal 16 Juli 1929 yang dihadiri oleh 2.300 *Fatherlands* yang menuntut hukum yang lebih tegas untuk melindungi kepentingan mereka. Sekitar sebulan setelah itu, sebuah cabang *Vaderlandsche Club* sayap kiri didirikan di Medan. Pada saat yang sama, pengadilan terhadap buruh Salim dimulai seminggu setelah insiden, lima hari kemudian ia dijatuhi hukuman dan akan digantung tanggal 23 Oktober.<sup>63</sup>

Di tengah meningkatnya hysteria orang-orang Eropa, Verhuijen mengirim sebuah telegram kepada Gubernur Sumatra Timur tanggal 13 Juli dan menginstruksikan kepadanya untuk mengirim sebuah laporan tentang propaganda nasionalis yang pernah disebutnya dalam telegram tanggal 10 Mei dan memperketat pengawasan polisi pada Iwa. Dua hari kemudian, tanggal 15 Juli, ia menulis surat kepada gubernur dan menganjurkan jika perlu gubernur mengambil tindakan tegas terhadap Iwa. Ia kemudian berkata:

Riwayat Iwa (*antecedenten*) sudah cukup untuk memberikan pertimbangan kita dalam mengambil tindakan-tindakan administratif terhadapnya, segera setelah ada bukti spesifik yang mendekati kepastian bahwa ia telah ikut serta, secara langsung atau tidak langsung (misalnya, melalui *antek*-nya) dalam sebuah

---

<sup>63</sup> Stoler, *Capitalism and Confrontation*, him. 75, 82–83; Reid, *The Blood of the People*, him. 39.

kegiatan rahasia yang diharapkan menimbulkan kekacauan-kekacauan.<sup>64</sup>

Maksud tindakan administratif di atas adalah pembuangan. Gubernur van Sandick mengirim laporannya kepada Verheijen tanggal 24 Juli, menyatakan bahwa seharusnya ia mengetahui dari laporan-laporan PIID Sumatra Timur yang sering dikirim secara teratur, bahwa Iwa dan dua propagandis dari Jawa, Soetarmono dan Hardjosoekarto terlibat dalam asosiasi-asosiasi dan pertemuan-pertemuan ilegal di subdistrik Serdang. Bahwa Soetarmono dan Hardjosoekarto, menyamar sebagai pedagang rokok dan sigaret, mengunjungi hampir semua perkebunan dan menyebarkan propaganda di kalangan kuli. Juga Sailan, bekas agen polisi dari Surabaya, mendirikan kelompok ketropak di perkebunan Kotari dan mengumpulkan uang untuk membeli senjata. Bahwa polisi telah menangkap 20 orang dan empat orang dicurigai, termasuk Sailan.<sup>65</sup> Ia juga mengirim sebuah telegram kepada Verheijen pada hari yang sama, melaporkan bahwa polisi menangkap delapan orang tanggal 15 Juli di perkebunan Sibogot karena inendirikan sebuah SR.<sup>66</sup>

Potongan informasi ini mirip dengan apa yang disebut Verheijen sebagai “bukti spesifik yang mendekati kepastian”, namun saat van Sandick mengirim laporannya kepada Verheijen, ia telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap SKBI dan juga Iwa. Ia menginstruksikan kepada gubernur melalui telegram tanggal 24 Juli untuk menangkap Iwa dan melakukan penggeledahan tanggal 26 Juli.

Iwa, dengan demikian, ditangkap karena “riwayatnya”. Posisi sentralnya dalam kegiatan perkumpulan orang Indonesia di Medan yang membuatnya dicurigai dan karena pemerintah menemukan ia sebagai target mudah untuk menenteramkan

<sup>64</sup> Advokat general (Verheijen) kepada Gubernur Sumatra Timur (L. van Sandick), 15 Juli 1929, Mr. 672x/1929.

<sup>65</sup> Gubernur Sumatra Timur (van Sandick) kepada Advokat General (Verheijen), 24 Juli 1929, Mr. 757/1929.

<sup>66</sup> G Medan kepada PG, 24 Juli 1929, Mr. 712x/1929.

orang-orang Eropa di Deli dan di bagian Hindia Belanda yang lain. Pada tanggal 29 Juli, advokat general meminta kepada gubernur wewenang untuk menahan Iwa dalam penahanan preventif "karena propaganda komunis yang dilakukannya sejak tahun 1924 di Amsterdam, kegiatan politik lanjutan di Sumatra Timur dan dalam kaitannya dengan Liga Anti-Imperialis".<sup>67</sup> Dibenarkan oleh alasan ini, proses administratif untuk membuang Iwa dimulai.

## Peran Moskow

Sejak awal, advokat general hanya ingin mencari alasan yang cukup kuat untuk membenarkan pembuangan Iwa berdasarkan "riwayatnya". Ia mencermati kegiatan Iwa di Sumatra Timur, meskipun sangat minim Dewan Hindia Belanda heran mengapa Iwa tidak ditanya tentang kegiatannya di Sumatra Timur ketika dewan ini bersidang untuk mempertimbangkan pembuangan Iwa pada tanggal 7 Maret 1930.<sup>68</sup> Namun seperti yang ditulis Verheijen, masa lalunya sudah cukup memberatkannya.

Menurut riwayatnya, Iwa Koesoeema Soemantri, lahir di Ciamis tahun 1899, pergi ke Belanda tahun 1922 setelah lulus dari sekolah hukum (*rechtschool*) tahun 1921. Aktif di PI, ia bergabung dengan Semaoen dalam mendirikan SPLI di Amsterdam tahun 1924 dan pernah menjadi sekretaris dan ketua pada organisasi tersebut. Tahun 1925, ia bekerja sebagai Ketua PI. Setelah lulus dari Universitas Leiden tahun 1925, ia diangkat sebagai wakil PI untuk *Comintern* dan berangkat ke Moskow bersama Semaoen.

File-file Iwa berisi surat-surat yang dikirim dari Moskow untuk Saudara Baron van Bour de Platte (Soelaiman) di Leiden, sebuah reproduksi fotografi dokumen ini telah jatuh ke tangan ARD. Di dalamnya ia mengatakan kepada Soelaiman bahwa ia, Iwa, dan Semaoen sama sekali tidak setuju bila mereka tidak

<sup>67</sup> Kepala ARD (vanderMost), Voorloopig Rapport, 30 Juli 1929, Mr. 731x/1929.

<sup>68</sup> Dewan Hindia Belanda (Wakil Presiden Ch. Weltevreden), Advies van den Raad van Nederland sch-Indie, 7 Maret, 1930, Mr. 315x/1930.

perlu menjenguk satu sama lain, bahwa Universitas Timur di Moskow (KUTV) seperti sekolah dasar, dan ia mengajar mahasiswa Indonesia lain. Ada foto Iwa yang dibuat di Moskow juga jatuh ke tangan ARD. Dua orang yang baru kembali dari Moskow, Daniel Kamoe dan Mohammad Saleh, mengidentifikasi orang dalam foto itu sebagai "Dingli". Selain diinterogasi, Iwa awalnya tidak mengakui pernah tinggal di Moskow, namun ketika dikonfrontasikan dengan surat dan foto, ia tidak dapat mengelak lagi.

Ia juga mengaku yang menulis sebuah pamflet, "Pernyataan Anti-Ribut" atas permintaan Semaoen. Ia juga menulis sebuah buku kecil tahun 1926 yang diberi judul *The Peasants' Movement in Indonesia*, dengan nama "S. Dingley" atas permintaan Th. Dombal dan N.L. Mercheriakov dari *Farmers and Peasants International*. Ada lagi surat lain yang dikirim "Dingli" dari Moskow, melalui Soelaiman di Leiden, kepada "Soedara A dan M" yang berisi permintaan bantuan untuk mengamankan izin keluar dari wilayah Soviet. Surat ini dalam amplopnya dialamatkan kepada "Saudara Toeant Hadji Muchtar" melalui "Tuan Fadullah, c/o Dewan Pengetahuan, Singapura", tertanggal 17 Desember 1926. Tampaknya Visbeen, kepala PID Batavia dikirim oleh van der Lely untuk menghancurkan pusat PKI di Singapura, memperoleh dokumen ini karena "Saudara A dan M" (Alimin dan Moesso) telah ditangkap tanggal 18 Desember, "Saudara Toeant Hadji Muchtar", Soebakat telah terbang ke Bangkok dan CID-SS mampu menyadap suratnya karena mereka tahu bahwa "Tuan Fadullah" menggunakan pos surat rahasia untuk korespondensi PKI. Iwa akhirnya memperoleh izin keluar dari Moskow berkat bantuan Dombal. Ia kembali ke Berlin dengan menggunakan uang yang diperolehnya dari penulisan buku, *The Peasants' Movement in Indonesia*.

File selanjutnya mengatakan bahwa Iwa bergabung dengan Gatot Mangkoepraja di Berlin dan setelah beberapa lama tinggal di Paris, ia kembali ke Hindia Belanda tahun 1927. Ia pindah ke Medan bulan April 1928, namun terus berkorespondensi dengan

teman-temannya di Eropa Barat. Ada dua surat yang disita PID di rumah dan kantor, satu dari V. Chattopadhyaya, sekretaris internasional Liga Anti-Imperialis, kepada editor kepala *Matahari Indonesia*, dan yang lain dari Nazir Pamoentjak kepada Iwa, memperkenalkan Dr. Freundlich sebagai "orang Liga". Iwa mengakui bahwa ia berbicara dengan profesor ketika ia berkunjung ke Medan atas undangan pemerintah Hindia Belanda dan bahwa ia telah memperkenalkan profesor kepada Soenarjo dan Sartono. Ada sebuah surat lain ditemukan PID di rumahnya, surat dari Berlin tertanggal 25 Februari 1929 yang diterima Iwa dari "Abdul Rahman" yakni Soebardjo yang kemudian bekerja pada sekretariat Liga Anti-Imperialis di Berlin. Sebuah buku nota juga diambil dari rumahnya. Di dalam buku tersebut ada dua alamat yang ditulis dalam bentuk sandi; intelijen militer mengartikannya dan menemukan bahwa keduanya adalah alamat Frau Rosc, Berlin Ost, ZV Rigacrassc 60 Manfred dan Hellm Muller, Berlin Nord Ost, Langenbeckstrasse 4 Georg.<sup>69</sup>

Semua kepingan bukti ini cukup meyakinkan untuk mempengaruhi gubernur jenderal dan Dewan Hindia Belanda bahwa Iwa memainkan peran ekstrimis politik yang berbahaya bagi masyarakat sejak tahun 1923, sebagai seorang propagandis komunis untuk Timur Jauh, yang dibayar Rusia untuk peran dan partisipasinya dalam *The Red Peasant International*, memiliki kontak dengan Liga Anti-Imperialis dan orang-orang terpercaya (*vertrouwensmannen*) secara rahasia dan aktif di Sumatra Timur dari belakang layar.<sup>70</sup> Meskipun demikian, harus ditekankan bahwa hal terpenting dalam "riwayat" Iwa adalah bahwa ia pernah tinggal di Moskow. Di sana terdapat mahasiswa Indonesia lainnya yang bekerja sama dengan Semaoen dan kaum komunis dan sosialis lain di Belanda, dan dengan Liga. Namun hanya Iwa

<sup>69</sup> Magistraat Medan en Hoofd van Plaatselijk Bestuur (W.J. Leyds), Proces Verbaal (Iwa Koesnoe Soemantri), 25-28 September, 1929; 200 Desember 1929; Het Hoofd der VIIde Afdeeling A, namens den Legercommandant, aan Procureur Generaal (de Graeff), 31 Desember 1929, semua dalam Mr. 315x/1930.

<sup>70</sup> Jaksa Penuntut (Verheijen) kepada gubernur jenderal (de Graeff), 3 Desember 1929, Mr. 315x/1930.

saja yang pergi ke Moskow. Bagaimana ia bisa menjadi kominis, agen *Comintern*, jika ia tinggal di Moskow hanya selama satu setengah tahun, masuk Universitas Timur, dan bekerja pada *Farmers and Peasant International*? Ini merupakan pertanyaan mendasar. Namun jika kita membaca transkrip interogasi Iwa dengan cermat, sambil tetap ingat apa yang dikatakannya tentang Moskow dalam biografinya, sebuah gambaran berbeda tentang Iwa akan muncul.

Iwa diinterogasi oleh Kontrolir W.J. Leyds tanggal 25–28 September 1929. Awalnya, ia membantah pernah tinggal di Moskow, namun dikonfrontir dengan suratnya dari Moskow untuk Soclaiman dan potret diri yang dibuat di Moskow, ia akhirnya mengaku pada tanggal 28 September, bahwa ia pernah tinggal di Moskow. Mungkin karena kenangan-kenangan tentang hari-harinya di Moskow muncul kembali setelah ia mengaku, ia terus bercerita tentang hidupnya di Moskow meski Leyds sudah selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Untuk menampung pengakuan panjang lebar itu, Leyds menambah waktu interogasi selama beberapa menit pada tanggal 28 September. Di bagian ini, Iwa memutar kembali sejarah hidupnya, sementara Leyds hanya menatap catatan tanpa mengajukan pertanyaan.

Saya harus mengakui bahwa saya pernah di Rusia ... Semaoen telah berangkat ke sana lebih awal, saya dibiayai orang-orang Rusia, ia menulis kepada saya dari Rusia bahwa jika saya bisa membayar biaya perjalanan sendiri, saya bisa belajar di Eastern University dan di sana memperoleh penginapan dan makan gratis. Semaoen berkata bahwa saya tidak bisa melakukan perjalanan dengan gratis karena saya seorang borjuis, paling tidak bukan anggota partai komunis. Saya ingin ke sana beberapa bulan untuk melihat-lihat, dan mencoba rencana studi tanpa biaya. Saya berangkat ke Rusia setelah berhasil menggondol sarjana hukum di Leiden, pada akhir tahun 1925, saya yakin bulan Desember. Cuaca sangat dingin. Saya memiliki paspor Belanda, dengan visa Rusia, yang saya peroleh dari Konsulat Rusia di Berlin. Saya memperoleh visa karena mungkin Semaoen telah menulis surat untuk konsulat mengenai hal ini. Kepada universitas di Moskow,

Semaoen memperkenalkan saya sebagai seorangnasionalis yang bersimpati pada Soviet. Saya pergi ke Moskow dalam kapasitas sebagai tokoh Perhimpunan Indonesia, namun tidak membicarakan hal ini. Semaoen ingin melakukannya sendiri.

...Di Eastern University, bagian administrasi universitas memberi saya nama samaran, S. Dingley. Semaoen dipanggil dengan nama Serphon, nama ini tidak resmi, Semaoen mengerjakan sesuatu untuk universitas, ia tampaknya menjadi pembimbing (*raadsman*) bagi mahasiswa Indonesia.

... Saya mengambil kuliah bahasa Rusia, diajar dengan menggunakan metode Berlitz, dan dua mata kuliah tentang komunisme, materialisme sejarah, dan bahasa Francis, yang dibimbing oleh orang Austria ... setelah beberapa minggu saya merasa cukup, tidak masuk secara teratur lagi. Saya menyibukkan diri dengan mengajar mahasiswa Indonesia lain di asrama dalam bidang geografi, sejarah umum, dan laporan-laporan surat kabar. Ketika itu orang-orang mencatat saya sebagai guru, padahal saya masih mahasiswa. Di sana kemudian ada empat orang Indonesia lain; Moelia, Minahasa, Celebes, dan Oesman. Minahasa mungkin nama lain dari Waworuntu (Johannes Wawoeroentoe); dan juga ada Pakih.

Saya tidak memberi kuliah tentang komunisme, orang-orang tidak mempercayai saya, saat itu saya adalah seorang mahasiswa dan tidak terlalu merisaukan hal tersebut. Saya ingin tahu lebih banyak mengenai komunisme, namun saya tak pernah menjadi seorang komunis yang meyakinkan, dan saya semakin paham tentang teori dan praktik. Yang saya temui adalah bahwa komunisme itu menjijikkan. Saya tidak menyukai orang-orang partai; otoritarian, fanatik, dan beratsebelah. Saya diterima dengan penuh kecurigaan. Saya tidak bisa berputar-putar di Moskow dengan bebas; semua kantor dijaga tentara. Tak seorang pun bisa masuk ke sana tanpa kartu anggota yang dilengkapi foto, dan saya bukan seorang anggota partai. Saya ingin meninggalkansemuanya, namun saya mengetahui bahwa Anna Elinischana Iwanna (Ivanova), akan melahirkan anak saya. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran dan kemudian bekerja sebagai perawat di panti asuhan, bukan anggota partai, mengalami hidup yang sangat berat; ia dibuang di panti asuhan. Saya diberi penginapan yang buruk, tidur bersama delapan orang dalam satu kamar, orang Cina, Persia, dan Kaukasus, sebuah persekutuan yang terus berubah,

orang-orang yang memiliki sifat buruk dan tidak berbudaya. Roti juga sangat jelek. Setelah beberapa bulan, saya tidak menghadiri kuliah secara teratur, dan kuliah sejarah saya memihak kaum borjuis, demikian yang mereka dengar dari mahasiswa saya yang paham sedikit bahasa Rusia. Saya dikeluarkan dari universitas, dan Semaoen marah karena saya tidak mau mendaftarkan diri sebagai anggota partai..., saya tidak punya tempat tinggal, dalam musim panas tahun 1926 saya tinggal dengan Anna, 30 mil dari Moskow, dan tinggal di antara petani. Istri saya membayarnya, dan saya menyerahkan seluruh upah saya sebagai guru. Saya kenal dengan ketua koperasi petani, Dombal, dan ia memperkenalkan saya kepada Michiarof (Mercheriakov), seorang temannya di konite eksekutif. Dengan perantaraan mereka, saya menjadi koresponden. Semaoen tidak perlu lagi membantu saya.

Saya menjadi koresponden sebuah jurnal bulanan untuk petani. Saya juga memperoleh majalah berbahasa Belanda dan Melayu dari Dombal, yang diperolehnya dari Semaoen. Ketika istri saya akan melahirkan, saya berkirim surat ke rumah. Melalui Soelaiman saya meminta uang untuk pulang, dan seandainya tidak cukup, saya menulis bahwa buku kecil (*The Peasants' Movement in Indonesia*) yang diterbitkan dalam bahasa Rusia dengan Dombal sebagai editor, maka saya akan memperoleh uang yang cukup. Kemudian, setelah bayi saya lahir, saya kembali ke Indonesia. Sah-satunya hubungan dengan Rusia yang masih saya miliki adalah anak saya. Saya tidak begitu sering mengirim uang, hanya dua kali masing-masing 50 gulden dan satu kali sejumlah 100 gulden...

Saya mengakui telah menulis surat kepada "Saudara A dan M". Mereka adalah Alimin dan Moesso. Saya kenal mereka ketika datang ke Moskow pada musim panas tahun 1926; saat itu saya berada di desa, namun mengunjungi Moskow selama beberapa waktu. Mereka dikirim sebagai wakil partai komunis di Hindia Belanda. Mereka tidak terlalu terbuka pada saya, karena saya bukan anggota partai. Mereka datang bulan Agustus dan pulang bulan Oktober. Mereka memberikan alamat pada saya: C/o Tuan Faddulah Singapura. Siapa tuan ini, saya tidak tahu.

Maksud surat ini adalah saya mengirim surat dalam amplop yang (dialamatkan) pada Hadji Muchtar, apakah ini nama samaran Soebakat, saya tidak tahu. "A dan M" adalah Alimin dan Moesso. Saya menyatakan dalam surat bahwa saya hanya menerima satu surat dari mereka (Shanghai) ... lalu saya menulis bahwa saya

bukan lagi teman dari "kawan" saya Semaoen yang tidak ingin bekerja di Moskow tetapi selalu melakukan intrik.

Ia tidak melakukan apa pun untuk Hindia Belanda (Indonesia). Ia ingin mempertahankan kedudukannya sebagai wakil partai di Hindia Belanda demi kepentingan diri, semontara ia begitu lama tinggal di luar Hindia Belanda. Selain itu, ia berjanji untuk menulis surat pada Kijazi, komisaris untuk urusan-urusan Timur, Petrowski, kemudian M.N. Roy, seorang India, karena saya ingin merancang keberangkatan saya, namun karena saya tidak disukai Semaoen, ia tidak mau membantu saya memperoleh visa, dan saya tidak bisa mengusahakan sendiri sebuah visa karena tidak dipercayai. Petrowski tidak mengizinkan saya pergi. Saya ingin mereka (Alimin dan Moesso) menulis pada Petrowski untuk mengizinkan Soemantri ini pergi. Bagaimana pun saya harus menulis kepada mereka, karena saya tidak tahu apakah alamat itu benar, setelah revolusi, karena kejadian dalam surat ini artinya revolusi. Mereka mengatakan kepada saya di Rusia tentang rencana untuk memulai sebuah revolusi setelah kembali, jika mereka yang di Moskow menyetujui hal ini.

Namun mereka mengatakan kepada saya bahwa Moskow tidak menyetujunya, Moskow takut gagal. Ketika mereka tiba di Shanghai, revolusi sudah terjadi. Mungkin Soebakat dan orang-orang di Hindia Belanda mempersepatnya. Saya tidak memperoleh balasan surat ini. Namun kemudian saya memperoleh visa dengan perantaraan Dombal, saya dikirim ke perbatasan sebagai seorang tahanan.

Saya berada di Rusia dari akhir tahun 1925 sampai pertengahan tahun 1927.<sup>71</sup>

Kenangan Iwa akan hari-harinya di Moskow seperti yang terekam dalam biografinya tidak berbeda dengan apa yang diceritakannya di atas. Cerita itu lebih hangat dan rinci, dan lebih didasarkan pada fakta bahwa orang begitu mudah percaya bahwa ia adalah seorang komunis atau paling kurang seorang sosialis, karena ia pernah di Moskow. Dalam otobiografi, kebencian pada Semaoen tidak terlalu menyolok, Alimin dan Moesso tidak disebut, dan kenangannya kepada Anna Ivanova dan anak

<sup>71</sup> Kepala Pemerintahan Daerah di Medan (W.J. Leyds), vervolg process verbaal (Mr. Iwa Koesoeema Soemantri), 28 September 1929, Mr. 315x/1930.

mereka, Sumira Dingli atau Mira, lebih manis. Di satu pihak, otobiografi lebih jelas, karena ia mencantumkan tanggal-tanggal khusus untuk kedatangannya, pernikahan, dan kelahiran anaknya: ia tiba di Moskow bulan Oktober 1925, menikahi Anna awal Januari 1925, dan anak mereka Mira lahir bulan Oktober 1926.<sup>72</sup> Jika pengakuannya pada Leyds ditempatkan dalam bingkai waktu di atas, menjadi jelas mengapa Iwa begitu kecewa dengan Moskow; kurang dari dua bulan ia ditendang dari universitas. Akhirnya, ia membenci Semaoen dan dilindungi Dombal menjelang musim panas tahun 1926. Dan setelah Mira lahir pada bulan Oktober, ia mengerjakan apa saja untuk bisa memperoleh visa dan meninggalkan Rusia. Sulit dipercaya bahwa Iwa menjadi tokoh propaganda komunis di Timur Jauh sebagai akibat dari kejadian-kejadian di atas atau hasil dari kerja dengan Semaoen, Alimin, dan Moesso yang tidak melakukan apa pun untuk membantunya memperoleh izin keluar dari Rusia. Namun statusnya sebagai orang yang pernah tinggal di Moskow meyakinkan Verheijen, van der Plas, dan pejabat tinggi Hindia Belanda lainnya bahwa ia adalah seorang komunis. Pada tanggal 22 Maret 1930, gubernur-jenderal memutuskan untuk membuangnya. Iwa berangkat ke pembuangannya di Banda Ncira, bukan Digocl pada bulan Juni karena ia adalah seorang intelektual.

## PARI Bawah Tanah: Menangani *Onverzoenlijken*

### Sejarah PARI

Jika masalah SKBI dan pembuangan Iwa menjelaskan kepada kita bagaimana pemerintah berusaha menanamkan asosiasi komunis dan Digoel dalam kesadaran publik dan memasang tanda "dilarang lewat" sebagai batas untuk meredam perlawanan dan perkumpulan-perkumpulan pribumi, maka tanggapan pemerintah terhadap PARI, satu-satunya partai di Indonesia yang benar-benar bagi hantu, revolusioner, dan

---

<sup>72</sup> Iwa Koesoema Soemantri, *Indonesia Minzoku Shugi no Geiryuu*, hlm. 43–45. Iwa mengunjungi Moskow untuk kedua kalinya pada awal tahun 1958, namun Anna telah meninggal sebelum kunjungannya, akhir tahun 1957.

bergerak di bawah tanah, mengatakan kepada kita tentang *disjunction* antara persepsi politik pemerintah Hindia Belanda tentang ancaman komunisme dan kenyataan yang sebenarnya. PARI (Partai Republik Indonesia), didirikan di Bangkok bulan Juni 1927 oleh tiga pelarian komunis, Tan Malaka, Soebakat, dan Djamaloedin Tamin. Partai ini lahir dari pusat propaganda komunis di Singapura yang menentang keputusan Prambanan tahun 1926. Partai ini kecil, bergerak di bawah tanah dan dijaga ketat. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh Indonesia sesegera mungkin dan mendirikan sebuah Republik Federal Indonesia melalui aksi massa.<sup>73</sup>

Manifesto PARI yang asli, yang ditulis Tan Malaka di Belanda dan diterjemahkan Soebakat dalam bahasa Melayu, tidak lagi tersedia. Apa yang kita punyai adalah ringkasan bahasa Belanda dari manifesto bulan Mei 1929 dan dialamatkan kepada para pendukung *Comintern* di Indonesia. Dalam manifesto ini, sejauh yang dikatakan dalam ringkasan, Tan Malaka dan Soebakat menempatkan arti penting PARI dalam pengalaman kehancuran PKI. Pertama-tama, mereka mengatakan bahwa tujuan terpenting rakyat Indonesia adalah untuk mencapai pembebasan sosial dan nasional, dan bahwa PARI didirikan untuk memperjuangkan tujuan ini. Sebagai seorang veteran PKI yang dihancurkan mereka juga mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mendirikan PKI baru demi menghindari meningkatnya harapan-harapan masyarakat yang keliru terhadap *Comintern*. Ada kepemimpinan yang birokratis bahkan di Rusia, kata mereka, dan mereka berargumen setelah melihat Cina, Stalin akan mengirim Borodin, van Galens, Cheka, penasihat-penasihat militer dan bidang lainnya ke Indonesia yang sedang melakukan revolusi. Semua itu bukan demi kepentingan Indonesia, karena yang harus dilakukan orang Indonesia tidak lebih dari harus menunggu hasil persaingan antara Trotsky dan

<sup>73</sup> Berdasarkan Djamaloedin Tamin, *Sedjarah PKI* (n.p.n.d., mimeo) dan Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Levensloop van 1897 tot 1945* (S. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1976), hlm. 354–346, dalam bagian mengenai PARI.

Stalin. PARI adalah instrumen pekerja revolusioner yang dirancang untuk mengatasi persoalan-persoalan ini.

Kedua, mereka mengumumkan bahwa kejatuhan PKI akibat dari adanya banyak kelemahan, seperti yang dijelaskan Tan Malaka dalam *Semangat Moeda* dan *Massa Actie*. PKI bukan sebuah "mesin yang kuat". Kelemahan mendasarnya terletak dalam kepercayaan publik mengenai "Ratoe Adil atau Mahdi". Pemberontakan tahun 1926 mengulang apa yang terjadi di Jambi dan Banda Aceh. Anggota-anggota eksekutif pusat partai mengira mereka dapat melakukan revolusi dengan cara itu. Lia (Boedisoetjito) menulis ke Hasni (Tan Malaka) di Tokyo (Manila) pada bulan Januari 1926 bahwa sekelas pemimpin telah memutuskan untuk melakukan "pesta besar" (revolusi). Orang-orang bawah tanah dan penjual jimat mengendalikan sendiri keadaan, akibat para eksekutif resmi partai di Bandung terpisah dari gerakan. PARI tidak boleh mengulang kesalahan ini. PARI harus menjadi sebuah partai proletarian revolusioner, yang tidak menyctujui tindakan Moskow dan *Third International*.<sup>74</sup>

Statuta PARI menetapkan bahwa cabang-cabang didirikan di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat-pusat ekonomi, politik, dan transportasi yang penting dan "di mana paling kurang terdapat lima anggota". Namun ketentuan ini tidak berarti PARI harus menjadi sebuah partai massa. Ketika diinterogasi tahun 1930, Marjono, tokoh propaganda PARI terkenal, bercerita bahwa Tan Malaka mengatakan kepadanya tujuan PARI adalah membentuk sel-sel dalam berbagai partai politik dan skrikat buruh untuk menggiring perkumpulan-perkumpulan ini kedalam pengaruh PARI.<sup>75</sup> Itu berarti PARI menjadi partai kader, kecil, penuh disiplin, dan bergerak di bawah tanah. Dalam kenyataannya PARI tetap merahasiakan kegiatannya sehingga *hoofdpartij* tidak mengetahui keberadaannya sampai lebih dari dua tahun sejak didirikan, sebelum akhir tahun 1929 ketika

<sup>74</sup> Korte Inhoud van het Manifest der Partij Republiek Indonesia (PARI), Vb. 6-8-30 B18.

<sup>75</sup> Proces Verbaal (Mardjono), Mrr. 509/1931.

Soebakat ditangkap di Bangkok dan pemerintah memperoleh surat-surat dan literatur PARI yang menjadi miliknya dari pemerintah Muangthai. Tidak ada literatur tentang PARI yang diterbitkan; majalahnya, *Obor*, ditulis dengan tangan dan diedarkan dari orang ke orang. Surat-surat dikirim melalui kurir dan alamat surat rahasia, semua anggota PARI diidentifikasi dengan nama-nama sandi, manifesto, dan brosur-brosur partai dikirim melalui pos, disembunyikan dalam surat kabar.<sup>76</sup>

Para pemimpin pusat seperti Tan Malaka (ketua), Soebakat (sekretaris), dan Djamaloedin Tamin (komisioner) disebut Kongsi Tiga, Komite Tiga. Anggota komite tidak pernah bertemu setelah mendirikan partai di Bangkok. Tan Malaka pergi dari Bangkok ke Manila, dan setelah ia deportasi dari Manila bulan Agustus 1927, ia tinggal di Amoy dan sekitarnya sampai tahun 1931, ketika ia pindah ke Shanghai. Soebakat tinggal di Bangkok sampai ia ditangkap bulan Oktober 1929. Tamin pulang dari Bangkok ke Singapura dan tinggal di sana, walaupun ia sering lari ke pantai dan menyamar sebagai nelayan ketika ia merasa terancam.

Kita hanya mengetahui sedikit tentang apa yang dilakukan Soebakat dalam PARI, kecuali bahwa ia berkomunikasi secara teratur dengan Tan Malaka dan Tamin. Tan Malaka lebih menyerupai seorang guru dan teoritis partai dibandingkan sebagai seorang ketua. Sering kali dalam kesibukan pelatihan kader partai, Tamin mengirim surat Tan Malaka dan menulis tesis-tesis dan artikel *Obor*. Tokoh sentral kegiatan PARI adalah Djamaloedin Tamin, yang mengendalikan sendiri jaringan di Hindia Belanda dari Singapura sampai ia ditangkap oleh CID-SS (*Criminal Investigation Department-Straits Settlements*) pada bulan September 1932.

Tidak perlu diragukan bahwa Tamin adalah pelaksana operasi bawah tanah, bahkan mungkin yang paling baik dihasilkan komunis Indonesia pada zaman Belanda. Di samping

---

\* Hoofd van den Dienst der Algemeene Recherche (van der Most), De Partai Republiek Indonesia (PARI), Geheim Rapport, 4 Maret 1930, Mr. 509x/1931.

Djamaloedin Tamin dan Bakri, nama-nama yang ia pakai di Singapura, Tamin juga dikenal dengan nama Gow, Abdullah/Dollah, Si Badu, Lookman/Lohman, Si Besar, Joseph/Josefo, Sulaiman/Salomon, A. Jacoeb, Joesoef, Boediman, Iskandar, dan Alex dalam surat-surat PARI. Ia amat waspada: ketika ia merasa dalam bahaya, ia segera meninggalkan Singapura, sering dengan menyamar sebagai pelaut pada jalur pelayaran Singapura-Mindanau-Zamboanga dan Singapura-Bangkok. Ia beruntung: ia dilindungi oleh pensiunan agen CID-SS, Pak Said, yang mengungkapkan identitas agen dan informan CID lainnya. Setelah dilatih di Sekolah Islam Sumatra Thawalib di Padang Panjang, Sumatra Barat, dan membantu beberapa pelarian PKI dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal di Malaysia, ia membangun jaringan non-PARI yang sangat luas dengan memanfaatkan pengaruh para guru agama di Minangkabau, khususnya Sjech Taher Djamaloedin Al-Azhari dan murid-muridnya di Perak, Negeri Sembilan, Johor, dan Penang. Ia dibantu oleh sekelompok kecil kader dan pendukung PARI yang berasal dari para pelarian PKI yang terbang ke Singapura tahun 1926 dan 1927.<sup>77</sup>

Dalam *Sejarah PKI*, yang sebenarnya adalah biografinya sendiri, Tainin mengatakan bahwa ia membantu lebih dari 100 orang pelarian PKI untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal di Malaysia pada akhir tahun 1926 dan awal tahun 1927. Namun ia hanya mengharapkan menerima bantuan demi alasan revolusi dari 10 orang: Djamaloedin Ibrahim (juga dipanggil Rahman Djamal), Daja bin Joesoef (Tenek, Aliyasin), dan Mohammad Arief Siregar (Mohammad Ajoob Siregar), dari Sumatra Barat; Maswar Madjid dari Sumatra Selatan; Tjek Mamad (Mansur) dari Banten; Kasim (Emang) dari Ciamis; Agam Poetih (Mahmoed) dari Aceh; Mardjono (Djohan), Sarosan (Saroso, Agoes), dan Soewarno (Achmad) dari Jawa.<sup>78</sup> Karena ia menulis *Sedjarah PKI* tahun 1960-an, beberapa dekade setelah kejadian, seseorang mungkin curiga

<sup>77</sup> Lihat Tainin, *Sejarah PKI*.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 47 dan 57.

bahwa ia hanya menyebut mereka yang memegang peran penting di PARI. Ini bukan kenyataan sebenarnya. Tjek Mamad, Kasim, dan Soewarno tampaknya tidak memainkan peran penting apa pun dalam PARI. Agam Poetih, pengawal Moesso yang membawanya ke Singapura awal tahun 1926, memang begitu dekat dengan Soebakat dan Tamin, tetapi bukan tokoh penting dalam jaringan PARI. Individu lain yang namanya disebut dalam daftar di atas, juga yang lainnya (Seperti Umar Giri/Abdoel Rahman, Kandur dan Dawood), merupakan kelompok yang disebut sebagai "Orang-orang muda Universitas Tamin" dalam surat-surat PARI. Kecuali Djamaloedin Ibrahim yang ditahan di Onrust, sebuah penjara di Batavia karena mengidap tuberkulosis, semua mereka ditangkap dan dibuang ke Digoel. Maswar Madjid ditangkap oleh CID-SS pada bulan September 1928 dan dibuang ke Digoel. Sarosan dan Mardjono ditangkap bulan Juli 1930; Umar Giri bulan April 1931; Mohainmad Arief Siregar dan Daja bin Joesoef bulan September 1931 tidak lama setelah penangkapan Tamin di Singapura; Kandur bulan Juni 1933. Akhirnya, Djamaloedin Tamin, bersama dengan Dawood, yang pernah ditangkap bersama Tan Malaka oleh polisi Inggris di Hongkong bulan Oktober 1932, telah membangun hubungan dengan generasi baru aktivis PARI menjelang saat ditangkap di Surabaya dan Batavia tahun 1936. Sejarah PARI adalah sejarah kegagalan, yang tersusun dari serangkaian penangkapan dan pembuangan yang menimpa satu demi satu aktivis PARI. Meskipun demikian, sejarah ini telah mengatakan kepada kita bagaimana *hoofdparket* menangkap aktivis, apa itu PARI sebenarnya, dan apa arti penting PARI sebagai bagian gerakan bawah tanah di Indonesia selama akhir tahun 1920-an.

## Terciumnya Kegiatan PARI

Aktivis PARI pertama yang dibuang ke Digoel adalah Maswar Madjid. Ia ditangkap di Singapura oleh CID-SS bulan September 1928, setelah diselidiki bahwa ia memberikan kepada para mahasiswa Indonesia yang singgah di Singapura tulisan-

tulisan Tan Malaka, *Naar de Republiek Indonesia, Semangat Moeda, Goetji Wasiat Kaoem Militer, dan Massa Actie*, yang diperolehnya melalui pos dari Amoy, disembunyikan dalam gulungan *North China Daily News*. Ia diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda bulan Februari 1929 dan dibuang ke Digoel.

Sebagai akibat penangkapannya, kepala ARD van der Lely mengetahui bahwa ada alamat pos rahasia di Amoy yakni "Esquire Lawson, C/o Pit Sang Dispensary, Chan Chuang, Amoy". Van der Lely menyimpulkan bahwa koresponden yang menggunakan alamat ini adalah orang-orang kepercayaan yang diorganisasikan oleh Tan Malaka dan/atau Alimin dan Moesso.<sup>79</sup> Di kantor pos Amoy bulan Februari 1929, Konsul Belanda di Amoy mengamati bahwa surat-surat yang datang dari Bangkok untuk "Esquire Lawson" dikirim oleh Viggo-Lund. Konsul Belanda di Bangkok menemukan seorang Indonesia bernama Mohammad Zain, bekerja di Viggo-Lund. Konsul lalu mengirim fotonya ke gubernur jenderal. *Hoofdparket* mengidentifikasi Zain sebagai Soebakat. Jaksa penuntut umum meminta gubernur jenderal pada bulan April 1929 untuk menginstruksikan Konsul Belanda agar mulai berunding dengan pemerintah Siam demi penangkapan Soebakat. Ia juga merekomendasikan pembuangan Soebakat ke Digoel setelah diekstradisi.<sup>80</sup> Staf PID yang dikirim ke Bangkok pada bulan Oktober 1929 mengkonfirmasikan bahwa Mohammad Zain adalah Soebakat. Pemerintah Siam menangkap Soebakat dan menyita surat-surat dan literatur tentang PARI yang dimilikinya.<sup>81</sup>

ARD berhasil memecahkan sandi PARI menjelang Desember 1929 dan untuk pertama kali mengetahui bahwa ada sebuah partai, Partij Republiek Indonesia, yang didirikan sebagai sebuah partai buruh revolusioner Indonesia. Di sini, waktu menjadi penting. Polisi menggerebeg SKBI dan Iwa ditangkap bulan Juli

<sup>79</sup> Harry A. Poeze, *Tan Malaka*, hlm. 390, 396.

<sup>80</sup> Jaksa penuntut umum kepada gubernur jenderal, 25 April 1929, Mr. 404x/1929; Poeze, *Tan Malaka*, hlm. 396–397.

<sup>81</sup> Poeze, *Tan Malaka*, hlm. 397.

1929. Pada awal Desember, advokat general mengusulkan pembuangan Iwa ke pemerintah pusat. Dalam suratnya pada de Graeff tanggal 17 Desember, Verheijen mengingatkan kembali gubernur jenderal bahwa ia mengusulkan pembuangan Iwa dan ia menulis; "Iwa secara sadar dan sengaja memihak mereka yang merencanakan serangan terhadap pemerintah Belanda dan sekarang merencanakan sebuah serangan baru." Ia berargumen bahwa apakah mereka terlibat dalam revolusi atau tidak, orang-orang yang dulu tidak tertangkap yang terus berusaha melakukan revolusi, masih bekerja bersama dan mencoba dari luar untuk menabur benih gerakan revolusi di wilayah Hindia Belanda melalui cara-cara ilegal. Ia mengatakan bahwa telah menemukan bukti mengenai kelompok ini dan kegiatannya. Mereka adalah PARI yang dipimpin oleh Tan Malaka, Soebakat, dan Alimin. Tujuan mereka adalah mencapai Indonesia merdeka melalui aksi massa. Dengan merujuk pada bagian-bagian yang dikutip van der Lely dari karya Tan Malaka *Naar de Republiek Indonesia*, Verheijen menambahkan bahwa tujuan lain PARI adalah mendirikan cabang-cabang di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat-pusat ekonomi, politik, dan transportasi yang penting. Banyak anggotanya tidak teridentifikasi karena mereka menggunakan alamat dengan nama sandi seperti Kan, Joseph, Mandar, Marwal, Ogiri & Co.<sup>62</sup>

Verheijen melaporkan kepada de Graeff bahwa dokumen dan surat-surat yang disita mengungkapkan, PARI telah mengirim surat-surat Tan Malaka kepada kaum nasionalis seperti Mr. Singgih dan Dr. Soetomo, untuk mencoba bekerja sama. PARI merencanakan untuk mengadakan sebuah konferensi pada bulan September 1929, yang dihadiri oleh dua belas partisipan, enam dari Jawa, tiga dari Sumatra, dan tiga dari luar. Berdasarkan pada surat Boediman kepada Soebakat tertanggal 10 Agustus, Verheijen berspekulasi bahwa salah satu partisipan dari Sumatra yang bernama Ramantauan, mungkin adalah Iwa. Sedangkan

<sup>62</sup> Jaksa penuntut umum kepada gubernur jenderal, 17 Desember 1929, Vb. 6-8-30  
1318

Jono dan Nar yang disebut Boediman terlibat dalam “eskabei ziekte (SKBI Zaak, Masalah SKBI)” adalah Soediono dan Soenarjo. Ia menyimpulkan ada kontak antara Alimin dan SKBI di Jawa dengan Iwa di Sumatra.<sup>53</sup> Dalam dunia politik yang fantastis, PARI yang didirikan Tan Malaka digabungkan dengan SKBI, Iwa dan Alimin (dan mungkin Moesso), membentuk dasar revolusioner utuh dan kuat yang oleh Tan Malaka disebut sebagai visi dan strategi revolusioner.

Soebakat diinterogasi oleh Visbccn bulan Januari 1930. Ia sangat tertarik dengan sandi-sandi PARI. Namun Soebakat mengatakan kepadanya lebih dari apa yang diketahuinya dari dokumen-dokumen dan surat-surat. Ia mengatakan kepada Visbccn bahwa Boediman adalah Bakri, dan Alimin tidak terlibat dalam PARI. Namun Visbeen tidak mempercayainya.<sup>54</sup> Soebakat bunuh diri tanggal 2 Februari 1930.

Sesudah penyelidikan lebih jauh, kepala ARD merampungkan laporan pertama tentang PARI pada awal Maret. Ia menyimpulkan dalam laporannya bahwa PARI terlepas dari Comintern, dan bahwa tidak ada hubungan antara PARI dan PNI atau partai revolusioner asing lainnya. ARD juga mengidentifikasi Jono dan Nar sebagai Mardjono dan Soenarjo, karena mereka telah meninggalkan Singapura bulan Agustus 1929, sesaat setelah penggerebegan polisi terhadap SKBI. ARD, untuk pertama kalinya juga mengetahui bahwa Maswar Madjid adalah seorang anggota PARI. Namun ia juga percaya bahwa Boediman/Bakric adalah Alimin.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Ibid. Perkiraan Verheijen bahwa “Ramantauan” adalah Iwa mungkin bisa benar, namun hal ini tak berarti bahwa Iwa terlibat dalam PARI. Tamin mengetahui bahwa Iwa pernah di Moskow, dan sebagai hoofdpartijk harus percaya bahwa ia adalah seorang komunis. Dengan posisi berpengaruh dalam pergerakan di Medan, tidak mengejutkan bahwa Tamin mencoba mengontaknya walaupun sia-sia karena ia ditangkap. Iwa tidak pernah menyebut baik Tan Malaka maupun Tamin atau juga PARI dalam otobiografinya.

<sup>54</sup> Visbeen, Process Verbaal (Soebakat) 13 Januari 1930, Vb. 6-8-30 B18.

<sup>55</sup> ARD Chief (van der Most), Geheim Rapport: Onderwerp PARI, 4 Maret 1930, Mr. 509x/1930.

## Jaringan PARI

Terciumnya dan kemudian penghancuran jaringan PARI di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada musim panas tahun 1930, bukan hasil kerja jaringan detektif yang bagus. Tokoh penting dalam jaringan ini adalah Mardjono dan Sarosan. Mardjono (lahir 1909 di Kediri) yang belajar di sekolah swasta HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) di Surabaya selama enam tahun dan kemudian lulus dari Sekolah Rakyat Semarang tahun 1925, adalah murid Tan Malaka. Ia aktif dalam organisasi Pandu yang berafiliasi dengan PKI di Semarang, dan mengenal Soebakat secara pribadi.<sup>86</sup> Bulan Mei 1926, ia berpindah dari semarang ke Banjarmasin dengan teman, Moenandar dan Sarosan. Di sana ia bekerja pada *Borneo Post* sebagai tukang set. Tahun 1927 ia berangkat ke Singapura bersama pedagang Arab bernama Said Djien Alsagaff untuk bekerja di percetakannya selain enam bulan. Di sana ia bertemu dengan Tamim, yang mengizinkannya membaca karya-karya Tan Malaka: *Massa Actie*, *Goetji Wasiat Kaoem Militer*, dan *Semangat Moeda*. Ia bergabung dengan PARI, kembali ke Banjarmasin, dan beberapa lama mengajar sebuah sekolah swasta di Marabahan sampai Soenarjo datang dari Surabaya bulan Maret 1929 dan menggantikannya.<sup>87</sup>

Soenarjo, salah satu pendiri SKBI, tidak punya karir yang lebih panjang di pergerakan. Aktif di SR, Serikat Sopir, dan SBBE di Surabaya ketika "masih ada partai kominis". Ia sering berganti pekerjaan, sebagai juru tulis pabean di Surabaya, juru tulis pada perusahaan pelelangan di Malang, penjual buku di Malang, dan guru sekolah yang diselenggarakan Perserikatan Goeroe Bantoe di Surabaya. Akhirnya ia menjadi sekretaris "Bersatoe Commercial Press" dan editor *Sinar Indonesia* serta ikut serta dalam

<sup>86</sup> Soebakat ingin mengirimnya ke konferensi pandu yang diadakan di Shanghai bulan September 1926 karena kegiatannya dalam IPO di Semarang, namun karena alasan-alasan yang tidak jelas (Mungkin karena Soebakat tidak bertemu dengan Mardjono pada waktunya). Tadjoedin M.S., kemudian menjadi Alphonso pada Kongres Comintern tahun 1928, dikirim ke Shanghai.

<sup>87</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, Process Verbaal (Mardjono), 30 Juli 1930, Mr. 509x/1931.

pembentukan SKBI pada bulan Juli 1928. Namun awal tahun 1929, ia berselisih dengan Marsoedi dan berpindah ke Banjarmasin pada bulan Maret 1929, menjadi guru di Marabahan sampai Mardjono menggantikannya. Ia direkrut menjadi anggota PARI oleh Sarosan.<sup>68</sup>

Sarosan (lahir di Purworejo) datang ke Semarang pada awal tahun 1920-an, tidak lama setelah lulus dari HIS di Purworejo. Ia bekerja untuk *Sinar India* sebagai penyusun huruf dan kemudian menjadi perawat siswa di rumah sakit pusat Semarang. Ia bergabung dengan SR dan Serikat Pekerja Rumah Sakit Indonesia tahun 1925, bergabung dalam pemogokan perawat, khalangan pekerjaan dan bekerja untuk *Api*, koran PKI dan SR Semarang yang dipimpin oleh Soebakat. Ia mengenal Mardjono di Semarang karena keduanya aktif dalam organisasi *Pandu Indonesia*, sebuah organisasi gerakan pandu komunis. Ia bersama Mardjono pindah ke Banjarmasin bulan Mei 1926, bekerja sebagai tukang set pada *Borneo Post*. Kemudian ia bergabung dengan Mardjono di Singapura bulan Februari 1927. Di sana ia bekerja pada "Al Ikwan Press" milik Alsagaff, bertemu Tamin, dan bergabung dengan PARI.<sup>69</sup>

Setelah bekerja sebagai pelaut pada jalur Singapura-Australia selama beberapa waktu, ia kembali ke Banjarmasin pada awal tahun 1928, bertemu Soenardjo, dan kemudian pergi ke Jawa bulan April 1928 untuk melakukan propaganda bagi PARI. Tampaknya, kegiatan Sarosan berjalan mulus. Pertama-tama ia menghubungi Soedarmo, saudara Mardjono dan seorang pegawai Stasiun NIS (Netherland Indies Railway, Jalan Kereta Api Hindia Belanda) di Babar, Bojonegoro, yang tidak tertarik dengan PARI tetapi tahu buruh jalan kcreta api yang aktif dalam serikat buruh. Pada awal perkenalannya, Sarosan bertemu dengan kondektur Danoewirjo di Cepu yang kemudian memper-

<sup>68</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, *Process Verbaal (Soenarjo)*, 29 Juli 1930, Mr. 509x/1931.

<sup>69</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, *Process Verbaal (Soenarjo)*, 29 Juli 1930, Mr. 509x/1931.

kenalkannya dengan Soetedjo dan Tjokrosoebono, keduanya dari Cepu, dan Ngadimin dari Semarang. Mereka semua adalah buruh jalan kereta api dan mau bergabung dengan PARI.<sup>90</sup>

Yang penting untuk dicatat di sini adalah waktunya. Seperti yang kita ingat, SKBI didirikan pada bulan Juli 1928, ketika Sarosan berada di Jawa dan memulai propaganda PARI di kalangan buruh jalan kereta api. Dengan ingatan akan VSTP yang masih segar, tentu banyak buruh rel kereta api yang ingin menghidupkan kembali serikat buruh tersebut. Buruh rel kereta api tentu tahu individu-individu mana dari kalangan mereka yang ingin aktif lagi dalam organisasi baru ini. Danoewirjo (lahir tahun 1900), seorang kondektur NIS sejak tahun 1921 dan bekas anggota VSTP, tampaknya seorang aktivis. Oleh karena itu, Marsoedi memintanya untuk bergabung dengan SKBI sejak hari-hari awalnya. Dalam interogasi setelah ditangkap, ia mengaku setuju untuk menjadi propagandis PARI dan meminta Ngadimin untuk melakukan propaganda di antara "teman-teman lama" yakni bekas anggota VSTP dalam organisasi-organisasi buruh: SR (*State Railway*), NIS (*Netherlands Indies Railway*), SJS (*Semarang Juana Railway*) dan SCS (*Semarang Cirebon Railway*). Jika laporan polisi benar bahwa propaganda SKBI dilakukan akhir tahun 1928 dan awal tahun 1929 di kalangan buruh rel kereta api di Pekalongan, Cepu, Magelang, Purworejo, Kutoarjo, Malang, Probolinggo, dan tempat lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, beberapa tempat itu telah menerima propaganda PARI. Hal ini dikatakan Tamin dalam *Sedjarah PKI* walaupun baik Socnarjo, Ngadimin maupun Soetedjo tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan kegiatan untuk PARI.<sup>91</sup>

Namun hal ini berakibat fatal, karena jaringan PARI di Jawa Tengah dan Timur terguncang ketika polisi mengawasi SKBI dengan ketat dan mengancam para buruh jalan kereta api. Karena

<sup>90</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, *Process Verbaal* (Danoewirjo), 3 Agustus, 1930, M. 509x/1931.

<sup>91</sup> Lihat Tamin, *Sedjarah PKI*, hlm. 67; Visbeen dan Mohammad Halid, *Process Verbaal* (Soetedjo), 8 Agustus 1930.

Soenarjo telah ditandai polisi sebagai aktivis SKBI, baik Soenardjo dan Mardjono yang tinggal serumah ditangkap dengan cepat di Marabahan dalam penyapuan oleh polisi terhadap SKBI. Tidak lama setelah pembebasan mereka, keduanya terbang ke Singapura bulan Agustus 1929 dan di sana bergabung dengan Sarosan. Mardjono dikirim oleh Tamim ke Amoy pada bulan September, tinggal dengan Tan Malaka selama satu bulan dan kembali ke Banjarmasin dalam bulan November. Mungkin karena ia telah ditandai oleh SKBI sebagai seorang aktivis, ia didekati oleh seorang polisi *wedana* dan mulai bekerja sebagai seorang mata-mata untuk mengawasi orang-orang yang datang dari Jawa, sambil bekerja sebagai *clerk* pada kantor daerah kontrolir Belanda.<sup>92</sup> Pada waktu yang sama, Soenarjo tinggal di Singapura dengan Tamim, mempelajari tulisan-tulisan Tan Malaka, dan kembali ke Banjarmasin pada akhir tahun 1929 bersama Sarosan. Namun residen melarangnya untuk mengajar di sekolah swasta di Marabahan karena masa lalunya sebagai anggota SKBI. Ia lalu dipaksa untuk kembali ke Surabaya dan menjadi seorang propagandis yakni agen komisi *Soeara Oemoein*, sebuah surat kabar terkemuka yang diterbitkan oleh kelompok studi Dr. Soetomo.<sup>93</sup>

Setelah bergabung dengan Mardjono dan Soenarjo di Singapura, Sarosan juga pergi ke Amoy pada bulan September 1929 dan kembali ke Banjarmasin dengan Soenarjo pada bulan Desember. Tidak lama kemudian ia berangkat ke Jawa, tinggal dengan Danoeuwirjo, saat di Surakarta selama sebulan dan kemudian bersama Tjokrosoebono di Secang selama tiga bulan. Saat itu situasi mulai berubah. Masalah SKBI telah menakutkan para buruh jalan kereta api. Baik Danoeuwirjo maupun Tjokrosobono tidak lagi melakukan propaganda untuk PARI lagi. Barangkali Sarosan tetap tinggal di Jawa Tengah tanpa melakukan sesuatu. Akhirnya, ia melarikan istri Tjokrosoebono

<sup>92</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, Process Verbaal (Mardjono), 3 Agustus, 1930, Mr. 509x/1931.

<sup>93</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, Process Verbaal (Soenarjo), 3 Agustus, 1930, Mr. 509x/1931.

pada awal tahun 1930-an. Ia kemudian ditangkap oleh Tjokrosoebono, diberi uang oleh Danoewirjo dan disuruh pergi jauh. Kemudian menyerahkan diri kepada polisi Wedana Ramelan di Surakarta tanggal 10 Juli. Ia mengatakan segala sesuatu yang ingin didengar Ramelan, mengungkapkan tidak hanya identitas orang-orang yang terlibat dalam jaringan PARI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun juga hubungannya dengan Comintern.<sup>94</sup>

Awal Agustus, semua orang yang terlibat dalam jaringan PARI ditangkap: Sarosan dan Danoewirjo di Solo; Mardjono dan Moenandar di Banjarmasin; Soenarjo di Surabaya; Soetojo di Cepu; Ngadimin di Wonogiri; R. Moerdomo di Kediri; Soedarmo di Bojonegoro; dan Mas Socwarjo di Semarang. Setahun kemudian gubernur jenderal memutuskan untuk menbuang ke Digoel delapan anggota PARI, Mardjono, Sarosan, Moenandar, Soenarjo, Danoewirjo, Ngadimin, Soetedjo dan Ngadimin. Sisanya dilepas, namun tetap berada di bawah pengawasan ketat polisi.<sup>95</sup>

Dari interrogasi, ARD akhirnya mengetahui Bakri/Boediman adalah Djamaloedin Tamim, bukan Alimin. Mereka juga menyimpulkan bahwa jaringan PARI dikendalikan oleh agen utama (*hoofdagenteen*) dan agen (*agenten*).<sup>96</sup> ARD percaya bahwa Tamim adalah agen utama di Sumatra dan Iwa pendukungnya, sementara Mardjono adalah agen utama untuk Jawa dan Sarosan agen peinbantunya. Sejauh yang kita ketahui dari buku Tamim *Sedjarah PKI* dan beberapa sumber lain, PARI tidak pernah menggunakan kata “agen utama” dan “agen”. ARD tampaknya menerapkan gambaran organisasionalnya sendiri kepada PARI, dan percaya bahwa partai ini memiliki struktur yang sama

<sup>94</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, Proces Verbaal (Sarosan), 25 Juli 1930; Visbeen dan Mohammad Halid, Process Verbaal (Danoewirjo), 3 Agustus 1930, keduanya dalam Mr. 509/1931.

<sup>95</sup> Procureur Général (Verheijen) aan Gouverneur Général (de Graeff), 21 Maret 1931, Mr. 509x/1931.

<sup>96</sup> Hoofd van den Dienst der Algemeene Recherche (van den Most), Geheim Rapport, 4 Maret 1931, Mr. 509x/1931.

dengannya, meski lebih kecil. Seperti dalam pandangan ARD, Tan Malaka adalah padanan dari van der Most, sementara Tamin adalah Visbeen dan Sarosan sama dengan Ramelan. Namun PARI tidak bekerja hanya melalui orang-orang ini. "Agen-agennya" dan para pendukungnya berada di bawah tanah, bekerja di antara aktivis, informan, dan mata-mata. Mardjono, misalnya, bekerja sebagai mata-mata untuk polisi *wedana* melindungi dirinya sendiri sebagai propagandis PARI.

Kata "agen utama" dan "agen" menggambarkan sifat penting PARI. Hal ini bisa kita temukan dengan membedah jaringan PARI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kedua daerah ini PARI memiliki jaringan yang kecil. Namun pertanyaannya adalah apa yang dilakukan organisasi jika Sarosan, misalnya, berhasil membangun satu atau dua cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ngadimin mengatakan dalam interrogasi:

Sarosan mengatakan bahwa ia datang dari luar negeri bersama teman yang namanya tidak disebutkan, dengan maksud mendirikan sebuah organisasi baru. Ia berbicara mengenai organisasi di luar dan mengatakan gerakan di sini tidak berhasil karena organisasi tidak baik dan para pemimpin membuat kesalahan. Karena itu sebuah partai baru harus didirikan. Tujuannya adalah mengorganisasikan para pekerja baru. Eksekutif sebuah partai baru dibentuk di Banjarmasin, dan cabang-cabang harus didirikan di Jawa. Setiap cabang terdiri dari enam orang yang dikelompokkan ke dalam dua subcabang, yakni A dan B. Cabang A terdiri dari satu orang pemimpin yang memiliki hubungan langsung dengan eksekutif di Banjarmasin. Cabang B, terdiri dari lima orang yang harus menerima instruksi dari cabang A dan mempunyai tugas memperluas partai secara rahasia dengan bergabung dalam berbagai organisasi. Sasarannya adalah ketika aksi massa terjadi, partai baru mengambil alih kepemimpinan aksi. Anggota-anggota cabang B tidak boleh mengenal satu sama lain dan hanya boleh berhubungan dengan anggota cabang A. Mereka tidak boleh berhubungan dengan eksekutif. Semua kegiatan dan nama-nama harus dirahasiakan, terutama nama-nama anggota eksekutif. Anggota eksekutif di Banjarmasin harus membangun kontak dengan anggota eksekutif di luar, sementara anggota eksekutif di luar negeri harus memelihara komunikasi antara

serikat buruh di Hindia Belanda dengan yang berada di Eropa. Dengan cara ini, Sarosan mengharapkan dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan bagi pekerja, ketika pekerja membentuk kesatuan, kebebasan akan datang dengan sendirinya. Sarosan kemudian bertanya, apakah saya ingin menjadi anggota partai baru, dan saya menyetujuinya.”<sup>77</sup>

Apa yang Ngadimin katakan adalah mengenai struktur organisasi PARI, selnya, seperti apa yang ia tangkap dari penjelasan Sarosan. Ngadimin, atau anggota PARI lainnya, tidak pernah mengatakan tentang apa yang harus dilakukan anggota ketika mereka berhasil membentuk sel dalam organisasi lain, namun saat aksi massa belum juga tiba. Baik Visbeen maupun Mohammad Halim, polisi *wedana* dari PID Batavia menanyakan kedua hal ini, karena bagi mereka jawaban akan terbukti sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa anggota PARI adalah agen rahasia yang mengambil bagian dalam konspirasi besar revolusi. Namun tidak sulit untuk memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Ingat kembali apa yang dilakukan eksekutif PARI ketika mereka mencoba bekerja sama dengan kaum nasionalis. Eksekutif mengirim surat Tan Malaka. Ingat apa yang Mardjono dan Soenarjo lakukan ketika Tamin membujuk mereka untuk bergabung dengan PARI. Mereka membaca karya-karya Tan Malaka seperti *Naar de Republiek Indonesia* dan *Massa Aclie*. Ingat apa yang Sarosan lakukan ketika ia bertemu Danocewirjo. Ia memberikan kcpadanya manifesto PARI dan bacaan lain tentang PARI. Secara singkat, PARI adalah sebuah kelompok murid Tan Malaka, dan jaringannya berfungsi untuk menyebarkan tulisan-tulisannya, *samizdat*. Dilihat dari sudut ini, kata “agen utama” dan “agen” mewakili gambaran PARI bukan seperti yang dipahami ARD, tetapi lebih menyerupai gambaran seorang penjual keliling yang memperoleh komisi seperti yang dilakukan agen-agen perusahaan mesin jahit *Singer*, penjual dan supervisor yang aktif di Jawa.

<sup>77</sup> Visbeen dan Mohammad Halid, Proces Verbaal (Ngadimin), 9 Agustus 1930, Mr. 509x/1931.

Hancurnya jaringan PARI di Jawa Tengah dan Timur diikuti oleh penangkapan Djama loedin Tamin, Mohammad Arief Siregar, dan Daja bin Joesoef pada musim panas tahun 1932. Ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik di Malaysia, Inggris dan perbaikan kerja sama antara ARD dan CID-SS Inggris.

Seperti yang disebutkan Tamin dalam *Sedjarah PKI*, kepala PID Batavia Visbeen kembali ke Singapura kira-kira sebulan setelah penangkapan aktivis PARI di Jawa bulan Juli 1930. Tamin, seorang yang selalu waspada, terbang dari Singapura bulan Agustus. Sejak itu ia selalu dalam pelarian setelah selama beberapa waktu tinggal di Singapura. Ia sering dibayangi oleh CID-SS ketika menyamar sebagai scorang pelaut pada kapal "Darvel" di jalur Singapura-Mindanau-Zamboanga sejak Agustus 1930 sampai Januari 1931. Kemudian ia pindah ke kapal "Kistna" di jalur Singapura-Bangkok bersama Daja bin Joesoef dari bulan Januari sampai Juli 1931. Ia turun di Selangor dan dilindungi oleh guru-guru Islam yang belajar di Padang Panjang, dari Juli sampai Desember 1931.<sup>93</sup>

Menjelang ia kembali ke Singapura pada bulan Desember 1931, Arief Siregar dan Daja bin Joesoef telah memperoleh pekerjaan pada *Nederlandsch Colonial Petroleum Maatschappij* (NKPM, Perusahaan Minyak Koloni Belanda) di Sungai Gerong, Palembang. Keduanya menyebarkan bacaan tentang PARI di Sumatra Selatan dan juga dimulai penyebaran ke Batavia. Dawood (Davidson) juga bergabung dengan PARI menyusul pengenalan oleh Tjek Mamad.<sup>94</sup> Pada awal tahun 1932, setelah Soekarno dibebaskan dari penjara dan bergabung dengan PARTINDO, Tamin dipanggil, permintaan akan buku-buku PARI, pamphlet dan propagandis meningkat. Pada bulan Februari 1932, ia mengirim Dawood ke Tan Malaka untuk dilatih. Saat itu Tan Malaka pindah dari Amoy ke Shanghai. Padabulan Maret, Adam Galo dari Padang Panjang berhasil mengontak Tamin di Singapura. Bulan Mei, ia mulai dianiati oleh CID-SS. Ia men-

<sup>93</sup> Tatum, *Sedjarah PKI*, hlm. 69-78.

<sup>94</sup> Tan Malaka, *Front sail in jail*, Vol. 3, hlm. 318.

curigai scorang bekas pelarian PKI yang pernah ditolongnya di Kota Tinggi telah menginformasikan kehadirannya di Singapura. Pada bulan Juli, Kandur gelar Soetan Rangkajo Basa, yang telah kehilangan kontak dengan Tamin selama tiga tahun, datang ke Singapura, mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kontak dengan pemimpin PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) seperti, Hadji Djalaloedin Thaib, dan kembali ke Sumatra Barat dengan membawa bacaan tentang PARI. Bulan Agustus, Adam Galo mengirim dua orang, Loctan Soctan Basa dan Loetan Madjid, dari Sumatra Barat ke Singapura untuk dilatih sebagai kader PARI. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1929, tampak ada kesempatan untuk mendirikan sebuah cabang di Padang Panjang, Sumatra Barat, mungkin di Batavia, dan juga Palembang. Tamin membeli tiket ke Batavia tanggal 15 September 1932. Dua hari sebelum keberangkatannya, ia ditangkap oleh CID-SS bersama dua belas orang lainnya saat mereka memproduksi pamflet PARI di persebunyian.<sup>100</sup>

Dalam dua hari CID-SS mengetahui dari surat-surat PARI yang disita bahwa Mohammad Arief Siregar yang berada di Sungai Gerong, Palembang, bekerja sebagai *clerk* pada NKPM, sedangkan Dajabin Joesoef berada di Pasar Senen Batavia. Setelah diberitahu oleh CID-SS melalui telegraf, PID menangkap dua orang pada hari yang sama. Setelah penangkapan mereka, polisi menyita *Obor* dari rumah Arief Siregar dan *Manifesto PARI* (satu kopi), Statuta PARI (dua kopi), Manifesto PARI tertanggal Mei 1929 (dua kopi), surat-surat dari Nadir (Tan Malaka) dan Goenadhi (Soebakat) kepada Ir. Soekarno, Mr. Singgih dan Dr. Soetomo (dua kopi), dan sebuah foto Tan Malaka di rumah Daja bin Joesoef.<sup>101</sup> ARD juga mengetahui ada orang lain yang pernah bersama Daja sebelum ditangkap, seorang pria yang diidentifikasi kemudian sebagai Kandur (juga dipanggil

<sup>100</sup> Ibid., hlm. 78–86.

<sup>101</sup> Lihat Hoofdpartjet, Opgave van te interneeren personen die daadwerkelijk deelgenomen hebben aan de actie van de geheime revolutionnaire "Partai Republiek Indonesia" (PARI), Mr. 963x/1933.

Mohammad Noer, Djamil, Tagong, Charles dan Tumbel} yang ditangkap bulan Juni 1933.

Dalam interogasi yang kemudian disusul, Daja bin Joesoef dan Tamin (yang diserahkan ke ARD bulan September 1932) mengatakan segala sesuatu tentang PARI, namun Mohammad Arief Siregar mengatakan cerita menarik tentang hidupnya, bagaimana ia bergabung dengan PARI, dan seperti apa hidup dalam gerakan PARI bawah tanah.

Mohammad Arief Siregar, lebih tepat, Mohammad Arief Siregar alias Mohammad Ajoob Siregar, alias Suntok, alias Noekman, alias Hongko, alias Mohammad Sidik, alias Hamzah, alias Mcnteri, alias Adik Menteri, alias John Little, dilahirkan di Beringin, Subdistrik Sipirok, Distrik Padang Sidempuan, Residen Tapanuli tahun 1908. Lulus dari sekolah menengah pribumi di Sipirok, ia menjadi calon guru (*teacher-trainee, kweekelingonderwijzer*) selama dua tahun pada sekolah Muhammadiyah di Beringin, dan kemudian bekerja sebagai guru bantu di sana sampai tahun 1924. Kemudian ia pindah ke pamannya di Pematang Siantar, ke Singapura, Indragiri, dan kembali ke Singapura, antara tahun 1924–1926. Dalam perjalanananya dari Rengat ke Singapura tahun 1926, ia bertemu dengan Raoeb dari Padang, yang memperkenalkannya pada Bakri (Tamin) di Singapura.<sup>102</sup> Interogasi Mohammad Arief mengikuti alur sebagai berikut:

#### *6. Siapa nama Bakri yang sebenarnya?*

Saya tidak tahu nama aslinya sampai saat ini. Dalam kenyataan saya tidak tahu bahwa namanya adalah Djamaloedin Tamin. Foto yang engkau tunjukkan pada saya (selembar foto Djamaloedin Tamin diserahkan kepadanya) adalah Bakri yang saya

---

<sup>102</sup> Visbeen dan Mohanunad Halid, *Prices Verbaal (Mohammad Arief Siregar)*, 6 Oktober 1932, Mr. 963x/1933. Raoeb dari Padang tampaknya adalah Madjid Rauf, yang bekerja sebagai penyadap pada perkembunan karet di Kota Tinggi, bersama dengan Soebakat dan Abdøel Rahman alias Umar Giri alias Idris pada bulan Desember 1926 ketika Alimin dan Moesso ditangkap di sana. Tamin, *Sedjarah PKI*, hlm. 46.

maksud. Bakri sering datang dan meminjam uang dari saya sehingga saya hampir tak punya apa-apa lagi. Ia menasihati saya untuk membayar sisa sewa pada Sjech Ibrahim dengan uang yang tersisa dan kemudian pergi tinggal dengan Hadji Akip, seorang pria dari Palembang yang tinggal di Minto Road 7, Singapura. Seorang pria bernama Masjwar (Maswar Madjid) juga tinggal di sana. Ia berasal dari Padang yang sekarang dikenal dengan nama Boven Digoel.

#### *7. Siapa lagi yang tinggal di rumah itu?*

Hanya Masjwar dan saya. Pada waktu itu Bakri (yang nama aslinya Djamaloedin Tamin) juga datang sebentar, dan saya memberikannya sejumlah uang. Saya tinggal di rumah Hadji Akip selama dua bulan dan kemudian pindah ke Rowell Road No. 1, di mana kuli-kuli *rickshaw* (becak yang ditarik manusia) tinggal. Saya memperoleh sebuah kamar bersama Adam, Moening, Timin, Zainnoeng, dan beberapa orang lain yang namanya tidak saya kenal. Semuanya adalah tukang becak dari l'adang. Di sana ada juga seorang pria bernama Soelan, yang mempunyai sedikit modal dan mengizinkan orang-orang Padang lain menjajakan barang. Kepada orang ini, saya membawa Djalaedien Tamin dan untuknya saya menjajakan barang-barang.

#### *8. Dari mana asal Soelan dan siapa nama aslinya?*

Ia berasal dari Padang. Soelan adalah nama aslinya. ia bekerja untuk Soelan selama lima bulan. Kemudian ia berkata pada Djamaloedin Tamin bahwa ia akan bekerja (sebagai seorang pelaut) di kapal, karena saya tidak memperoleh cukup uang untuk makan, tidak bisa membeli apa-apa lagi. Saya tinggal di Singapura selama tiga bulan, memperoleh pekerjaan sebagai tukang pos pada kantor pusat di Singapura. Di sana, saya bekerja selama tiga bulan dan setelah itu bekerja selama sembilan bulan sebagai tukang pos pada cabang kantor pos. Lalu saya bekerja sebagai pelaut pada kapal uap "Marella" di jalur Singapura-Australia, melakukan dua kali kunjungan yang berlangsung selama kira-kira tiga bulan. Setelah itu saya menganggur selama tiga bulan dan tinggal dengan Soelan.

Lalu ia berlayar dengan kapal "Darval" yang melayani jalur Kalimantan Utara, tinggal dengan Tamin selama tiga bulan di Singapura, bekerja untuk Soelan dan dengan Adam setelah Soelan berangkat. Terakhir, ia dikirim Tamin ke Medan sebagai

kurir untuk mengantar suratnya kepada Iwa Koesoema Soemantri. Namun ketika ia tiba di Medan, Iwa telah ditangkap. Arief menghancurkan surat Tamin seperti yang diinstruksikan. Ia tinggal di Medan selama dua minggu, bekerja empat bulan di Pematang Siantar pada sebuah penginapan milik pamannya, lalu kembali ke Singapura. Saat ia bertemu dengan Tamin (mungkin bulan Desember 1929 atau Januari 1930), ia berkata kepada Arief bahwa mereka sebaiknya menghentikan kegiatan selama beberapa saat, mungkin akibat penangkapan Soebakat. Arief pergi ke Pulo Sambu, bekerja pada BPM (*Borneo Petroleum Maatschappij*) selama tiga bulan, dan bertemu dengan Abdoelrahim Siregar dan Harahap. Mereka bertiga pergi ke Palembang pada bulan Maret atau April 1930 dan memperoleh pekerjaan pada NKPM di Sungai Gerong. Setelah bekerja tujuh bulan, Arief menulis surat pada Tamin, memintanya untuk mengirim seorang asisten. Daja bin Joesoef yang sudah dikenal Arief sejak ia di Singapura, dikirim dari Singapura.

*17. Sejauh mana anda melakukan propaganda untuk PARI dan berapa anggota atau kandidat yang anda peroleh?*

Saya tidak melakukan propaganda sendiri karena saya tidak punya waktu untuk itu. Saya harus bekerja keras dari pagi sampai malam, setelah itu saya begitu lelah untuk melakukan sesuatu untuk PARI. Jadi tidak ada anggota atau calon anggota PARI. Daja datang sebulan kemudian (setelah ia menulis surat kepada Tamin). Saya telah mengirim uang untuk ongkos perjalannya.

...Setelah saya mengenal Djamaloedin Tamin tahun 1926, ia berbicara tentang persoalan-persoalan politik secara teratur dan memberi saya berbagai macam buku untuk dibaca, seperti *Semangat Moeda*, *Philippine Revolution*, dan *Chinese Revolution*. Buku pertama ditulis oleh Tan Malaka. Setelah Djamaloedin Tamin melatih saya dalam soal-soal politik selama enam bulan, yang dilakukan selama kami tinggal di Minto Road No. 7, bersama Hadji Akip, ia menanyakan pandangan saya mengenai berbagai macam buku, khususnya buku Tan Malaka. Saya menjawab bahwa sulit untuk mencapai tujuan yang digambarkan dalam buku dan bahwa saya belum cukup belajar politik untuk dapat memahami segala sesuatu. Djamaloedin Tamin tertawa dan tidak mengatakan apa lagi...

Tamin kemudian bercerita kepadanya tentang PARI. Ia mengizinkan Arief membaca statuta dan peraturan-peraturannya. Tamin juga berkata kepadanya bahwa "Tan Malaka dulu menerima f4.000 sebulan dari Moskow, namun sekarang tidak pernah lagi" dan bahwa "Tan Malaka telah memutuskan hubungan dengan Moskow." Partai dipimpin oleh Tan Malaka, Soebakat, dan Tamim. Arief Said, Sarosan, Soenarjo, Mardjono, Abdoolrachman (Umar Giri, alias Idris, yang ditangkap di Riau pada bulan April 1931) dan yang lain, kemudian juga ditangkap adalah anggotanya. Setelah ia menetap di Sungai Gerong, Arief Siregar bertemu dengan Pasariboe, bekas anggota PNI dan pejabat pencatat tanah (*kadastrer*) di Palembang, yang memperkenalkannya kepada bekas ketua PNI cabang Palembang, Samidin.

*25. Apakah anda mengatakan kepada Salimin tentang rencanamu dan apakah ia setuju dengan gagasanmu?*

Tidak. Baiklah, saya berbicara dengan mengenai rencana mengadakan pawai ... namun ia berkata bahwa cabang harus mengikuti instruksi pimpinan PNI pusat untuk tidak mengadakan pawai. Pada saat itu Samidin merencanakan untuk membentuk (sebuah cabang) Pendidikan Nasional Indonesia, namun Noengtjik, bekas anggota eksekutif cabang PNI, menentang rencana ini. Saya mencoba mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil. Karena saya tidak yakin bahwa itu tepat untuk membentuk sebuah PI (partai Indonesia) dan PNI (pendidikan), saya merencanakan bersama Tjeq Man dan Soedirdjo untuk mendirikan Taman Pelajaran, sebuah asosiasi (kelompok membaca) yang secara resmi tidak mengurus soal-soal politik untuk mencegah campur tangan pemerintah. Namun rencana ini sangat bersifat politis, diarahkan untuk berdiri sejajar dengan PNI (pendidikan). Samidin diminta untuk menjadi pemimpin dan PNI Baru (pendidikan) dilahirkan kembali melalui Taman Pelajaran.

*26. Namun apakah tujuan PARI tidak sama dengan tujuan PNI Baru?*

Itu tidak menjadi masalah. Tujuansaya bukanlah membentuk partai politik di Palembang, dan pertama-tama saya menganggap PNI begitu dekat dengan PARI. Begitu partai didirikan di Palembang, akan lebih mudah bagi saya untuk melaksanakan

gagasan saya. Djamaloedin Tamin juga mengatakan kepada saya untuk membentuk serikat buruh. Dan untuk tujuan ini saya meminta bantuan Daja bin Joesoef. Saya tidak tahu apa yang dikerjakannya di Palembang, namun ia pernah mengatakan kepada saya bahwa ia bertemu seorang disiplin partai, saya tidak diizinkan untuk bertanya tentang siapa orang itu.

... di Palembang saya tidak menemukan seorang pun yang setuju dengan gagasan saya dan bergabung dengan PARI. Anggota Taman Pelajaran adalah para pendukung PI dan PNI. Di Sungai Gerong awalnya saya juga tidak berhasil mendirikan sebuah koperasi karena egoisme berbagai macam orang. Meskipun demikian, ketika gaji dipotong, sekelompok orang terdaftar mulai mogok. Saya tidak tahu siapa yang membuat daftar itu. Saya mengatakan bahwa adalah tindakan gila melakukan pemogokan, karena mereka sendiri akan menjadi korban. Akhirnya saya berhasil membentuk sebuah koperasi. Di Sungai Gerong, Palembang, dan Plaju, saya tidak pernah berbicara tentang PARI.

Ini adalah cerita Arief Siregar kepada Visbeen dan Mohammad Halid. Tidak ada alasan untuk meragukan cerita ini. Tidak perlu diragukan bahwa ia hanya memberitahukan fakta-fakta yang ia yakini sudah diketahui Visbeen dan Halid. Ia tidak mengungkapkan apa pun tentang aktivis-aktivis PARI yang dikenalnya secara luas. Meskipun ia mengakui bahwa ia pernah menjadi anggota PARI dan memberikan keterangan yang cukup tentang hidupnya, bagaimana ia bertemu Tamin, dan seperti apa hidupnya setelah ia bergabung dengan PARI.

Ada bagian yang menyolok dalam cerita ini. Tampak bahwa Arief Siregar tidak punya pekerjaan tetap dan alamat tetap sejak ia meninggalkan Tapanuli. Ia mengapung bebas, terbang dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu pekerjaan ke yang lainnya, dan bertemu serta membangun koneksi dengan berbagai macam orang. Dalam hal ini, ia mungkin tidak berbeda dengan para pengelana yang ia temui, seperti para tukang becak dari Padang yang bekerja untuk Soelan di Singapura atau dua teman yang berpindah bersama Arief dari Pulo Sambu ke Sungai Gerong. Ia merantau seperti orang-orang Sumatra lainnya.

Namun ia mengalami pertemuan fatal selama pengembarnya. Ia bertemu dengan Tamin dan sesuatu terjadi. Kita tidak tahu karena ia tidak mengatakan apa yang terjadi ketika ia bertemu Tamin. Yang jelas ia tunduk pada wewenang Tamin. Ia memberinya uang. Ia melakukan apa yang dikatakan Tamin. Ia membaca karya Tan Malaka *Semangat Moeda* karena Tamin mengizinkan ia membacanya. Ia mendiskusikan soal-soal politik dengan Tamin. Ia ingat betul, Tamin tertawa ketika ia mengatakan tidak sepenuhnya memahami politik. Ia ingat Tamin membagi rahasia PARI kepadanya. Ia bergabung dengan PARI. Namun kita tidak tahu, bahkan barangkali ia sendiri tidak yakin kapan saat ia bergabung dengan PARI. Mungkin saat ia bertemu Bakri/Tamin, atau mungkin itu terjadi saat Tamin mengungkapkan rahasia PARI kepadanya.

Hidupnya tidak langsung berubah setelah ia menjadi anggota PARI. Ia tetap mengejar, berpindah dari pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Kadang-kadang ia bekerja sebagai kurir, ketika Tamin memintanya, ketika ia pergi ke Medan untuk mengantar surat Tamin untuk Iwa. Pernah ia tinggal di Sungai Gerong, ia terus mengikuti instruksi Tamin. Ia mendirikan sebuah kelompok membaca dengan harapan bahwa suatu hari kelompok ini akan menjadi sebuah partai. Namun seperti yang dikatakannya kepada kita, karya politiknya tidak lagi diteruskan. Ia terlalu lelah setelah bekerja dan orang-orang yang dikenalnya dengan baik umumnya pendukung PI dan PNJ. Namun ini bukan masalah. Persoalannya ia harus tetap berkomunikasi dengan Tamin melalui surat-surat rahasia dan dengan nama-nama rahasia, yang diminta Tamin untuk digunakanya. Singkatnya, Arief tunduk pada wewenang Tamin yang melanggar wewenang pemerintah Hindia Belanda walaupun ia takut ditangkap dan dibuang. Dalam diri Arief, Tamin mewujudkan apa yang dimaksud dengan PARI bawah tanah.

Bukan hal mengejutkan bahwa Visbeen dan Mohammad Halid mempraktikkan surat-surat dan nama-nama sandi sebagai

tanda-tanda terpenting adanya PARI bawah tanah. Ingat kembali apa yang dikatakan Arief tentang Soelan. Ia mengatakan; Soelan adalah pria berasal dari Padang, dan itu juga nama aslinya. Segera sesudah ia mengatakannya, Visbeen dan Mohammad Halid mengerti apa yang dimaksudkannya: Soelan bukan orang PARI. Ia tidak menggunakan nama alias, yang berarti bahwa ia tidak menerima nama-nama yang diberikan Tamin. Nama-nama dan surat sandi begitu penting, bukan karena nama dan surat itu merupakan kunci untuk membuka rahasia PARI, tetapi juga karena nama-nama dan surat itu menunjukkan adanya hierarki yang dibangun berdasarkan pada ketaktaatan pada wewenang Tan Malaka, yang meniadakan tertib kolonial yang sudah mapan. Hal ini menjadi senjata simptom dalam arti Arief memiliki satu kopian *Obor* yang ditulis Tan Malaka dan Daja mempunyai selembar foto Tan Malaka.

Orang-orang PARI sadar bahwa mereka harus menerima risiko dibuang ke Diguel kalau ditangkap. Mereka tahu bahwa mereka bergerak di wilayah yang dibuat pemerintah dengan pos-pos yang ditempel tanda larangan. Sebuah tempat di mana mereka dinyaata untuk tidak melanggar batas. Mereka berada di sana karena Tamin menghendakinya dan mereka merasa bahwa penunjuk jalan mereka Tamin dan Tan Malaka mengawasi mereka. Hal ini bisa menjelaskan mengapa Ngadimin mengatakan dalam interrogasinya bahwa "saat para pekerja membentuk kesatuan, kebebasan akan datang dengan sendirinya". Mereka bicara tentang munculnya sebuah hierarki baru, terpisah dari masyarakat dan pemerintahan Hindia Belanda, keluar dari Tan Malaka dan disebarluaskan oleh Tamin, yang sering membuat pengembalaan mereka bermakna. Mereka tidak bicara tentang kebebasan politik.

Menjadi jelas sekarang mengapa pembuangan orang-orang PARI tidak pernah dipertanyakan pemerintah. Pemerintah tahu bahwa PARI itu kecil, secara politik tidak berarti, dan tidak berhasil sebagai sebuah partai revolusioner. Pemerintah juga tahu bahwa PARI tidak melakukan apa-apa dengan Comintern. Partai ini juga memiliki hubungan yang sedikit dengan partai-partai

lain di Hindia Belanda. Namun kenyataan-kenyataan ini tidak relevan. Hukuman yang dibuat pemerintah dalam menghancurkan gerakan komunis yang inembangkitkan revolusi, seperti penangkapan massal, penjara dan pembuangan, bermakna secara politis maupun pendidikan. Secara politis, hukuman itu ditujukan untuk menghancurkan inti partai. Dari segi pendidikan, hukuman itu menanamkan pendirian pemerintah dalam kesadaran publik. Jika ada pembangkang yang tidak memahami sikap pemerintah dalam persoalan ini, mereka harus ditangkap, dipenjara, dan dibuang. Jenis hukuman ditentukan oleh tingkat keseriusan pembangkangan mereka. Dalam pengertian ini, kegiatan Tan Malaka dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Seperti yang ditulis Residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur kepada gubernur jenderal ketika ia mengusulkan pembuangan Mardjono, "setiap usaha pemimpin (Tan Malaka) untuk membangun kembali kontak dengan penduduk di Hindia Belanda harus dicegah dengan cara apa pun, yakni dengan melukai para penghubungnya, melalui penerapan apa yang disebut kekuasaan luar biasa".

Jadi, semua "agen" dan "agen utama" PARI harus dibuang ke Digoel. Karena mereka berhubungan dengan Tan Malaka dan telah melanggar tanda "dilarang lewat" secara sadar, inaka tidak ada kesempatan untuk bebas dari Digoel, tulis Hillen maupun Welter. Damaloedin Tainin, Mohaninjad Arif Siregar, dan Daja bin Joesoef dibuang ke Digoel pada bulan Agustus 1933. Lebih banyak lagi aktivis PARI yang menyusul mereka pada tahun-tahun berikutnya. Untuk kepentingan pembahasan kita, uraian mengenai PARI dibatasi sampai dengan penangkapan Tamin, karena dengan penangkapannya tidak ada lagi kontak antara Tan Malaka dengan sisa aktivis PARI. Akibat kehilangan kontak ini, Tan Malaka menjadi legenda. Legenda yang menggantikan pribadi dan tulisan-tulisan yang menjadi sumber otoritasnya.

Sekarang kita sampai pada titik di mana kita harus mempertimbangkan lagi pertanyaan yang muncul pada awal esai ini: Bagaimana kebijakan pemerintah menangani pergerakan dan

bagaimana kebijakan itu membentuk kehidupan politik di Indonesia? Menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit melihat kembali kasus SKBI, pembuangan Iwa, pemusnahan PARI, dan memikirkan tentang strategi yang diadopsi pemerintah sesudah terjadi revolusi. Seperti yang telah kita ketahui, pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran, pemenjaraan, dan pembuangan mereka yang terlibat revolusi: 13.000 orang ditangkap, 4.500 dipenjara, dan 1.440 dibuang. Penangkapan ini luar biasa besar dibandingkan dengan penangkapan, pemenjaraan, dan pembuangan selama tahun-tahun sebelum revolusi. Namun tidak berarti, bila dibandingkan dengan penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan massal dan pembuangan pada tahun 1965 dan 1966. Tujuan utama dari kebijakan represi ini bersifat politis, untuk menghancurkan inti Partai Komunis Indonesia, meski ini merupakan tujuan jangka pendek. Dari sudut pandang pemerintah, represi ini jauh lebih penting untuk mengajarkan orang-orang Indonesia bahwa ada batas toleransi pemerintah. Mereka tidak boleh melawan batas tersebut dan jika mereka melanggarinya, mereka harus menanggung risiko pembuangan. Dari sudut ini, kebijakan represi ini bersifat mendidik; tanda "tidak boleh melanggar" dipasang untuk memperingatkan rakyat agar menjauhkan diri dari kelompok-kelompok seperti, PKI, SR, VSTP, Comintern (*The Third International*), Sekretariat Serikat Buruh Pan Pacific, Liga Anti Imperialis, Moskow, Tan Malaka, dan asosiasinya dengan Digoel meresap dalam kesadaran publik. Orang-orang Indonesia akan tetap tinggal dalam batas-batas yang ditetapkan pemerintah. Dalam kerangka ini, masuk akal bahwa pemerintah menangani SKBI, Iwa, dan PARI dengan cara yang begitu keras. Pemerintah memutuskan untuk menghancurkan SKBI setelah mengetahui bahwa organisasi ini berhubungan dengan Liga Anti Imperialis. Iwa telah dicurigai bahkan sebelum ia kembali ke Hindia Belanda, karena ia pernah tinggal di Moskow. Dan PARI adalah sekumpulan pembangkang keras kepala, *onverzogenlijken*, karena mereka berhubungan dengan Tan Malaka dan tidak menaati tanda "dilarang lewat".

Kebijakan politik nasional dengan menegakkan pos tanda "dilarang lewat" menciptakan masalahnya sendiri. Pertama, karena tanda larangan itu telah ditempatkan, seluruh aparat keamanan—tidak hanya hoofdparket dengan ARD sebagai inti, tetapi juga agen-agen lokal dan regional PID dan mata-mata serta informan mereka—mengawasi aktivis PARI dengan ketat. Aparat keamanan juga mengawasi setiap orang yang mungkin mendekati atau bahkan mengamati tanda larangan itu dari jauh. Ini merupakan zona temaram dan samar-samar yang dibuat PID untuk mencapai setiap ancaman revolusioner terhadap *rust en orde* (ketenangan dan tertib), terus diperluas bahkan jauh ke dalam kehidupan politik yang "normal". Melihat hal ini, seseorang hanya perlu mengingat kembali apa yang terjadi pada Abdul Manap, pamian Iwa. Ia adalah seorang dokter hewan di kota Medan, ketua BO cabang Medan, nasionalis moderat, dan secara sosial terhormat. Meskipun demikian, ia ditempatkan di bawah pengawasan polisi dan rumahnya pernah digeledah sekali karena hubungannya dengan Iwa. Untuk memperkuat kemungkinan Iwa dibuang, van der Plas menunjuk pada kebijakan konstruksi liberal pemerintah yang diikuti dengan hukuman keras untuk melawan aksi-aksi bawah tanah yang destruktif. Ini adalah kesensi kebijakan Gubernur Jenderal de Graeff yang diterapkan terhadap PNI tahun 1927–1931. Namun perlu diingat bahwa dasarnya telah runtuh karena logika kebijakan keamanan politik telah berubah menjadi kecurigaan.

Masalah lain yang muncul dari penempatan tanda "dilarang lewat" berhubungan dengan sifat gerakan bawah tanah. Seperti yang kita lihat, gerakan politik bawah tanah yang muncul setelah revolusi sangat kecil. PARI tidak pernah berhasil membangun keberadaan yang cukup berarti dalam politik nasional Indonesia, dan tidak pernah menjadi ancaman terhadap tertib kolonial di Hindia Belanda. Namun gambarannya sebagai sebuah entitas politik yang penting untuk dipelajari bukan hanya karena PARI memberikan alasan bagi pemerintah kolonial untuk membuat larangan, namun juga karena PARI memperjelas—and terus memperjelas—akibat strategi keamanan politik yang kurang hati-

hati yang digunakan untuk menanggapi ancaman. PARI adalah sebuah sekolah, yang terbentuk dari sekelompok murid Tan Malaka yang percaya bahwa begitu keanggotaan mereka cukup besar, kebebasan akan datang dengan sendirinya. PARI memang kesannya revolusioner dan pemerintah memiliki kesan yang sama. Dalam kenyataan, partai ini lebih mengarah ke pendidikan dibanding politik. Masuk akal bahwa orang-orang Tamin disebut sebagai "orang-orang muda dari Universitas Tamin" dalam korrespondensi PARI dan Tan Malaka berkewajiban melatih orang-orang yang dikirim Tamin ke Amoy dan Shanghai. Dengan kata lain, asumsi dasar, yang tentu saja utopis, yang mendasari seluruh bangunan PARI adalah janji, jika ada jutaan Tan Malaka dan Tamin lain yang terlatih, maka kebebasan akan datang dengan sendirinya. Namun Tan Malaka dan Tamin hanya berhasil melatih paling banyak 30 pengikut. Karena itu pemerintah tidak menghadapi masalah ketika membuang para aktivis PARI ke Digoel. Namun begitu pemerintah melakukan tindakan ini dan "Tan Malaka" dipisahkan dari pribadi dan tulisannya lalu ditransformasi ke dalam bentuk larangan—transformasi yang secara efektif dilakukan sendiri oleh pemerintah—maka tandanya tersebut tampak di tempat-tempat yang tak diharapkan, seperti yang terjadi pada bayangan para martir. Dengan kata lain, pemerintah harus mencampakkan tanda "dilarang lewat" untuk mempringatkan orang-orang Indonesia agar menjauhkan diri dan tidak berhubungan dengan Tan Malaka dan PARI. Namun hubungan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosilogis-politik, namun juga dalam bidang kebudayaan. Sepanjang tahun 1930-an, setelah pemerintah berhasil membangun kembali "kondisi normal", hantu Tan Malaka hadir kembali dalam artikel-artikel fantastis berbentuk cerita detektif dan mata-mata mengenai PARI dan Tan Malaka di surat kabar. Artikel-artikel ini tidak bisa diawasi, biarkan hancur sendiri, karena ia diciptakan oleh polisi pada saat normal di Digoel.

# EPILOG: DIALOG BERSAMA TAKASHI SHIRAISSI

---

---

Berpuluh kawan di tiang gantungan,  
beratus-ratus melayang jiwanya.  
Laki dan istri dalam buangan,  
beribu-ribu di dalam penjara.  
Ya! Ya! Ya!  
Itulah yang akan mendatangkan  
dunia kemerdekaan.  
Ayo, lawan, kawan kita semua.  
Hancurkanlah si penjajah durhaka!

**K**utipan di atas merupakan sebagian dari lagu *Dua Belas November* yang menceritakan Pemberontakan PKI tahun 1926. Setelah pemberontakan itu para pimpinannya dibuang ke Boven Digoel, Irian, oleh pemerintah kolonial Belanda. Beberapa tahun kemudian tokoh-tokoh PARI (Partai Republik Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PARTINDO (Partai Indonesia), PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia), dan lain-lain, juga dijebloskan ke Digoel. Wawancara dengan Dr. Takashi Shiraishi berikut ini adalah tentang "laki dan istri dalam buangan" itu, serta tentang arti Digoel dalam politik kolonial pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dr. Takashi Shiraishi adalah Profesor Sejarah di Universitas Kyoto, Jepang. Oleh murid-muridnya, dia biasa dipanggil "Sensei", sebuah ungkapan Jepang yang berarti "guru".

## *Exorbitante Rechten*

T: *Dalam Jurnal SEAP INDONESIA terbitan April 1996, Sensei menulis artikel "The Phantom World of Digoel", tentang kamp tahanan politik Digoel di Irian Barat. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Digoel ini. Pertama, apa dasar hukum pemerintah kolonial Belanda waktu itu membuang para pemberontak 1926 ke Digoel?*

J: Waktu itu ada hak istimewa dari gubernur jenderal yang namanya *Exorbitante Rechten*. Siapa saja yang ditunjuk oleh gubernur jenderal sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, atau *rust en orde*, dari pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh tinggal di Hindia Belanda atau ditunjukkan tempat di mana dia harus tinggal. Itu dasar hukumnya Digoel didirikan.

T: *Sebelum pemberontakan 1926 itu sudah ada beberapa tokoh yang dibuang. Pak [Samion] Sorontiko, misalnya, dibuang ke Sumatra Barat tahun 1907. Dr. Tjipto, Douwes Dekker, Ki Hadjar dibuang ke Belanda tahun 1913. Haji Misbach dibuang ke Manokwari tahun 1924, tokoh-tokoh PKI seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan lain-lain, juga dibuang pada awal tahun 1920-an. Setelah pemberontakan 1926 itu ada begitu banyak orang yang dibuang ke suatu tempat yang sama. Dan ide untuk membuang itu keluarnya begitu cepat. Pemberontakan terjadi tanggal 12 November. Tanggal 18 November sidang pertama Dewan Hindia. Tanggal 19 November sidang kedua. Saat itu diputuskan untuk membuat kamp Digoel. Jadi cuma seminggu setelah pemberontakan sudah diputuskan untuk membuat kamp Digoel. Dari mana munculnya ide Digoel itu? Dan mengapa prosesnya bisa begitu cepat?*

J: Saya kira ada dua hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu, idenya sudah ada sebelum pemberontakan. Saya kira ini ide pertama kali diungkapkan oleh kakaknya Schrieke, saya lupa jabatannya. Tapi ada dua Schrieke. Yang satu menjadi sosiolog yang menulis buku dan juga menulis laporan mengenai pemberontakan di Sumatra Barat. Dan satu lagi kakaknya, saya kira dia orang nomor satu di bidang hukum waktu itu dan dia yang mengusulkan supaya ada satu tempat khusus didirikan sebagai tempat buangan.

Karena orang-orang macam ini, terutama orang komunis waktu itu, mereka kerjanya keluar dan masuk penjara. Kalau melanggar hukum mereka ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara selama satu tahun atau satu tahun setengah, lalu dikeluarkan lagi. Aktif selama setengah tahun, lalu dimasukkan lagi ke penjara. Menurut Schricke ini "kasihan". Lebih baik ditunjukkan tempat di mana mereka bisa mendapat kehidupan yang tenteram, tidak diganggu oleh mimpi-mimpi untuk merdeka atau untuk mendirikan masyarakat komunis. Jadi ide itu sudah ada pada tahun 1925 tapi tetap dipertahankan sebagai ide saja. Sekonyong-konyong, waktu pemberontakan terjadi, ide itu dijalankan. Ini saya kira satu penjelasan.

Tapi dalam konteks yang lebih besar, saya kira perlu diperhatikan satu fakta bahwa Belanda adalah kekuatan kolonial yang minor. Bukan yang nomor satu tetapi nomor tiga, setelah Inggris dan Prancis. Koloni satu-satunya yang mereka punya dan berarti adalah Hindia Belanda. Lain dari Inggris. Karena Inggris punya koloni di Afrika, Australia, India, dan di banyak tempat lagi. Kalau umpamanya ada orang di Birma yang jadi nakal dan harus dibuang, mereka bisa ditempatkan umpamanya ke Ceylon atau ke Afrika. Tapi karena di Hindia Belanda nggak ada tempat lain, ke mana orang-orang macam ini bisa dibuang? Jadi pejabat tinggi Hindia Belanda pada tahun 1926 menyimpulkan bahwa lebih baik mendirikan satu tempat di Hindia Belanda, di mana lebih dari seribu orang bisa dibuang. Saya kira ini penjelasan yang kedua.

*T: Bagaimana pemerintah kolonial waktu itu menjual ide Digoel ini kepada masyarakat Hindia Belanda maupun kepada masyarakat Belanda sendiri? Apa alasan yang mereka pakai?*

J: Pertama, saya kurang tahu apakah mereka memang perlu menjual ide itu. Karena masyarakat Belanda begitu paranoid, begitu takut terhadap gerakan apa pun dari bumiputra. Jadi barangkali pemerintah tidak perlu menjual ide itu. Orang kulit putih senang sekali kalau orang komunis, nasionalis, dan lain-lain, semua dibuang atau dibunuh. Selain itu saya kira Gubernur

Jenderal de Graeff waktu itu masih percaya dengan kemungkinan untuk membangun Nugini sebagai koloni yang baru. Karena waktu itu Nugini atau Irian Barat memang belum dibangun sama sekali. Jadi de Graeff percaya akan ada kesempatan untuk mendirikan suatu koloni yang baru, yang makmur dan tenteram untuk orang-orang komunis, dan sekaligus juga akan menjadi koloni yang baik untuk Hindia Belanda.

*T: Apa ada pengaruh pemikiran orang-orang intel—misalnya kepala polisi rahasia PID (Dinas Polisi Rahasia Belanda)—waktu itu? Kalau zaman sekarang urusan kayak gini kan pasti kerjaannya orang intel.*

J: Saya kira kepala polisi rahasia waktu itu, namanya van der Lely, tidak terlibat dalam keputusan untuk mendirikan Boven Digoel. Karena dia pangkatnya nggak begitu tinggi. Saya lupa berapa jumlah orang yang terlibat dalam *decision making* ini. Tapi ini diputuskan oleh gubernur jenderal bersama *Raad van Indie* atau Dewan Hindia yang merupakan semacam Dewan Pertumbuhan Agung kepada gubernur jenderal.

*T: Ada begitu banyak pulau lain di Hindia Belanda, dan pada waktu itu begitu banyak daerah yang belum dibuka untuk koloni baru. Mengapa justru Digoel yang dipilih?*

J: Ini pertanyaan yang baik. Saya sendiri belum jelas kenapa Digoel yang dipilih. Yang paling penting diperhatikan adalah tempat pembuangan itu harus terisolasi 100%. Dan orang yang diutus mencari tempat pembuangan yang baru itu adalah Gubernur Propinsi Maluku. Karena Nugini juga termasuk Propinsi Maluku, orang ini mengusulkan Boven Digoel yang paling baik. Atas usulan dari Gubernur Maluku itu Dewan Hindia lalu menentukan Boven Digoel sebagai tempat pembuangan.

Barangkali ada tempat-tempat yang lain. Tapi menurut Gubernur Propinsi Maluku, Boven Digoel itu ideal sebagai tempat buangan karena 100% terisolasi. Jaraknya dari muara Sungai Digoel itu 455 km ke arah hulu, ke pedalaman. Itu sama dengan jarak Jakarta ke Semarang atau dari Amsterdam ke Paris.

Tapi semuanya hutan lebat, rawa-rawa yang banyak nyamuk malaria dan di sungainya banyak buaya. Banyak penduduk aslinya yang masih *head hunter*, atau masih kanibal, masih suka makan orang.

## Residen dan Polisi Rahasia

*T: Pemberontakan mulai tanggal 12 November 1926 di Banten dan kemudian bulan Januari 1927 di Sumatra Barat. Secara militer pemberontakan itu dengan mudah ditumpas. Kemudian 13 ribu orang ditangkap dan 4.500 yang dipenjara setelah diadili. Bagaimana pemerintah kolonial memilih siapa yang mestilah dibuang dan siapa yang tidak dibuang?*

J: Ini sepenuhnya diserahkan kepada residen dan kepada kepala polisi, terutama polisi rahasia (PID) setempat. Umpamanya di Jawa Tengah, di Karesidenan Surakarta, orang yang dibuang saya kira jumlahnya tidak begitu banyak, sekitar 70 orang. Jumlah ini cukup kecil dibandingkan dengan orang yang aktif di pergerakan nasional, terutama pergerakan rakyat pada tahun 1920-an di Surakarta. Padahal dari Ujung Pandang, Sumatra Timur, dan daerah sekitar Medan, jumlah yang dibuang jauh lebih besar, saya kira lebih dari 100 orang. Padahal aktivitas pergerakan rakyat di Ujung Pandang dan Sumatra Timur itu nggak sebesar yang di Karesidenan Solo. Saya kira ini tergantung pada residen yang mengusulkan siapa yang harus dibuang. Kalau orangnya sudah diusulkan oleh residen, usulannya hampir 100% disahkan oleh gubernur jenderal.

*T: Bagaimana prosedur pembuangan ini?*

J: Kalau dibandingkan dengan prosedur pembuangan sebelum itu, pembuangan sesudah pemberontakan menjadi sangat rutin. Waktu dr. Cipto Mangunkusumo dibuang pada awal tahun 1920-an, dia tidak boleh tinggal di daerah yang berbahasa Jawa. Jadi dia terpaksa tinggal di Bandung. Untuk itu prosedurnya cukup panjang. Mula-mula dia harus menjawab banyak pertanyaan. Dan semua pertanyaan yang harus dijawab

oleh Cipto itu disusun oleh kepala polisi rahasia. Kemudian residen mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Cipto. Sesudah itu Dewan Hindia kumpul untuk membicarakan masalah pembuangan Cipto. Tapi prosedur semacam ini sama sekali tidak diambil sesudah pemberontakan. Pokoknya, kalau orangnya sudah diusulkan residen supaya dibuang, terus dia dibuang *beneran*. Dan pertanyaan itu semuanya sah, tidak disesuaikan dengan kasus perseorangan.

*T: Jadi yang sangat menentukan adalah residen?*

J: Residen dan polisi rahasia. Karena di setiap karesidenan ada PID. Kepalanya biasanya polisi profesional yang menjadi pembantu residen.

*T: Setelah diputuskan, setelah yang mau dibuang sudah ada daftarnya, lalu kan harus dibangun kampnya. Siapa yang mendirikan kamp di tengah-tengah hutan rimba itu?*

J: Yang diperintah itu Kapten Becking, orang KNIL. Dia yang memimpin pasukan menumpas pemberontakan di Banten. Kurang jelas kenapa dia yang dijadikan komandan untuk membangun Boven Digoel. Barangkali dia dipandang sebagai orang yang mengerti pribumi, yang bisa mengambil hati orang pribumi. Saya kira itu alasannya. Dan rupanya dia cukup disukai. Bukan saja disukai oleh para serdadu dari Ambon, tapi juga oleh sebagian dari orang yang dibuang. Itu bisa dilihat dari memoarnya Chalid Saliin.

## Mau Atau Tidak Mau Bekerja

*T: Tahanan pertama datang bulan Maret 1927. Apa mereka kemudian dipisahkan menurut suku-sukunya? Dalam artikel ini Sensei bilang ada kampung Sumatra—yang isinya orang Minang, Aceh, Lampung. Ada kampung Banten yang isinya orang-orang Banten saja, dan sebagainya.*

J: Kediaman itu disusun berdasarkan suku. Tapi saya kira ini bukan atas perintah dari pemerintah, tapi secara alamiah.

Umpamanya orang Banten suka kumpul sama orang Banten sebagian karena bahasanya sama.

T: *Jadi pemisahan berdasarkan suku-suku itu bukan keputusan pemerintah?*

J: Itu bukan keputusan pemerintah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kamp semua orang cukup bebas memilih di mana mereka mau tinggal.

T: *Sejak tahun 1927 pimpinan kamp mengeluarkan peraturan apakah mau atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Kalau mau bekerja sama mereka mendapat bayaran selain 72 sen per hari ditambah dengan 40 sen. Yang tidak mau bekerja sama hanya dapat bayaran 72 sen per hari. Apakah sebagai tapol mereka itu dibayar?*

J: Ya. Mereka dibayar sedikit, dikasih makan dan juga logistik. Karena idenya mereka bukan orang kriminal, bukan penjahat. Mereka cuma dipandang sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, *rust en orde*. Jadi begitu dibuang dan sudah dimasukkan ke dalam kamp mereka menjadi orang bebas lagi. Dan sebagai orang bebas, kalau kerja harus dibayar. Itu idenya. Tapi kalau tidak mau kerja tentu mereka tidak dibayar.

T: *Dengan adanya pilihan mau bekerja atau tidak mau bekerja ini, apakah menimbulkan perpecahan di kalangan tapol?*

J: Ya, memang. Ini saya kira cukup masuk akal. Bekerja atau tidak mau bekerja inerupakan pilihan, terserah orang di kamp. Kalau pendirian pemerintah, ya terserah kepada orang-orang itu. Kalau mereka mau bekerja—pemerintah tentu satu-satunya lembaga yang bisa memberi pekerjaan—mereka akan dibayar. Tapi kalau tidak mau bekerja, ya boleh juga.

T: *Pada tahun-tahun pertama ini para tapol berusaha berorganisasi dengan membentuk dewan di setiap kampung, lalu ada Dewan Pusat atau Centraal Raad Digoel [CRD]. Apa tujuan mereka membentuk CRD itu?*

J: Di sini saya kira ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, umpamanya orang A, tidak mau bekerja untuk

pemerintah. Hal itu sudah merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Tapi lalu ada dua kelompok, satu kelompok mereka yang tidak mau kerja tapi dia itu juga tidak berbuat apa-apa untuk melawan pemerintah, ya pokoknya tidak mau kerja saja. Di sini ada kelompok yang *self-employed*, kerja sendiri, bukan kerja untuk pemerintah. Mereka mau bekerja umpamanya jadi tukang cukur, atau tukang cuci pakaian untuk sesama teman yang dibuang. Mereka mendapat uang dari sesama orang yang dibuang.

Satu kelompok lagi yang bukan saja tidak mau kerja untuk pemerintah tapi mencoba menyusun perlawanan dalam bentuk yang lain. Saya kira kelompok ini yang mendirikan organisasi untuk pemerintahan sendiri dan mereka tentu dipandang oleh pejabat di Boven Digoel sebagai musuh.

*T: Selain dengan mengorganisir diri itu—dengan memilih kepala desa sendiri, mendirikan CRD, dan sebagainya—apa lagi usaha perlawanannya?*

J: Perlawanannya inacam-macam. Salah satu bentuk adalah mencoba mendirikan administrasi sendiri. Tapi ada juga orang yang merusak jembatan yang didirikan oleh orang-orang yang mau bekerja untuk pemerintah, melakukan pengrusakan atau semacam sabotase. Dan ada juga orang yang tidak mau bekerja pada pemerintah, semacam boikot. Bentuk perlawanannya macam-macam.

## Tanah Merah dan Tanah Tinggi

*T: Bagaimana usaha pemerintah untuk mematahkan perlawanan para tapol ini?*

J: Pemerintah di Boven Digoel memandang orang yang secara aktif mencoba menyusun perlawanan sebagai musuh nomor satu. Pada permulaan mereka dipisahkan, dibuang ke tempat lain yang namanya Gudang Arang. Letaknya dekat dengan kamp Tanah Merah, dekat dengan Sungai Digoel. Tapi sesudah itu mereka dibuang ke kamp Tanah Tinggi, itu kamp baru yang didirikan.

*T: Tahun berapa Timuh Tinggi didirikan?*

J: Saya kira sekitar tahun 1928. Kamp Tanah Tinggi ini jauh dari Tanah Merah, masih 55 km ke arah hulu, sekitar 5 jam dengan motor boat.

*T: Apa teknik-teknik biasa—seperti memasang mata-mata dan segala macam teknik sejenis itu—dikerjakan oleh pemerintah Digoel?*

J: Di Tanah Merah, iya. Untuk mengawasi orang-orang di kamp, pemerintah daerah merekrut orang yang kerjanya sebagai mata-mata, sebagai polisi, sebagai *clerk*, dan lain-lain. Orang mengerti kalau mereka bekerja sebagai mata-mata atau polisi nanti kemungkinan untuk diperbolehkan pulang bisa lebih besar. Jadi cukup banyak yang mau kerja untuk pemerintah.

*T: Bagaimana umumnya mentalitas penghuni Tanah Merah itu? Apa bedanya dengan yang di Tanah Tinggi?*

J: Kalau yang di Tanah Tinggi orangnya sudah nekat. Mereka tidak mau membangun jalan, mereka sama sekali tidak mau bicara dengan orang pemerintah, dan lain-lain. Jadi mereka sama sekali nekat. Tapi kalau yang di Tanah Merah ada dua kelompok. Satu kelompok yang sebagaimana saya bilang tadi, orang-orang yang mau kerja untuk pemerintah. Mereka tentu berharap diperbolehkan pulang ke tempat asalnya. Sesudah orang Belanda yang namanya Hillen datang ke Boven Digoel, sebagian memang mulai diperbolehkan pulang. Jadi sesudah itu satu-satunya harapan untuk mereka adalah pulang ke kampung asalnya.

Kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak mau kerja. Mereka tentu tahu tidak bisa berharap pulang ke kampung asalnya. Tapi mereka mencoba mempertahankan kesadaran. Pokoknya berusaha supaya tidak gila. Misalnya coba konsentrasi mengerjakan sesuatu.

Umpamanya Chalid Salim, dia merupakan penulis buku yang sangat bagus tentang Digoel. Setiap hari dia kerjanya cari nyamuk, maksudnya supaya punya kesibukan supaya bisa tetap waras. Setiap hari kesibukannya, ya cari nyamuk. Pokoknya cari kesibukan supaya tidak memikirkan pulang ke kampung. Dia

itu selalu sibuk supaya tidak jadi gila. Ini strateginya. Dan saya kira ini sangat penting karena orang yang dibuang ke Digoel sama sekali tidak tahu apakah mereka bisa pulang atau tidak. Dan scandalnya bisa, kapan juga tidak tahu. Jadi inasjinya depannya sainya sekali tidak jelas, dan ini menambah rasa rindunya. Banyak orang yang hancur mentalnya karena putus asa.

Di tempat pembuangan ini sama sekali tidak ada kekejaman secara fisik. Sama sekali tidak ada. Orangnya bisa bebas, dan pemerintah bilang kepada semua orang, mereka boleh bekerja untuk pemerintah dan dibayar. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Orang yang tidak mau bekerja untuk pemerintah punya banyak sekali waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Lalu bisa kurang sehat mentalnya. Banyak sekali orang yang menjadi sangat rindu dan putus asa. Itu senjata siksaan mental. Tentu orang Belanda tahu apa yang sedang terjadi.

*T: Tapol bisa bergerak bebas? Apa tidak ada kawat berduri?*

J: Seluruh kamp tidak dikelilingi kawat berduri. Sama sekali tidak ada. Yang dikelilingi kawat berduri justru "tangsi" atau kompleks militernya. Alasannya supaya tentara itu tidak bisa dipengaruhi oleh tawanannya.

*T: Bagaimana dengan kegiatan keagamaan?*

J: Ya, biasa saja. Ada inasjidnya, ada gereja, ada pendeta dan ulamanya, dan sebagainya. Tidak kekurangan ulama. Banyak ulama dari Banten, Sumatra Barat, dan lain-lain.

*T: Bagaimana dengan hiburan atau kegiatan kesenian dan olah raga? Apakah mereka diberi kesempatan?*

J: Banyak sekali kegiatan, terutama pada awalnya. Menurut Salim, yang paling penting adalah kelompok musik. Orang Jawa main gamelan, orang dari Batavia main kerongcong, dan lain-lain. Dan satu hal yang masih saya ingat adalah Xarim M. S., yang nanti menjadi pemimpin dari revolusi sosial di Medan. Dia menjadi pemimpin dari jazz band. Rupanya dia orang yang sangat menarik. Dia memilih bekerja untuk pemerintah, entah menjadi

apa, tapi pokoknya mau kerja sama dengan pemerintah. Tapi dia juga mendirikan kelompok jazz dan rupanya dia sangat aktif pada akhir 1920-an dan awal 1930-an lalu diperbolehkan pulang pada tahun 1934-1935. Ya, banyak kegiatan kebudayaan terutama musik dan teater seperti ketoprak, dan wayang orang. Tapi kesan saya lama-kelamaan banyak orang putus asa, lalu kegiatan itu menjadi jarang.

T: *Kelompok yang di Tanah Tinggi menurut Sensei terbagi atas tiga kelompok lagi: kelompok Aliarcham, kelompoknya Sarjono, dan kemudian orang-orang didikan Moskow. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang memisahkan mereka?*

J: Saya kira ada dua alasan. Pertama, yang sangat penting, dan ini memisahkan orang yang dilatih di Moskow dengan orang-orang yang lain, mereka sangat yakin bahwa cuma mereka lah orang yang paling mengerti Marxisme dan Leninisme. Mereka belajar di Moskow, jadi mereka tahu "bahasa suci"-nya Marxisme. Mereka sama sekali tidak percaya pada tulisan-tulisan Marxisme atau Komunisme dalam bahasa Melayu. Mereka jadi sombong dan tidak mau bergaul dengan orang-orang lain kalau orang-orang lain itu tidak patuh pada kepercayaannya.

Kalau perpecahan antara kelompok Sarjono dan kelompok Aliarcham, saya kira ini tergantung pada bagaimana penilaian masing-masing tentang pemberontakan. Tapi hal ini masih kurang jelas. Ini cuma dugaan saya, karena bukti-buktinya kurang. Saya menduga orang-orang yang ikut Aliarcham kebanyakan adalah orang yang nantinya menjadi orang Murba, dan ikut Tan Malaka. Kelompok ini orangnya kebanyakan mengalami hari-hari permulaan dari PKI atau ISDV, pada akhir tahun 1910-an dan awal 1920-an, waktu PKI masih dipimpin oleh Semaoen, Tan Malaka, dan lain-lain. Sedangkan orang yang masuk kelompok Sarjono adalah mereka yang datang sesudah itu, sesudah markas besar PKI dipindah dari Semarang ke Batavia. Jadi saya kira perpecahan ini semacam cerminan dari sejarah PKI sendiri. Karena PKI zaman Semarang dan PKI zaman Batavia dan Bandung cukup lain.

*T: Lain bagaimana?*

J: Nomor satu, peniimpin PKI di Semarang secara representatif adalah Semaoen dan Tan Malaka. Mereka mengerti pergerakan secara umum dan mereka juga cukup lama dan cukup banyak aktivitasnya di dunia pergerakan. Mereka bukan saja kenal sesama orang komunis tapi juga kenal baik dengan mereka yang menjadi lawan politiknya, umpamanya Cokroaminoto dan Agus Salim. Semaoen kenal baik dengan Cokroaminoto, Agus Salim, Suryopranoto, dan lain-lain.

Orang-orang yang menjadi pemimpin PKI di Batavia dan Bandung lebih muda. Kedua, mereka mulai aktif di dunia pergerakan pada awal 1920-an, sesudah Serikat Islam pecah. Jadi mereka secara umum memandang Cokroaminoto dan lain-lain sebagai lawan. Karena nggak mengalami zaman ketika mereka masih berteman. Jadi mereka lebih sektarian dari orang-orang Semarang atau orang yang ikut Aliarcham, Semaoen, dan Tan Malaka, yang masih ingat zaman pergerakan sebelum PKI lahir pada tahun 1920.

*T: Tahun berapa PKI Batavia dan Bandung mulai aktif?*

J: Mereka mulai sangat aktif sesudah tahun 1922. Terutama sesudah pemogokan VSTP, Serikat Buruh Kereta Api, yang kalah pada tahun 1923. Tapi saya sendiri benar-benar kurang tahu apakah Sarjono ikut di situ. Sarjono saya kira guru dari Surabaya. Tapi umpamanya yang menjadi teman Sarjono, yaitu Budi Sutjito, dia orang Semarang, kemudian pindah dari Semarang ke Batavia. Lalu ada Winanta, tokoh buruh kereta api di Bandung. Mereka jadi sangat radikal sesudah pemogokan kalah. Kelompok mereka yang mengambil kepemimpinan dari kelompok Semarang.

*T: Apa tiga kelompok itu kemudian bisa bersatu lagi?*

J: Nggak juga. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan sesudah mereka kembali ke Jawa dan tulisan mereka pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, akhirnya mereka tetap jalan sendiri-sendiri.

## Penelitian Hillen

T: Setelah ribuan orang dibuang ke Digoel, bagaimana reaksi Volksraad?

J: Ada anggota Volksraad orang pribumi dari Batavia, namanya (Mohammad Husni) Thamrin. Dia sering menanyakan masalah Digoel di Volksraad. Tapi informasinya masih kurang. Saya lupa pertanyaan Thamrin di Volksraad, sebagian berasal dari kutipan surat kabar. Pemerintah responsnya begitu-begitu saja, nggak begitu peduli. Mereka lebih peduli dengan laporan dari wartawan Belanda yang tulisannya diterbitkan di salah satu koran di Amsterdam atau Rotterdam, karena itu langsung dibaca oleh orang Belanda di negeri Belanda. Lalu Hillen dikirim ke Digoel untuk mengadakan penyelidikan, bagaimana keadaan di sana. Dan juga menyelidiki kemungkinan kalau cukup banyak orang yang tidak begitu salah tapi dibuang ke Digoel.

T: Siapa Hillen itu?

J: Dia Gubernur Jawa Barat dan anggota Raad van Indie, atau Dewan Hindia yang mirip seperti DPA sekarang.

T: Pada bulan April tahun 1930 waktu Hillen mengunjungi Digoel jumlah tahanan politiknya paling banyak mencapai 2.000 orang.

J: Kalau tapolnya saja saya kira sekitar 1.300, yang lain itu keluarga mereka.

T: Di Digoel, Hillen mengadakan wawancara 49 hari. Setiap hari dia bisa wawancara 20–25 orang. Total ada 600 orang lebih yang diwawancara oleh Hillen. Dari 600 orang itu, 400 kennudian dilepaskan. Apa ide di balik penelitian Hillen itu? Apa penikiran pemerintah Hindia Belanda dengan memugaskan Hillen?

J: Saya sendiri belum membaca lengkap berita yang ditulis wartawan Belanda itu. Saya cuma baca separonya, yang dikutip dalam laporan dari pemerintah. Rupanya wartawan Belanda ini menanyakan apakah semua orang yang dibuang ke Digoel memang orang yang begitu serius “dosa”-nya? Dia menanyakan,

bukankah kebanyakan cuma petani, yang sebenarnya tidak begitu mengerti ideologi komunis. Dan Gubernur Jenderal de Graeff adalah orang liberal. Saya kira dia cukup terkesan oleh berita ini dan lalu jadi prihatin. Apakah berita ini memang betul apa tidak? Dan saya kira dia mengerti, siapa yang dibuang tergantung pada residennya. Dan pasti ada residen yang lebih kejam dibandingkan residen-residen yang lain.

*T: Sebab itu dia mengirim Hillen untuk menyelidiki?*

J: Ya, keprihatinan itu saya kira satu alasan yang penting. Alasan lainnya adalah bahwa Hillen itu orangnya lebih konservatif dibandingkan de Graeff. Hillen tidak sepandapat dengan de Graeff, terutama mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap pribumi. Hillen orangnya lebih *tough* dibandingkan de Graeff. Dan de Graeff mengerti kalau Hillen bilang ternyata memang ada kesalahan, nanti de Graeff merasa aman untuk membenarkan *policy*-nya, umpamanya memperbolehkan orang-orang di Digoei untuk pulang ke kampung.

Bayangkan saja kalau orang yang ditunjuk untuk penyelidikan adalah orang liberal, bisa-bisa de Graeff nanti akan dikritik lagi oleh masyarakat Belanda. Tapi semua orang tahu Hillen lebih konservatif dan lebih keras. Jadi de Graeff merasa aman menjalankan kebijaksanaannya. De Graeff memberi ampun kepada Soekarno sehari sebelum dia turun sebagai gubernur jenderal. Soekarno divonis dua tahun waktu diadili di Bandung. Tapi oleh de Graeff hukuman ini dikurangi jadi satu tahun tiga bulan.

Waktu itu Hillen salah satu orang yang paling vokal kritiknya terhadap de Graeff. Hillen sendiri percaya Soekarno tidak boleh diampuni, dia harus tetap dipenjara. Jadi memang ada perbedaan antara de Graeff dan Hillen. Chalid Salim bilang Hillen adalah seorang *gentleman*. Saya kira dia benar. Kesan saya Hillen itu orangnya *correct*, walaupun keras. Jadi kalau memang ada kesalahan, dia berani bilang ada kesalahan.

## Korban Baru de Jonge

T: *De Graeff itu turun sebagai gubernur jenderal bulan Mei 1931, lalu diganti dengan de Jonge. Siapa dia?*

J: De Jonge jauh lebih reaksioner daripada de Graeff. Nanti waktu Perang Dunia Kedua, waktu Belanda diduduki Nazi Jerman, dia menjadi kolaborator Nazi. Saya kira dari semua gubernur jenderal di Hindia Belanda pada abad 20 dia ini yang paling reaksioner.

T: *Setelah de Jonge naik menjadi gubernur jenderal, September 1931, apa dampaknya untuk orang-orang di Digoel itu? Apa ada perubahan kebijakan soal Digoel?*

J: Dampaknya sangat besar. Di mana saja, kalau pimpinannya berganti, misalnya Presiden Amerika ganti, biasanya juga ganti kebijaksanaan. Kalau ada gubernur jenderal yang baru datang ke Hindia Belanda satu hal yang dia mau tunjukkan adalah bahwa dia lain dari gubernur jenderal yang lama. Terutama ini sangat penting untuk de Jonge karena dia sama sekali tidak setuju dengan kebijaksanaan de Graeff terhadap orang pribumi. Banyak hal yang dilakukan oleh de Jonge pada tahun 1931–1932, harus dimengerti dari sudut ini.

Umpamanya de Graeff sebelum diganti sudah mulai memikirkan bahwa keputusannya untuk mendirikan Digoel adalah keliru. Karena itu lebih baik menutup kamp dan memindahkan orang tawanan ke tempat lain. Tapi persis karena de Graeff sudah mulai memikirkan begitu, de Jonge justru mau mempertahankan Digoel, dan dia tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sana. De Graeff juga memikirkan supaya cuma orang komunis yang aktivis, atau pemimpin dari PKI, yang dibuang ke Digoel. Orang nasionalis yang bukan komunis tidak boleh dibuang ke Digoel. Tapi persis karena de Graeff memikirkan begitu, de Jonge justru melakukan sebaliknya. Lalu orang nasionalis juga harus dibuang ke sana. Jadi dampaknya sangat besar.

T: Dalam catatan *Sensei ini*, pada tahun 1930 pemimpin SKBI (Serikat Kaum Buruh Indonesia) dibuang. Lalu tahun 1931–1934 pemimpin-pemimpin PARI (Partai Republik Indonesia) dibuang. Tahun 1933–1934 menyusul kelompok nonkooperasi dari PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia), PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) Sumatra Barat juga dibuang ke Digoel. Begitu juga PNI-Pendidikan, termasuk Hatta dan Sjahrir. Pemimpin PARTINDO di Sumatra Utara itu juga dibuang ke Digoel. Tahun 1936 anggota PARI yang baru, PNI-Baru, dan juga beberapa anggota PKI-Moesso juga dibuang. Semua pembuangan baru ini apakah akibat kebijaksanaan gubernur jenderal yang baru itu?

J: Ya. Memang bisa dikatakan de Jonge itu juga orang yang nekat. Dan sebetulnya sangat incarik kalau membaca memoarnya. Dalam memoarnya dia nggak bilang begitu, tapi cukup jelas perasaannya bahwa waktu dia datang ke Hindia Belanda dia sudah menentukan, kalau ada kesempatan dia akan membuang Soekarno.

T: Itu sebelum dia berangkat?

J: Oh, ya. Karena dia tahu Soekarno sudah merupakan satu simbol dari kebijaksanaan de Graeff terhadap pribumi. Karena de Graeff sudah memberi ampun kepada Soekarno. Jadi kalau de Jonge mau menunjukkan dia lain dari de Graeff, dia lebih keras, maka yang paling gampang ya tentu buang banyak orang ke Digoel, dan sekalian juga buang Soekarno. Kemudian semua pemimpin kelompok nonkooperasi dia buang juga.

T: Memang akhirnya dia yang membuang Soekarno ke Ende.

J: Ya, memang sedikit lain karena Soekarno tamatan dari *Technische Hooge School*, Sekolah Tinggi Teknik Bandung yang sekarang jadi ITB. Waktu rapat Dewan Hindia diadakan saya kira sama sekali tidak pernah dibicarakan kemungkinan menbuang Soekarno ke Digoel, walaupun sudah dimengerti bahwa Soekarno harus diisolasi.

T: Tapi tidak ke Digoel?

J: Karena Soekarno lulusan THS lalu dia dianggap intelektual walaupun dia orang pribumi. Sebetulnya sedikit nggak jelas apa makna intelektual. Waktu itu, kalau sudah dianggap intelektual berarti sama derajatnya dengan orang putih. Walaupun pribumi, kalau sudah dapat pendidikan universitas, dia menjadi *honorary white*.

T: *Tahun 1936 ada dua keputusan penting. Pertama, Digoel dianggap tidak sesuai untuk intelektual. Yang kedua, mereka yang diduga akan tetap mengadakan perlawanan, jangan dilepaskan. Apa latar belakang lahirnya keputusan tahun 1936 itu?*

J: Wah, saya lupa.

T: Kami kira ini cukup penting. Karena kemudian berdasarkan keputusan ini maka Hatta dan Sjahrir lalu dikeluarkan dari Digoel pada awal 1936.

J: Ya, benar. Saya tidak begitu perhatikan kenapa Hatta dan Sjahrir dipindahkan dari Digoel ke Banda Neira. Tapi saya kira sesudah mereka dibuang ke Digoel barangkali ada pertanyaan—bukan hanya di Hindia Belanda tapi lebih penting lagi yang di negeri Belanda—kenapa Hatta dan Sjahrir dibuang ke Boven Digoel? Karena waktu itu nama Digoel sudah cukup terkenal di negara Belanda sebagai “kuburan”. Jadi pemerintah Hindia Belanda terpaksa merumuskan kebijakan yang sebenarnya sudah dijalankan. Karena Soekarno meinang sudah dibuang ke Ende, dr. Cipto dan Iwa Koesoema Soemantri ke Banda Neira. Maka intelektual semacam Hatta dan Sjahrir juga dipindahkan dari Digoel ke Banda Neira.

T: *Apa ada hubungannya dengan pergantian gubernur jenderal? Karena de Jonge diganti oleh Tjarda van Starkenborgh tahun 1936.*

J: Ya, barangkali ada. Tapi saya kurang tahu. Saya tidak melakukan riset mengenai Hatta dan Sjahrir. Tapi ya mungkin juga karena kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda pada abad 20 selalu berubah sesudah gubernur baru datang. Setiap gubernur jenderal mau “lain” dari yang digantikan.

## Mencoba Lari

T: Bagaimana percobaan lari yang pernah dilakukan oleh para Digoelis ini. Sensei cerita di sini tentang Najoan, Sanjoyo, dan lain-lain. Bisa diceritakan tentang Najoan ini. Siapa orang yang sudah mencoba empat kali lari?

J: Dia memang orang yang luar biasa. Saya sendiri tidak begitu kenal orang ini. Tapi saya tahu dia tokoh pergerakan rakyat sejak tahun belasan. Dia salah satu pemimpin dari ISDV dan juga Scrikat Buruh Kereta Api di Semarang. Saya kira dia teman baik Scmaoen dan peranannya cukup penting dalam sejarah pergerakan partai, pergerakan buruh, dan juga pergerakan di Semarang dan Jawa Tengah. Saya sendiri tidak tahu apa yang dilakukan Najoan di Digoel. Tapi karena dia salah satu buangan di Tanah Tinggi, berarti dia sangat nekat dan sama sekali tidak mau berurusan dengan pemerintah.

T: Untuk berani lari dari Digoel itu luar biasa. Dan orang ini mencoba empat kali, terakhir dia mencoba tahun 1942, dan dia hilang.

J: Mungkin dia meninggal. Pelariannya yang terakhir terjadi setahun sebelum kampnya ditutup. Tapi dia sendiri tidak tahu bahwa nggak lama setelah dia lari kampnya ditutup. Ini sangat tragis.

T: Lalu ada 16 percobaan lari yang lain. Seluruh orang yang mencoba lari itu 60 orang, 40 di antaranya dari Tanah Tinggi. Tapi yang kemudian berhasil menyeberangi Selat Torres dan sampai ke Pulau Thursday lalu buka kios cukur, itu kelompoknya Sanjoyo. Siapa Sanjoyo itu?

J: Sayakira Sanjoyo orang Solo, dia salah satu anak buah dr. Cipto yang pada permulaan jadi aktivis di National Indische Partij yang didirikan di Semarang tahun 1919. Sanjoyo ini cukup dekat dengan dr. Cipto dan juga Haji Misbach. Sesudah dr. Cipto dibuang ke Bandung dia juga ikut ke Bandung. Sesudah itu dia pulang ke Solo dan langsung jadi aktivis di Solo.

Yang paling penting tidak ada orang yang berhasil melarikan diri dari Digoel. Paling jauh sampai ke Thursday Island di Australia. Tetapi akhirnya mereka ditangkap lagi karena sudah ada persetujuan antara Australia dan Hindia Belanda bahwa kalau ada orang yang lari ke Australia, termasuk Irian Timur, mereka langsung dipulangkan.

T: *Tapi bahwa mereka lari dan bisa sampai ke laut dengan menempuh jarak 455 km, itu luar biasa. Seperti cerita dalam film Pappillon.*

J: Ya, itu hebat sekali. Ada satu tulisan yang judulnya "Pandu Anak Buangan", saya kutip juga dalam artikel saya. Itu tulisannya Xarim MS yang diterbitkan di Medan pada akhir 30-an. Tulisan ini secara humoris menceritakan pelarian satu kelompok orang buangan dari Tanah Merah. Ini secara lucu menceritakan betapa tidak mungkin melarikan diri dari Digoel.

T: *Siapa Chalid Salim itu? Tadi Sensei bilang dia menulis buku yang bagus tentang Digoel.*

J: Dia adiknya Haji Agus Salim yang menjadi wartawan di Sumatra Utara. Walaupun kakaknya jadi pemimpin Partai Sarikat Islam, dia sendiri termasuk PKI. Pada permulaan dia aktif di Sumatra Barat lalu datang ke Jawa, kerja sama dengan Moesso. Lalu dikirim ke Sumatra Utara, punya kontak dengan Tan Malaka di Singapura. Tapi akhirnya tertangkap di Medan, lalu dibuang. Sesudah kampanye ditutup dia dikirim ke Australia, dia tidak pulang ke Indonesia tapi pindah ke negeri Belanda karena dia kawin dengan orang Belanda.

Sesudah bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia pernah datang ke Jakarta dan sempat ketemu dengan Presiden Soeharto. Buku *Linia Belas Tahun di Boven Digoel*, diberikan kepada Soeharto. Saya sendiri belum tahu apakah Soeharto baca. Tapi bukunya sangat bagus dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia juga bagus sekali.

T: Menarik bahwa dia adiknya Haji Agus Salim.

J: Itu berarti sebetulnya perbedaan antara orang komunis dan orang nonkomunis sangat tipis. Lihat saja kakak-beradik Salim. Barangkali tergantung pada siapa orang yang mereka temui dalam perjalanan hidupnya, orang bisa menjadi komunis atau bukan komunis.

T: Apa Chalid Salim ini masih hidup sekarang?

J: Sekarang saya kurang tahu. Tapi lima tahun yang lalu dia masih di Belanda. Saya sendiri belum pernah bertemu dia. Saya baca bukunya dalam bahasa Belanda, bahasanya sangat bagus.

T: Dari daftar yang Sensei buat tentang jumlah tahanan ini, kita lihat di bulan Mei 1930 total di Digoel ada 1.308 tapol, di Tanah Tinggi 70, ini orang-orang yang tidak mau kompromi. Kemudian tahun 1931 total ada 1.178 tapol, di Tanah Tinggi bertambah jadi 82 orang. Tahun 1932 merurun tinggal 793, di Tanah Tinggi ada 69 orang. Dan sejak itu jumlah tapol menurun terus sampai 1937 total tinggal 446, tapi di Tanah Tinggi jumlahnya tetap 64 orang. Jadi kelompok yang tidak mau kompromi jumlahnya 70, kemudian perlah衰 menjadi 82 dan selanjutnya tetap saja lebih dari 60 orang. Ini bukan main.

J: Ya, sayakira jumlahnya tetap. Kalau jumlahnya berkurang berarti ada orang yang mati. Umpamanya Mas Marko Kartodikromo, dia juga salah satu orang yang dibuang ke Tanah Tinggi. Dia mati di Tanah Tinggi pada tahun 1933, berarti kurang satu. Aliarcham juga mati di Tanah Tinggi.

T: Luar biasa orang yang tidak mau kompromi. Betul-betul sampai mati.

J: Ya, memang.

(Catatan Editor ISAI: Menurut Soe Hok Gie, "Waktu Aliarcham meninggal semua orang merasa 'diguyur' air dingin karena sikap pribadinya yang kuat dan pantang menyerah. Baik PKI maupun Murbia menghormatinya sampai sekarang." Lihat Soe Hok Gie, Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Bentang, 1977, catatan kaki No. 64, him. 40).

## Perubahan Politik Dunia

*T: Tahun 1937 Jepang menyerang Cina dan pemerintah Nazi naik di Jerman. Apa dampak perubahan politik dunia ini terhadap kebijakan kolonial tentang Digoel?*

J: Saya kira ada dua dampak yang sangat penting. Pertama, negeri Belanda sendiri kemudian diduduki Nazi Jerman tahun 1939. Sebelum negeri Belanda diduduki, pemerintah Belanda sudah mulai prihatin terhadap adanya Boven Digoel. Karena jelas dunia waktu itu sudah terbagi dua. Satu, blok demokrasi, satu lagi blok fasis atau miltaris. Untuk menunjukkan bahwa negeri Belanda adalah salah satu negara yang deinokratis, adanya Boven Digoel tidak cocok. Itu tidak baik untuk *image* Belanda sebagai negara demokratis. Karena itu Weltevreden, waktu itu menteri urusan kolonial, mulai prihatin. Walaupun orangnya sebenarnya cukup reaksioner, Weltevreden mulai mengusulkan supaya kampnya ditutup. Ini saya kira satu dampak yang sangat penting dari perkembangan di dunia.

Dan nomor dua, kalau kamip tetap dipertahankan karena keperluan dalam negeri, meninggalkan pemerintah Hindia Belanda ingin mempertahankan kamip ini untuk menempatkan orang-orang yang bisa menjadi ancaman, nanti muncul kemungkinan yang agak jelek. Kalau Jepang membebaskan orang dari kamp Digoel, Jepang bisa kelihatan lebih demokratis daripada Hindia Belanda. Mengingat kemungkinan itu, pemerintah Hindia Belanda tidak mau ambil risiko. Jadi mereka memutuskan kampanya harus ditutup. Dan orang tawanan harus dipindahkan ke Australia.

*T: Apakah keputusan ini juga dipengaruhi oleh berita buruk tentang kamp-kamp orang Yahudi yang dibikin oleh Nazi?*

J: Saya kira tidak.

*T: Apakah akhir tahun 1930-an kamp-kamp konsentrasi Yahudi belum ditemukan?*

J: Sebetulnya orang sudah tahu. Umpamanya Presiden Amerika, (Franklin Delano) Roosevelt, dan banyak juga orang lain, mereka sudah tahu ada kamp-kamp orang Yahudi di Eropa. Dan juga mereka tahu banyak orang Yahudi sudah dibunuh. Memang banyak berita tapi mereka tidak percaya, beritanya tidak dianggap begitu serius. Saya kira pemerintah Hindia Belanda memang memperhatikan orang Yahudi. Tapi dalam mentalitas mereka masalah orang Yahudi itu ada dalam satu "kotak" dan urusan Hindia Belanda dalam "kotak" yang lain, jadi tidak bisa dikirim.

T: Apakah sebelum Digoel memang sudah ada semacam kamp konsentrasi tahanan politik sejenis ini di dunia?

J: Kamp konsentrasi yang pertama di dunia saya kira ya Digoel ini. Atau barangkali di Rusia sudah mulai muncul tetapi saya tidak tahu persis. Di Indochina Prancis punya Pulau Condore. Pulau ini bisa dikatakan satu kamp konsentrasi, cuma lebih mirip penjara. Tapi tentu kita bisa bilang pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah yang sangat inovatif dalam menangani masalah tahanan politik.

T: Sensei mengatakan suasana di Digoel itu ada miripnya dengan suasana dalam novel "One Hundred Years of Solitude". Apa maksudnya?

J: Rasa kesepiannya. Anda sudah baca buku itu?

T: Belum. Tapi buku ini pernah dibaca Clinton, lalu jadi berita besar.

J: Buku itu dikarang Garcia Marquez, ya macam Pramoedya Ananta Toer dari Amerika Latin. Tapi karya-karyanya sangat lain. Dalam novel *One Hundred Years of Solitude* ini dia menceritakan sejarah dari satu keluarga sedemikian rupa sampai pembaca bisa merasakan kesepiannya dan juga terisolasinya tempat itu di Amerika Latin. Saya dapat perasaan sepi yang hampir sama dari tulisannya Chalid Salim mengenai Boven Digoel. Saya kira Digoel itu sangat sepi.

## Zaman Normal

T: Sensei membuat semacam analogi antara Digoel dengan Hindia Belanda. Di Digoel itu ada kamp Tanah Merah untuk tapol yang biasa, ada kamp Tanah Tinggi untuk tapol yang tidak mau kompromi. Di Hindia Belanda ada Hindia Belanda untuk orang yang tidak dibuang, yang hidup "normal", dan ada Digoel untuk orang yang melawan. Lalu Sensei lihat lagi analogi itu dalam politik zaman akhir Hindia Belanda, ada kelompok "kooperasi" dan ada kelompok "nonkooperasi". Bisa dijelaskan apa maksudnya lagi ini?

J: Barangkali lebih baik menjelaskan pertanyaan yang muncul pada saya waktu mulai memikirkan soal Boven Digoel. Sudah lama sekali, ya lebih dari sepuluh tahun sebelumnya, saya mau melakukan riset tentang Digoel dan menulis satu makalah mengenai Tanah Tinggi dan Tanah Merah. Karena pada awal 1980-an saya pernah ketemu dengan seorang nenek. Dia kerja di salah satu rumah sakit di Bandung pada tahun 30-an. Sekali waktu kami berdua sedang melihat TV lalu ada berita tentang kematian Jenderal Ali Murtopo. Sekonyong-konyong saja nenek itu menceritakan kehidupannya seolah-olah dia dapat trigger dari berita kematian Ali Murtopo. Dia bilang di zaman Belanda, dokter-dokter orang Belanda di rumah sakit itu sangat baik terhadap dia. Dan sesudah orang Jepang datang semuanya menjadi kacau. Waktu saya ketemu sama dia, dia tinggal di Jakarta. Tapi sampai awal Orde Baru dia tinggal di Jawa Barat dan dia pernah sangat takut terhadap DI (Dariil Islam).

Bagi nenek itu, zaman kemerdekaan adalah zaman kacau dan mengerikan, sedangkan zaman Belanda adalah "Zaman Normal". Sejak itu saya mulai memikirkan apa maknanya "normal"? Banyak orang Indonesia yang masih ingat zaman Belanda bilang, "Waktu itu zamannya Zaman Normal." Orang Indonesia yang tua-tua itu juga suka bilang, "Zaman Normal itu mulainya sesudah pemberontakan." Jadi saya mulai tanya apa maknanya normal? Dan apa maknanya 'orde'? Karena jelas normal berarti zaman di mana ada orde yang cukup stabil, yang teratur. Dan biasanya kalau ada "order" tentu harus ada

"disorder", yaitu ancaman terhadap orde dan kita biasanya tanya apa ancamannya?

Waktu saya mulai melihat masalah Digoel, rasanya ancaman untuk Hindia Belanda tidak ada. Saya lihat kegiatan PKI sesudah pemberontakan itu sama sekali tidak mengancam pemerintah Hindia Belanda. Umpamanya SKBI, itu merupakan salah satu percobaan untuk mendirikan suatu organisasi sentral dari pergerakan serikat buruh. Saya kira sekjennya mata-mata Belanda. Semua surat-menurut, semua komunikasi diketahui oleh polisi rahasia; sama sekali tidak merupakan ancaman terhadap pemerintah.

Kelompok Tan Malaka mencoba setengah mati menyusun jaringan PARI untuk melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Saya kira orang-orang yang masuk PARI dan bergerak di bawah tanah itu jumlahnya nggak sampai 50 orang. Lebih kecil bila dibandingkan dengan LSM-LSM sekarang. Saya lihat sebenarnya ancamannya tidak ada. Tapi apa arti ancaman? Saya pikir ini bukan karena adanya ancaman. Tapi ancaman ada justru karena ada orde. Orang yang mementingkan orde selalu memikirkan ancaman. Jadi supaya ada orde harus ada ancaman. Lalu orang mulai mencari ancamannya.

Seandainya Anda jadi gubernur jenderal yang bertanggung jawab untuk mempertahankan orde inaka logikanya harus dibalik: supaya ada orde harus ada ancaman. Lalu Anda akan bilang kepada orang-orang pribumi, "Kalau kamu menjadi ancaman maka kamu tidak bolch tinggal di masyarakat." Jadi harus mendirikan satu tempat khusus untuk orang yang merupakan ancaman. Bukan saja untuk mengucilkan orang-orang yang dianggap ancaman, saya kira ini nggak penting. Yang jauh lebih penting supaya orang lain, masyarakat banyak, bisa melihat dan mengerti bahwa kalau mereka menjadi ancaman nanti mereka akan ditempatkan di sana. Kalau orde Hindia Belanda mau dipertahankan maka harus ada tempat untuk orang-orang yang merupakan ancaman. Supaya orang-orang yang tinggal di masyarakat Hindia Belanda merasa aman dan

mengerti mereka hidupnya “normal”. Karena di sana disediakan tempat yang abnormal.

*T: Digoel jadi semacam batas, begitu?*

J: Semacam cermin juga, supaya masyarakat bisa melihat masyarakat “normal”. Yang menarik, begitu Tanah Merah didirikan lalu muncul orang-orang yang nekat, orang-orang yang tetap mau melawan pemerintah. Lalu pemerintah harus mendirikan satu tempat yang lain yang namanya Tanah Tinggi. Supaya orang yang tinggal di Tanah Merah merasa hidupnya normal. Karena mereka mengerti ada tempat yang abnormal yang namanya Tanah Tinggi.

Makna normal itu jadinya relatif. Tentu banyak orang di masyarakat Hindia Belanda bisa merasa “Yah, kami masih untung, karena kalau tidak pasti kami ada di sana.” Saya kira atas pengertian ini didirikan orde Hindia Belanda. Dan ini saya kira salah satu hal yang baru karena sebelum pemberontakan PKI ordenya didirikan atas prinsip yang lain.

## Pendidikan Politik Kolonial

*T: Apa prinsipnya sebelum Pemberontakan 1926 itu?*

J: Sebelumnya nggak sistematik. Kalau ada orang yang memang merupakan ancaman, mereka lalu dibuang. Tapi setelah pemberontakan, apakah orang itu merupakan ancaman apa tidak, itu menjadi tidak begitu penting. Pentingnya nomor dua. Yang lebih penting orang lain bisa dapat pelajaran. Maknanya Digoel itu buat mendidik masyarakat Hindia Belanda.

*T: Jadi semacam pendidikan politik versi penjajah?*

J: Iya.

*T: Sensei juga mengatakan bahwa surat-surat dari Digoel menang sengaja disebarluaskan melalui koran-koran.*

J: Ya, supaya orang mengerti. Sebetulnya ada satu contoh yang sangat bagus dari Soebakat, pemimpin PARI nomor dua

setelah Tan Malaka. Waktu PARI didirikan dan waktu dia berada di Bangkok dia bikin bahasa kode. Dalam kode ini "abu" itu artinya polisi, "rumah sakit" itu artinya penjara, dan "rumah sakit besar" artinya Boven Digoel. Jadi Hindia Belanda dibayangkan seperti kepulauan rumah sakit. Dalam bayangan ini tentu ada asosiasi antara kegiatan politik, terutama kegiatan politik bawah tanah dengan polisi, penjara, dan Boven Digoel.

Jadi, seandainya saya mulai bergerak di bawah tanah, masuk jadi anggota PARI, tentu saya tahu bahwa saya harus awas, hati-hati terhadap polisi. Karena kalau saya ditangkap saya bakal masuk penjara. Kalau sudah diketahui sebagai anggota PARI nanti saya dibuang ke Digoel. Hubungan seperti itu sangat penting, dan sudah ada dalam otak orang. Kalau orang memang masuk PARI, itu artinya mereka sudah nekat. Mereka sudah menentukan mereka nanti melawan pemerintah Hindia Belanda secara mati-matian.

Tapi kalau orang biasa sudah melihat asosiasi ini maka dampaknya sangat negatif. Mereka sudah mengerti kalau mereka ikut PARI nanti mereka akan dibuang ke Digoel. Maka kebanyakan orang tentu tidak mau masuk PARI. Saya kira asosiasi ini sengaja disebar sebagai pendidikan politik oleh pemerintah Hindia Belanda.

Surat orang-orang buangan itu diberitakan di koran-koran supaya yang membaca mengerti bagaimana keadaan di Digoel. Supaya mereka tidak mau bergerak. Kalau Anda baca novel-novel atau cerpen pada tahun 1930-an, banyak sekali cerita yang dikaitkan dengan Digoel. Misalnya cerita cinta, di mana lelakinya jatuh cinta kepada perempuan, tapi lelaki itu juga idealis dan dia mulai bergerak, lalu dibuang ke Digoel. Cerita seperti ini zaman itu sangat biasa.

Tentu di sini yang penting bukan saja Digoel. Digoel itu saya kira hanya salah satu cara yang efektif untuk menimbulkan ide atau asosiasi bahwa ikut pergerakan atau politik itu berbahaya. Tapi asosiasinya bukan saja antara pergerakan, komunisme, dan Digoel. Tapi juga umpamanya antara Moskow dengan Tan

Malaka atau Semaoen, dan lain-lain. Dan banyak *signpost* lain yang didirikan.

T: *Apa maksudnya signpost?*

J: Tanda untuk peringatan, seperti "dilarang masuk" atau "awas, anjing galak". Dalam masyarakat Amerika kalau kita berjalan-jalan, umpamanya di pegunungan, scring ketemu tanda *no trespassing*. Ada banyak *signpost* macam itu. Kita tahu kalau masuk kita bisa ditembak atau digigit anjing. Jadi kalau kita sudah masuk daerah *no trespassing*, kita sudah ambil risiko. Tanda peringatan atau *signpost* macam ini banyak didirikan dalam alam mentalnya orang-orang di Hindia Belanda pada akhir tahun 1920-an dan 1930-an.

Selain Digoel, ada umpamanya *signpost* yang namanya Tan Malaka. Anda jangan dekat-dekat dengan *signpost* ini. Kalau Anda sudah dekat dengan *signpost* ini dan lalu masuk ke dalam, itu berarti Anda ambil risiko. Dan risikonya tentu penjara dan Boven Digocl. Ini merupakan suatu strategi dari pemerintah Hindia Belanda. Dan saya kira ini cukup berhasil. Dengan memakai strategi ini jumlah orang yang dibunuh sangat sedikit. Karena pendidikannya berhasil maka orangnya tidak usah dibunuh.

T: *Apa alat yang dipakai untuk mengadakan pendidikan politik semacam ini? Dan bagaimana cara kerjanya?*

J: Alatnya polisi rahasia. Bayangkan saja kalau Anda mulai aktif di pergerakan zaman itu. Umpamanya PKI bawah tanah, PARI, PNI-Baru, atau PARTINDO, dan lain-lain. Barangkali Anda bisa aktif sebulan dua bulan, pergi ke kantor cabang PNI atau ketemu dengan pemimpin cabang PNI di warung. Nggak lama lagi Anda sudah didekati oleh orang PID. Anda sudah mulai mengerti bahwa Anda sedang diawasi. Saya kira begitulah mekanismenya.

T: *Apakah aktivis pergerakan waktu itu memahami cara atau mekanisme kontrol semacam ini?*

J: Saya kira mereka mengerti bahaya dan risikonya, dan tentu ada orang yang mengerti mekanismenya. Sjahrir mengerti

dan itu dia bilang dalam surat yang dia tulis dari Banda Neira. Menurut dia ada tiga pilar yang mendukung sistem penjajahan di Hindia Belanda. Pertama, polisi. Kedua, tentara. Dan ketiga adalah Digoel. Jadi tentu dia mengerti. Tapi kebanyakan orang saya kira nggak mengerti karena asosiasinya sangat natural.

*T: Apakah Soekarno mengerti?*

J: Saya kurang tahu. Pemerintah Hindia Belanda mengerti Soekarno dengan baik sejak tahun 1933, sesudah dia ditangkap lagi. Waktu dia dipenjara di Batavia, Dewan Hindia Belanda mengadakan sidang untuk membicarakan masalah pembuangan Soekarno. Kesimpulannya sangat sederhana. Mereka sepakat bahwa Soekarno orangnya begini: Apa pun yang dia bilang di penjara, sama sekali tidak bisa dipercaya. Begitu dia muncul di rapat besar, dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri karena dia mabok. Lalu dia akan mengungkapkan apa yang merupakan suara orang yang datang ke rapat, yaitu suara rakyat. Jadi apa pun yang dia katakan, apa pun yang dia janjikan, sama sekali tidak bisa dipercaya. Lebih baik buang saja ke tempat sepi di mana dia sama sekali tidak bisa mengadakan rapat karena tidak ada orang.

Ini saya kira politik pemerintah Hindia Belanda mengenai Soekarno. Dan tentu pemerintah lalu memakai Soekarno sebagai *signpost* yang baru. Untuk bilang pada orang banyak kalau kamu mengikuti Soekarno nanti kamu juga dibuang. Tapi Soekarno sendiri, sejauh saya baca otobiografinya, saya kira dia nggak mengerti dengan jelas mengenai mekanisme ini.

*T: Kalau Bung Hatta mengerti apa tidak?*

J: Saya kira Bung Hatta mengerti. Tapi yang paling mengerti adalah Sjahrir. Dan tentu saja Tan Malaka, Soebakat, Djamiludin Tamin, dan orang-orang PARI. Tapi mengerti itu satu hal, apakah bisa berbuat apa-apa itu hal lain lagi.

\*Wawancara berlangsung tanggal 20 Desember 1996.

# **SUMBER TULISAN**

---

---

## **Bagian Pertama: Dunia Hantu Digoel**

Tulisan ini diterjemahkan dari "The Phantom Word of Digoel". Naskah aslinya pernah dipublikasikan Jurnal SEAP INDONESIA, Cornell University, Edisi No. 61, April 1996, halaman 13-48.

## **Bagian Kedua: Tatanan Rezim Baru**

Tulisan ini diterjemahkan dari "A New Regime of Order". Naskah ini dikirim oleh penulisnya khusus untuk penerbitan buku ini.

## **Bagian Ketiga: Mengamankan Hantu Gerakan Bawali Tanah**

Tulisan ini diterjemahkan dari "Policing the Phantom Underground". Naskah aslinya pernah dipublikasikan Jurnal SEAP INDONESIA, Cornel University, No. 63 April 1997, halaman 1-46.

## **Epilog: Dialog Bersama Takashi Shiraishi**

Tulisan hasil wawancara ini diambil dari "Digul Takashi Shiraishi tentang Politik Kolonial Tahun 1920-an dan 1930-an" dalam *Mencari Demokrasi*, ISAI Jakarta; 1999, hlm. 159-188. Penyertaan dalam buku ini atas izin ISAI Jakarta.

# **INDEKS**

---

---

## **A**

Abdul Hamid Loebis 15  
Abdul Manap 124, 129,  
131, 132, 173  
agitasi 56, 74, 83, 103  
Agustus 12, 16, 61, 73,  
83, 115, 120, 122,  
135, 156, 157, 158,  
160  
Ahmad Soemadi 15  
AN 27  
Aliarcham 29, 35, 39, 40  
Ambo 7, 21, 22  
Amerika 35, 125  
Amir Hamzah 15, 16  
April 7, 10, 14, 16, 24,  
36, 47, 50, 58, 61,  
63, 122, 151  
ARD 46, 61, 62, 63, 64,  
70, 71, 76, 77, 79,  
81, 83, 85, 88, 90,  
91, 92  
Australia 2, 17, 18, 19, 34,  
40, 44, 47, 117, 118,  
165  
AVROS 127, 128

## **B**

Banda Neira 2, 15, 145  
Banjar 125, 154  
Banten 7, 25, 26, 47, 67,  
68, 98, 150  
Banyuwangi 110, 111, 121  
Batavia 17, 19, 45, 47, 49,  
51, 52, 56, 57, 60,  
61, 62, 64, 67, 68,  
69, 70, 71, 79, 82,  
83, 84, 90, 124  
Bawah Tanah 95  
Benih Merdeka 132  
Benih Timor 133  
Bermawi Latif 15  
Bintang Sumatera 133  
Blora 87, 120, 121  
Blumberger 14, 17, 42,  
117, 122  
BO 127, 129, 130, 131,  
132, 173  
Boven Digoel 1, 7, 10, 18,  
20, 26, 28, 33, 34,  
35, 36, 43, 164  
Buitenzorg 13, 30, 42, 53,  
57, 61, 69

Buruh 15, 97, 100, 101, 112, 113, 114, 117, 156, 172

## C

Central Raad Digoel 34  
 Cepu 120, 156, 157, 158  
 CID-SS 85, 149, 151, 161  
 Cina 10, 21, 27, 28, 42, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 73, 82, 84, 85, 88, 90, 104, 125, 126, 143, 147  
 Comintern 100, 101, 103, 104, 113, 124, 138, 140, 146, 147, 154, 171, 172  
 Comite Masigit 26, 27  
 congresgebouw 26  
 convict worker 7  
 CRD 34, 35, 36

## D

Darsono 2, 84  
 Dawud 15  
 de eigenwerkzoekenden 31  
 De Graeff 4, 5, 8, 13, 96, 98, 99, 113, 119, 124, 135, 140, 153, 158, 173  
 De Jonge 14, 73, 75  
 de naturalisten 32  
 De Nieuwe 10  
 de steuntrekkers 32  
 de werkwillinger 31  
 Deli 125, 126, 127, 133, 136, 137

Desember 6, 7, 11, 13, 34, 42, 43, 51, 61, 80, 81, 82, 83, 88, 96, 99, 100, 101, 102, 108, 111, 121, 123, 131, 133, 139, 140, 141, 152, 158, 162, 164, 165

Diktatorial 101

Dinas Keamanan Swasta 34  
 Djamaloedin 15, 35, 81, 146, 148, 149, 150, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 171  
 dokumen 64, 99, 138, 139, 153  
 DVP 127

## E

Editor 132, 133  
 ekonomi 105, 106, 122, 148, 152  
 ekstrem 78  
 Eropa 25, 28, 48, 57, 59, 63, 65, 67, 107, 125, 126, 127, 136, 137, 139, 160  
 Etnis 25

## G

geemploieerden 33  
 gereja 20, 22  
 gila 2, 32, 39, 44, 113, 168  
 Gubernur Jenderal 3, 4, 6, 8, 16, 24, 47, 48, 54, 57, 59, 61, 83, 92, 98, 134, 173, 178, 188

Gubernur jenderal 11, 60, 80, 98, 113, 119  
 gubernur jenderal 1, 6, 8, 13, 16, 42, 43, 47, 55, 56, 57, 59, 60, 76, 84, 88, 93, 95, 98, 99, 111, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 134, 136, 140, 145, 151, 152, 158, 171, 176, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 192, 198  
 Gudang Arang 35, 36

**H**

Haji 18, 26, 27, 58, 73, 89, 90  
 Haji Misbach 26  
 Hannah Arendt:s 1  
 Hatta 15, 28  
 Hillen 3, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 171  
 Hindia Belanda 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 28, 30, 37, 38, 40, 141, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 71, 92, 138  
 Hoodsparket 116, 118, 119, 121, 124, 125

**I**

Illyas Jacob 15  
 Imperialis 16, 122, 140, 172  
 Indonesia 2, 3, 5, 6, 10, 15, 18, 26, 29, 33,

34, 35, 36, 41, 46, 50, 70, 71, 76, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 161, 162, 163, 167, 172, 173, 174

Intelijen 46, 65, 83, 128  
 interni 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44

ISDV 38, 76

Isolasi 104

isomorfis 40, 41

Iwa 109, 111, 113, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 152, 153, 159, 165, 169, 172, 173

Iwa Koesoema Soemantri 15, 109, 111, 113, 123, 124, 129, 130, 131, 133, 135, 138, 140, 144, 145, 165, 191

**J**

- J.J. Schrieke 4, 9  
 J.M. Pluvier 2  
 Jahja Nasoetion 15  
 Jaksa 96, 97, 99, 111, 120, 121, 123, 124, 134, 140, 151, 152  
**Jaksa Agung** 48, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 85  
 Jalaloedin Thaib 15  
 Januari 7, 9, 10, 13, 14, 27, 29, 33, 35, 36, 51, 78, 80, 81, 82, 98, 153  
 Jawa 1, 2, 4, 16, 19, 23, 25, 29, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 67, 69, 70, 71, 73, 77, 80, 82, 88, 123  
 Jawa Barat 3, 4, 5, 22, 58, 69, 81, 95, 123  
 Jawa Tengah 1, 2, 58, 120, 154, 174  
 Jawa Timur 2, 58  
 jazz 29  
 Jerman 2, 42, 66  
 Juli 10, 19, 20, 33, 43, 58, 59, 61, 81, 82, 91  
 Juni 58, 78, 86, 100, 119, 130, 134, 146, 150, 163  
 Jurutulis 31

**K**

- Kamp 3, 13, 23, 26  
 Kanton 100, 101, 107, 113

- kantor pos 9, 20, 23, 151, 165  
 Kereta Api 97, 110, 156  
 Kolonial 47  
 Komunis 5, 26, 46, 70, 76, 77, 82, 85, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 113, 149  
 Konflik 25, 126  
 Konser 29  
 kooperasional 36, 41  
 Koperasi 34  
 kriminal 5, 6, 16, 22, 48, 64, 67, 82, 97, 122  
 Kudus 58, 120  
 KUTV 138

**L**

- L. Th. Becking 7  
 Lampung 25, 80  
 liberal 13, 47, 98, 135, 173  
 Lokal 58, 63, 79

**M**

- M. van Blankenstein 10  
 Madura 25, 49, 51, 52, 62, 67, 69, 121, 130  
 magis 97  
 Malang 52, 64, 67, 69, 70, 80, 110, 111, 121, 155, 157  
 malaria 1, 12, 18, 21, 29, 30, 31, 32  
 Maluku 6, 7, 11, 12, 13, 16, 33, 35, 36  
 Mappi-Papua 19  
 Maret 7, 9, 12, 36, 61, 76, 84, 88, 124, 130,

132, 133, 138, 145,  
148, 154, 155, 158,  
162, 166  
Marsoesi 111  
Matahari Indonesia 129,  
131, 133, 139  
Matu Mona 133  
melerikan diri 39, 127  
Minangkabau 22, 25, 125,  
127, 129, 149  
Moechtar Loetfi 15  
Moehidin Nasoetion 15  
Moesso 15, 20, 35, 139,  
143, 144, 145, 150,  
151, 153, 164  
Moskow 15, 16, 40, 77

**N**

Najoen 18, 38, 39  
Nazi 2, 42  
Nederlandsch-Indie 2, 3, 4,  
10, 95, 96, 97, 111,  
112, 117, 138  
non-kooperasjoni 15, 41  
November 99, 105, 114,  
120, 121, 124

**O**

Obor 148, 149, 163, 170  
onverzoenlijken 3, 10, 32,  
33, 36, 37, 38, 39,  
41, 42, 43, 172  
Opium 50, 130, 131  
Oranje Park 20  
otoriter 13

**P**

Pan Pacific 111, 172  
Papua 1, 17, 18, 19, 23,  
39, 43  
PARI 3, 15, 16, 85, 146,  
147, 163  
Partindo 15, 16, 162  
Pekalongan 69, 70, 80,  
120, 157  
Pematang Siantar 97, 128,  
133, 164, 165  
Pembuangan 109, 123  
Pemerintah 2, 7, 26, 27,  
54, 56, 59, 82, 93,  
96, 97, 130, 152,  
170, 172  
Pemogokan 58  
penal sanction 1  
Perkebunan 125, 127  
Penni 16  
Persatoean Indonesia 10, 18,  
26, 33, 34, 130  
Pewarta Deli 20, 129, 133  
PID 46, 57, 58, 59, 86,  
87, 92, 98, 110, 112,  
115, 116, 120, 127,  
128, 130, 131, 132,  
133, 134, 137, 139,  
140, 152, 160, 161,  
163, 173  
PKI 5, 6, 12, 14, 15, 16,  
20, 33, 34, 35, 36,  
37, 38, 40, 46, 67,  
70, 76, 77, 81, 85,  
89, 90, 91, 97, 98,  
100, 101, 102, 103,  
104, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112,  
116, 117, 119, 122,

123, 127, 128, 139,  
 146, 147, 149, 150,  
 154, 155, 157, 159,  
 161, 162, 164, 172  
**PMI** 130, 131  
**PNI** 16, 34, 84, 110, 113,  
 114, 115, 118, 119,  
 120, 123, 124, 128,  
 130, 131, 132, 135,  
 154, 167, 168, 169,  
 173  
**PNI-Baru** 15  
**Politik** 46, 60, 71, 72, 74,  
 85, 90, 97  
**Prambanan** 101, 102, 146  
**Propaganda** 101  
**Propagandis** 16, 128  
**PSII** 15, 16, 162  
**psikopat** 41

**R**

**R.C. Kwantes** 2, 4, 10, 58,  
 95, 111  
**R.M. Gondojoewono** 35  
**Raad van** 3, 138  
**religius** 91, 128  
**revolusi** 54, 55, 56, 57,  
 73, 74, 79, 80, 81,  
 86, 88, 95, 96, 98,  
 100, 101, 102, 103,  
 107, 108, 116, 128,  
 144, 147, 150, 152,  
 161, 171, 172, 173  
**revolutionis** 41  
**ROB** 26, 27  
**ROD** 36  
**Rudolf Mrazek** 18, 30  
**Rumah Sakit** 3, 25

**S**

**Sarekat Rakyat** 12, 97, 112  
**Schrieke** 75  
**Selat** 19, 83, 101  
**Semaoen** 2, 58, 76, 84, 123  
**Semarang** 17, 34, 47, 49,  
 51, 52, 57, 58, 60,  
 61, 62, 64, 67, 69,  
 70, 77, 79, 80  
**Senjata Indonesia** 119  
**September** 10, 13, 16, 60,  
 77, 81, 83, 86, 91,  
 110, 112, 124, 140,  
 141, 144, 149, 150,  
 151, 153, 154, 158,  
 162, 163  
**Serikat Buruh Merah** 101  
**Sidoarjo** 119  
**Singapura** 101, 103, 104,  
 139, 146, 148, 149,  
 150, 151, 154, 155,  
 157, 158, 161, 162,  
 164, 165, 166, 168  
**Sjahrir** 15, 18, 29, 33  
**SKBI** 15, 109, 110, 111,  
 112, 113, 114, 115,  
 116, 117, 118, 119,  
 120, 121, 122, 123,  
 133, 135, 137, 146,  
 152, 153, 154, 155,  
 156, 157, 158, 172  
**Soebakat** 3, 81, 153, 154,  
 164  
**Soekamo** 2, 91, 124, 162,  
 163  
**Soerantiko** 1  
**Solo** 16, 26, 29, 105, 106,  
 108, 120, 121, 158  
**Soviet** 82, 104, 139, 141

Sportvereeniging Digoel 29  
 Starkenborgh 16, 42, 43  
 Sumatra Barat 1  
 Sumatra Timur 125  
 Sunda 22, 25, 29, 72  
 Surabaya 20, 49, 51, 52,  
   56, 57, 60, 62, 64,  
   67, 69, 70, 79, 80,  
   97, 100, 101, 105,  
   109, 110, 111, 112,  
   113, 115, 116, 117,  
   118, 120, 121, 129,  
   137, 151, 154, 155,  
   157, 158  
 Surakarta 18, 52, 58, 60,  
   64, 67, 69, 70, 79,  
   80, 89, 101, 102,  
   105, 106, 120, 121,  
   122, 158

**T**

Tan Malaka 2, 6, 77, 81,  
   84, 85, 101, 104,  
   105, 106, 107, 108,  
   109, 125, 126, 146,  
   147, 148, 149, 150,  
   151, 152, 153, 154,  
   157, 159, 161, 162,  
   163, 166, 167, 169,  
   171, 172, 173, 174

Tan Tjo 21, 22, 27

Tanah Merah 9, 10, 11, 12,  
   17, 18, 19, 20, 23, 25,  
   28, 30, 31, 32, 35, 36,  
   37, 38, 40, 41

Tanah Tinggi 1, 3, 11, 12,  
   13, 14, 16, 17, 18,  
   25, 29, 32, 33, 36,

37, 38, 39, 40, 41,  
   43

tangsi 24

teroris 77, 101, 102, 107

Third International 5, 147,  
   172

Tideman 11, 12

Timur jauh 140

Tjipto Mangunkusumo 15, 18

tropis 10

**V**

van der Lely 6, 98, 99, 102,  
   103, 104, 105, 108,  
   109, 110, 112, 151,  
   152

Van der Plas 113, 123, 134

van der Plas 44, 113, 114,  
   115, 116, 118, 119,  
   135, 145, 173

Verheijen 2, 111, 114, 115,  
   116, 118, 120, 123,  
   134, 135, 136, 137,  
   138, 140, 145, 152,  
   153, 158

Volksraad 4, 9, 10, 72, 86

VSTP 38, 97, 112, 116,  
   117, 121, 156, 172

**W**

W.P. Hillen 3, 10

Wedana 61, 68, 120, 158,  
   159

Wilhelmina 25, 28

Winanta 29, 39

Worker 111

**Y**

Yogyakarta 52, 58, 60, 64,  
67, 69, 70, 77, 80,  
81, 100, 101, 102, 105,  
108, 119, 121

## **BIODATA PENULIS**

---

---

**Dr. Takashi Shiraishi**, adalah Profesor Sejarah di Universitas Kyoto Jepang. Ia termasuk salah seorang Indonesianis terkemuka, yang dibuktikan dengan karyanya yang cukup banyak tentang Indonesia, salah satunya yang monumental *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912–1926*. Di jurnal SEAP INDONESIA yang diterbitkan Cornell University, ia bersama Benedict Anderson dan James T. Siegel menjabat *Contributing Editor*. Hingga kini berbagai karyanya yang mengambil setting sejarah Indonesia tersebar di berbagai jurnal internasional.